



RPJMD KABUPATEN KONAWE

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2025-2029



BENDUNGAN AMERORO

#MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA
"MENUJU KONAWE BERSAHAJA"



H. YUSRAN AKBAR, ST
BUPATI KONAWE



H. SYAMSUL IBRAHIM, SE., M.SI
WAKIL BUPATI KONAWE





**BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 2. TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI KONAWE,

- Menimbang:**
- a. bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah proses sistematis untuk menentukan arah, tujuan, dan langkah strategis pembangunan di tingkat daerah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa untuk menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, kerangka pendanaan dan program Perangkat Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE

dan

BUPATI KONAWE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN
2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Kabupaten Konawe, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Konawe untuk periode 20 (dua puluh) tahun yakni, tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Konawe Tahun 2025-2045 dan memperhatikan rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Tenggara.
7. Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
9. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
10. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
11. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah.
12. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.

BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Program pembangunan daerah periode 2025-2029 dilaksanakan sesuai dengan RPJMD.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan renstra perangkat Daerah, rencana kerja pemerintah Daerah, rencana kerja perangkat Daerah, dan dokumen perencanaan daerah lainnya.
- (3) Rincian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 3

RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. bab I pendahuluan;
- b. bab II gambaran umum daerah;
- c. bab III visi, misi dan program prioritas pembangunan daerah;
- d. bab IV program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
- e. bab V penutup.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Bappeda.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pelaksanaan RPJMD dan rencana kerja perangkat daerah Perangkat Daerah.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Konawe Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2023 Nomor 611), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
pada tanggal **2 September 2025**



BUPATI KONAWE,

YUSRIAN AKBAR

Diundangkan di Unaaha
pada tanggal **2 September 2025**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE,

FERDINAND

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN ~~2025~~ NOMOR **277**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE PROVINSI
SULAWESI TENGGARA **2/44/2025**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 2. TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Perencanaan pembangunan nasional merupakan pemilihan alternatif-alternatif atas sumber daya yang tersedia dan bersifat terbatas. Perencanaan pembangunan dilakukan agar pembangunan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan yang wajib disusun baik mulai dari tingkat pusat maupun daerah dan terangkum dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Berakhirnya perodesasi dari Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Konawe tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 mendorong pelaksanaan penyusunan RPJMD periode Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah tahap pertama dari pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045. Penyusunan RPJMD periode Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai penjabaran atas arah dan tahapan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi, dan arah kebijakan yang terjabarkan dalam pembangunan 5 (lima) tahunan. Hal ini merupakan amanat yang tersiratkan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Konawe yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah (Bupati) yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah, serta keuangan daerah. RPJMD ditetapkan untuk masa 5 (lima) tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai dari Tahun 2025 hingga Tahun 2029. Pelaksanaan RPJMD menjadi tahapan awal dari RPJPD yang akan dijabarkan ke dalam berbagai periodisasi pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan.

RPJMD yang memuat visi, misi dan program Bupati untuk selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD tersebut merupakan rencana pembangunan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaannya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sehubungan dengan hal tersebut, RPJPD Kabupaten Konawe Tahun 2025-2045 menjadi sangat penting bagi pembangunan di Kabupaten Konawe. Oleh karena itu, Peraturan Daerah Kabupaten Konawe tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 perlu untuk ditetapkan

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN **2025 NOMOR 278**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya kegiatan Penyusunan RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah selesai disusun sesuai dengan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang menjadi penjabaran visi, misi, dan program kerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih. RPJMD ini berfungsi sebagai pedoman arah pembangunan daerah sekaligus menjadi instrumen utama dalam mengukur kinerja pemerintahan daerah selama lima tahun ke depan hingga tahun 2029. Untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD, pelaksanaannya melibatkan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe. Pelaksanaan pembangunan dilakukan secara kolaboratif dan sinergis dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kecamatan lainnya. Selain itu, RPJMD ini juga menekankan pentingnya partisipasi aktif dari masyarakat luas, termasuk peran dunia usaha, sebagai bagian integral dari pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dan terpadu ini diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Kabupaten Konawe, serta menjawab berbagai tantangan dan kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran dan akuntabel. RPJMD menjadi landasan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah selama lima tahun mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029 ini, kami ucapkan terima kasih.

DAFTAR ISI

	Hal
SAMPUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR GRAFIK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	5
1.3. Keterkaitan Antardokumen	8
1.4. Maksud dan Tujuan.....	14
1.5. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH	17
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah	17
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi	17
2.1.1.1 Aspek Geografi.....	17
1. Posisi dan Peran Strategis.....	17
2. Potensi Sumber daya alam.....	22
3. Daya Dukung dan Daya Tampung.....	39
4. Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan...	45
5. Kualitas Lingkungan Hidup.....	48
6. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim..	48
2.1.1.2 Aspek Demografi.....	50
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	55
2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi	55
2.1.2.2 Kesehatan Untuk Semua	74
2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas Yang Merata.....	81
2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang adaptif.....	85
2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju....	89
2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesejahteraan Gender, dan Masyarakat Inklusif.....	90
2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah	92
2.1.3.1 Daya Saing SDM.....	92
2.1.3.2 Iptek Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	93
2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru	97
2.1.3.4 Transformasi Digital	98
2.1.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	99

2.1.3.6 Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi.....	100
2.1.4. Aspek Pelayanan Umum	103
2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang berintegritas dan Adaptif	103
2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, Dan Demokrasi Substansial	105
2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	106
2.1.4.4 Kinerja Urusan Pemerintah Daerah	107
2.1.4.4.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar	107
2.1.4.4.2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar.....	127
2.1.4.4.3 Urusan Pilihan.....	160
2.1.4.4.4 Urusan Penunjang	167
2.1.5. Standar Pelayanan Minimal	178
2.1.6. Kerjasama Daerah	198
2.1.7. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	200
2.2. Gambaran Keuangan Daerah.....	216
2.2.1. Kinerja Keuangan Tahun 2020-2024.....	217
2.2.2. Neraca Daerah Tahun 2020-2024.....	220
2.2.2. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah	227
2.3. Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis Daerah.....	235
2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah.....	235
2.3.2. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan Penyelenggaraan Pemerintah.....	242
2.3.2. Isu Strategis Daerah	244

BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN

DAERAH	262
3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Daerah	262
3.1.1. Visi dan Misi.....	262
3.1.2. Tujuan dan Sasaran	268
3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	274
3.2.1. Tahapan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 ...	275
A. Arah Pengembangan Wilayah pada RPJPD Kab. Konawe Tahun 2025-2045	280
B. Arah Pengembangan Wilayah pada RPJMN Tahun 2025-2029	281
C. Arah Pengembangan Wilayah Sultra pada RPJMD Prov Sultra Tahun 2025-2029.....	287
D. Arah Pengembangan Wilayah pada RPJMD Kab. Konawe Tahun 2025-2029	288

3.2.2. Arah Kebijakan Daerah.....	307
3.2.3. Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	312
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	325
4.1. Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	325
4.2. Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah	341
4.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah.....	341
4.2.2. Indikator Kinerja Daerah (IKD)	342
BAB V PENUTUP	391
5.1. Kaedah Pelaksanaan.....	392
5.1.1. Konsistensi Perencanaan dan Penggaran.....	393
5.1.2. Keterhubungan RPJMD Kabupaten Konawe 2025-2029 Dengan Dokumen Perencanaan Pusat dan Provinsi...	395
5.2. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi	
5.2.1. Pengendalian Perencanaan	395
5.2.2. Pengendalian Pelaksanaan	395
5.3. Konsep Dan Strategi Pendanaan Dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Konawe.....	396
5.4. Kesimpulan	398

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 2. 1 Luas wilayah Daratan Kabupaten Konawe Menurut Wilayah Administrasi Kecamatan, Tahun 2024.....	20
Tabel 2. 2 Daya Dukung dan Daya Tampung Indikatif Status Air Kabupaten Konawe	39
Tabel 2. 3 Daya Dukung dan Daya Tampung Indikatif Status Pangan Kabupaten Konawe	44
Tabel 2. 4 Hasil Penilaian Indeks Kapasitas Daerah Prov Sultra	49
Tabel 2. 5 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2024.....	51
Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Konawe Tahun 2024	52
Tabel 2. 7 Presentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Konawe Tahun 2023	53
Tabel 2. 8 PDRB ADHB Lapangan Usaha Kabupaten Konawe Tahun 2020-2024 (Dalam Miliar Rupiah)	56
Tabel 2. 9 PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Konawe Tahun 2019-2024.....	57
Tabel 2. 10 Peranan PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut lapangan usaha Kab. Konawe Tahun 2020-2024.....	59
Tabel 2. 11 Indeks Kedalaman (P1) Dan Indeks Keperahan (P2) Kabupaten Konawae dan Kawasan Sekitarnya dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional	68
Tabel 2. 12 Perkembangan IPM Kabupaten Konawe Tahun 2020-2024.....	70
Tabel 2. 13 Angka Kesakitan Kabupaten Konawe Menurut Karakteristik, 2024.....	79
Tabel 2. 14 Kondisi Kesehatan Ibu dan Anak	79
Tabel 2. 15 Ringkasan Hasil Capaian Rapor Pendidikan Kabupaten Konawe, 2025.....	83
Tabel 2. 16 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran di Kabupaten Konawe	99
Tabel 2. 17 Angka Kriminalitas.....	102
Tabel 2. 18 Indikator Urusan Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif ..	104
Tabel 2. 19 Indikator Urusan Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Yang Tangguh, Dan Demokrasi Substansial.....	106
Tabel 2. 20 Perkembangan Capaian Indikator Bidang Pendidikan	108
Tabel 2. 21 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Bidang Kesehatan	110
Tabel 2. 22 Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten menurut Jenis Permukaan dan Kondisi Jalan, 2024.....	114
Tabel 2. 23 Status Jalan Kewenangan Kabupaten.....	115
Tabel 2. 24 Panjang Jalan Menurut Kewenangan, 2024.....	116
Tabel 2. 25 Daftar Jembatan Kab. Konawe berdasarkan Tipe Jembatan.....	117
Tabel 2. 26 Kondisi D.I Kewenangan Kabupaten, 2024	117
Tabel 2. 27 Sistem Penyediaan air Minum (SPAM).....	119
Tabel 2. 28 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	120
Tabel 2. 29 Kondisi Perumahan dan Kawasan Permukiman	123
Tabel 2. 30 Daftar Kawasan Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Konawe, Berdasarkan SK Bupati Konawe Tentang Penetapan Perumahan Kumuh Dan Pemukiman Kumu	124
Tabel 2. 31 Capaian Kinerja Bidang Trantibumlinmas	124
Tabel 2. 32 Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Sosial	126
Tabel 2. 33 Indikator Urusan Tenaga Kerja	128
Tabel 2. 34 Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak.....	129
Tabel 2. 35 Capaian Skor PPH Kabupaten Konawe.....	132
Tabel 2. 36 Konsumsi Energi Perhari dan Protein Per hari	132
Tabel 2. 37 Gambaran Urusan Pertanahan di Kabupaten Konawe.....	133
Tabel 2. 38 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup	134
Tabel 2. 39 Kondisi Persampahan Kota Unaaha	135
Tabel 2. 40 Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Tahun 2020-2024	138
Tabel 2. 41 Perkembangan Capaian Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa	140
Tabel 2. 42 Indikator Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana	142

Tabel 2. 43 Urusan Perhubungan.....	144
Tabel 2. 44 Perkembangan Capaian Urusan Statistik.....	145
Tabel 2. 45 Perkembangan Capaian Urusan Komunikasi dan Infomasi.....	146
Tabel 2. 46 Indikator Urusan Koperasi.....	148
Tabel 2. 47 Capaian Indikator Urusan Penanaman Modal Kabupaten Konawe.....	151
Tabel 2. 48 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Urusan Pelayanan Perizinan, Triwulan II 2025.....	152
Tabel 2. 49 Target dan Realisasi Investasi PMDN/PMA, Tahun 2020-2024.....	152
Tabel 2. 50 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga.....	154
Tabel 2. 51 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan.....	155
Tabel 2. 52 Indikator Capaian Kinerja Perpustakaan Kabupaten Konawe.....	157
Tabel 2. 53 Indikator Capaian Kearsipan Kabupaten Konawe.....	159
Tabel 2. 54 Gambaran Urusan Perikanan di Kabupaten Konawe Tahun 2020-2024.....	160
Tabel 2. 55 Perkembangan Capaian Urusan Pariwisata.....	162
Tabel 2. 56 Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pertanian.....	163
Tabel 2. 57 Indikator Urusan Pedagangan.....	165
Tabel 2. 58 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian.....	166
Tabel 2. 59 Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi.....	167
Tabel 2. 60 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan.....	168
Tabel 2. 61 Capaian Kinerja Urusan Keuangan.....	169
Tabel 2. 62 Capaian Kinerja Urusan Pengawasan.....	170
Tabel 2. 63 Gambaran Urusan pengadaan di Kabupaten Konawe.....	172
Tabel 2. 64 Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian.....	173
Tabel 2. 65 Capaian Kinerja Urusan Transparansi dan Partisipasi Publik.....	175
Tabel 2. 66 Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan.....	176
Tabel 2. 67 Dukungan Personil yang Mendukung Pencapaian SPM Urusan Perumahan Kabupaten Konawe Tahun 2024.....	189
Tabel 2. 68 Alokasi Anggaran yang Mendukung Pencapaian SPM Dinas Sosial Kabupaten Konawe Tahun 2024.....	195
Tabel 2. 69 Dukungan Personil yang Mendukung Pencapaian SPM Dinas Sosial Kabupaten Konawe Tahun 2024.....	196
Tabel 2. 70 Roadmap Reformasi BUMD Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029.....	213
Tabel 2. 71 Realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Konawe Tahun 2020-2024.....	219
Tabel 2. 72 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah).....	222
Tabel 2. 73 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2025-2030	228
Tabel 2. 74 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2025-2030.....	229
Tabel 2. 75 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2025-2030.....	231
Tabel 2. 76 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2025-2030.....	233
Tabel 2. 77 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe.....	236
Tabel 2. 78 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan Penyelenggaraan Pemerintah.....	242
Tabel 2. 79 Penentuan Isu Strategis Daerah Kab. Konawe Tahun 2025-2029.....	250
Tabel 3. 1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029.....	278
Tabel 3. 2 Tujuan, Sasaran dan Strategis Daerah.....	284
Tabel 3. 3 Arah Pembangunan Kewilayahan berdasarkan RPJMN 2025-2029 di Kabupaten Konawe.....	291
Tabel 3. 4 Pengembangan Berbasis Klaster.....	301
Tabel 3. 5 Matriks Arah Pengembangan Wilayah Konawe.....	307
Tabel 3. 6 Arah Kebijakan Daerah.....	314
Tabel 3. 7 Arah Kebijakan Daerah terhadap Program Nasional dalam RPJMN Tahun 2025- 2029.....	317
Tabel 3. 8 Program Prioritas Daerah RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029.....	321
Tabel 3. 9 Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Wilayah Sulawesi Tenggara Pda RPJMN Tahun 2025-2029.....	330

Tabel 4. 1 Matriks Program Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029	334
Tabel 4. 2 IKU Kab Konawe Tahun 2025-2029	352
Tabel 4. 3 IKD Kab Konawe Tahun 2025-2029	354

DAFTAR GAMBAR

Hal

Gambar 1. 1 Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Konawe 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya	9
Gambar 2. 1 Jalur Ekonomi Sulawesi	18
Gambar 2. 2 Peta Administrasi Kecamatan Di Kabupaten Konawe, Tahun 2023	22
Gambar 2. 3 Potensi Mineral Indonesia	29
Gambar 2. 4 Peta Jaringan Sungai dan Ekosistem Rawa	32
Gambar 2. 5 Bendungan Wawotobi	33
Gambar 2. 6 Bendungan Ameroro	34
Gambar 2. 7 Rencana Bendungan Pelosika	34
Gambar 2. 8 Peta Status Pangan.....	41
Gambar 2. 9 Peta Status Air Kab. Konawe	42
Gambar 2. 10 Analisis Emisi Karbon.....	50
Gambar 2. 11 Prevalensi Stunting Kab. konawe Tahun 2024.....	74
Gambar 2. 12 Kondisi Stunting Kab. Konawe Berdasarkan e-PPGBM	75
Gambar 2. 13 Pembangunan Rumah Sakit dan Puskesmas Kab. Konawe	78
Gambar 2. 14 Kondisi Indeks Literasi Digital Kabupaten Konawe.....	84
Gambar 2. 15 Angka Literasi dan Numerasi di Kab. Konawe.....	84
Gambar 2. 16 Rasio PDRB Industri Pengolahan Konawe	95
Gambar 3. 1 Penahapan Pembangunan Kabupaten Konawe	282
Gambar 3. 2 Rencana Pengembangan Kawasan Kab. Konawe	287
Gambar 3. 3 Arah Pembangunan Kewilayahan di Provinsi Sulawesi Tenggara Berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029	289
Gambar 3. 4 Arah Kebijakan Kewilayahan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029	295
Gambar 3. 5 Analisis Makro Kebijakan Nasional Sektor Industri.....	298
Gambar 3. 6 Analisis Makro Sektor Transportasi.....	298
Gambar 3. 7 Penahapan Pembangunan Kabupaten Konawe	299
Gambar 3. 8 Peta Penetapan Kawasan Strategis Kab. Konawe	300
Gambar 3. 9 Klaster Satu.....	302
Gambar 3. 10 Konsep Pengembangan Makro.....	302
Gambar 3. 11 Konsep Pengembangan Makro dan Meso.....	303
Gambar 3. 12 Konsep Pengembangan Mikro	304
Gambar 3. 13 Klaster Dua	305
Gambar 3. 14 Klaster Tiga.....	306
Gambar 3. 15 Air Baku Kabupaten Konawe	310
Gambar 3. 16 Air Baku Bendung Ameroro.....	311
Gambar 3. 17 Jaringan Irigasi D.I Wawotobi, D.I Ameroro, D.I Walay	312
Gambar 3. 18 Jaringan Irigasi D.I Wawotobi, D.I Ameroro, D.I Walay.....	313

DAFTAR GRAFIK

	Hal
Grafik 2. 1 Produksi Padi di Sultra.....	24
Grafik 2. 2 Produksi Padi di Konawe.....	24
Grafik 2. 3 Produktivitas Jagung.....	26
Grafik 2. 4 Populasi Unggas Kab. Konawe.....	28
Grafik 2. 5 Produksi Perikanan Kabupaten Konawe.....	28
Grafik 2. 6 Persentase Rumah tangga dengan Akses air minum.....	46
Grafik 2. 7 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan.....	46
Grafik 2. 8 Indeks Ketahanan Pangan Kab. Konawe.....	47
Grafik 2. 9 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.....	48
Grafik 2. 10 Proyeksi Penduduk Kabupaten Konawe.....	55
Grafik 2. 11 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Konawe.....	58
Grafik 2. 12 Perkembangan PDRB Per Kapita (dalam juta rupiah).....	62
Grafik 2. 13 Perkembangan Inflasi y-o-y.....	63
Grafik 2. 14 Perkembangan Inflasi m-o-m.....	64
Grafik 2. 15 Perbandingan Kondisi Gini Rasio.....	65
Grafik 2. 16 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Konawe Tahun 2020-2024.....	67
Grafik 2. 17 Perkembangan TPT Kab. Konawe.....	71
Grafik 2. 18 Angkatan Kerja Kab. Konawe.....	73
Grafik 2. 19 Perkembangan TPAK Konawe Tahun 2020-2024.....	74
Grafik 2. 20 Usia Harapan Hidup Kab. Konawe.....	76
Grafik 2. 21 Cakupan Kepesertaan BPJS Ketenaga kerjaan.....	86
Grafik 2. 22 Cakupan Kepesertaan BPJS Kesehatan.....	88
Grafik 2. 23 Cakupan Bantuan Sosial.....	89
Grafik 2. 24 Indeks Pembangunan Gender Konawe.....	92
Grafik 2. 25 Komposisi Penduduk Kabupaten Konawe.....	93
Grafik 2. 26 Angkatan Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin.....	94
Grafik 2. 27 Kondisi Emisi Karbon Kabupaten Konawe.....	98
Grafik 2. 28 Perkembangan Inflasi bulan-bulan Konawe.....	101
Grafik 2. 29 Perkembangan inflasi tahun-tahun.....	101
Grafik 2. 30 Indeks Inovasi Daerah Prov Sultra Tahun 2024.....	107

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah bukan semata-mata proses teknokratis dalam menyusun target dan indikator, melainkan merupakan perwujudan dari nilai-nilai filosofis yang mencerminkan jati diri, aspirasi, dan cita-cita masyarakat. Di Kabupaten Konawe, pembangunan dipahami sebagai proses yang holistik, berakar pada potensi lokal, kearifan budaya, dan kebutuhan riil masyarakat, serta berorientasi pada keberlanjutan dan keadilan antar generasi.

Pembangunan nasional Indonesia sejak awal kemerdekaan telah berpijak pada nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan semangat kedaulatan rakyat. Dalam konteks filosofis, pembangunan nasional tidak hanya dimaknai sebagai proses ekonomi semata, tetapi merupakan jalan menuju cita-cita bangsa: mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, berkeadaban, serta setara di seluruh wilayah nusantara.

Filosofi pembangunan daerah Kabupaten Konawe didasarkan pada prinsip **“Membangun Desa, Menata Kota”**. Prinsip ini mencerminkan komitmen untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, dimulai dari penguatan struktur sosial dan ekonomi di pedesaan sebagai basis kehidupan masyarakat Konawe, tanpa mengabaikan penataan kawasan perkotaan sebagai pusat pelayanan dan pertumbuhan ekonomi. Semangat “Membangun Desa, Menata Kota” ini selaras dengan visi pembangunan jangka panjang dalam RPJPD Kabupaten Konawe Tahun 2025–2045, yang menekankan pada pemerataan pembangunan antarwilayah, penguatan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan manusia sebagai modal utama pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, pembangunan tidak dipahami semata sebagai upaya peningkatan angka-angka makro, tetapi lebih dalam lagi sebagai ikhtiar kolektif untuk memperbaiki kualitas hidup manusia Konawe secara menyeluruh—baik di desa maupun di kota. Desa dilihat sebagai pilar utama

ketahanan pangan, budaya, dan sosial, sedangkan kota diarahkan untuk menjadi simpul modernisasi, pelayanan publik, dan inovasi. Dengan filosofi “Membangun Desa, Menata Kota,” RPJMD Konawe 2025–2029 menjadi cerminan dari semangat gotong royong, keberpihakan pada masyarakat akar rumput, serta perencanaan strategis yang mengedepankan keadilan spasial, sosial, dan ekologis demi tercapainya visi daerah: **Konawe yang Berdaya Saing, Sejahtera, Adil dan Berkelanjutan.**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RTRW, RPJPD, RPJMD Provinsi dan RPJMN

Sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka Kepala Daerah terpilih berkewajiban merumuskan langkah-langkah strategis untuk menjamin keberlanjutan dan percepatan pembangunan daerah yang telah dicapai sebelumnya. Langkah-langkah ini dijabarkan ke dalam sebuah visi, misi melalui arahan kebijakan, dan rencana strategis serta program-program pembangunan daerah yang dituangkan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode tahun 2025-2029.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan, yang dalam penyusunannya mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi dan RTRW Kabupaten serta RPJPD Kabupaten, selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan sebagai acuan bagi seluruh stakeholder di Kabupaten dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahunan yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih.

Dokumen RPJMD Kabupaten Konawe disusun untuk menjabarkan visi dan misi serta program Bupati dan Wakil Bupati Konawe dalam rangka tetap menjaga sinkronisasi Perencanaan antar level pemerintahan dalam jangka menengah baik dalam hal program pembangunan di daerah, provinsi, maupun pusat, maka RPJMD Kabupaten Konawe disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Konawe Tahun 2025-2045 dan memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2025-2029 yang telah ditetapkan lebih dahulu. Selanjutnya untuk digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Konawe dan sebagai acuan bagi seluruh stakeholder di Kabupaten Konawe dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2025-2029 yang disusun berdasarkan Visi dan Misi Bupati Konawe. Dengan demikian RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029 diharapkan dapat menjawab dan mewujudkan empat pertanyaan dasar yaitu : (1) Arah pembangunan Kabupaten Konawe dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; (2) bagaimana cara mencapainya dan (3) strategi apa yang perlu dilakukan (4) bagaimana mengendalikan dan mengevaluasi RPJMD.

Perencanaan pembangunan di tingkat daerah merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan sistem perencanaan pembangunan di tingkat nasional maupun provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan yang dirancang dan diimplementasikan di daerah harus senantiasa diselaraskan serta mengacu pada arah dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan nasional dan provinsi, baik dalam jangka panjang maupun jangka menengah. Dengan demikian, proses penyusunan rencana pembangunan daerah tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus mengintegrasikan visi, misi, serta prioritas pembangunan yang ditetapkan secara nasional dan provinsi agar tercipta keselarasan dan sinergi dalam pelaksanaannya. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa dalam penyusunan rencana pembangunan daerah tersebut juga tercantum skenario pembangunan yang menjunjung tinggi prinsip keberlanjutan, yang

disusun berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), sebagai instrumen penting untuk menjamin bahwa pembangunan yang direncanakan tidak hanya memenuhi kebutuhan masa kini, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya bagi generasi yang akan datang.

Pemerintah Kabupaten Konawe menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode Tahun 2025-2029 dengan 4 (empat) pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan teknokratis yang menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
2. Pendekatan partisipatif yang dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
3. Pendekatan politis yang dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD; dan
4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas yang dilaksanakan dengan memaduserasikan antara kebijakan dari tingkat atas dengan aspirasi masyarakat.

Perumusan RPJMD Kabupaten Konawe juga memperhatikan pemenuhan pendekatan substansi penyusunan dokumen rencana, yaitu:

1. Pendekatan perencanaan Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial;
 - a. Pendekatan Holistik-Tematik;

Pendekatan Holistik-Tematik mempertimbangkan keseluruhan dilaksanakan dengan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
 - b. Pendekatan Integratif; yang dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
 - c. Pendekatan Spasial. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

2. Kebijakan anggaran belanja yang pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (*Money Follow Programme*).

Pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Konawe yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 telah menetapkan Bupati dan wakil Bupati Periode 2025-2029, yaitu pasangan **H. Yusran Akbar, S.T dan H. Syamsul Ibrahim, S.E., M.Si.** dan dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia, Letjend TNI (Purn) Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta

Dalam pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa RPJMD merupakan dokumen penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan indikasi kerangka pendanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. Selain itu, Pasal 264 menyebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Perda dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe tahun 2025-2029 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran

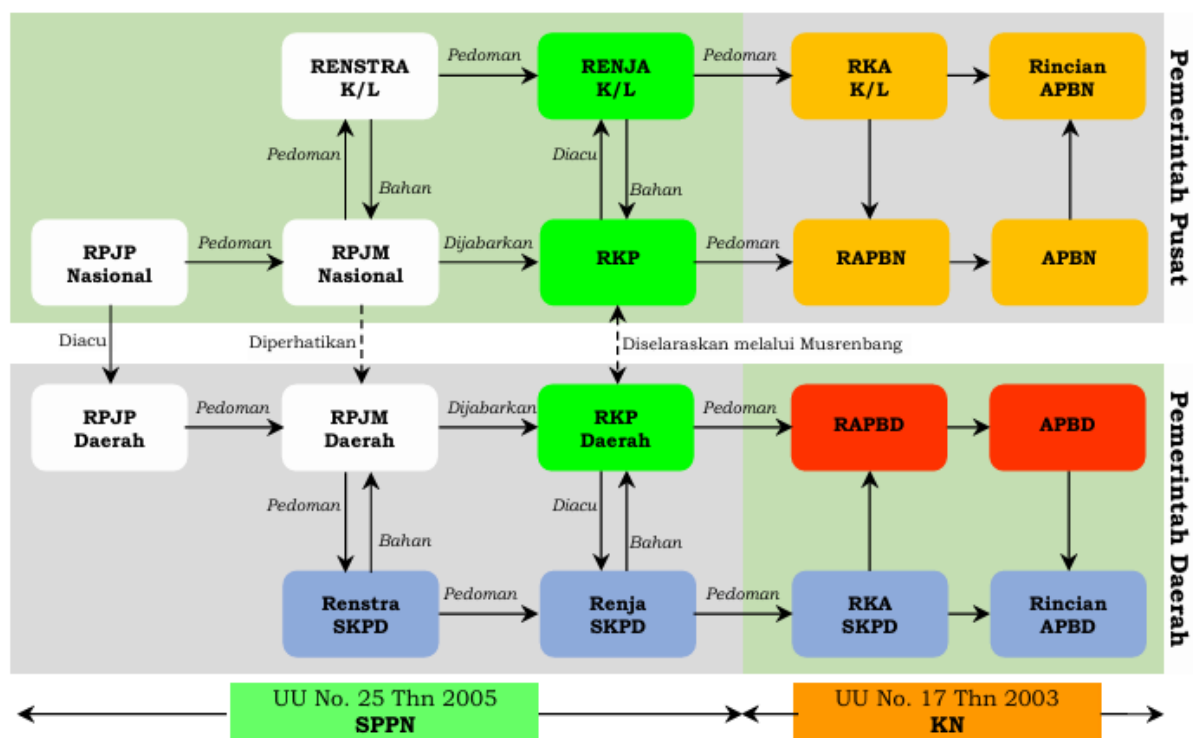
- Negara Republik Indonesia Nomor 228 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 14. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 269) ;
 15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 19);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1253)

19. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Tahun 2014-2034;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupsten konawe Tahun 2025-2045

1.3. Keterkaitan Antardokumen

Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Konawe 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam hubungannya dengan sistem perencanaan pembangunan nasional maupun dengan sistem keuangan pada gambar 1.1 berikut



Gambar 1. 1 Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Konawe 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya

a. RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029

RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang menjadi arah pembangunan daerah selama masa jabatan kepala daerah terpilih. Dalam penyusunannya, RPJMD ini dirancang untuk selaras dan bersinergi secara vertikal dengan dokumen perencanaan nasional, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

RPJMN Tahun 2025–2029 merupakan periode awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045, dengan visi besar “Indonesia Emas 2045” yang menargetkan Indonesia sebagai negara maju yang berdaulat, adil, dan makmur. Dalam rangka mendukung visi tersebut, RPJMN 2025–2029 menetapkan arah

pembangunan yang mencakup penguatan pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, serta penguatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.

Sejalan dengan itu, RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2025–2029 mengambil peran penting dalam mengartikulasikan arah kebijakan nasional tersebut ke dalam konteks lokal melalui visi daerah: ***“Konawe yang Berdaya Saing, Sejahtera, Adil dan Berkelanjutan.”***

Melalui visi ini, Kabupaten Konawe menegaskan komitmen untuk mendukung prioritas nasional, khususnya dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan pendidikan dan kesehatan, transformasi ekonomi berbasis potensi lokal, pembangunan infrastruktur pedesaan dan perkotaan, serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan inklusif.

Selain itu, berbagai misi daerah dalam RPJMD Kabupaten Konawe seperti pengembangan ekonomi lokal berbasis pertanian dan agrowisata, pelestarian lingkungan hidup, serta pelibatan masyarakat dalam pembangunan juga dirancang untuk mendukung agenda transformasi ekonomi hijau dan inklusif sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN.

Dengan demikian, RPJMD Konawe tidak hanya berfungsi sebagai pedoman pembangunan daerah, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menjamin keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan nasional hingga ke tingkat lokal.

b. RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Konawe Tahun 2025-2045

RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2025–2029 merupakan tahapan awal dari pelaksanaan **RPJPD Kabupaten Konawe Tahun 2025–2045** yang mengusung visi jangka panjang : ***“Mewujudkan Konawe sebagai Kawasan Pariwisata, Agribisnis, dan Industri yang Berbudaya, Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan”***.

Sebagai periode transisi awal dalam dua dekade perencanaan jangka panjang, RPJMD ini berperan strategis dalam membangun fondasi utama bagi transformasi wilayah, terutama melalui peningkatan kualitas sumber

daya manusia, penguatan ekonomi lokal berbasis sektor unggulan, serta pembangunan infrastruktur dasar yang merata.

RPJMD ini juga menempatkan prinsip “membangun desa, menata kota” sebagai filosofi dasar dalam menjembatani capaian awal RPJPD, memastikan konektivitas pembangunan antarwilayah, dan memperkuat peran Konawe sebagai pusat pertumbuhan strategis di Sulawesi Tenggara.

c. RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Prov Sultra Tahun 2025-2029

RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2025–2029 disusun secara sinergis dan berkesinambungan dengan **RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025–2029** yang mengusung visi: ***“Terwujudnya Sulawesi Tenggara Maju yang Aman, Sejahtera dan Religius”*** Dalam kerangka tersebut, Kabupaten Konawe diarahkan menjadi salah satu lokomotif pertumbuhan kawasan daratan Sulawesi Tenggara, terutama di bidang agribisnis, industri pengolahan, dan ketahanan pangan, yang secara langsung menopang dimensi kemajuan dan kesejahteraan daerah.

RPJMD Konawe juga mendukung pencapaian Provinsi dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera secara ekonomi, aman dalam kehidupan sosial, dan religius dalam kehidupan bermasyarakat, melalui program-program strategis yang meningkatkan kualitas SDM, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta menjaga harmoni sosial dan kearifan lokal. Sinergi antardokumen ini memastikan bahwa arah pembangunan Kabupaten Konawe tidak berjalan sendiri, melainkan terintegrasi dalam pencapaian target makro Provinsi, sehingga kontribusi Konawe terhadap kemajuan Sulawesi Tenggara semakin nyata, terukur, dan berkelanjutan.

d. RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029 dengan RKPD Konawe

RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang menjadi landasan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan selama lima tahun masa periode kepala daerah. RPJMD menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, dan

kerangka pendanaan yang kemudian dijabarkan secara operasional ke dalam RKPD setiap tahun.

RKPD disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan yang menjadi jembatan antara perencanaan jangka menengah dengan penganggaran tahunan daerah. Dengan demikian, konsistensi antara RPJMD dan RKPD menjadi kunci agar pelaksanaan pembangunan tahunan tetap berada dalam koridor strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Seluruh program prioritas dan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Konawe selama periode 2025–2029 disusun mengacu pada RPJMD, agar tercapai kesinambungan pembangunan dan pencapaian target-target pembangunan daerah secara bertahap dan terukur, mulai dari peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi lokal, tata kelola pemerintahan yang efektif, hingga pembangunan infrastruktur dan kelestarian lingkungan.

e. RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029 dengan Renstra PD Kabupaten Konawe

RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2025–2029 menjadi dokumen induk perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang wajib dijabarkan secara teknis dan operasional oleh seluruh Perangkat Daerah melalui penyusunan **Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah**.

Renstra OPD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah selama lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian sasaran RPJMD. Keterkaitan dan konsistensi antara RPJMD dan Renstra OPD merupakan prinsip penting dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Setiap sasaran dan program prioritas dalam RPJMD akan menjadi acuan langsung dalam perumusan tugas dan fungsi OPD, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sinergis, terukur, dan sesuai dengan kewenangan serta sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing perangkat daerah.

Dengan demikian, dokumen Renstra OPD berfungsi sebagai **turunan** teknokratis **dari RPJMD**, sekaligus sebagai alat kendali dan evaluasi kinerja OPD dalam mendukung keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Kabupaten Konawe selama periode 2025–2029.

f. RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029 dengan RTRW Kabupaten Konawe

RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2025–2029 disusun selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe, sebagai rujukan utama dalam pengaturan pemanfaatan ruang wilayah dan arah pengembangan kawasan. Keterpaduan antara dokumen perencanaan pembangunan dan tata ruang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta peraturan perencanaan nasional.

RPJMD sebagai dokumen pembangunan menjabarkan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah, sementara RTRW menetapkan struktur ruang, pola ruang, serta kawasan strategis yang menjadi acuan spasial dalam pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, integrasi antara keduanya menjadi dasar dalam menentukan lokasi program pembangunan, penyusunan infrastruktur wilayah, pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi, kawasan strategis, serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Melalui sinergi antara RPJMD dan RTRW, pembangunan Kabupaten Konawe dapat diarahkan secara lebih terencana, tepat lokasi, berwawasan lingkungan, dan mendorong pertumbuhan wilayah secara seimbang antara desa dan kota, dengan tetap menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta ketahanan bencana.

g. RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029 dengan KLHS RPJMD Kabupaten Konawe

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Tahun 2025–2029 tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD sebagai instrumen penting dalam menjamin bahwa prinsip-prinsip masyarakat berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi secara menyeluruh dalam setiap kebijakan, rencana, dan program pemerintah daerah.

KLHS RPJMD Kabupaten Konawe disusun sebagai bagian tidak terpisahkan dari proses penyusunan RPJMD, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD. Dalam konteks ini, KLHS menjadi alat analisis strategis yang memastikan bahwa seluruh tahapan perencanaan pemerintah daerah telah mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, risiko perubahan iklim, serta potensi dampak lingkungan, ekonomi, dan ekologi.

Keterkaitan antara KLHS dan dokumen RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2025–2029 tercermin dari Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), Identifikasi Isu Strategis Berbasis Lingkungan dan Sosial, Penguatan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dalam Arah Pembangunan Daerah, Sinkronisasi Indikator Kinerja Lingkungan dan Sosial.

Dengan demikian, dokumen KLHS tidak hanya berfungsi sebagai dokumen pelengkap, tetapi menjadi syarat utama dalam memastikan bahwa seluruh kebijakan, program, dan kegiatan dalam RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2025–2029 telah dirancang secara inklusif dan berkelanjutan terhadap perubahan lingkungan serta kebutuhan daerah saat ini dan masa mendatang.

1.4. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Kabupaten Konawe, dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Pedoman bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah;
2. Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih
3. Instrumen evaluasi kinerja dan pengendalian pembangunan daerah pemerintah Kabupaten Konawe
4. Pedoman penyusunan Renstra OPD dan penyusunan program dalam RKPD setiap tahunnya;
5. Menjadi pedoman DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran

program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD;

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Keterkaitan Antardokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

- 2.1. Gambaran Umum Kondisi Wilayah
 - 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
 - 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
 - 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
 - 2.1.5. Standar Pelayanan Minimal
 - 2.1.6. Kerjasama Daerah
 - 2.1.7. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- 2.2. Gambaran Keuangan Daerah
 - 2.2.1. Kinerja Keuangan Tahun 2020-2024
 - 2.2.2. Neraca Daerah Tahun 2020-2024
 - 2.2.2. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah
- 2.3. Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis Daerah
 - 2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah
 - 2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah berdasarkan Urusan
 - 2.3.2. Isu Strategis Daerah

BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- 3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Daerah
 - 3.1.1. Visi dan Misi
 - 3.1.2. Tujuan dan Sasaran
- 3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas

Pembangunan Daerah

3.2.1. Tahapan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

3.2.2. Arah Kebijakan Daerah

3.2.3. Program Prioritas Pembangunan Daerah

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

4.2. Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah

4.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah

4.2.2. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

BAB V PENUTUP

5.1. Kaedah Pelaksanaan

5.1.1. Konsistensi Perencanaan dan Penggaran

5.1.2. Keterhubungan RPJMD Kabupaten Konawe 2025-2029

Dengan Dokumen Perencanaan Pusat dan Provinsi

5.2. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

5.2.1. Pengendalian Perencanaan

5.2.2. Pengendalian Pelaksanaan

5.3. Sistem Pendanaan

5.4. Kesimpulan

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah merupakan deskripsi menyeluruh mengenai situasi geografis dan demografis serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Konawe. Indikator capaian kinerja yang dianalisis mencakup tiga aspek utama, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Analisis ini bertujuan untuk menilai sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang telah dicapai, serta mengidentifikasi faktor-faktor dan aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan guna mengoptimalkan pencapaian keberhasilan pembangunan di masa mendatang. Kondisi daerah ini menjadi dasar penting dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah, yang mencakup aspek geografi, demografi, ekonomi, sosial, serta kinerja pemerintahan, lengkap dengan interpretasinya.

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Aspek Geografi

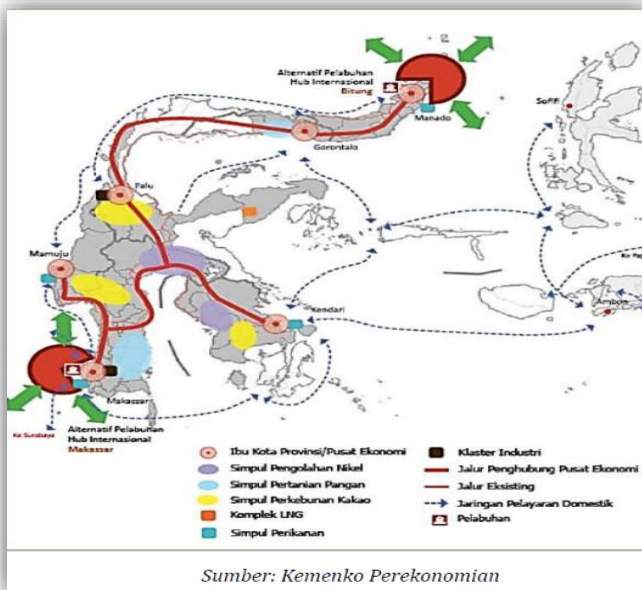
1. Posisi dan Peran Strategis

Kabupaten Konawe terletak di jantung daratan Provinsi Sulawesi Tenggara, pada koordinat 2°45'–4°15' Lintang Selatan dan 121°15'–123°30' Bujur Timur. Dengan luas wilayah daratan 6.087,83 km² atau sekitar 42,43% dari total luas daratan provinsi, serta wilayah perairan ±1.960 km² dengan garis pantai sepanjang ±295 km, Konawe merupakan salah satu wilayah administratif terbesar di Sulawesi Tenggara.

Secara administratif, Kabupaten Konawe berbatasan dengan Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, dan sebagian Provinsi Sulawesi Selatan di utara; Laut Banda, Laut Maluku, dan Kota Kendari di timur; Kabupaten Konawe Selatan di selatan; dan Kabupaten Kolaka Timur di barat. Letaknya yang strategis menjadikan Konawe sebagai titik simpul konektivitas wilayah daratan Sulawesi Tenggara.

Pusat Konektivitas Regional dan Nasional

Konawe memainkan peran penting sebagai pusat konektivitas regional. Jalur Trans Sulawesi yang melintasi wilayah ini menghubungkan berbagai koridor ekonomi di Sulawesi Selatan, Tengah, dan Tenggara. Sebagai wilayah transit utama barang, jasa, dan manusia, Konawe memperkuat integrasi ekonomi antarwilayah dan berfungsi sebagai simpul logistik strategis di Kawasan Timur Indonesia.



Kedekatannya dengan Kota Kendari sebagai ibu kota provinsi menjadikan Konawe sebagai wilayah penyangga dan pendukung utama kebutuhan logistik, pangan, dan bahan baku industri. Hal ini menciptakan efek pengganda ekonomi bagi Konawe dan wilayah sekitarnya.

Gambar 2. 1 Jalur Ekonomi Sulawesi

Peran Strategis dalam Konteks Internasional

Konawe memegang peran sentral dalam rantai nilai global melalui industri nikel. Sebagai bagian dari 97,4 miliar ton cadangan nikel nasional dan penghasil utama bahan baku baterai kendaraan listrik, Konawe menjadi bagian penting dari transisi global menuju ekonomi rendah karbon. Kawasan industri Morosi-Bondoala-Kapoiala menjadi pusat hilirisasi nikel berteknologi tinggi yang mengeksport feronikel dan nickel matte ke pasar China, Korea Selatan, dan Jepang. Selain pertambangan, Konawe juga menembus pasar global melalui ekspor kakao, kopi spesialti, jambu mete, dan rempah-rempah, khususnya ke Asia dan Eropa. Diversifikasi ekspor ini memperkuat resiliensi ekonomi Konawe dalam skala internasional.

Peran Strategis dalam Konteks Nasional

Konawe merupakan bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) Soroako (soroako-rauta-morowali), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Morosi dan koridor ekonomi Sulawesi dalam MP3EI. Implementasi hilirisasi industri pertambangan, terutama pasca pelarangan ekspor bijih nikel mentah, menjadikan Konawe sebagai pusat nilai tambah domestik yang berkontribusi langsung terhadap PDRB nasional dan pencapaian target Net Zero Emission/Nol Emisi Gas Rumah Kaca pada tahun 2060.

Sebagai lumbung padi utama di Sulawesi Tenggara, Konawe memproduksi lebih dari 35% dari total produksi padi provinsi. Dukungan irigasi modern seperti Bendung Wawotobi dan bendungan Ameroro memperkuat peran Konawe dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Fungsi distribusi logistik diperkuat oleh jaringan Trans Sulawesi yang melintasi wilayah ini, menjadikannya simpul vital arus barang di Kawasan Timur Indonesia.

Peran Strategis dalam Konteks Regional

Konawe merupakan kontributor terbesar terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 22,52% pada tahun 2023. Letaknya yang menguasai 42,43% wilayah daratan provinsi Sulawesi Tenggara menjadikannya simpul distribusi alami dan wilayah penyangga utama Kota Kendari.

Secara sosial budaya, Konawe adalah pusat peradaban Tolaki yang memainkan peran penting dalam menjaga identitas budaya regional. Warisan kearifan lokal Tolaki menjadi fondasi stabilitas sosial dan sumber daya budaya untuk pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata.

Implikasi Strategis dan Arah Pengembangan

Posisi strategis Konawe dalam konteks internasional, nasional, dan regional membawa implikasi penting bagi arah pembangunan jangka menengah:

1. Internasional: Perlu peningkatan daya saing industri global, penguatan standar lingkungan dan sosial internasional, serta ketahanan terhadap fluktuasi pasar komoditas.

2. Nasional: Perluasan kontribusi terhadap ketahanan pangan dan transisi energi melalui industrialisasi berbasis sumber daya alam.
3. Regional: Pemerataan pertumbuhan dan penguatan hubungan antarwilayah di Sulawesi Tenggara.

Strategi pengembangan Konawe ke depan harus mengintegrasikan ketiga skala tersebut melalui penguatan kelembagaan multi-level, hilirisasi industri, pembangunan berkelanjutan, dan pengembangan sumber daya manusia yang unggul. Dengan demikian, Konawe dapat menjadi model daerah yang berhasil menyelaraskan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan di tingkat lokal, nasional, dan global.

Kabupaten Konawe ditetapkan memiliki kode wilayah 74.02.32 dengan luas wilayah sebesar 6.087,83 km². Dalam perjalanannya, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang penggabungan kecamatan anggotaa kedalam kecamatan wawotobi menjadikan Kabupaten Konawe kedalam 28 kecamatan, 57 kelurahan, dan 291 desa. Keputusan ini menjadi acuan resmi dalam pendataan dan pengelolaan wilayah administrasi di Kabupaten Konawe, serta mendukung tertib administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di daerah tersebut.

Tabel 2. 1 Luas wilayah Daratan Kabupaten Konawe Menurut Wilayah Administrasi Kecamatan, Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Presentase
		(Km ²)	(%)
1	2	3	4
1	Kec. Rوتا	2090,05	34,33
2	Kec. Latoma	1316,26	21,62
3	Kec. Asinua	322,24	5,29
4	Kec. Padangguni	210,15	3,45
5	Kec. Abuki	185,61	3,05
6	Kec. Amonggedo	177,8	2,92
7	Kec. Uepai	160,73	2,64
8	Kec. Puriala	157,4	2,59
9	Kec. Tongauna Utara	157,35	2,58
10	Kec. Morosi	135,92	2,23
11	Kec. Onembute	135,33	2,22
12	Kec. Anggaberu	123,12	2,02
13	Kec. Meluhu	110,47	1,81

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Presentase
		(Km ²)	(%)
1	2	3	4
14	Kec. Besulutu	108,18	1,78
15	Kec. Wawotobi	103,11	1,69
16	Kec. Lambuya	96,22	1,58
17	Kec. Wonggeduku	73,7	1,21
18	Kec. Pondidaha	66,07	1,09
19	Kec. Soropia	55,55	0,91
20	Kec. Tongauna	47,72	0,78
21	Kec. Sampara	46,62	0,77
22	Kec. Wonggeduku Barat	37,83	0,62
23	Kec. Kapoiala	35,78	0,59
24	Kec. Lalonggasumeeto	34,18	0,56
25	Kec. Bondoala	32,86	0,54
26	Kec. Unaaha	29,87	0,49
27	Kec. Anggalo Moare	19,33	0,32
28	Kec. Konawe	18,37	0,3
Total		6087,82	100

(Sumber Data: Kabupaten Konawe Dalam Angka Tahun 2024, Bag. ADM Pemerintahan)

Tabel 2.1 di atas menunjukkan bahwa kecamatan Routa merupakan wilayah terluas dengan luas mencapai 2.090,05 km² atau sekitar 34,33% dari total luas Kabupaten Konawe. Diikuti oleh Kecamatan Latoma dengan luas 1.316,26 km² (21,62) dan Asinua dengan luas 322,24 km² (5,29%). Sementara itu, kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Konawe yang hanya mencakup 18,37 km² (0,29%), diikuti oleh Kecamatan Unaaha seluas 29,87 km² (0,44%) dan Bondoala seluas 32,86 km² (0,56%). Secara keseluruhan, total luas wilayah Kabupaten Konawe adalah 6.087,83 km². Wilayah-wilayah dengan luas yang besar seperti Routa, Latoma, dan Asinua berkontribusi signifikan terhadap total luas kabupaten, sementara kecamatan lainnya memiliki kontribusi yang relatif kecil, rata-rata di bawah 3%. Sebaran luas ini mencerminkan adanya ketimpangan geografis yang mungkin berimplikasi pada perencanaan pembangunan, distribusi infrastruktur, dan pelayanan publik. Kecamatan dengan luas yang kecil namun memiliki peran administratif penting, seperti Unaaha sebagai ibu kota kabupaten, tetap memegang peranan strategis meskipun dari segi luasan

2. Potensi Sumber Daya Alam

1) *Sumber Daya Alam Hayati – Sektor Kehutanan*

Potensi hasil hutan di Konawe mencakup dua kategori utama, yaitu hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu (HHBK). Jenis-jenis kayu bernilai tinggi yang terdapat di wilayah ini antara lain kayu jati, kayu eboni (kayu hitam), kayu merbau (sering disebut kayu besi), dan kayu bitti. Kayu

jati banyak dibudidayakan dalam skala perkebunan rakyat, sedangkan kayu eboni merupakan spesies endemik Sulawesi yang sangat bernilai tinggi namun kini langka dan memerlukan upaya konservasi serius. Selain itu, hasil hutan bukan kayu yang menjadi unggulan Konawe meliputi rotan alam, bambu, madu hutan, damar, serta tanaman obat dan pangan hutan yang dimanfaatkan masyarakat secara tradisional.

Rotan menjadi komoditas unggulan dengan kualitas yang diakui nasional, namun masih didominasi ekspor dalam bentuk bahan mentah ke luar daerah. Produksi rotan yang semula mencapai 100 ton per bulan kini menurun drastis akibat alih fungsi hutan menjadi kebun kelapa sawit. Selain rotan, HHBK seperti madu hutan dan tanaman obat memiliki potensi ekonomi dan konservasi yang besar, terutama jika dikembangkan melalui skema perhutanan sosial.

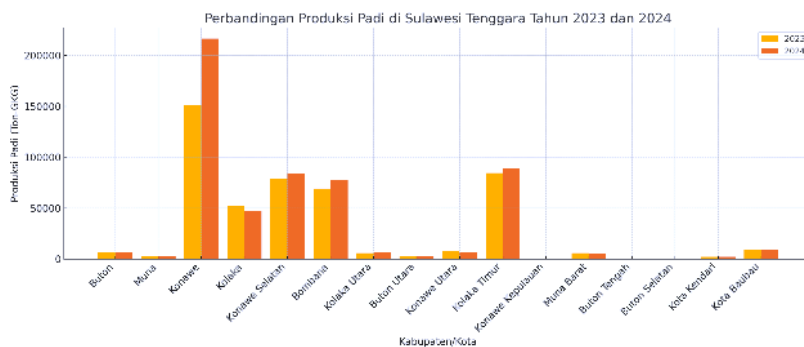
Kawasan hutan di Konawe juga menjadi habitat penting bagi flora dan fauna endemik, seperti kayu eboni dan satwa khas Sulawesi seperti anoa, babirusa, dan rusa. Sebagian wilayah Konawe masuk dalam kawasan konservasi Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai, yang melindungi ekosistem rawa dan keanekaragaman hayati yang unik.

Namun, pemanfaatan potensi kehutanan ini menghadapi berbagai tantangan serius, antara lain deforestasi akibat ekspansi pertambangan dan perkebunan, pembalakan liar, lemahnya pengawasan kawasan, serta rendahnya nilai tambah akibat keterbatasan industri pengolahan hasil hutan di daerah. Selain itu, konflik tenurial dan belum optimalnya implementasi program perhutanan sosial menjadi kendala dalam pengelolaan kawasan hutan secara berkelanjutan.

Ke depan, arah kebijakan pembangunan kehutanan Kabupaten Konawe perlu difokuskan pada penguatan fungsi lindung dan produksi hutan secara berimbang, perluasan program perhutanan sosial, pengembangan industri hilir berbasis HHBK seperti rotan dan madu, serta pemanfaatan jasa lingkungan melalui skema perhutanan sosial dan ekowisata berbasis konservasi. Upaya ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan tanpa mengorbankan fungsi ekologis kawasan, sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

2) Sumber Daya Alam Hayati: Sektor Pertanian – Komoditas Padi

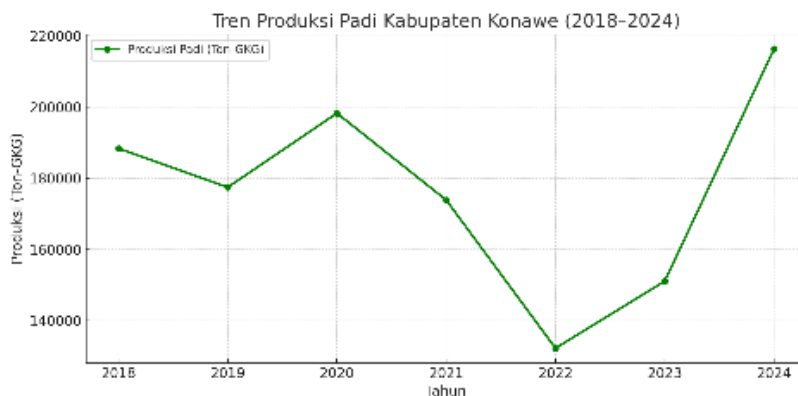
Grafik 2. 1 Produksi Padi di Sultra



Kabupaten Konawe merupakan salah satu sentra produksi padi terbesar di Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini tercermin dari kontribusinya yang

sangat signifikan terhadap produksi padi provinsi. Pada tahun 2023, total produksi padi di Kabupaten Konawe mencapai 151.058 ton Gabah Kering Giling (GKG), naik sebesar 14,26 persen dibandingkan tahun 2022 yang hanya sebesar 132.209 ton. Peningkatan ini setara dengan tambahan produksi sebesar 18.849 ton-GKG. Adapun pada tahun 2024, produksi padi Kabupaten Konawe kembali melonjak tajam menjadi 216.342 ton-GKG, atau meningkat sebesar 65.285 ton (43,22%) dibandingkan tahun sebelumnya.

Grafik 2. 2 Produksi Padi di Konawe



Sumber: Dinas TPHP Kab. Konawe

Kontribusi Kabupaten Konawe terhadap total produksi padi Sulawesi Tenggara juga semakin menguat. Pada tahun 2023, Kabupaten Konawe menyumbang

31,51 persen dari total produksi padi provinsi sebesar 479.407 ton. Dengan pencapaian 216.342 ton pada tahun 2024, kontribusi ini makin mendominasi, menjadikan Konawe sebagai daerah penentu stabilitas ketahanan pangan di tingkat provinsi .

Dari sisi produktivitas, Kabupaten Konawe mencatat pencapaian yang sangat baik. Angka produktivitas padi pada tahun 2023 mencapai 40,58 kuintal per hektar (Ku/Ha), tertinggi dalam lima tahun terakhir. Nilai ini

mengalami kenaikan 5,98 persen dibandingkan tahun 2022 yang hanya sebesar 38,29 Ku/Ha. Produktivitas ini merupakan hasil dari peningkatan kualitas varietas yang digunakan, perbaikan sistem irigasi, dan penanganan hama tanaman yang lebih efektif .

Pertumbuhan produksi ini juga didukung oleh peningkatan luas panen. Tahun 2023, luas panen padi di Kabupaten Konawe tercatat sebesar 37.224 hektar, naik 2.695 hektar atau 7,8 persen dibanding tahun sebelumnya (34.529 hektar). Kenaikan luas panen ini terutama disebabkan oleh selesainya perbaikan bendungan dan saluran irigasi utama yang sebelumnya membatasi pasokan air ke lahan sawah. Sementara itu, luas panen padi di Provinsi Sulawesi Tenggara justru mengalami penurunan sebesar 3,66 persen pada tahun yang sama .

Jika dikonversi ke dalam produksi beras siap konsumsi menggunakan angka konversi resmi, maka produksi padi Konawe tahun 2023 sebesar 151.058 ton-GKG menghasilkan sekitar 86.749 ton beras. Jumlah ini merupakan cadangan pangan strategis tidak hanya untuk kebutuhan lokal, tetapi juga menopang ketersediaan beras di tingkat provinsi.

Secara keseluruhan, tren lima tahun terakhir menunjukkan dinamika yang cukup stabil, dengan lonjakan signifikan pada tahun 2020 dan 2023. Penurunan yang terjadi pada tahun 2021–2022 disebabkan oleh gangguan sistem irigasi dan cuaca yang tidak menentu, namun telah berhasil diatasi menjelang 2023, dan ditingkatkan lebih lanjut pada 2024.

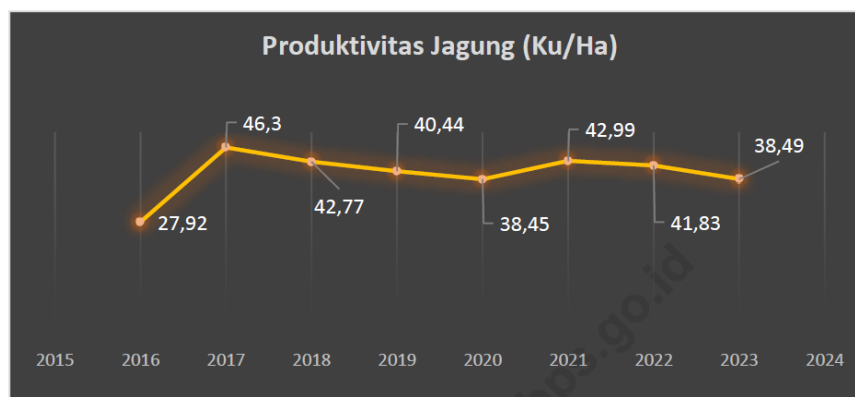
Melihat tren yang ada, penguatan sektor pertanian tanaman pangan, khususnya padi, tetap menjadi prioritas pembangunan daerah ke depan. Intervensi yang akan difokuskan antara lain: pengembangan teknologi pertanian, intensifikasi lahan produktif, peningkatan akses pupuk dan benih unggul, serta revitalisasi infrastruktur irigasi yang berkelanjutan.

3) *Sumber Daya Alam Hayati: Sektor Pertanian – Komoditas Jagung*

Jagung merupakan salah satu tanaman pangan penting setelah padi, yang memiliki peran strategis sebagai penghasil karbohidrat, pakan ternak, dan bahan baku industri. Di Kabupaten Konawe, komoditas jagung telah lama dibudidayakan oleh masyarakat, terutama di wilayah dataran tengah dan tenggara. Selain dikonsumsi langsung, jagung juga menjadi bahan

utama dalam industri pakan, minyak nabati, dan bioindustri lainnya. Potensi nilai ekonomi jagung yang besar menjadikan pengembangannya sebagai bagian penting dalam strategi pertanian berkelanjutan Kabupaten Konawe.

Grafik 2. 3 Produktivitas Jagung



Sumber: Dinas TPHP Kab. Konawe

a. Perkembangan Produksi, Produktivitas, dan Luas Panen

Produktivitas tanaman jagung Kabupaten Konawe pada tahun 2023 tercatat sebesar 38,49 Ku/Ha, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 41,83 Ku/Ha. Tren ini mencerminkan fluktuasi produktivitas yang terjadi sejak tahun 2016, dengan capaian tertinggi pada tahun 2017 sebesar 46,3 Ku/Ha. Penurunan produktivitas ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain ketergantungan pada varietas lokal dengan siklus panen cepat namun hasil lebih rendah, keterbatasan teknologi budidaya, serta pengaruh kondisi iklim.

Dari sisi produksi, pada tahun 2023 tercatat produksi jagung hanya mencapai 2.712,6 ton, menurun signifikan sebesar 65,5 persen dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 7.859,6 ton. Penurunan ini turut dipengaruhi oleh menyusutnya luas panen dari 1.879 Ha pada tahun 2022 menjadi 705 Ha pada tahun 2023.

Distribusi luas panen jagung terbesar berada di Kecamatan Konawe (19,58%), disusul oleh Kecamatan Puriala (17,06%), Anggotoa (13,40%), Lambuya (10,39%), dan Uepai (10,00%). Konsentrasi ini menunjukkan adanya potensi sentra produksi jagung yang dapat dioptimalkan untuk pengembangan kawasan jagung berbasis klaster agribisnis

b. Strategi Pengembangan dan Hilirisasi Jagung sebagai Bahan Baku Pakan Ternak

Melihat tren penurunan produktivitas dan produksi jagung, Pemerintah Kabupaten Konawe memandang penting untuk tidak hanya fokus pada aspek budidaya, tetapi juga mendorong hilirisasi produk jagung, terutama untuk pengembangan pakan ternak lokal. Strategi ini dinilai relevan mengingat meningkatnya kebutuhan pakan untuk pengembangan komoditas unggas, sapi potong, dan kambing yang tersebar di wilayah Konawe bagian tengah dan utara.

Pengembangan industri pakan berbasis jagung memiliki beberapa manfaat strategis:

- Meningkatkan nilai tambah petani jagung, melalui kemitraan produksi dan pembelian hasil oleh unit usaha pengolahan pakan;
- Meningkatkan kepastian pasar bagi petani jagung dan mendorong stabilitas harga;
- Mengintegrasikan sektor pertanian dengan peternakan, membentuk ekosistem agribisnis lokal yang kuat;
- Menumbuhkan sentra ekonomi baru pedesaan melalui pembangunan industri kecil pengolahan jagung (*feed mill*) di kecamatan sentra.

4) Potensi Peternakan Ayam di Kabupaten Konawe

Subsektor peternakan ayam merupakan bagian penting dari pengembangan sumber daya hayati Kabupaten Konawe. Berdasarkan data tahun 2024, jumlah total populasi unggas di Kabupaten Konawe tercatat sebanyak 2.262.489 ekor, yang terdiri dari ayam buras sebanyak 1.650.739 ekor (72,97 persen), ayam ras pedaging (broiler) sebanyak 594.750 ekor (26,29 persen), dan ayam petelur sebanyak 17.000 ekor (0,75 persen).

Grafik 2. 4 Populasi Unggas Kab. Konawe



Distribusi populasi ayam buras cukup merata di hampir seluruh kecamatan, menunjukkan kuatnya basis peternakan tradisional masyarakat. Kecamatan-kecamatan seperti Tongauna, Uepai, Amonggedo, Puriala, dan Pondidaha

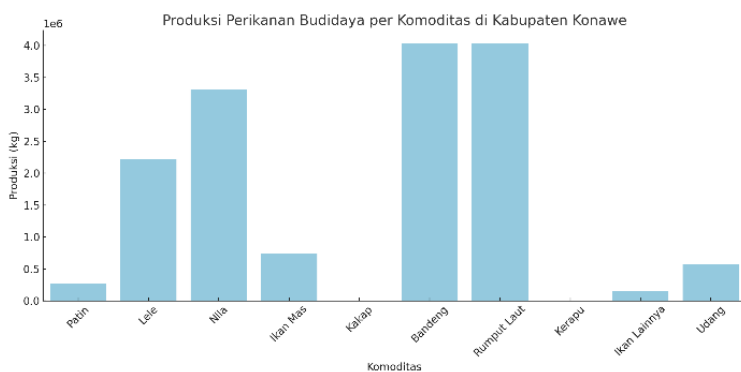
Sumber; Dinas Peternakan Kab. Konawe

menjadi kantong produksi ayam buras terbanyak. Ayam buras ini berfungsi sebagai cadangan pangan rumah tangga sekaligus sumber pendapatan tambahan masyarakat perdesaan.

5) Sumber Daya Alam Hayati – Sektor Perikanan Budidaya

Kabupaten Konawe memiliki potensi sumber daya alam hayati yang cukup menjanjikan dalam sektor perikanan budidaya. Keberadaan lahan perairan, irigasi teknis, rawa-rawa, serta akses pasar di wilayah daratan Sulawesi Tenggara, menjadikan Konawe sebagai salah satu sentra pengembangan budidaya air tawar dan payau.

Grafik 2. 5 Produksi Perikanan Kabupaten Konawe



Pada tahun terakhir, komoditas unggulan dalam subsektor perikanan budidaya di Kabupaten Konawe didominasi oleh ikan lele, ikan nila, dan rumput laut. Produksi ikan

lele tercatat sebesar 2.212.550 kg dengan nilai produksi mencapai Rp66,38 miliar, sedangkan produksi ikan nila mencapai 3.310.947 kg dengan nilai mencapai Rp115,88 miliar. Selain itu, rumput laut juga memberikan kontribusi signifikan dengan volume produksi sebesar 4.037.881 kg dan nilai ekonomi sebesar Rp72,68 miliar.

Komoditas lain seperti ikan mas (1.086.040 kg; Rp54,30 miliar), patin (271.510 kg; Rp9,50 miliar), dan udang (740.380 kg; Rp96,23 miliar) juga

memperlihatkan potensi yang dapat terus dikembangkan. Namun demikian, produksi ikan kakap dan ikan kerapu tidak tercatat dalam periode ini, yang mengindikasikan masih belum optimalnya pemanfaatan perairan pesisir untuk budidaya komoditas laut bernilai tinggi.

Nilai total produksi seluruh komoditas perikanan budidaya di Kabupaten Konawe secara keseluruhan cukup signifikan, menjadikan sektor ini sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan yang potensial untuk terus dikembangkan melalui peningkatan kapasitas pembudidaya, penyediaan sarana prasarana budidaya yang lebih baik, serta perluasan akses pasar.

6) **Sumber Daya Alam Non-Hayati: Sektor Mineral dan Bahan Tambang**

Kabupaten Konawe memiliki potensi sumber daya alam non-hayati yang sangat strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana tercantum dalam dokumen Konawe Dalam Angka 2024. Sektor mineral dan bahan tambang menjadi salah satu kekuatan utama, terutama dengan keberadaan komoditas mineral logam seperti nikel. Kekayaan ini tersebar di sejumlah kecamatan, antara lain Routa, Morosi, dan Bondoala, yang kini berkembang menjadi pusat industri tambang serta kawasan hilirisasi nasional.



Gambar 2. 3 Potensi Mineral Indonesia

Selain nikel, Kabupaten Konawe juga menyimpan potensi bahan tambang non-logam seperti batu gamping, batu andesit, pasir, dan batu kerikil, yang tersebar di wilayah daratan tengah dan pesisir barat. Komoditas-komoditas ini dimanfaatkan untuk bahan bangunan dan konstruksi infrastruktur, baik untuk kebutuhan lokal maupun regional. Aktivitas penambangan dilakukan oleh perusahaan besar pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) serta oleh pelaku usaha lokal berskala kecil.

Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Konawe sangat dominan, dengan capaian lebih dari 60 persen terhadap total PDRB atas dasar harga berlaku. Dominasi ini menempatkan sektor pertambangan sebagai penggerak utama perekonomian Konawe. Namun demikian, ketergantungan yang tinggi pada sektor ini juga menimbulkan potensi ketidakseimbangan struktur ekonomi, terutama bila tidak diimbangi dengan penguatan sektor-sektor lain seperti pertanian, industri pengolahan, dan jasa.

Dalam kerangka RPJMD 2025–2029, Pemerintah Daerah merumuskan strategi untuk mendorong transformasi sektor pertambangan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan, salah satunya melalui percepatan program hilirisasi mineral. Kawasan Industri Morosi saat ini telah menjadi motor utama hilirisasi nikel nasional yang memberikan efek ganda (*multiplier effect*) dalam bentuk peningkatan lapangan kerja, pendapatan daerah, dan pertumbuhan sektor pendukung lainnya.

Lebih jauh, wilayah Routa diproyeksikan menjadi kawasan strategis baru dalam pengembangan hilirisasi mineral dengan hadirnya PT Sulawesi Cahaya Mineral (SCM), anak perusahaan dari Harita Group. PT SCM mengelola cadangan nikel yang sangat besar di blok Routa dan saat ini sedang membangun infrastruktur pengolahan dan pemurnian (*smelter*) nikel di lokasi tersebut. Kehadiran perusahaan ini akan menjadikan Routa sebagai pusat hilirisasi nikel berikutnya di Sulawesi Tenggara, mendukung pertumbuhan investasi baru, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah di Kabupaten Konawe.

Dalam jangka menengah, potensi kawasan hilirisasi Routa akan melengkapi peran Morosi sebagai kawasan industri berbasis logam,

membentuk koridor ekonomi timur–tengah Konawe yang terintegrasi dengan infrastruktur energi, logistik, serta pemukiman pekerja. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengawal regulasi, penataan ruang, dan sinergi antar sektor agar kegiatan hilirisasi berjalan secara berkelanjutan, ramah lingkungan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat lokal.

Dengan demikian, sektor mineral dan bahan tambang di Kabupaten Konawe tidak hanya menjadi fondasi kekuatan ekonomi daerah, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam pencapaian visi pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berorientasi pada nilai tambah dalam negeri.

7) *Potensi dan Persebaran Pertambangan*

Kabupaten Konawe memiliki potensi sumber daya geologi yang sangat melimpah dan beragam, mencakup berbagai jenis mineral logam, mineral bukan logam, hingga mineral batuan. Kekayaan ini tersebar di sejumlah kecamatan dengan karakteristik geologi yang berbeda, menjadikan sektor pertambangan sebagai salah satu pilar ekonomi daerah yang strategis namun juga menghadirkan tantangan dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Mineral Logam

Sumber daya mineral logam di Kabupaten Konawe sangat signifikan, khususnya untuk bahan galian strategis seperti nikel, besi, kromit, dan kobalt. Deposit nikel tersebar di Kecamatan Routa, Puriala, dan Pondidaha. Ketiga kecamatan ini juga memiliki potensi deposit besi dan kromit. Selain itu, deposit kobalt juga teridentifikasi di wilayah yang sama, menjadikan kawasan ini sebagai pusat utama potensi mineral logam di Kabupaten Konawe. Keberadaan sumber daya ini mendukung posisi strategis Konawe dalam pengembangan kawasan industri berbasis nikel dan logam lainnya.

Mineral Bukan Logam

Selain mineral logam, Konawe juga menyimpan cadangan mineral bukan logam yang beragam, seperti pasir kuarsa (Quartzsand), batu setengah permata, mika (Mica), kuarsit (Quartzite), kalsit (Calcite), asbes (Asbestos), talk (Talc), oker (Ocher), grafit (Graphite), dolomit (Dolomite), dan endapan posfat. Persebaran mineral ini mencakup berbagai kecamatan: pasir kuarsa

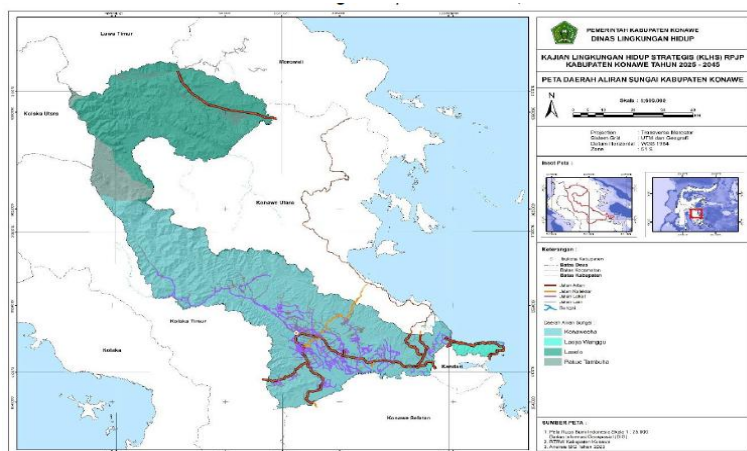
banyak ditemukan di Kecamatan Meluhu, batu setengah permata di Pondidaha dan Puriala, mika di Latoma dan Asinua, serta kuarsit di Latoma dan Asinua. Sementara itu, beberapa mineral seperti talk, asbestos, dan oker terfokus di Kecamatan Rounta, yang juga memiliki deposit posfat.

Mineral Batuan

Mineral batuan juga menjadi bagian dari kekayaan geologis Konawe. Beberapa jenis yang tercatat antara lain marmer (*Marble*), batuserpih (*Slate*), batugamping (*Limestone*), peridotit (*Peridotite*), rijang (*Chert*), genes (*Gneiss*), lempung (*Clay*), dan pasir batu (*Sirtu*). Deposit marmer terletak di Kecamatan Latoma, sedangkan batugamping tersebar di Rounta dan Pondidaha. Jenis batuan lainnya juga tersebar merata di berbagai kecamatan, memperkaya diversifikasi sumber daya alam non-logam di daerah ini.

8) Potensi Sumber Daya Alam Non-Hayati: Sektor Air dan Energi Air

Kabupaten Konawe memiliki potensi sumber daya air yang sangat besar dan strategis, yang tidak hanya berperan sebagai penopang utama sistem pertanian dan penyediaan air baku, tetapi juga menyimpan potensi besar sebagai sumber energi baru terbarukan, khususnya energi air (hidro dan mikrohidro). Dengan konfigurasi wilayah yang dialiri oleh sungai-sungai besar dan ditunjang oleh keberadaan beberapa bendungan strategis, Kabupaten Konawe memiliki posisi yang sangat menguntungkan dalam pengelolaan dan pemanfaatan air untuk beragam keperluan pembangunan berkelanjutan.



Salah satu kekuatan utama Kabupaten Konawe adalah keberadaan Sungai Konawechea, sungai terbesar di Sulawesi Tenggara, dengan debit air mencapai $\pm 200 \text{ m}^3/\text{detik}$. Sungai ini menjadi tulang punggung sistem irigasi teknis di wilayah tengah

Gambar 2. 4 Peta Jaringan Sungai dan Ekosistem Rawa

Sumber; KLHS RPJMD Kab. Konawe

hingga selatan Konawe dan juga berperan penting dalam menyuplai air baku bagi kebutuhan domestik maupun kawasan industri seperti Morosi dan Rounta. Sungai ini juga merupakan lokasi rencana pembangunan Bendungan Pelosika yang akan memperkuat ketahanan air regional.

Selain Konawehe, terdapat pula sungai-sungai penting lainnya seperti Sungai Lahambuti, Sungai Pohara, dan Sungai Lasolo Hulu, yang tersebar di berbagai kecamatan dan membentuk Daerah Aliran Sungai (DAS) strategis untuk pemenuhan kebutuhan air masyarakat, pertanian, dan perikanan air tawar. Beberapa sungai ini juga potensial dikembangkan sebagai sumber energi mikrohidro untuk skala desa atau kecamatan.

Di sisi lain, Rawa Aopa yang sebagian masuk wilayah Konawe, memberikan nilai tambah sebagai sumber daya air permukaan yang penting untuk pengembangan budidaya ikan air tawar dan konservasi lahan basah.

Infrastruktur Bendungan dan Irigasi

Dibangun pada 1981–1987,

Bendungan Wawotobi

merupakan bendungan irigasi teknis terbesar di Sulawesi Tenggara. Bendungan ini memiliki potensi mengairi ±18.000 menyuplai air irigasi ke ±16.572 hektare lahan, dengan



Gambar 2. 5 Bendungan Wawotobi

luas fungsional eksisting mencapai 9.872 hektare. Peran bendungan ini sangat vital dalam menjaga kontinuitas produksi pertanian, terutama pada musim kemarau.

Selain fungsi irigasi, bendungan ini juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) yang dapat memberikan suplai energi untuk desa-desa sekitar. Bendungan ini juga menjadi lokasi wisata lokal dan ruang publik yang populer di kalangan masyarakat Konawe.

Bendungan Ameroro, yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada 14 Mei 2024, merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan kapasitas tampung 98,81 juta m³. Terletak di Desa Tamesandi, Kecamatan Uepai, bendungan ini dibangun dengan pendekatan *Green Construction Dam* dan berperan sebagai bendungan multifungsi.



Gambar 2. 6 Bendungan Ameroro

Fungsi utama Bendungan Ameroro antara lain:

- Menyediakan air baku sebesar 0,51 m³/detik untuk kebutuhan industri dan masyarakat.
- Mengairi 3.363 hektare lahan pertanian di Ameroro dan Meraka.
- Mengendalikan banjir dengan kapasitas reduksi hingga 66,99 m³/s.
- Mampu menyediakan energi terbarukan melalui PLTMH berkapasitas 1,3 MW dan PLTS hingga 48,81 MW.
- Menjadi kawasan edukasi dan wisata lingkungan berbasis budaya lokal.

Bendungan ini menjadi salah satu simbol pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Konawe, karena memadukan fungsi teknis, sosial, ekonomi, dan ekologi secara terpadu.

Rencana Bendungan Pelosika

Bendungan Pelosika, yang akan dibangun di wilayah Latoma pada aliran hulu Sungai Konawehea, dirancang sebagai bendungan multifungsi yang melengkapi sistem ketahanan air Kabupaten Konawe. Bendungan ini diharapkan dapat:

- Mengendalikan banjir di hilir Sungai Konawehea.
- Menyediakan air baku tambahan untuk kawasan industri dan pemukiman.



Gambar 2. 7 Rencana Bendungan Pelosika

- Mendukung sistem irigasi terintegrasi bersama Wawotobi dan Ameroro.
- Menghasilkan energi terbarukan melalui PLTMH.
- Memperkuat ketahanan iklim di sektor pertanian dan pemukiman padat.

Potensi Energi Air: Hidro dan Mikrohidro

Dengan tingginya curah hujan tahunan dan keberadaan jaringan sungai yang stabil sepanjang tahun, Kabupaten Konawe menyimpan potensi besar dalam pengembangan energi air berbasis mikrohidro dan hidro skala kecil-menengah. Beberapa wilayah seperti Routa, Meluhu, Asinua, dan Lambuya memiliki topografi dan debit aliran yang memungkinkan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) yang dapat menyuplai energi untuk desa dan fasilitas sosial dasar.

Sementara itu, proyek-proyek besar seperti PLTMH di Bendungan Ameroro dan rencana PLTMH di Bendungan Pelosika membuka ruang bagi transformasi sistem energi Konawe menuju energi yang bersih, terbarukan, dan mandiri. Pengembangan energi air ini juga mendukung target pengurangan emisi karbon dan penguatan ekonomi hijau di tingkat lokal.

9) *Potensi Sumber Daya Alam Non-Hayati: Energi Terbarukan Energi Surya (Pembangkit Listrik Tenaga Surya – PLTS)*

Kabupaten Konawe memiliki potensi energi surya yang sangat menjanjikan karena secara geografis terletak di wilayah dengan tingkat radiasi matahari yang tinggi dan stabil, yaitu rata-rata di atas 4,5–5,0 kWh/m² per hari. Potensi ini menempatkan Konawe sebagai wilayah yang sangat ideal untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), baik skala rumah tangga, komunal, maupun industri.

Salah satu Lokasi strategis adalah pembangunan PLTS skala menengah hingga besar di sekitar Bendungan Ameroro, dengan kapasitas daya mencapai 48,81 MW. Kawasan ini dipilih karena memiliki infrastruktur pendukung dan beririsan dengan proyek strategis nasional lainnya seperti penyediaan air baku dan irigasi. Penerapan PLTS di wilayah ini diharapkan dapat:

- Mendukung operasional kawasan industri dan pertanian secara berkelanjutan

- Menyediakan energi alternatif di wilayah-wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik PLN
- Mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mendukung target emisi nol bersih (net zero emission)
- Menjadi pilot project bagi pengembangan green energy ecosystem/Ekonomi Hijau di Sulawesi Tenggara

Pengembangan PLTS juga berpotensi diintegrasikan dengan sektor perumahan dan fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, dan perkantoran pemerintah daerah, khususnya dalam mendukung efisiensi anggaran energi dan ketahanan energi lokal.

Energi Biomassa (Limbah Pertanian dan Peternakan)

Sebagai daerah agraris yang kaya akan hasil pertanian dan peternakan, Kabupaten Konawe memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan berbasis biomassa. Produk limbah organik seperti jerami padi, tongkol jagung, sekam kelapa, serta kotoran ternak ayam dan sapi tersedia dalam jumlah besar setiap tahun. Potensi limbah ini selama ini sebagian besar belum termanfaatkan secara optimal, sehingga menjadi peluang besar dalam membangun sistem energi mandiri desa berbasis biomassa. Pemanfaatan biomassa dapat diarahkan untuk berbagai kebutuhan energi dan produksi pertanian ramah lingkungan, di antaranya:

- Briket biomassa padat untuk keperluan memasak masyarakat di daerah pedesaan atau industri rumah tangga
- Pupuk organik dan kompos untuk meningkatkan kesuburan lahan secara alami, mendukung pertanian berkelanjutan
- Biogas sebagai alternatif sumber energi untuk penerangan dan memasak di rumah tangga, khususnya di wilayah perdesaan yang belum memiliki akses listrik yang stabil

Pengembangan energi surya dan biomassa di Kabupaten Konawe bukan hanya menjadi bagian dari strategi ketahanan energi, tetapi dapat juga berfungsi sebagai instrumen penggerak ekonomi lokal yang berkelanjutan. Sinergi antara sektor energi terbarukan dengan sektor pertanian, peternakan, dan industri akan memperkuat fondasi pembangunan ekonomi hijau di Konawe.

10) *Potensi Sumber Daya Alam Lanskap dan Geowisata: Sektor Pariwisata*

Kabupaten Konawe memiliki kekayaan sumber daya lanskap alam, geologi, dan budaya yang berpotensi besar untuk dikembangkan menjadi sektor unggulan pariwisata daerah. Wilayah ini menawarkan bentang pesisir yang eksotis, kawasan pegunungan dan hutan tropis yang masih alami, hingga situs-situs sejarah dan budaya yang merepresentasikan identitas masyarakat Tolaki. Potensi ini menjadi modal strategis dalam mendorong pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, berbasis komunitas, dan terintegrasi dengan pengembangan ekonomi lokal.

Pada kawasan pesisir, Kecamatan Soropia menjadi pusat utama wisata bahari. Destinasi-destinasi seperti Pulau Bokori, Saponda Laut, Saponda Darat, dan Pantai Toronipa menawarkan daya tarik berupa pasir putih, laut yang jernih, dan suasana alami yang sangat potensial untuk pengembangan wisata pantai, snorkeling, diving, dan resort ekowisata. Selain itu, Goa Panjat Tebing di Desa Sawapudo juga berpotensi dikembangkan sebagai wisata minat khusus untuk panjat tebing dan petualangan alam.

Di kawasan perbukitan dan pegunungan bagian tengah dan timur Konawe, tersebar sejumlah objek wisata alam yang menyimpan keindahan lanskap dan potensi geowisata. Beberapa di antaranya adalah Air Terjun Meluhu (Kecamatan Meluhu), Air Terjun Kumopadahu (Kecamatan Anggaberu), Air Terjun Otodopi (Kecamatan Padangguni), Air Terjun Solomeronda (Kecamatan Lambuya), dan Air Terjun Anawai (Kecamatan Sampara). Selain itu, wilayah Kecamatan Puriala juga memiliki potensi unik berupa Hutan Savana Osu Unggulino dan pemandian Air Panas Sonay yang dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata alam pegunungan dan geotermal. Wisata alam berbasis edukasi dan konservasi ini sangat cocok untuk ekowisata dan wisata keluarga.

Kawasan wisata buatan juga berkembang, terutama di sekitar Bendungan Wawotobi dan Bendungan Ameroro. Keduanya tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur strategis ketahanan air, tetapi juga memiliki potensi sebagai destinasi wisata air dan edukasi lingkungan. Bendungan Wawotobi yang dibangun sejak 1981–1987 kini menjadi salah satu tempat

rekreasi favorit masyarakat lokal. Sementara itu, Bendungan Ameroro yang baru diresmikan pada tahun 2024 telah dirancang dengan konsep “green construction dam” yang ramah lingkungan, serta dilengkapi fasilitas pendukung seperti museum, taman edukasi, gardu pandang, hingga ikon-ikon kebudayaan Tolaki yang berfungsi sebagai penarik wisatawan.

Pada aspek wisata budaya dan sejarah, Kabupaten Konawe menyimpan kekayaan narasi sejarah Kerajaan Konawe. Situs Makam Raja Lakidende dan Makam Permaisuri Lakidende yang terletak di Kelurahan Arombu, Kecamatan Unaaha, merupakan warisan budaya lokal yang potensial dikembangkan sebagai destinasi wisata sejarah dan budaya Tolaki. Wisata budaya ini dapat dikemas bersama kegiatan festival budaya, pertunjukan seni tradisi, dan kuliner khas daerah sebagai upaya pelestarian warisan takbenda masyarakat Konawe.

Selain itu, lokasi-lokasi seperti Argawana Camp dan Puncak Ahuawali menjadi contoh pengembangan wisata alam aktif yang dapat mendukung kegiatan pendidikan luar ruang, outbound, dan wisata keluarga. Penguatan potensi ini harus dibarengi dengan peningkatan infrastruktur dasar pariwisata seperti akses jalan, fasilitas publik, serta promosi digital dan branding pariwisata daerah.

Secara keseluruhan, potensi sektor pariwisata di Kabupaten Konawe mencakup berbagai dimensi: wisata bahari, wisata alam pegunungan, wisata air terjun, wisata geotermal, wisata buatan, hingga wisata budaya dan sejarah. Jika dikelola dengan baik dan berkelanjutan, sektor ini berpotensi menjadi pengungkit ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat identitas budaya lokal. Dalam kerangka RPJMD 2025–2029, pengembangan sektor pariwisata akan diarahkan secara terpadu dengan pengembangan kawasan, peningkatan kapasitas SDM, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk promosi destinasi wisata Konawe.

3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

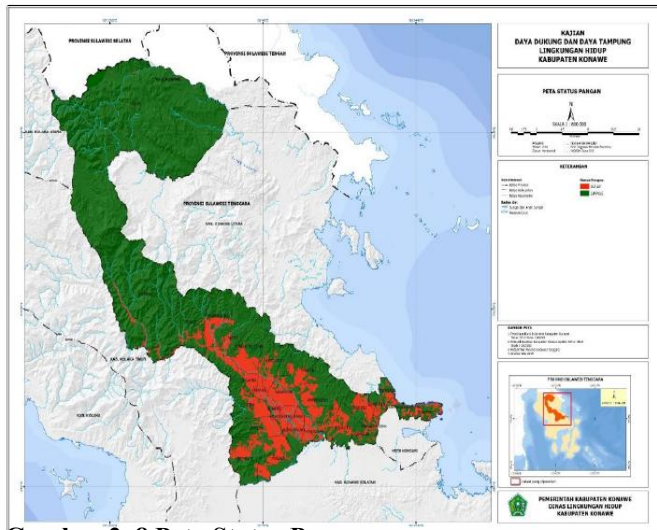
A. Daya Dukung Air

Hasil analisis ketersediaan air Kabupaten Konawe yang meliputi air permukaan dan air tanah menunjukkan total ketersediaan air tahunan adalah 7,630,114,654.16 m³/tahun, mampu mendukung kebutuhan air sebanyak 152,755,001 jiwa (ambang batas populasi penduduk Kabupaten Konawe). Nilai kebutuhan air wilayah Kabupaten Konawe sebesar 1,053,332,245.20 dengan jumlah penduduk eksisting sebesar 257.174 jiwa (BPS, 2022). Secara umum sebagian besar kecamatan di Kabupaten Konawe didominasi oleh kondisi surplus akan ketersediaan air, terkecuali Kecamatan Wonggeduku Barat yang memiliki status defisit akan ketersediaan air.

Tabel 2. 2 Daya Dukung dan Daya Tampung Indikatif Status Air Kabupaten Konawe

NO	Kecamatan	Model	DDDTLH INDIKATIF PENYEDIAAN AIR KABUPATEN KONAWE									TOTAL LUAS
		Populasi	KETERSEDIAAN	KEBUTUHAN	SELISIH	AMBANG	SELISIH	LUAS WILAYAH		LUAS WILAYAH		
		Pergrid	(SUPPLY)	(DEMAND)	KEBUTUHAN	BATAS		SURPLUS		DEFISIT		
		(jiwa)	m3/tahun	m3/tahun	m3/tahun	jiwa	jiwa	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)
1	Abuki	8.514	303.299.775,08	32.665.107,10	270.634.667,98	6.281.749	6.273.235	19.778,61	3,75%	576,37	0,11%	20.354,99
2	Amonggedo	11.326	204.027.787,36	53.626.828,82	150.400.958,53	3.504.177	3.492.851	13.465,06	2,55%	1.701,48	0,32%	15.166,54
3	Anggaberu	7.344	205.349.166,26	37.174.603,19	168.174.563,07	3.907.668	3.900.324	13.759,00	2,61%	702,34	0,13%	14.461,34
4	Anggalomoare	4.790	18.485.433,64	454.374,09	18.031.059,55	426.973	422.183	1.438,05	0,27%	0,03	0,00%	1.438,08
5	Asinua	3.145	331.395.499,36	21.134.410,01	310.261.089,35	7.188.345	7.185.200	21.120,72	4,00%	301,67	0,06%	21.422,39
6	Besulutu	8.852	128.940.102,17	20.857.228,74	108.082.873,43	2.519.656	2.510.804	9.491,64	1,80%	0,10	0,00%	9.491,74
7	Bondoala	5.073	48.109.096,23	6.775.501,66	41.333.594,58	966.935	961.862	3.689,04	0,70%	112,43	0,02%	3.801,47
8	Kapoiata	5.639	38.848.133,37	3.240.409,23	35.607.724,15	835.508	829.869	3.320,31	0,63%	0,06	0,00%	3.320,37
9	Konawe	9.868	33.062.623,83	18.187.150,63	14.875.473,21	364.084	354.216	2.108,77	0,40%	440,19	0,08%	2.548,96
10	Lalonggasumeeto	5.426	49.340.275,28	1.866.815,50	47.473.459,78	1.109.779	1.104.353	3.433,08	0,65%		0,00%	3.433,08
11	Lambuya	7.491	155.641.288,99	56.556.510,23	99.084.778,76	2.308.640	2.301.149	8.925,34	1,69%	2.148,91	0,41%	11.074,25
12	Latoma	2.998	1.278.346.271,73	18.635.017,52	1.259.711.254,21	29.166.627	29.163.629	80.803,61	15,32%		0,00%	80.803,61
13	Meluhu	5.715	222.360.263,97	35.513.615,80	186.846.648,17	4.336.619	4.330.904	13.650,01	2,59%	809,03	0,15%	14.459,04
14	Morosi	6.044	115.036.548,55	41.925.318,28	73.111.230,27	1.704.504	1.698.460	6.823,69	1,29%	1.255,13	0,24%	8.078,82
15	Onembute	7.277	176.171.644,38	51.769.939,46	124.401.704,92	2.894.065	2.886.788	12.432,60	2,36%	2.037,06	0,39%	14.469,66
16	Padangguni	9.169	230.406.969,29	45.686.101,14	184.720.868,15	4.294.345	4.285.176	14.237,58	2,70%	1.488,67	0,28%	15.726,25
17	Pondidaha	12.756	133.468.925,16	39.760.254,33	93.708.670,83	2.194.708	2.181.952	8.808,69	1,67%	1.069,27	0,20%	9.877,97
18	Puriala	9.370	188.297.331,37	114.390.186,91	73.907.144,46	1.729.459	1.720.089	9.282,47	1,76%	4.904,21	0,93%	14.186,67
19	Routa	3.448	2.941.145.636,94	72.069.709,23	2.869.075.927,71	66.419.470	66.416.022	201.285,27	38,16%		0,00%	201.285,27
20	Sampara	9.143	65.117.349,63	2.261.976,21	62.855.373,42	1.473.350	1.464.207	4.973,03	0,94%		0,00%	4.973,03
21	Soropia	8.999	77.600.760,42	9.015.787,13	68.584.973,29	1.605.626	1.596.627	5.181,34	0,98%		0,00%	5.181,34
22	Tongauna	17.826	263.343.663,03	120.728.788,34	142.614.874,69	3.336.847	3.319.021	13.716,22	2,60%	5.363,86	1,02%	19.080,08
23	Uepai	14.720	154.730.211,19	42.593.604,10	112.136.607,08	2.625.203	2.610.483	10.105,42	1,92%	1.255,84	0,24%	11.361,26
24	Unaaha	25.896	30.263.974,34	21.112.087,97	9.151.886,37	263.638	237.742	1.836,04	0,35%	827,59	0,16%	2.663,64
25	Wawotobi	23.478	114.672.094,35	76.294.874,66	38.377.219,69	935.335	911.857	6.734,29	1,28%	2.317,18	0,44%	9.051,46
26	Wonggeduku	13.840	81.193.599,19	56.921.658,00	24.271.941,19	589.549	575.709	3.984,69	0,76%	2.303,38	0,44%	6.288,07
27	Wonggeduku Barat	9.389	41.460.229,05	52.114.386,93	(10.654.157,88)	(227.858)	(237.247)	1.132,92	0,21%	2.321,67	0,44%	3.454,59
	Grand total	257.536	7.630.114.654,16	1.053.332.245,2	6.576.782.408,96	152.755.001	152.497.465	495.517,49	0,94	31.936,47	6,05%	527.453,97

Sumber: KLHS RPJMD Konawe Tahun 2025-2029



Gambar 2. 8 Peta Status Pangan

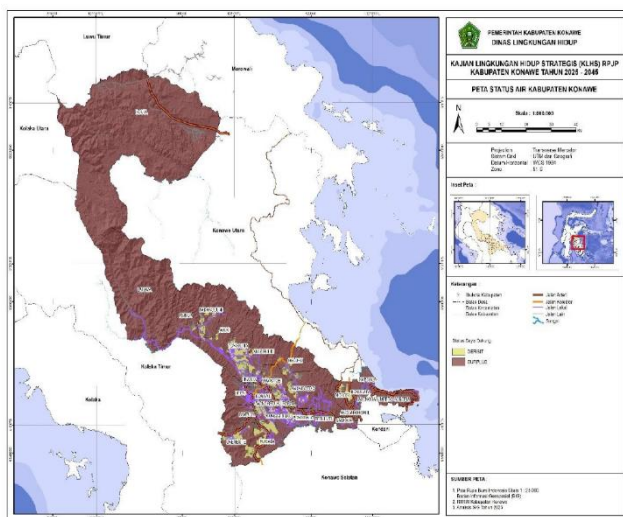
Sumber; KLHS RPJMD Kab. Konawe

didefinisikan sebagai kemampuan lingkungan dalam menyediakan sumber daya alam untuk mendukung aktivitas manusia, sementara daya tampung lingkungan mencerminkan kapasitas lingkungan dalam menyerap limbah atau zat buangan dari aktivitas tersebut tanpa menimbulkan kerusakan ekologis.

Di Kabupaten Konawe, daya dukung lingkungan hidup memiliki peran strategis mengingat pesatnya pertumbuhan kawasan industri, urbanisasi, dan eksploitasi sumber daya alam. Oleh karena itu, identifikasi kapasitas penyedia (supportive capacity) dan kapasitas tampung limbah (assimilative capacity) menjadi dasar penting dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Kapasitas penyedia lingkungan di Konawe saat ini masih tergolong tinggi, ditopang oleh ketersediaan sumber daya air (melalui sistem sungai dan bendungan), lahan pertanian, hutan lindung, dan cadangan mineral. Namun, tekanan terhadap sumber daya tersebut meningkat tajam seiring dengan berkembangnya aktivitas industri pengolahan nikel, pertambangan terbuka, dan perluasan kawasan permukiman. Di sisi lain, kapasitas daya tampung limbah lingkungan menunjukkan kecenderungan menurun akibat belum optimalnya sistem pengelolaan limbah domestik dan industri, terutama di kawasan sekitar Morosi, Lambuya, dan Unaaha.

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan aspek krusial dalam perencanaan pembangunan wilayah yang berkelanjutan di Kabupaten Konawe. Mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009, daya dukung lingkungan hidup



Gambar 2. 9 Peta Status Air Kab. Konawe

Sumber; KLHS RPJMD Kab. Konawe

Studi daya dukung dan daya tampung di beberapa kecamatan, seperti yang dilakukan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Konawe, menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang dan sumber daya alam perlu diatur secara ketat agar tidak melampaui ambang batas ekologis. Misalnya,

penggunaan lahan untuk sawah dan industri harus mempertimbangkan kapasitas air irigasi dari Bendungan Wawotobi dan Ameroro, serta perlindungan daerah resapan air di wilayah hulu seperti Rوتا dan Asinua.

Penting pula dicatat bahwa aspek daya dukung tidak hanya terbatas pada kuantitas sumber daya, tetapi juga kualitasnya. Pencemaran sungai dan tanah akibat limbah domestik dan industri perlu ditangani secara sistematis melalui peningkatan pengawasan, penyediaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), serta integrasi kebijakan pembangunan dengan prinsip lingkungan hidup.

Untuk menjamin keberlanjutan pembangunan di Konawe, Pemerintah Daerah perlu menyusun kebijakan pemanfaatan ruang dan sumber daya alam yang berbasis data daya dukung dan daya tampung secara berkala. Rencana tata ruang dan RPJMD harus secara eksplisit mengintegrasikan aspek lingkungan, tidak hanya sebagai pelengkap administratif, tetapi sebagai fondasi utama dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan pelestarian ekologi.

Dengan pendekatan ini, pembangunan Kabupaten Konawe dapat tetap tumbuh secara progresif, namun tetap dalam batas kemampuan alam mendukung kehidupan yang sehat, produktif, dan berkelanjutan—baik bagi generasi sekarang maupun masa depan.

B. Daya Dukung Pangan

Status daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk menyediakan pangan ditentukan oleh ketersediaan pangan dan kebutuhan pangan penduduk. Hasil analisis menunjukkan bahwa total potensi ketersediaan Pangan sebesar 288.137.464.990,33 Kkal mampu mendukung kebutuhan Pangan 130.791 jiwa (ambang batas populasi penduduk Kabupaten Konawe), sedangkan total kebutuhan pangan sebesar 202.101.376.000 kkal dengan jumlah populasi eksisting Kabupaten Konawe sebanyak 257.714 jiwa (BPS, 2022).

Hasil analisis menunjukkan bahwa Kabupaten Konawe memiliki potensi akan surplus ketersediaan pangan dengan total luas wilayah surplus sebesar 436.294,42 ha atau 82,72%, sedangkan luas wilayah defisit pangan sebesar 91.159,51 ha atau 17,28% dari total luas wilayah Kabupaten Konawe. Beberapa kecamatan yang mengalami surplus yaitu; Kecamatan Abuki, Anggaberu, Asinua, Lambuya, Latoma, Meluhu, Morosi, Onembute, Padangguni, Puriala dan Routa. Sedangkan wilayah yang memiliki kondisi akan status defisit pangan diantaranya yaitu Amonggedo, Anggalomoare, Besulutu, Bondoala, Kapoiala, Sampara, Soropia, Tonggauna, Uepai, Unaaha, Wawotobi, Wonggeduku dan Wonggeduku Barat. Secara rinci hasil analisis neraca status dan daya dukung pangan Kabupaten Konawe disajikan pada tabel dibawah ini

Tabel 2. 3 Daya Dukung dan Daya Tampung Indikatif Status Pangan Kabupaten Konawe

NO	KECAMATAN	Model Populasi Pergrid	DDDTLH INDIKATIF PENYEDIAAN PANGAN KABUPATEN KONAWE									TOTAL LUAS
			KETERSEDIAAN (SUPPLY)	KEBUTUHAN (DEMAND)	SELISIH KEBUTUHAN	AMBANG BATAS	SELISIH	LUAS WILAYAH SURPLUS		LUAS WILAYAH DEFISIT		
			(jiwa)	(kkal)	(kkal)	(kkal)	jiwa	jiwa	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)
1	ABUKI	8.514	11.124.297.668,86	6.681.361.500	4.442.936.168,86	13.903	5.389	16.163,18	3,06%	4.191,81	0,79%	20.354,99
2	AMONGGEDO	11.326	7.949.942.918,71	8.888.078.500	(938.135.581,29)	9.975	(1.351)	10.029,67	1,90%	5.136,87	0,97%	15.166,54
3	ANGGABERI	7.344	7.574.194.975,68	5.763.204.000	1.810.990.975,68	9.443	2.099	10.590,19	2,01%	3.871,14	0,73%	14.461,34
4	ANGGALOMOARE	4.790	817.204.087,20	3.758.952.500	(2.941.748.412,80)	1.023	(3.767)	853,96	0,16%	584,12	0,11%	1.438,08
5	ASINUA	3.145	12.385.550.136,20	2.468.038.750	9.917.511.386,20	15.874	12.729	19.392,47	3,68%	2.029,93	0,38%	21.422,39
6	BESULUTU	8.852	5.747.835.405,10	6.946.607.000	(1.198.771.594,89)	7.130	(1.722)	6.048,65	1,15%	3.443,09	0,65%	9.491,74
7	BONDOALA	5.073	2.497.076.502,30	3.981.036.750	(1.483.960.247,70)	3.100	(1.973)	2.376,64	0,45%	1.424,83	0,27%	3.801,47
8	KAPOIALA	5.639	2.190.885.988,42	4.425.205.250	(2.234.319.261,58)	2.792	(2.847)	2.216,18	0,42%	1.104,18	0,21%	3.320,37
9	KONAWE	9.868	1.330.773.683,92	7.743.913.000	(6.413.139.316,08)	1.699	(8.169)	485,92	0,09%	2.063,04	0,39%	2.548,96
10	LALONGGASUMEETO	5.426	2.024.763.980,60	4.258.053.500	(2.233.289.519,39)	2.436	(2.990)	2.287,36	0,43%	1.145,72	0,22%	3.433,08
11	LAMBUYA	7.491	6.622.300.696,48	5.878.562.250	743.738.446,48	8.453	962	6.838,20	1,30%	4.236,05	0,80%	11.074,25
12	LATOMA	2.998	45.923.817.122,01	2.352.680.500	43.571.136.622,01	58.424	55.426	78.703,31	14,92%	2.100,30	0,40%	80.803,61
13	MELUHU	5.715	7.722.057.392,79	4.484.846.250	3.237.211.142,79	9.528	3.813	11.090,95	2,10%	3.368,09	0,64%	14.459,04
14	MOROSI	6.044	4.782.738.021,95	4.743.029.000	39.709.021,95	5.982	(62)	4.208,31	0,80%	3.870,50	0,73%	8.078,82
15	ONEMBUTE	7.277	8.026.672.228,18	5.710.625.750	2.316.046.478,18	10.256	2.979	10.449,58	1,98%	4.020,08	0,76%	14.469,66
16	PADANGGUNI	9.169	8.892.038.848,18	7.195.372.750	1.696.666.098,18	11.205	2.036	11.391,18	2,16%	4.335,07	0,82%	15.726,25
17	PONDIDAHA	12.756	5.561.815.324,57	10.010.271.000	(4.448.455.675,43)	7.023	(5.733)	4.642,85	0,88%	5.235,12	0,99%	9.877,97
18	PURIALA	9.370	8.185.256.892,32	7.353.107.500	832.149.392,32	10.356	986	7.444,54	1,41%	6.742,13	1,28%	14.186,67
19	ROUTA	3.448	102.192.258.958,69	2.705.818.000	99.486.440.958,69	129.151	125.703	201.195,25	38,14%	90,02	0,02%	201.285,27
20	SAMPARA	9.143	2.967.175.804,04	7.174.969.250	(4.207.793.445,96)	3.702	(5.441)	3.860,53	0,73%	1.112,50	0,21%	4.973,03
21	SOROPIA	8.999	3.115.304.764,17	7.061.965.250	(3.946.660.485,83)	3.769	(5.230)	2.816,01	0,53%	2.365,34	0,45%	5.181,34
22	TONGAUNA	17.826	11.193.426.086,74	13.988.953.500	(2.795.527.413,26)	14.053	(3.773)	11.349,68	2,15%	7.730,40	1,47%	19.080,08
23	UEPAI	14.720	6.564.451.266,45	11.551.520.000	(4.987.068.733,55)	8.378	(6.342)	6.910,93	1,31%	4.450,33	0,84%	11.361,26
24	UNAAHA	25.896	1.337.547.220,18	20.321.886.000	(18.984.338.779,82)	1.699	(24.197)	168,50	0,03%	2.495,13	0,47%	2.663,64
25	WAWOTOB	23.478	5.261.720.064,55	18.424.360.500	(13.162.640.435,45)	6.847	(16.631)	2.550,90	0,48%	6.500,57	1,23%	9.051,46
26	WONGGEDUKU	13.840	3.911.409.573,43	10.860.940.000	(6.949.530.426,57)	5.016	(8.824)	2.082,77	0,39%	4.205,30	0,80%	6.288,07
27	WONGGEDUKU BARAT	9.389	2.234.949.378,59	7.368.017.750	(5.133.068.371,41)	2.873	(6.516)	146,71	0,03%	3.307,88	0,63%	3.454,59
	GRAND TOTAL	257.536	288.137.464.990,33	202.101.376.000	86.036.088.990,34	364.090	106.554	436.294,42	82,72%	91.159,55	17,28%	527.453,97

Sumber: KLHS RPJMD Konawe Tahun 2025-2029

4. Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

Ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan merupakan pilar penting dalam menjamin keberlangsungan hidup masyarakat serta menopang pembangunan yang berkelanjutan. Ketiganya saling terkait dan membentuk satu kesatuan sistem yang mendukung ketahanan daerah, khususnya dalam menghadapi perubahan iklim, dinamika ekonomi global, dan pertumbuhan kebutuhan dasar penduduk. Dalam konteks Kabupaten Konawe, ketiga aspek ini menunjukkan perkembangan signifikan meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan.

a. Ketahanan Energi

Kabupaten Konawe memiliki potensi energi terbarukan yang cukup besar, khususnya dari energi surya, biomassa, dan tenaga air. Intensitas penyinaran matahari yang tinggi, berkisar antara 4,5–5,0 kWh/m² per hari, menjadikan Konawe sebagai lokasi yang potensial untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). potensi pembangunan PLTS skala menengah hingga besar di sekitar Bendungan Ameroro dengan kapasitas 48,81 MW bisa menjadi langkah awal yang strategis dalam mendukung transisi menuju energi bersih dan mandiri.

Selain itu, potensi biomassa dari limbah pertanian dan peternakan seperti jerami padi, tongkol jagung, sekam, serta kotoran sapi dan ayam juga dapat diolah menjadi briket padat, kompos, dan biogas untuk kebutuhan energi rumah tangga di wilayah pedesaan. Inisiatif ini dapat dikembangkan melalui program integrasi pertanian-peternakan yang melibatkan koperasi petani dan dukungan OPD teknis.

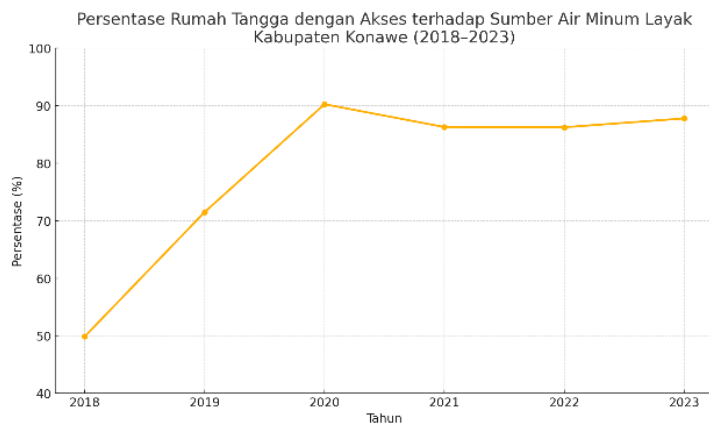
Meski demikian, pemanfaatan potensi energi air (hidro) dari aliran Sungai Konaweaha dan sejumlah bendungan seperti Bendungan Wawotobi dan Ameroro masih terbatas untuk energi listrik. Potensi pengembangan mikrohidro masih terbuka luas terutama di wilayah perdesaan terpencil.

b. Ketahanan Air

Akses rumah tangga terhadap sumber air minum layak di Kabupaten Konawe mengalami peningkatan yang sangat signifikan dalam lima tahun terakhir. Jika pada tahun 2018 baru 49,88% rumah tangga memiliki akses air minum layak, maka pada tahun 2023 capaian ini meningkat menjadi

87,8%. Hal ini menunjukkan efektivitas pembangunan infrastruktur air bersih serta pengelolaan sumber daya air yang lebih merata dan inklusif.

Grafik 2. 6 Persentase Rumah tangga dengan Akses air minum



Keberadaan bendungan strategis seperti Bendungan Wawotobi dan Bendungan Ameroro menjadi tulang punggung penyediaan air, baik untuk irigasi maupun sebagai cadangan air baku domestik. Bendungan

Wawotobi yang mengandalkan debit Sungai Konaweheha mampu mengairi hingga ±16.572 ha lahan pertanian, serta menyimpan cadangan air pada musim kemarau. Sungai-sungai besar lainnya seperti Sungai Lahambuti dan Sungai Motaha juga memiliki peran penting dalam mendukung irigasi, konservasi, dan penyediaan air baku untuk masyarakat.

c. Kemandirian dan Ketahanan Pangan

Konawe merupakan salah satu lumbung pangan utama di Sulawesi Tenggara dengan produksi utama pada sektor pertanian padi, jagung, serta subsektor peternakan dan perikanan. Namun, berdasarkan indikator ketahanan pangan, terdapat dinamika yang patut menjadi perhatian.

Grafik 2. 7 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan

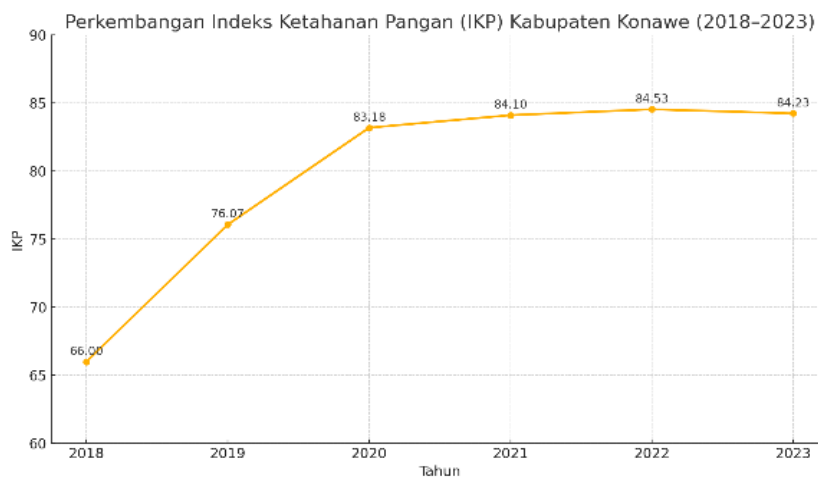


Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU) sempat mengalami lonjakan pada tahun 2022 hingga mencapai 14,57% atau sekitar 38.600 penduduk

mengalami kekurangan konsumsi pangan. Angka ini menurun pada tahun 2023 menjadi 8,44% dan kembali turun pada 2024 menjadi 8,15%, mencerminkan pemulihan sistem distribusi pangan dan peningkatan intervensi gizi masyarakat.

Jumlah penduduk undernourished juga menunjukkan penurunan signifikan dari 38.600 jiwa pada 2022 menjadi 22.748 jiwa pada 2023. Penurunan ini dipengaruhi oleh intervensi program perlindungan sosial, diversifikasi pangan, serta penguatan akses masyarakat terhadap pangan bergizi dan terjangkau.

Grafik 2. 8 Indeks Ketahanan Pangan Kab. Konawe



Sumber; Badan Pangan Nasional

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Konawe terus meningkat dari skor 66 (peringkat 308 nasional) pada 2018 menjadi 84,23 (peringkat 75 nasional) pada tahun 2023.

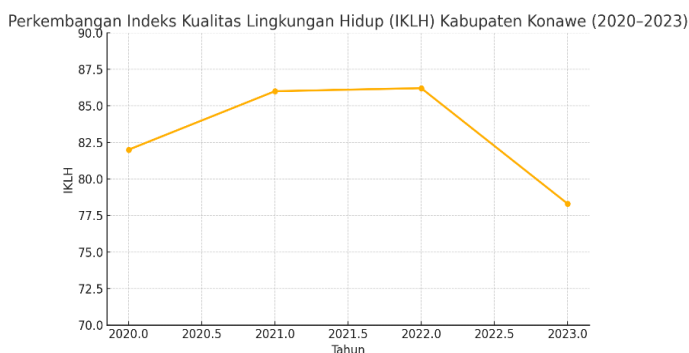
Kabupaten Konawe secara konsisten berada pada kelompok IKP 6, yaitu kategori daerah dengan ketahanan pangan tinggi. Hal ini menunjukkan keberhasilan pembangunan sektor pertanian, distribusi pangan, dan pemanfaatan sumber daya alam lokal dalam menjamin kecukupan pangan masyarakat.

Ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan Kabupaten Konawe telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan akses energi bersih dan layak, pengelolaan sumber daya air yang lebih optimal, serta peningkatan ketahanan pangan masyarakat menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Namun demikian, RPJMD 2025–2029 perlu memperkuat sinergi antar sektor, mempercepat investasi energi terbarukan dan sistem irigasi terpadu, serta memperkuat cadangan dan distribusi pangan lokal guna menjaga stabilitas ketahanan daerah dalam menghadapi berbagai risiko ke depan.

5. Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup merupakan pilar penting dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Kabupaten Konawe menunjukkan kemajuan positif dalam upaya menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungannya. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kondisi ini adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang dihitung berdasarkan tiga komponen utama: Indeks Pencemaran Air, Indeks Pencemaran Udara, dan Indeks Tutupan Hutan.

Grafik 2. 9 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup



sumber; Dinas Lingkungan Hidup Konawe

Dalam periode 2020–2023, nilai IKLH Kabupaten Konawe berada pada kisaran yang relatif tinggi. Rata-rata nilai IKLH selama empat tahun tersebut adalah 83,13, menunjukkan bahwa secara

umum kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Konawe berada pada kategori baik. Namun, penurunan nilai IKLH pada tahun 2023 perlu menjadi perhatian serius, mengingat potensi tekanan an lingkungan akibat aktivitas industri dan pertambangan yang terus berkembang di wilayah ini.

6. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Kabupaten Konawe memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap berbagai bentuk bencana alam dan krisis lingkungan, baik yang bersifat geologis, hidrometeorologis, maupun akibat tekanan perubahan iklim global. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim menjadi faktor krusial yang harus dikelola secara sistematis, terukur, dan berbasis data. Indikator utama yang digunakan untuk menganalisis kondisi resiliensi ini meliputi: Indeks Risiko Bencana (IRBI), Indeks Kapasitas Daerah (IKD), serta intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Berdasarkan Tabel IRBI Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 yang dirilis oleh BNPB, Kabupaten Konawe memiliki skor Indeks Risiko Bencana sebesar 151,67, yang menempatkannya dalam kategori risiko tinggi. Skor ini menunjukkan bahwa potensi terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, serta kebakaran hutan dan lahan cukup besar, dan dapat berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan infrastruktur daerah.

Namun, apabila dikaji lebih lanjut melalui Indeks Kapasitas Daerah (IKD) tahun 2021, Kabupaten Konawe hanya memperoleh skor 0,31 atau kategori rendah, jauh di bawah rata-rata ambang batas kapasitas ideal. Skor ini mencerminkan masih terbatasnya kapasitas institusi daerah dalam hal regulasi, koordinasi kelembagaan, ketersediaan sumber daya manusia terlatih, sarana-prasarana darurat bencana, serta efektivitas sistem peringatan dini di tingkat lokal.

Tabel 2. 4 Hasil Penilaian Indeks Kapasitas Daerah Prov Sultra

KABUPATEN/KOTA	NILAI IKD KABUPATEN / KOTA	SKOR KABUPATEN/ KOTA	NILAI IKD PROVINSI	SKOR PROVINSI	INDEKS KAPASITA S	KELAS
KOTA BAUBAU	0,28	0,23	0,34	0,28	0,253	RENDAH
BOMBANA	0,49	0,41	0,34	0,28	0,358	SEDANG
KONAWA SELATAN	0,38	0,32	0,34	0,28	0,303	RENDAH
MUNA	0,2	0,17	0,34	0,28	0,213	RENDAH
MUNA BARAT	0,2	0,17	0,34	0,28	0,213	RENDAH
KONAWA UTARA	0,4	0,33	0,34	0,28	0,313	RENDAH
BUTON UTARA	0,21	0,18	0,34	0,28	0,218	RENDAH
BUTON	0,21	0,18	0,34	0,28	0,218	RENDAH
BUTON SELATAN	0,27	0,23	0,34	0,28	0,248	RENDAH
BUTON TENGAH	0,29	0,24	0,34	0,28	0,258	RENDAH
KONAWA	0,2	0,17	0,34	0,28	0,213	RENDAH
KOLAKA UTARA	0,2	0,17	0,34	0,28	0,213	RENDAH
KONAWA KEPULAUAN	0,2	0,17	0,34	0,28	0,213	RENDAH
WAKATOBI	0,3	0,25	0,34	0,28	0,263	RENDAH
KOLAKA	0,3	0,25	0,34	0,28	0,263	RENDAH
KOTA KENDARI	0,54	0,45	0,34	0,28	0,383	SEDANG
KOLAKA TIMUR	0,3	0,25	0,34	0,28	0,263	RENDAH

Sumber ; Buku IRBI, 2024

Kondisi ini menciptakan kesenjangan signifikan antara tingkat risiko dan kapasitas adaptasi, yang jika tidak segera diintervensi, dapat memperbesar dampak bencana dan memperlambat proses pemulihan pasca-krisis.

Krisis Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Salah satu tantangan utama Kabupaten Konawe dalam menghadapi perubahan iklim adalah tingginya emisi gas rumah kaca (GRK), terutama dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Berdasarkan hasil kajian risiko iklim tahun 2024, Indeks Risiko Iklim Kabupaten Konawe mencapai 157,8 dan dikategorikan sangat tinggi. Emisi karbon dari sektor kehutanan saja mencapai 6,8 ton CO₂e per kapita per tahun, hampir tiga kali lipat dari batas aman yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris (2,3 ton CO₂e/kapita/tahun).



Gambar 2. 10 Analisis Emisi Karbon

Sumber : www.globalforestwatch.org

Sepanjang periode 2001–2024, Kabupaten Konawe telah kehilangan tutupan hutan seluas 63.201 hektare dan melepaskan setidaknya 42,4 juta ton CO₂e ke atmosfer. Deforestasi ini dipicu oleh ekspansi perkebunan, pertambangan terbuka, pembangunan infrastruktur, dan lemahnya sistem pengawasan perizinan lingkungan. Tahun 2016 tercatat sebagai puncak deforestasi tertinggi, mencapai 5.169 hektare dalam satu tahun.

2.1.1.2 Aspek Demografi

Demografi merupakan elemen kunci dalam perencanaan pembangunan daerah karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar penduduk, potensi tenaga kerja, dan daya dukung sosial ekonomi wilayah. Analisis demografi tidak hanya mencakup data kuantitatif jumlah dan pertumbuhan penduduk, tetapi juga memahami struktur, distribusi, serta perubahan dinamis yang terjadi akibat kelahiran, kematian, dan migrasi. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Konawe, pemahaman yang menyeluruh terhadap aspek demografi sangat penting

dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan daerah lima tahun ke depan.

a. Laju Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan data BPS Kabupaten Konawe Dalam Angka 2024, jumlah penduduk Kabupaten Konawe pada tahun 2024 tercatat sebanyak 267.139 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,79%. Meskipun angka ini menunjukkan pertumbuhan yang cukup stabil dan terkendali secara umum, terdapat disparitas signifikan antar wilayah kecamatan. Misalnya, Kecamatan Routa mencatat laju pertumbuhan tertinggi sebesar 6,05%, disusul Bondoala (3,60%) dan Morosi (3,31%). Sebaliknya, Kecamatan Latoma justru mengalami pertumbuhan negatif (-0,09%) dan tidak mengalami lonjakan yang signifikan dari tahun ke tahun hal ini disebabkan oleh tingginya migrasi keluar serta keterbatasan sumber daya alam yang membatasi peluang ekonomi masyarakat.

Tabel 2. 5 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2024

No	Kecamatan	Penduduk (2024)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
1	Soropia	9372	0,47
2	Lalonggasumeeto	5958	1,64
3	Sampara	9764	0,69
4	Bondoala	6108	3,60
5	Besulutu	8873	1,81
6	Kapoiala	7374	2,39
7	Anggalomoare	5394	1,47
8	Morosi	8024	3,31
9	Lambuya	7897	1,43
10	Uepai	14835	2,23
11	Puriala	9730	1,83
12	Onembute	7648	1,16
13	Pondidaha	13588	2,43
14	Wonggeduku	14210	1,80
15	Amonggedo	11417	2,33
16	Wonggeduku Barat	9429	1,43
17	Wawotobi	22839	1,02
18	Meluhu	5887	2,05
19	Konawe	10188	1,95
20	Unaaha	24776	1,38
21	Anggaberri	7128	2,34
22	Abuki	8635	2,53
23	Latoma	3178	-0,09
24	Tongauna	11343	1,27
25	Asinua	3144	1,13
26	Padangguni	8737	0,09
27	Tongauna Utara	7212	2,57
28	Routa	4451	6,05
Kabupaten Konawe		267.139	1,79

(Sumber: Hasil Olah Data BPS Kabupaten Konawe Dalam Angka 2025)

b. Jumlah dan Struktur Penduduk

Struktur penduduk merupakan pengelompokan jumlah penduduk berdasarkan kategori atau data tertentu yang dapat memberikan gambaran mengenai komposisi penduduk suatu wilayah. Dalam hal ini, struktur penduduk Kabupaten Konawe disajikan berdasarkan dua kelompok utama, yaitu umur dan jenis kelamin. Pengelompokan tersebut bertujuan untuk mengetahui proporsi penduduk pada setiap rentang usia serta perbandingan antara penduduk laki-laki dan perempuan. Informasi ini sangat penting dalam perencanaan pembangunan, terutama dalam menentukan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerja di wilayah tersebut.

Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Konawe Tahun 2024

Kelompok Umur (Tahun)	Jenis Kelamin		Total (Jiwa)
	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	
0-4	10001	9217	19218
5-9	13230	12058	25288
10-14	12825	11697	24522
15-19	12638	11986	24624
20-24	12905	12109	25014
25-29	11812	10495	22307
30-34	10049	9398	19447
35-39	10139	9462	19601
40-44	10070	9636	19706
45-49	8729	8619	17348
50-54	7352	7037	14389
55-59	5863	5588	11451
60-64	7399	3907	11306
65-69	3259	3071	6330
70-74	2133	2123	4526
75+	2569	2390	4959
Jumlah	137.895	129.244	267.139

(Sumber: Data BPS Kabupaten Konawe Dalam Angka 2025)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Konawe pada tahun 2024 memiliki total penduduk sebanyak 267139 jiwa yang terdiri dari 137.895 jiwa laki-laki (51,6%) dan 129.244 jiwa perempuan (48,4%). Tidak Terdapat ketimpangan gender yang cukup signifikan dengan jumlah penduduk laki-laki dari jumlah penduduk perempuan. Jika dilihat berdasarkan kelompok umur, konsentrasi penduduk tertinggi berada pada kelompok umur 5-9 tahun dengan jumlah 25288 jiwa (9,4% dari total

penduduk), diikuti oleh kelompok umur 20-24 tahun sebanyak 25014 jiwa (9,36%), dan kelompok umur 15-19 tahun sebanyak 24624 jiwa (9,08%). Hal ini menunjukkan bahwa struktur penduduk Kabupaten Konawe didominasi oleh penduduk usia produktif. Kelompok umur dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah kelompok umur 70-74 tahun dengan 4256 jiwa (1,5%) dan kelompok umur 75+ tahun dengan 4959 jiwa (1,85%). Data ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Konawe memiliki potensi tenaga kerja yang besar dengan mayoritas penduduk berada dalam rentang usia produktif antara 20-54 tahun.

c. **Distribusi Penduduk**

Distribusi penduduk adalah persebaran atau pola pemukiman penduduk di suatu wilayah geografis tertentu. Pola ini menggambarkan bagaimana manusia tersebar di berbagai lokasi, baik itu di wilayah perkotaan, pedesaan, pesisir, atau pegunungan. Distribusi penduduk dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi geografis, iklim, ketersediaan sumber daya alam, peluang ekonomi, infrastruktur, serta faktor historis dan budaya. Di beberapa wilayah, penduduk mungkin terkonsentrasi padat di daerah-daerah tertentu seperti kota besar atau wilayah pesisir yang subur, sementara di wilayah lain seperti gurun, pegunungan tinggi, atau hutan belantara cenderung jarang penduduknya. Pola distribusi penduduk ini memiliki implikasi penting bagi perencanaan pembangunan, penyediaan layanan publik, pengelolaan lingkungan, dan kebijakan sosial-ekonomi suatu negara.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Konawe 2024 presentase penduduk terhadap kepadatan penduduk suatu wilayah dapat dilihat pada sajian tabel berikut ini.

Tabel 2. 7 Presentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Konawe Tahun 2023

No	Kecamatan	Presentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk Per Km ²
1	Soropia	3.51	168
2	Lalonggasumeeto	2.23	174
3	Sampara	3.66	209
4	Bondoala	2.29	186
5	Besulutu	3.32	82
6	Kapoiuala	2.76	206

No	Kecamatan	Presentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk Per Km ²
7	Anggalomoare	2.02	279
8	Morosi	3.00	59
9	Lambuya	2.96	82
10	Uepai	5.55	92
11	Puriala	3.64	62
12	Onembute	2.86	57
13	Pondidaha	5.09	206
14	Wonggeduku	5.32	193
15	Amonggedo	4.27	64
16	Wonggeduku Barat	3.53	249
17	Wawotobi	8.55	170
18	Meluhu	2.20	53
19	Konawe	3.81	555
20	Unaaha	9.27	829
21	Anggaberi	2.67	58
22	Abuki	3.23	47
23	Latoma	1.19	2
24	Tongauna	4.25	238
25	Asinua	1.18	10
26	Padangguni	3.27	42
27	Tongauna Utara	2.70	46
28	Routa	1.67	2
Kabupaten Konawe		100	44

(Sumber: Data BPS Kabupaten Konawe Dalam Angka 2024)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Konawe tersebar secara tidak merata di setiap kecamatan. Kecamatan Unaaha memiliki persentase penduduk tertinggi sebesar 9,27%, disusul oleh Wawotobi (8,55%) dan Wonggeduku (5,32%), yang menunjukkan bahwa daerah-daerah ini menjadi pusat konsentrasi penduduk. Sebaliknya, Kecamatan Asinua (1,18%), Latoma (1,19%), dan Routa (1,67%) memiliki persentase penduduk paling rendah.

Dari segi kepadatan penduduk, Kecamatan Unaaha juga mencatat angka tertinggi, yaitu 829 jiwa per km², diikuti oleh Konawe (555 jiwa/km²) dan Anggalomoare (279 jiwa/km²). Hal ini mengindikasikan bahwa wilayah-wilayah tersebut tidak hanya memiliki jumlah penduduk besar, tetapi juga ruang yang lebih padat dihuni. Sebaliknya, kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Latoma dan Routa, masing-masing hanya 2 jiwa per km², menunjukkan karakteristik wilayah yang masih sangat jarang dihuni atau memiliki luas wilayah yang besar dengan jumlah penduduk yang sedikit.

Secara keseluruhan, meskipun jumlah penduduk Kabupaten Konawe tersebar di seluruh kecamatan, terdapat perbedaan signifikan dalam hal konsentrasi dan kepadatan penduduk antar wilayah. Faktor seperti perkembangan infrastruktur, aksesibilitas, dan pusat-pusat ekonomi kemungkinan besar memengaruhi pola sebaran dan kepadatan tersebut.

d. Proyeksi Penduduk

Proyeksi penduduk Kabupaten Konawe menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil. Dari 269.550 jiwa pada tahun 2023, penduduk diperkirakan meningkat menjadi 373.702 jiwa pada tahun 2045, dengan laju pertumbuhan tahunan rata-rata sekitar 1,5%. Grafik berikut menggambarkan tren proyeksi tersebut:

Grafik 2. 10 Proyeksi Penduduk Kabupaten Konawe



Sumber : diolah

Tren ini memperlihatkan kebutuhan perencanaan yang adaptif dan responsif dalam penyediaan kebutuhan dasar seperti perumahan, sanitasi, air bersih, layanan pendidikan, dan kesehatan yang memadai.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

a. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makroekonomi yang penting dan biasanya diukur melalui perbandingan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) dari tahun ke tahun. Indikator ini memberikan gambaran mengenai perkembangan dan pembangunan suatu wilayah. Di Kabupaten Konawe, pertumbuhan ekonomi didukung oleh sektor industri pengolahan serta sektor pertanian, kehutanan,

dan perikanan. Selama periode tahun 2020 hingga 2024, perekonomian Kabupaten Konawe terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2020, nilai PDRB atas dasar harga berlaku tercatat sebesar 9.514,36 miliar rupiah, dan mengalami pertumbuhan signifikan hingga mencapai 20.747,72 miliar rupiah pada tahun 2024. Data ini menunjukkan adanya tren positif dalam pembangunan ekonomi di wilayah tersebut.

Tabel 2. 8 PDRB ADHB Lapangan Usaha Kabupaten Konawe Tahun 2020-2024 (Dalam Miliar Rupiah)

No.	Lapangan Usaha	2020 (miliar rupiah)	2021 (miliar rupiah)	2022 (miliar rupiah)	2023 (miliar rupiah)	2024 (miliar rupiah)
-1	-2	-4	-5	-6	-7	-7
A.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku					
I.	SEKTOR PRIMER	3.590,48	3.714,95	3.953,35	16.016,13	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.560,61	2.652,33	2.751,03	2.916,03	3.236,28
B	Pertambangan dan Penggalian	1.029,87	1.062,62	1.202,32	13.100,10	1.241,44
II.	SEKTOR SEKUNDER	3.694,15	4.570,85	6.928,58	10.405,31	
C	Industri Pengolahan	2.453,15	3.372,38	5.600,61	9.006,24	10.813,43
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,27	3,5	4,07	4,43	4,63
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,53	8,43	8,39	8,87	8,96
F	Konstruksi	1229,2	1186,54	1315,51	1385,77	1.473,42
III	SEKTOR TERSIER	3.030,24	3.127,54	3.381,34	3.663,70	
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	961,18	1029,82	1156,29	1300,73	1400,70
H	Transportasi dan Pergudangan	97,55	98,64	108,59	124,21	132,02
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	46,23	49,53	55,14	58,55	59,56
J	Informasi dan Komunikasi	73,95	72,2	74	74	79,53
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	158,6	171,42	188,13	204,71	208,92
L	Real Estat	182,32	183,81	195,02	199,85	202,92
m,n	Jasa Perusahaan	13,18	13,62	15,52	16,7	16,80
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	754,51	748,12	776,65	823,68	965,71
P	Jasa Pendidikan	504,2	510,3	554,02	594,51	624,35
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	140,04	148,9	153,17	155,9	164,55
r,s,t,u	Jasa lainnya/Other Services Activities	98,48	101,18	104,81	110,86	114,50
Total PDRB Harga Berlaku		9.514,36	10.362,23	11.542,29	14.269,55	20.747,72

Sumber; BPS Konawe

Berdasarkan tabel *PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Lapangan Usaha Kabupaten Konawe Tahun 2020–2024*, dapat dinyatakan bahwa total PDRB mengalami peningkatan signifikan dari Rp9.514,36 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp20.747,72 miliar pada tahun 2024. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor sekunder, khususnya industri pengolahan, yang melonjak dari Rp2.453,15 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp10.813,43 miliar pada

tahun 2024. Sektor pertambangan dan penggalian juga menunjukkan lonjakan besar pada tahun 2023 sebesar Rp13.100,10 miliar, meskipun mengalami penurunan kembali di 2024.

Sementara itu, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh stabil dari Rp2.560,61 miliar pada 2020 menjadi Rp3.236,28 miliar pada 2024. Di sektor tersier, pertumbuhan terlihat cukup merata, dengan kontribusi tertinggi berasal dari perdagangan besar dan eceran, serta administrasi pemerintahan. Secara keseluruhan, pertumbuhan PDRB Konawe didorong kuat oleh pengembangan industri pengolahan dan aktivitas pertambangan, menandakan pergeseran struktur ekonomi ke arah sektor-sektor produktif dan bernilai tambah tinggi.

Tabel 2. 9 PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Konawe Tahun 2019-2024

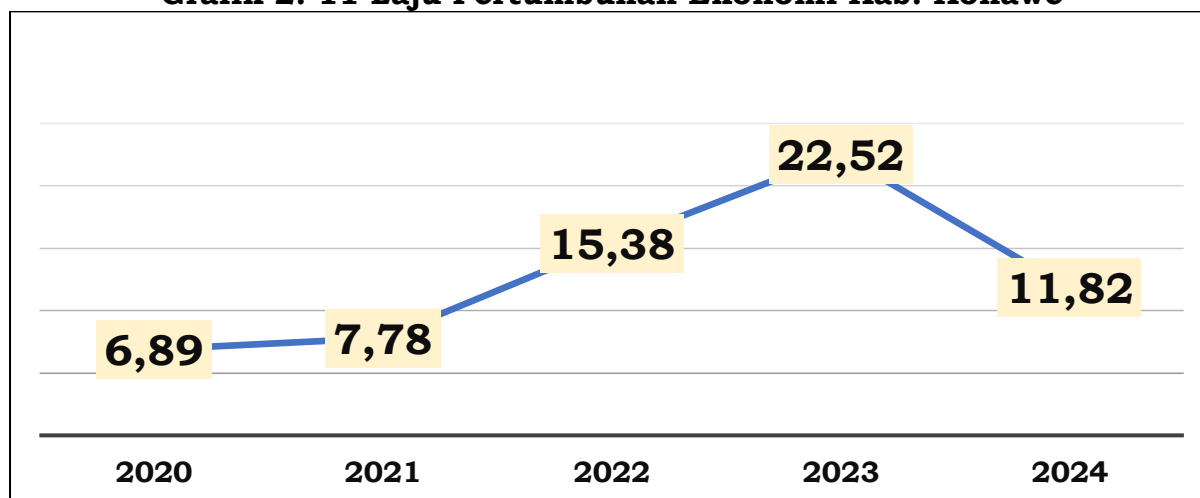
PDRB Pengeluaran	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran di Kabupaten Konawe					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsumsi Rumah Tangga	58,53	54,34	50,52	43,90	37,77	36,11
Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT)	1,19	1,07	0,99	0,88	0,78	0,79
Konsumsi Pemerintah	16,11	13,63	12,07	9,89	8,34	8,52
Pembentukan Modal Tetap Bruto	33,09	29,45	28,84	24,71	20,48	19,09
Perubahan Inventori	0,02	0,01	0,02	0,02	0,89	0,57
Net Ekspor	-8,94	1,50	7,56	20,46	31,75	34,92
PDRB	100	100	100	100	100	100

(Sumber: Data Diolah dari KDA Kabupaten Konawe)

Berdasarkan data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut pengeluaran di Kabupaten Konawe tahun 2019–2024, terlihat adanya perubahan struktur kontribusi antar komponen pengeluaran. Konsumsi rumah tangga yang awalnya mendominasi dengan kontribusi sebesar 58,53% pada tahun 2019 mengalami penurunan konsisten hingga mencapai 36,11% pada tahun 2024. Demikian pula, konsumsi pemerintah dan pembentukan modal tetap bruto menunjukkan tren menurun, masing-masing dari 16,11% dan 33,09% pada tahun 2019 menjadi 8,52% dan 19,09% pada tahun 2024. Sebaliknya, komponen net ekspor mengalami lonjakan signifikan dari -8,94% pada tahun 2019 menjadi 34,92% pada tahun 2024, mengindikasikan peningkatan peran sektor ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Perubahan ini menunjukkan pergeseran orientasi ekonomi Konawe dari konsumsi domestik ke perdagangan luar daerah.

Grafik 2. 11 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Konawe



(Sumber : BPS Konawe, 2024)

Grafik diatas menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe dari tahun 2020 hingga 2024. Data tersebut memperlihatkan tren pertumbuhan yang fluktuatif. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi berada di angka 6,89% dan mengalami sedikit peningkatan menjadi 7,78% di tahun 2021. Pertumbuhan kemudian melonjak tajam menjadi 15,38% pada tahun 2022 dan mencapai puncaknya pada tahun 2023 sebesar 22,52%. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan signifikan menjadi 11,82%. Meskipun terjadi penurunan di tahun terakhir, laju pertumbuhan ekonomi Konawe secara umum menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan awal periode.

Dalam konteks penyusunan RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2025–2029, arah kebijakan pembangunan ekonomi perlu difokuskan pada upaya menjaga stabilitas pertumbuhan sambil memperluas dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Strategi yang akan dikembangkan mencakup: (1) diversifikasi ekonomi lokal dengan mendorong hilirisasi sektor pertanian, peternakan, dan perikanan; (2) penguatan konsumsi rumah tangga melalui pemberdayaan UMKM dan melibatkan masyarakat dalam rantai pasok industri besar; (3) pembangunan konektivitas wilayah antara pusat produksi rakyat dan pusat pertumbuhan industri; serta (4) pemanfaatan data mikro untuk memastikan program-program afirmatif menjangkau kelompok rentan dan wilayah tertinggal. Dengan pendekatan ini, pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Konawe ke depan diharapkan tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga berkualitas dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

b. Struktur Ekonomi

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan struktur perekonomian suatu daerah adalah distribusi kategori lapangan usaha berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara keseluruhan. Distribusi ini mencerminkan komposisi atau susunan kegiatan ekonomi yang berlangsung dalam sistem perekonomian daerah tersebut. Kategori lapangan usaha yang dominan atau paling diandalkan biasanya ditunjukkan oleh nilai persentase yang paling besar dalam struktur PDRB, dan hal ini dapat menjadi ciri khas dari perekonomian wilayah yang bersangkutan. Untuk menggambarkan struktur perekonomian tersebut, distribusi ekonomi dihitung berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga berlaku. Secara lengkap, distribusi PDRB yang mencerminkan struktur perekonomian Kabupaten Konawe selama lima tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 10 Peranan PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut lapangan usaha Kab. Konawe Tahun 2020-2024

No.	Lapangan Usaha	2020 %	2021 %	2022 %	2023 %	2024 %
-1	-2	-4	-5	-6	-7	-7
A.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku					
I.	SEKTOR PRIMER					
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24,71	22,98	19,26	15,98	15,60
B	Pertambangan dan Penggalan	9,94	9,21	8,49	7,16	5,98
II.	SEKTOR SEKUNDER					
C	Industri Pengolahan	24,54	29,22	39,21	49,21	52,12
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04
F	Konstruksi	11,45	11,40	9,27	7,56	7,10
III	SEKTOR TERSIER					
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,28	8,92	8,10	7,11	6,75
H	Transportasi dan Pergudangan	0,94	0,85	0,76	0,68	0,64
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,45	0,43	0,39	0,32	0,29
J	Informasi dan Komunikasi	0,71	0,63	0,52	0,41	0,38
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,53	1,49	1,32	1,12	1,01
L	Real Estat	1,76	1,59	1,37	1,09	0,98
m,n	Jasa Perusahaan	0,13	0,12	0,11	0,09	0,08
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,28	6,48	5,44	4,50	4,65
P	Jasa Pendidikan	4,87	4,42	3,88	3,25	3,01
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,35	1,29	1,07	0,85	0,79
r,s,t,u	Jasa lainnya/Other Services Activities	0,95	0,88	0,73	0,61	0,55
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

Sumber: BPS Konawe

Sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan kontribusi yang sangat signifikan. Pada tahun 2020, sektor ini menyumbang sebesar 24,54%, dan terus meningkat hingga mencapai 52,12% pada tahun 2024. Pertumbuhan pesat ini terutama didorong oleh ekspansi kawasan industri di Kecamatan Morosi yang berfokus pada pengolahan logam dasar. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri telah menjadi lokomotif utama perekonomian Kabupaten Konawe, sekaligus menandai pergeseran dari dominasi sektor primer ke sektor sekunder.

Sebaliknya, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menunjukkan tren penurunan kontribusi, dari 24,71% pada tahun 2020 menjadi 15,60% pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya pergeseran nilai tambah ekonomi dari kegiatan berbasis agraris menuju kegiatan industri. Meskipun demikian, sektor ini tetap memegang peranan penting sebagai penyedia lapangan kerja dan sumber penghidupan bagi masyarakat pedesaan.

Sektor pertambangan dan penggalian juga mengalami penurunan dari 9,94% pada tahun 2020 menjadi 5,98% pada tahun 2024. Penurunan ini dapat dikaitkan dengan berkurangnya peran kegiatan ekstraktif dalam struktur ekonomi, seiring meningkatnya peran hilirisasi di sektor industri pengolahan.

Sektor-sektor lain yang juga mengalami penurunan kontribusi terhadap PDRB antara lain sektor konstruksi (dari 11,45% menjadi 6,70%), perdagangan besar dan eceran (dari 9,28% menjadi 6,75%), dan administrasi pemerintahan (dari 7,28% menjadi 4,65%). Penurunan ini menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah lebih terkonsentrasi pada sektor industri, sementara sektor jasa dan pelayanan publik mengalami perlambatan kontribusi relatifnya.

Penurunan kontribusi juga tercatat pada sektor pendidikan (dari 4,87% menjadi 3,07%) dan kesehatan dan kegiatan sosial (dari 1,35% menjadi 0,75%), yang mengindikasikan perlunya penguatan kembali peran sektor-sektor sosial dalam mendukung kualitas hidup masyarakat.

Sektor-sektor lain seperti informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, serta jasa akomodasi dan makan minum menunjukkan stabilitas kontribusi dalam rentang rendah, namun tetap memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Secara keseluruhan, struktur ekonomi Kabupaten Konawe dalam lima tahun terakhir menunjukkan pola konsentrasi yang semakin tinggi pada sektor industri pengolahan. Meskipun hal ini mencerminkan keberhasilan dalam pengembangan kawasan industri dan hilirisasi sumber daya, ketergantungan terhadap satu sektor berisiko menimbulkan ketimpangan sektoral dan kerentanan terhadap guncangan ekonomi global. Oleh karena itu, perlu dilakukan diversifikasi ekonomi dan penguatan sektor-sektor lainnya, terutama sektor jasa dan primer, untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Konawe.

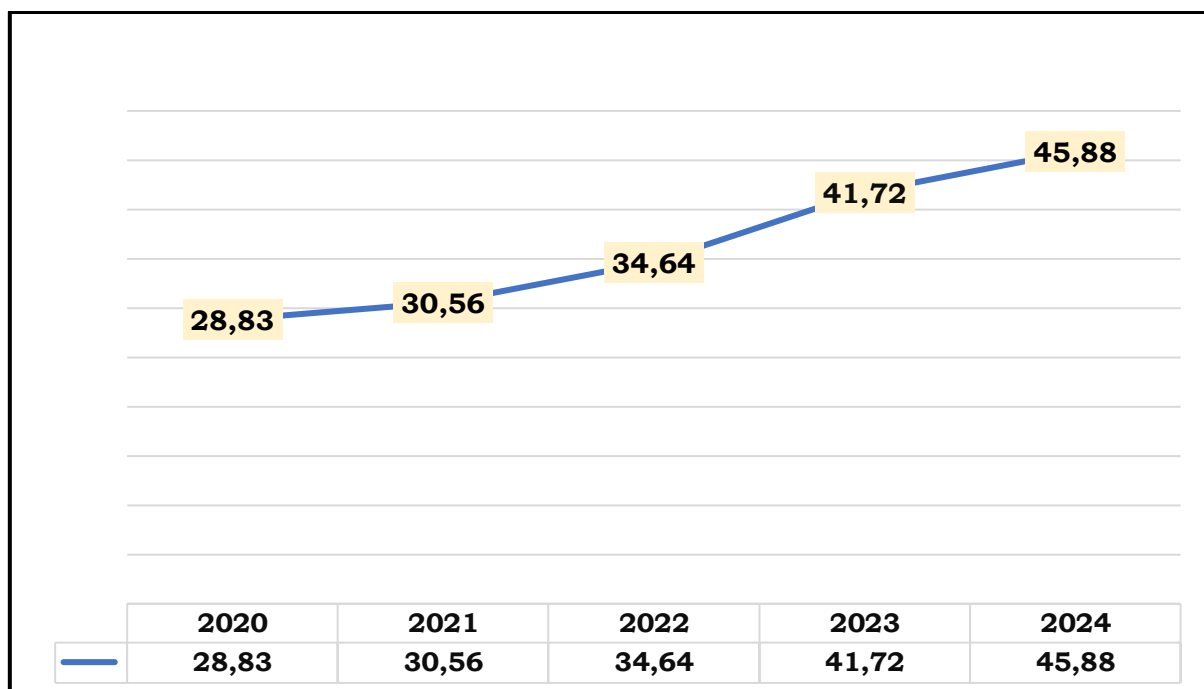
c. PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan salah satu indikator penting untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah. Indikator ini diperoleh dari hasil pembagian antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu daerah dengan jumlah penduduknya. Oleh karena itu, jumlah penduduk memiliki pengaruh langsung terhadap besar kecilnya nilai PDRB per kapita. Di sisi lain, nilai PDRB itu sendiri sangat dipengaruhi oleh potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang tersedia di wilayah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai PDRB rata-rata yang diterima oleh setiap penduduk dalam satu tahun berdasarkan harga yang berlaku pada tahun tersebut. Di Kabupaten Konawe, nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, nilai PDRB per kapita tercatat sebesar Rp28,83 juta per tahun, dan mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai Rp45,88 juta per tahun pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan adanya pertumbuhan ekonomi yang positif di wilayah tersebut dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Peningkatan nilai PDRB per kapita ini merupakan indikator makro yang menggembirakan karena menunjukkan bahwa produktivitas ekonomi daerah semakin besar. Namun demikian, nilai rata-rata ini tidak serta-merta mencerminkan distribusi yang merata antar penduduk. Masih terdapat tantangan dalam memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat diakses oleh seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok miskin dan rentan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Konawe ke depan akan fokus pada penguatan keterlibatan masyarakat lokal dalam rantai nilai ekonomi, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, serta pengembangan ekonomi kerakyatan yang mampu mendorong pemerataan pendapatan dan kesempatan kerja.

Dengan pendekatan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, diharapkan pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten Konawe tidak hanya mencerminkan kenaikan angka statistik, tetapi juga menjadi gambaran nyata peningkatan kesejahteraan seluruh penduduk secara berkelanjutan.

Grafik 2. 12 Perkembangan PDRB Per Kapita (dalam juta rupiah)

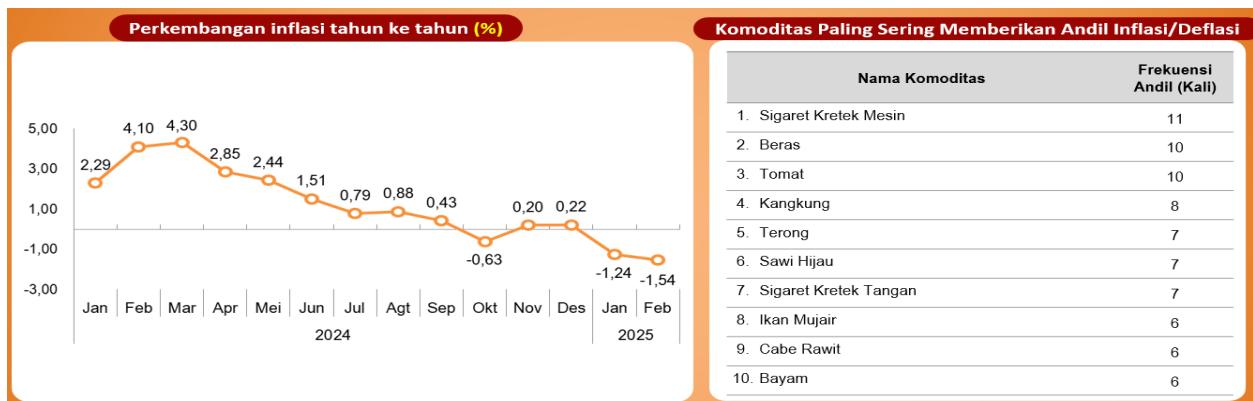


Sumber : BPS Konawe, 2024

d. Inflasi

Perkembangan inflasi di Kabupaten Konawe selama periode tahun 2024 hingga awal 2025 menunjukkan dinamika yang fluktuatif, mencerminkan ketergantungan perekonomian lokal terhadap faktor musiman, pasokan komoditas pangan, dan intervensi kebijakan pemerintah. Inflasi menjadi indikator penting untuk menilai stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat, sehingga pemantauan dan pengelolaannya menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan.

Grafik 2. 13 Perkembangan Inflasi y-o-y

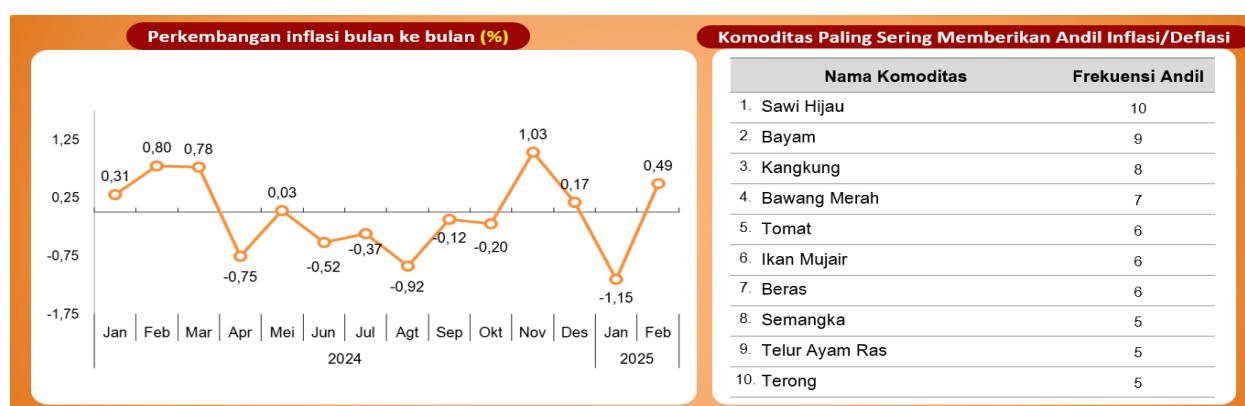


Sumber: BPS Konawe

Dari sisi inflasi bulanan (month-to-month/m-to-m), sepanjang tahun 2024 Kabupaten Konawe mengalami beberapa episode inflasi dan deflasi. Inflasi tertinggi tercatat pada bulan November 2024 sebesar 1,03%, sementara deflasi terdalam terjadi pada Agustus 2024 sebesar -0,92%. Di awal tahun 2025, inflasi m-to-m mengalami penurunan yang signifikan, dengan deflasi sebesar -1,15% pada Januari dan -0,49% pada Februari. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh kebijakan nasional berupa pemberian diskon tarif listrik sebesar 50 persen bagi pelanggan rumah tangga PLN, yang secara langsung menekan komponen pengeluaran rumah tangga dan menurunkan tekanan inflasi.

Sementara itu, inflasi tahunan (year-on-year/y-o-y) juga menunjukkan tren yang menurun tajam. Dari posisi 4,30% pada Maret 2024, angka inflasi terus merosot hingga mengalami deflasi tahunan sebesar -1,54% pada Februari 2025. Tren ini menunjukkan adanya tekanan permintaan yang menurun dan dampak kuat dari pengendalian harga energi serta stabilitas pasokan bahan pangan lokal.

Grafik 2. 14 Perkembangan Inflasi m-o-m



Sumber; BPS Konawe

Analisis komoditas yang paling sering memberikan andil terhadap inflasi dan deflasi menunjukkan bahwa inflasi di Kabupaten Konawe sangat dipengaruhi oleh harga-harga kebutuhan pokok, terutama kelompok sayuran seperti sawi hijau, bayam, kangkung, tomat, serta komoditas strategis lainnya seperti beras dan bawang merah. Sementara itu, komoditas seperti rokok kretek mesin dan tangan, serta bahan pangan segar, tercatat konsisten menjadi penyumbang utama perubahan harga secara tahunan. Hal ini mencerminkan pentingnya penguatan sektor pertanian dan stabilisasi harga bahan pangan sebagai strategi utama pengendalian inflasi daerah

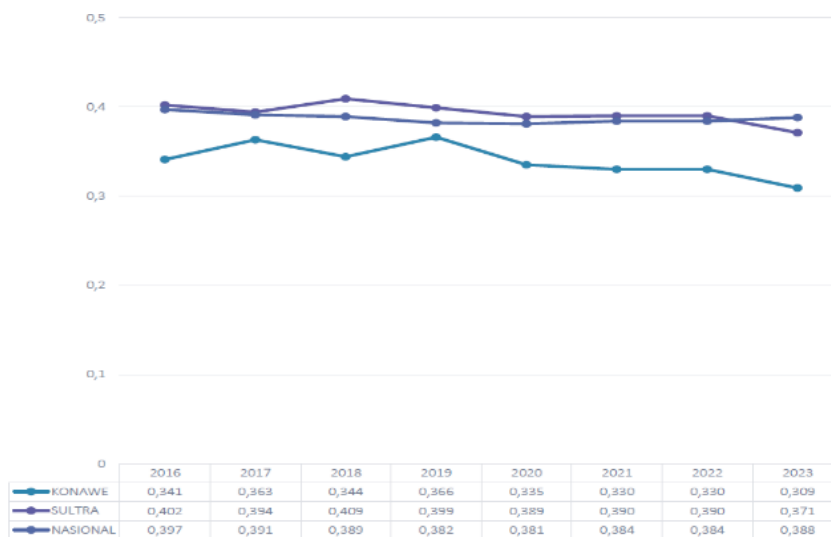
Secara umum, laju inflasi di Kabupaten Konawe sepanjang periode ini berada dalam kondisi yang relatif terkendali, meskipun tetap menunjukkan kerentanan terhadap faktor eksternal dan kebijakan pusat. Oleh karena itu, penguatan cadangan pangan strategis, stabilisasi distribusi logistik, serta pemantauan harga komoditas secara real-time perlu menjadi bagian dari kebijakan daerah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat.

e. **Rasio Gini**

Tingkat ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat Kabupaten Konawe dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren perbaikan yang cukup signifikan. Hal ini tercermin dari penurunan nilai Gini Ratio secara konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, Gini Ratio Kabupaten Konawe tercatat sebesar 0,335, kemudian menurun menjadi 0,330 pada tahun 2021 dan tetap berada pada angka yang sama di tahun 2022. Penurunan lebih nyata terjadi pada tahun 2023, di mana Gini Ratio turun menjadi 0,309, dan

kembali membaik pada tahun 2024 dengan mencatat nilai 0,302. Penurunan Gini Ratio ini mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan di Kabupaten Konawe semakin merata, serta kesenjangan ekonomi antarpenduduk semakin menyempit.

Grafik 2. 15 Perbandingan Kondisi Gini Rasio



Sumber; BPS Konawe

tingkat ketimpangan yang lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional. Hal ini menandakan bahwa meskipun laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Konawe sangat tinggi dan didorong oleh sektor industri pengolahan, dampaknya terhadap pemerataan pendapatan relatif positif.

Namun demikian, keberhasilan ini tetap perlu dibaca secara hati-hati. Penurunan Gini Ratio tidak selalu berarti peningkatan kesejahteraan merata, karena indikator ini tidak menangkap dimensi kemiskinan absolut maupun daya beli masyarakat. Oleh karena itu, meskipun tingkat ketimpangan menunjukkan perbaikan, Pemerintah Kabupaten Konawe perlu terus mendorong kebijakan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan pendapatan masyarakat lapisan bawah, penguatan ekonomi desa, serta perlindungan terhadap kelompok rentan, agar pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan dapat terwujud secara berkelanjutan.

f. Persentase Penduduk Miskin

Tingkat kemiskinan merupakan salah satu indikator utama kesejahteraan masyarakat yang sangat krusial dalam perumusan kebijakan

Sebagai perbandingan, Gini Ratio Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2024 adalah 0,365, sedangkan Gini Ratio nasional tercatat sebesar 0,381. Dengan demikian, Kabupaten Konawe memiliki

pembangunan daerah. Di Kabupaten Konawe, tren kemiskinan menunjukkan dinamika yang kompleks sepanjang periode 2019 hingga 2024. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin mengalami fluktuasi, dari 31,25 ribu jiwa pada tahun 2019 menjadi 33,99 ribu jiwa pada tahun 2024. Secara persentase, angka kemiskinan juga meningkat dari 12,34 persen pada tahun 2019 menjadi 13,25 persen di tahun 2024, menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif dan merata.

Selama periode tersebut, garis kemiskinan juga mengalami peningkatan signifikan, dari Rp293.801 per kapita per bulan di tahun 2019 menjadi Rp425.029 di tahun 2024. Hal ini mencerminkan adanya tekanan biaya hidup yang meningkat, baik dari sisi kebutuhan pangan maupun non-pangan. Kenaikan ini harus diwaspadai karena berpotensi menambah jumlah penduduk rentan miskin jika tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan masyarakat secara riil.

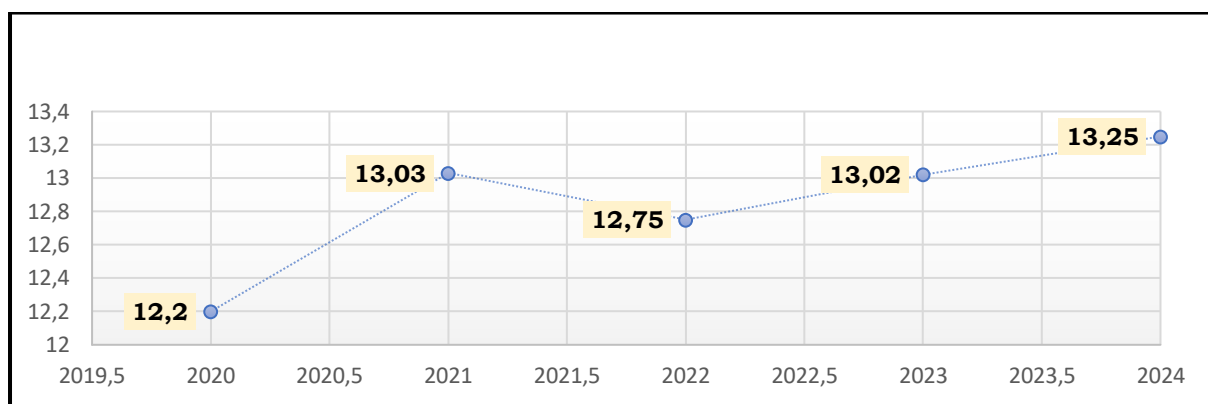
Lebih lanjut, dua indikator penting lainnya, yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index/P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index/P2), menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin masih terjadi. Pada tahun 2024, indeks kedalaman kemiskinan berada di angka 1,87, sedangkan indeks keparahan kemiskinan berada pada level 0,36. Meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, angka ini menunjukkan masih adanya kelompok penduduk miskin yang berada jauh di bawah garis kemiskinan, dan adanya ketimpangan distribusi pengeluaran di antara kelompok miskin itu sendiri. Kondisi tersebut menjadi tantangan utama bagi Pemerintah Kabupaten Konawe untuk menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.

Oleh karena itu, strategi pengentasan kemiskinan harus dirancang secara holistik dan terintegrasi, dengan menitik-beratkan pada peningkatan produktivitas masyarakat miskin, perluasan akses terhadap layanan dasar yang berkualitas, serta perlindungan sosial yang menyasar secara tepat sasaran.

Di samping itu, pemberdayaan ekonomi lokal berbasis potensi wilayah seperti pertanian, perikanan, dan UMKM perlu dioptimalkan sebagai tulang

pungggung penciptaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat. Upaya ini harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas kelembagaan, reformasi birokrasi yang mendukung pelayanan publik yang pro-poor, serta penguatan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dunia usaha, dan masyarakat sipil. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Konawe dapat ditekan secara berkelanjutan dan mendorong terciptanya keadilan sosial bagi seluruh warga.

Grafik 2. 16 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Konawe Tahun 2020-2024



(Sumber : BPS Konawe, 2025)

g. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

Persoalan kemiskinan tidak hanya dilihat dari jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi juga perlu memperhatikan tingkat kedalaman (P1) dan keparahan (P2) kemiskinan. Semakin kecil nilai P1 dan P2, semakin baik karena menunjukkan semakin kecilnya kedalaman kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin, baik terhadap Garis Kemiskinan (GK) maupun antar penduduk miskin itu sendiri. Pada tahun 2023, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Konawe tercatat sebesar 2,35%, yang lebih tinggi dibandingkan dengan angka Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang sebesar 1,96% dan angka nasional yang sebesar 1,53%. Begitu pula, Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Konawe sebesar 0,60%, yang juga lebih tinggi daripada angka Provinsi Sultra yang sebesar 0,48% dan nasional sebesar 0,38%. Hal ini mengindikasikan bahwa

kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin di Kabupaten Konawe lebih besar dibandingkan dengan tingkat Provinsi Sultra maupun nasional.

Tabel 2. 11 Indeks Kedalaman (P1) Dan Indeks Keperahan (P2) Kabupaten Konawae dan Kawasan Sekitarnya dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional

Kabupaten/Kota	P1 Tahun			P2 Tahun		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Konawe	2,86	2,35	1,87	0,85	0,6	0,36
Kolaka	1,54	1,95	1,78	0,31	0,5	0,47
Konawe Selatan	2,18	2,2	1,59	0,57	0,55	0,34
Konawe Utara	2,52	2,47	2,52	0,69	0,63	0,76
Kolaka Timur	1,86	2,49	1,87	0,46	0,64	0,44
Kota Kendari	0,73	0,64	0,70	0,15	0,13	0,14
SULAWESI TENGGERA	1,82	1,96	2,08	0,42	0,48	0,56
NASIONAL	1,56	1,53	1,36	0,38	0,38	0,32

Sumber : BPS Konawe, BPS RI, BPS SULTRA 2025

Data di atas menunjukkan perkembangan indikator kemiskinan ekstrem di beberapa kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara berdasarkan dua ukuran: P1 (Indeks Kedalaman Kemiskinan) dan P2 (Indeks Keperahan Kemiskinan) untuk tahun 2022 hingga 2024. Secara umum, terjadi penurunan angka P1 dan P2 di hampir seluruh daerah, yang menunjukkan perbaikan kondisi ekonomi masyarakat miskin ekstrem. Kabupaten Konawe mengalami penurunan signifikan dari P1 sebesar 2,86 di tahun 2022 menjadi 1,87 di tahun 2024, dan P2 dari 0,85 menjadi 0,36, mencerminkan peningkatan kesejahteraan warga miskin ekstrem. Begitu pula Konawe Selatan menunjukkan tren menurun dari P1: 2,18 ke 1,59 dan P2: 0,57 ke 0,34. Kota Kendari, sebagai ibu kota provinsi, konsisten memiliki angka P1 dan P2 paling rendah, yang menandakan kondisi sosial-ekonomi yang relatif lebih baik. Namun, ada daerah seperti Konawe Utara yang memperlihatkan stagnasi dan bahkan peningkatan P2 di tahun 2024 (dari 0,63 menjadi 0,76), mengindikasikan meningkatnya kesenjangan di antara penduduk miskin ekstrem. Sementara itu, Kolaka Timur sempat mengalami peningkatan P1 pada 2023 sebelum turun kembali di 2024, yang menunjukkan ketidakstabilan dalam pengentasan kemiskinan. Di tingkat provinsi, Sulawesi Tenggara menunjukkan tren peningkatan P1 dari 1,82 (2022) ke

2,08 (2024), dan P2 dari 0,42 ke 0,56, yang justru mengindikasikan kondisi kemiskinan ekstrem belum sepenuhnya membaik secara agregat. Hal ini berbeda dengan tren nasional yang terus menurun: P1 dari 1,56 ke 1,36 dan P2 dari 0,38 ke 0,32. Secara keseluruhan, meskipun beberapa kabupaten menunjukkan kemajuan dalam pengurangan kedalaman dan keparahan kemiskinan, tantangan masih besar secara provinsi, yang membutuhkan intervensi lebih terfokus dan merata antarwilayah.

h. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang menggambarkan capaian pembangunan manusia dari tiga dimensi dasar: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Di Kabupaten Konawe, IPM menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten dan positif selama periode 2020 hingga 2024. Berdasarkan data resmi dari BPS, nilai IPM Konawe meningkat dari 72,44 pada tahun 2020 menjadi 74,50 pada tahun 2024. Capaian ini tidak hanya menandakan kemajuan dalam kualitas hidup masyarakat, tetapi juga menegaskan komitmen pembangunan daerah yang menempatkan manusia sebagai pusat dari seluruh proses pembangunan.

Dimensi pendidikan yang tercermin dari indikator harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS) menunjukkan perbaikan nyata. HLS meningkat dari 13,00 tahun pada 2020 menjadi 13,05 tahun pada 2024, mengindikasikan bahwa anak-anak yang lahir di tahun tersebut diharapkan dapat menempuh pendidikan formal selama lebih dari 13 tahun. Sementara itu, RLS—yang menggambarkan rata-rata tahun sekolah yang telah dijalani penduduk usia 25 tahun ke atas—mengalami peningkatan signifikan dari 9,15 tahun menjadi 9,69 tahun dalam periode yang sama. Capaian ini memperlihatkan bahwa program peningkatan akses dan kualitas pendidikan di Kabupaten Konawe telah membuahkan hasil positif, terutama dalam mengatasi kesenjangan partisipasi pendidikan di wilayah-wilayah terpencil.

Dari sisi ekonomi, pengeluaran riil per kapita—yang menjadi indikator kesejahteraan material penduduk—juga menunjukkan peningkatan dari Rp10.126 pada tahun 2020 menjadi Rp11.415 pada tahun 2024.

Pertumbuhan daya beli ini mencerminkan membaiknya pendapatan masyarakat dan akses terhadap barang serta jasa kebutuhan dasar. Di sisi lain, angka harapan hidup saat lahir juga terus meningkat, dari 70,27 tahun pada 2020 menjadi 70,61 tahun pada 2024. Hal ini mengindikasikan perbaikan layanan kesehatan dasar, gizi masyarakat, dan sanitasi lingkungan yang turut menopang peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Jika dibandingkan dengan rerata Provinsi Sulawesi Tenggara, capaian IPM Kabupaten Konawe pada tahun 2024 yang berada pada angka 74,50 tercatat lebih tinggi dari rata-rata provinsi sebesar 73,62, sekaligus menempatkan Konawe sebagai empat besar dengan kualitas pembangunan manusia tertinggi di Sulawesi Tenggara. Kelebihan ini menjadi modal penting bagi Kabupaten Konawe dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pembangunan yang berkelanjutan.

Tabel 2. 12 Perkembangan IPM Kabupaten Konawe Tahun 2020-2024

Variabel	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
IPM	72,44	72,58	73,14	73,88	74,50
Harapan lama sekolah	13	13,01	13,03	13,04	13,05
Rata-rata lama sekolah	9,15	9,21	9,3	9,56	9,69
Pengeluaran riil perkapita	10.126,00	10.151,00	10.552,00	10.963,00	11.415
Angka harapan hidup	70,27	70,32	70,38	70,44	70,61

(Sumber : BPS Konawe, BPS RI, 2025)

i. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Konawe menunjukkan tren fluktuatif dalam sembilan tahun terakhir (2016–2024), namun cenderung membaik dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2024, TPT tercatat sebesar 2,95%, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya (2023) yang sebesar 3,09%. Penurunan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja, meskipun masih terdapat tantangan dalam menyediakan lapangan kerja yang berkualitas dan berkelanjutan.

Jika dibandingkan dengan tingkat provinsi Sulawesi Tenggara (SULTRA) yang sebesar 3,10% di tahun 2024, dan rata-rata nasional sebesar 4,60% pada tahun 2023, maka TPT Kabupaten Konawe tergolong relatif

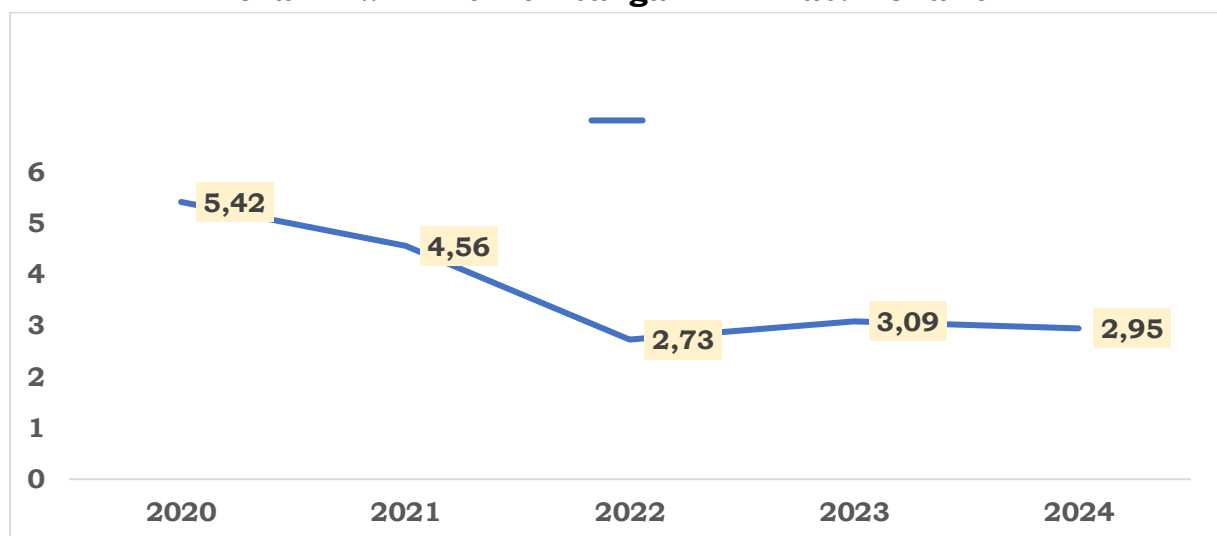
rendah. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, pasar tenaga kerja di Konawe masih mampu mengakomodasi sebagian besar angkatan kerja, terutama didorong oleh dominasi sektor-sektor produktif seperti industri pengolahan, pertanian, serta konstruksi yang tumbuh signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Namun demikian, angka TPT sebesar 2,95% tetap mengindikasikan bahwa terdapat sekitar 9.156 penduduk usia kerja yang secara aktif mencari pekerjaan namun belum memperoleh kesempatan kerja. Profil TPT juga menunjukkan bahwa sebagian besar penganggur berasal dari lulusan sekolah menengah atas dan perguruan tinggi. Artinya, tantangan bukan hanya pada ketersediaan lapangan kerja, tetapi juga pada kesesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja (mismatch).

Pemerintah Kabupaten Konawe perlu merespons kondisi ini melalui kebijakan strategis peningkatan kualitas sumber daya manusia, revitalisasi pendidikan vokasi, penyediaan pelatihan kerja berbasis permintaan pasar (demand-driven), serta dukungan terhadap kewirausahaan dan pengembangan UMKM. Disamping itu, penguatan kerja sama antara dunia pendidikan dan industri (link and match), serta pembukaan akses informasi ketenagakerjaan yang inklusif menjadi kunci dalam menurunkan angka pengangguran secara berkelanjutan.

TPT Kabupaten Konawe Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada gambar berikut:

Grafik 2. 17 Perkembangan TPT Kab. Konawe



(Sumber: BPS Konawe)

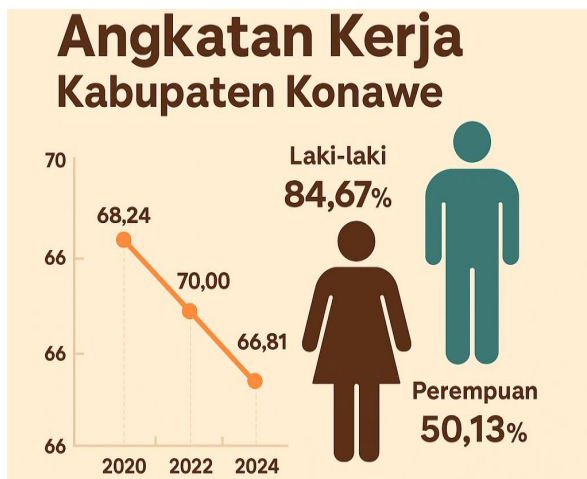
j. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Selama periode 2020 hingga 2024, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Konawe menunjukkan kecenderungan yang relatif stabil dengan fluktuasi yang tidak terlalu tajam. Pada tahun 2020, TPAK tercatat sebesar 68,24 persen, naik menjadi 70,00 persen pada tahun 2021, namun kemudian menurun ke 66,81 persen pada 2022. Tren ini kembali membaik di tahun-tahun berikutnya, yakni sebesar 67,93 persen pada 2023 dan 68,03 persen pada tahun 2024. Konsistensi TPAK di atas 66 persen mengindikasikan bahwa mayoritas penduduk usia kerja di Konawe aktif secara ekonomi, baik bekerja maupun sedang mencari pekerjaan, sehingga menjadi indikator penting bagi dinamika pembangunan ekonomi daerah.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2024, terdapat kesenjangan partisipasi yang cukup signifikan. TPAK laki-laki mencapai 84,67 persen, sedangkan TPAK perempuan hanya 50,13 persen. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki partisipasi yang jauh lebih rendah dalam pasar kerja dibandingkan laki-laki. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor struktural dan kultural, seperti keterbatasan akses terhadap lapangan kerja yang layak, dominasi peran domestik, serta kurangnya dukungan kebijakan afirmatif di dunia kerja.

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Konawe menunjukkan tren yang positif dengan penurunan cukup signifikan selama lima tahun terakhir. Dari angka 5,42 persen pada tahun 2020, TPT menurun menjadi 2,95 persen pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja oleh pasar, yang kemungkinan dipengaruhi oleh pertumbuhan industri pengolahan dan kegiatan hilirisasi yang semakin masif. Namun demikian, TPT perempuan (3,91%) masih lebih tinggi dibandingkan TPT laki-laki (2,42%), yang menandakan bahwa perempuan masih menghadapi tantangan lebih besar dalam memperoleh pekerjaan.

Grafik 2. 18 Angkatan Kerja Kab. Konawe

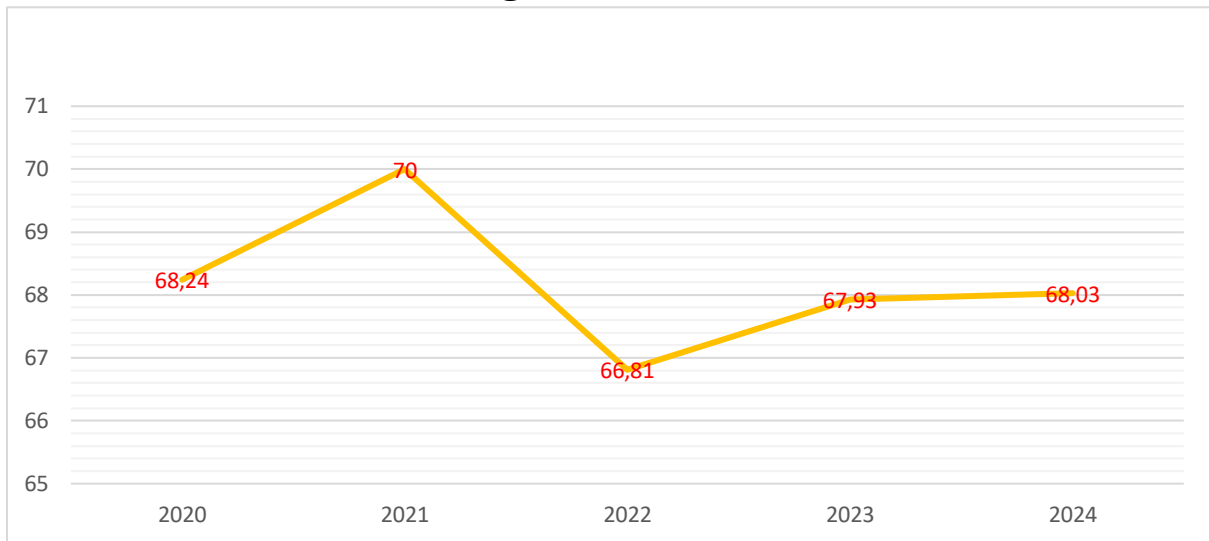


Pada tahun 2024, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Konawe mencapai 137.559 orang, terdiri dari 133.504 orang bekerja dan 4.055 orang penganggur. Sementara itu, jumlah penduduk usia kerja yang tergolong bukan angkatan kerja mencapai 64.658 orang, didominasi oleh perempuan sebanyak 48.599 orang.

Fakta ini mengindikasikan perlunya dorongan kebijakan yang lebih proaktif untuk meningkatkan partisipasi ekonomi perempuan, melalui pelatihan kerja, fasilitasi kewirausahaan perempuan, hingga perluasan lapangan kerja yang ramah gender.

Secara umum, data ketenagakerjaan di Kabupaten Konawe menggambarkan bahwa meskipun partisipasi angkatan kerja dan penyerapan tenaga kerja cukup baik, tantangan utama yang perlu dijawab dalam lima tahun ke depan adalah pengurangan kesenjangan partisipasi gender serta penguatan akses terhadap pekerjaan yang produktif, layak, dan berkelanjutan bagi seluruh penduduk usia kerja. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan ketenagakerjaan dalam RPJMD ke depan harus diarahkan untuk mendorong reformasi pasar tenaga kerja yang inklusif, memperluas program padat karya, serta menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif terhadap transformasi ekonomi lokal.

Grafik 2. 19 Perkembangan TPAK Konawe Tahun 2020-2024

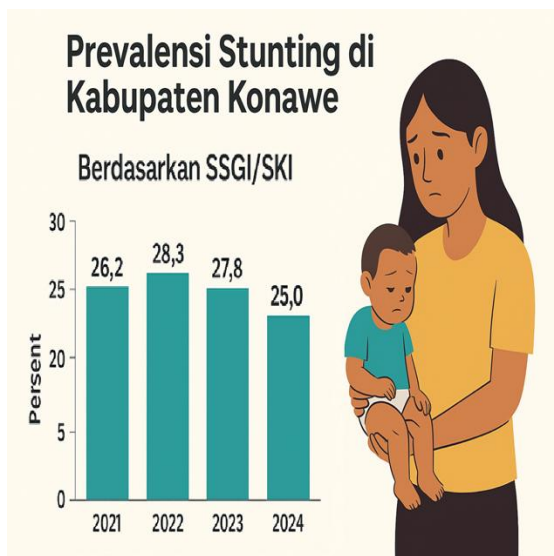


(Sumber: BPS Konawe)

2.1.2.2 Kesehatan Untuk Semua

A. Prevalensi Stunting

Prevalensi stunting merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur kualitas kesehatan dan gizi anak balita, yang juga mencerminkan keberhasilan intervensi pembangunan kesehatan secara menyeluruh. Di Kabupaten Konawe, terdapat dua sumber utama data prevalensi stunting, yaitu hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI)/Survei Kesehatan Indonesia (SKI) yang bersifat nasional dan estimatif, serta data elektronik berbasis laporan rutin Puskesmas melalui e-PPGBM (Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat)



Berdasarkan hasil SSGI/SKI, prevalensi stunting di Kabupaten Konawe pada tahun 2021 tercatat sebesar 26,2%, kemudian meningkat menjadi 28,3% pada 2022, dan sedikit menurun pada tahun 2023 menjadi 27,8%. Pada tahun 2024, angka ini menunjukkan penurunan cukup signifikan menjadi 25,0%. Penurunan ini mencerminkan adanya upaya peningkatan intervensi

Gambar 2. 11 Prevalensi Stunting Kab. konawe Tahun 2024

gizi spesifik maupun sensitif yang dijalankan lintas sektor.

Sementara itu, data e-PPGBM menunjukkan tren yang jauh lebih optimis. Pada tahun 2021, prevalensi stunting menurut e-PPGBM sebesar 21,1%, turun menjadi 17,5% pada 2022, dan anjlok secara signifikan menjadi hanya 4,9% pada 2023. Penurunan tajam ini juga didukung oleh meningkatnya cakupan pengukuran balita yang dilakukan, dari 2.632 balita pada 2021 menjadi 17.953 balita pada 2023, yang menunjukkan kualitas pencatatan dan pelaporan semakin membaik.



MONITORING PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI INTERVENSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI

DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH - KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Portal Monitoring PELAKSANAAN KONVERGENSI INTERVENSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI

DASHBOARD SEBARAN STUNTING 2024

SEBARAN DATA STUNTING DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

kembali

Data Sebaran jumlah Stunting di tiap kabupaten/kota.

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH BALITA (ANAK)	STUNTING		PREVALENSI (%)
			PENDEK (ANAK)	SANGAT PENDEK (ANAK)	
1	Buton	9,649	1,270	350	16.8
2	Muna	7,870	861	253	14.3
3	Konawe	17,572	619	228	4.8

Gambar 2. 12 Kondisi Stunting Kab. Konawe Berdasarkan e-PPGBM

Sumber; e-PPGBM

Perbedaan data antara SSGI/SKI dan e-PPGBM dapat dijelaskan dari aspek metodologi. SSGI merupakan survei nasional berbasis sampel yang dirancang untuk menghasilkan estimasi angka stunting yang representatif secara nasional dan regional, sedangkan e-PPGBM merupakan sistem pelaporan berbasis populasi sasaran yang dikelola oleh tenaga kesehatan di tingkat lapangan. Oleh karena itu, meskipun e-PPGBM memberikan gambaran cakupan lebih luas dan bersifat real-time, validitas estimasi nasional tetap mengacu pada hasil survei SSGI/SKI.

Kendati demikian, baik tren dari SSGI/SKI maupun e-PPGBM menunjukkan arah perbaikan prevalensi stunting di Kabupaten Konawe. Keberhasilan ini tidak terlepas dari peningkatan cakupan layanan kesehatan ibu dan anak, program pemberian makanan tambahan, serta intervensi kesehatan lingkungan dan air bersih. Namun demikian, angka prevalensi

yang masih berada di atas ambang batas nasional (20%) dalam data SSGI menunjukkan bahwa tantangan stunting di Konawe masih harus menjadi perhatian serius dalam lima tahun mendatang

B. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur keberhasilan pembangunan manusia, khususnya di bidang kesehatan. Indikator ini mencerminkan rata-rata umur yang diharapkan dapat dicapai oleh seseorang sejak lahir, dengan asumsi bahwa pola mortalitas yang berlaku saat ini tetap konstan sepanjang hidup individu tersebut. Oleh karena itu, UHH tidak hanya menggambarkan keberlangsungan hidup, tetapi juga kualitas hidup masyarakat yang erat kaitannya dengan ketersediaan layanan kesehatan, status gizi, lingkungan yang sehat, serta kondisi sosial ekonomi.

Grafik 2. 20 Usia Harapan Hidup Kab. Konawe



Sumber ; BPS Konawe

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Konawe, nilai UHH di Kabupaten Konawe menunjukkan tren yang meningkat selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, usia harapan hidup berada pada angka 70,27 tahun dan meningkat secara bertahap menjadi 70,32 tahun pada 2021, 70,38 tahun pada 2022, 70,44 tahun pada 2023, dan mencapai 70,61 tahun pada 2024. Peningkatan ini

mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memperluas akses terhadap layanan kesehatan dasar, memperbaiki sistem pelayanan kesehatan, serta menjalankan program promotif dan preventif kesehatan masyarakat secara lebih optimal.

Jika dibandingkan dengan rerata UHH Provinsi Sulawesi Tenggara yang mencapai 71,60 tahun pada tahun 2024, maka UHH Kabupaten Konawe masih berada sedikit di bawah rata-rata provinsi. Meski demikian, perbedaan ini terus menyempit dari tahun ke tahun, menandakan adanya perbaikan yang konsisten dalam indikator kesehatan masyarakat. Hal ini didukung oleh intervensi strategis seperti peningkatan kualitas Puskesmas dan Posyandu, pemberdayaan tenaga kesehatan di desa, serta peningkatan cakupan imunisasi dan layanan kesehatan ibu-anak.

Peningkatan UHH juga tidak lepas dari penurunan angka stunting di Kabupaten Konawe yang signifikan, baik berdasarkan data SSGI maupun e-PPGBM. Penurunan stunting menunjukkan bahwa generasi muda tumbuh dengan status gizi dan kesehatan yang lebih baik, yang dalam jangka panjang berdampak pada peningkatan kualitas hidup dan harapan hidup penduduk. Selain itu, tren peningkatan pengeluaran riil per kapita masyarakat turut mencerminkan kemampuan ekonomi rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar termasuk nutrisi dan layanan kesehatan.

Namun demikian, masih terdapat tantangan yang harus diatasi, seperti kesenjangan akses dan kualitas layanan kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok ekonomi atas dan bawah. Di samping itu, prevalensi penyakit tidak menular dan risiko kesehatan akibat gaya hidup juga berpotensi menghambat percepatan peningkatan UHH jika tidak ditangani secara serius.

Dengan demikian, arah kebijakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Konawe pada periode 2025–2029 harus difokuskan pada upaya penguatan layanan kesehatan primer, peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan, serta integrasi layanan kesehatan berbasis keluarga dan siklus hidup. Pendekatan ini bertujuan untuk tidak hanya meningkatkan angka UHH, tetapi juga memastikan bahwa setiap penduduk

Kabupaten Konawe dapat menjalani kehidupan yang sehat, produktif, dan bermakna.

C. Statistik Kesehatan Masyarakat Konawe

Pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Konawe terus menunjukkan perkembangan positif, ditandai dengan meningkatnya ketersediaan layanan dasar kesehatan serta partisipasi masyarakat dalam pelayanan kesehatan. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan serius yang memerlukan intervensi terstruktur dalam lima tahun mendatang.

Hingga tahun 2024, Kabupaten Konawe telah memiliki 2 rumah sakit, 6 puskesmas rawat inap, dan 23 puskesmas non-rawat inap yang tersebar di berbagai kecamatan. Selain itu, terdapat 358 posyandu aktif yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak. Meskipun demikian, distribusi tenaga medis masih belum merata. Sebagian besar dokter umum terkonsentrasi di wilayah perkotaan seperti Unaaha, sementara sejumlah kecamatan masih mengalami keterbatasan tenaga medis, bahkan dalam beberapa kasus tidak memiliki dokter sama sekali.



Gambar 2. 13 Pembangunan Rumah Sakit dan Puskesmas Kab. Konawe

Derajat kesehatan masyarakat juga masih menghadapi tantangan. Sekitar 10,66 persen penduduk mengalami keluhan kesehatan yang mengganggu aktivitas harian, dengan angka kesakitan lebih tinggi pada perempuan (11,99%) dibanding laki-laki (9,37%). Kelompok pengeluaran menengah tercatat memiliki angka kesakitan tertinggi. Selain itu, prevalensi perilaku merokok cukup tinggi, yakni mencapai 28,03 persen pada penduduk usia 15 tahun ke atas, yang berkontribusi terhadap meningkatnya risiko penyakit tidak menular.

Tabel 2. 13 Angka Kesakitan Kabupaten Konawe Menurut Karakteristik, 2024

Karakteristik	Angka Kesakitan (%)
Laki-laki	9,37
Perempuan	11,99
40 Persen Terbawah	10,3
40 Persen Menengah	11,87
20 Persen Teratas	8,93
Kabupaten Konawe	10,66

Sumber; BPS Konawe

Dalam hal kesehatan ibu dan anak, masih ditemukan sejumlah capaian yang belum optimal. Dari total 5.455 ibu hamil, hanya 62,58 persen yang melakukan kunjungan kehamilan pertama (K1), dan hanya 56,61 persen yang melakukan kunjungan keempat (K4). Persalinan oleh tenaga kesehatan tercatat sebesar 71,75 persen, masih di bawah target Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pemberian tablet Fe3 baru mencapai 64 persen, dan cakupan imunisasi Td-1 untuk ibu hamil sangat rendah, hanya sekitar 18,7 persen.

Tabel 2. 14 Kondisi Kesehatan Ibu dan Anak

Indikator	Capaian (%)
Kunjungan Kehamilan Pertama (K1)	62,58
Kunjungan Kehamilan Keempat (K4)	56,61
Persalinan oleh Tenaga Kesehatan	71,75
Pemberian Tablet Fe3	64
Cakupan Imunisasi Td-1 untuk Ibu Hamil	18,7

Sumber; BPS Konawe

Untuk kesehatan balita, cakupan pemberian ASI masih cukup baik, dengan 91,55 persen anak usia di bawah dua tahun pernah menerima ASI. Namun rata-rata durasi pemberian ASI masih di bawah rekomendasi WHO,

yaitu hanya 9,56 bulan. Sementara itu, cakupan imunisasi sebagian besar telah mencapai target, kecuali imunisasi campak/MR yang hanya mencapai 76,46 persen dan perlu mendapat perhatian khusus.

Kondisi kesehatan lingkungan juga menunjukkan ketimpangan antarwilayah. Mayoritas rumah tangga menggunakan sumber air bersih dari sumur bor (47,6%) dan mata air terlindung (28,6%), namun sekitar 7,6 persen rumah tangga masih memanfaatkan sumber air tidak layak. Di sisi lain, 94,78 persen rumah tangga telah memiliki fasilitas buang air besar (BAB) sendiri, namun masih terdapat 6,41 persen yang membuang tinja di tempat terbuka seperti sungai dan kebun.

Tantangan-tantangan tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan kesehatan ke depan perlu diarahkan pada penguatan akses dan mutu layanan kesehatan dasar, pemerataan distribusi tenaga kesehatan, intensifikasi pelayanan ibu dan anak, peningkatan cakupan imunisasi, serta perbaikan sanitasi lingkungan. Selain itu, intervensi terhadap perilaku berisiko seperti merokok dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap PHBS harus menjadi agenda prioritas dalam perencanaan dan penganggaran daerah.

D. Kondisi Kesehatan Masyarakat

Kondisi kesehatan masyarakat Kabupaten Konawe dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren perbaikan yang signifikan dan progresif, meskipun masih menyisakan sejumlah tantangan struktural. Berdasarkan indikator utama Usia Harapan Hidup (UHH), terdapat peningkatan dari 70,27 tahun pada tahun 2020 menjadi 70,61 tahun pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam aspek pelayanan kesehatan dasar, keberhasilan program imunisasi, pengendalian penyakit menular, serta peningkatan akses terhadap fasilitas kesehatan.

Di sisi lain, salah satu isu krusial yang menjadi perhatian nasional dan daerah adalah prevalensi stunting. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI)/Survei Kesehatan Indonesia (SKI), prevalensi stunting di Kabupaten Konawe sempat mengalami peningkatan dari 26,2% pada tahun 2021 menjadi 28,3% pada tahun 2022. Namun demikian, upaya intensif dari berbagai pihak, baik pemerintah daerah, lembaga kesehatan, maupun

masyarakat, membuahkan hasil positif dengan penurunan angka stunting menjadi 27,8% pada tahun 2023, dan secara lebih signifikan turun menjadi 25,0% pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan semakin efektifnya intervensi gizi terpadu, peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi dan sanitasi.

Kondisi kesehatan masyarakat juga dapat tercermin melalui capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya pada dimensi kesehatan yang diwakili oleh UHH. Dengan IPM Kabupaten Konawe yang meningkat dari 72,44 pada tahun 2020 menjadi 74,50 pada tahun 2024, terlihat bahwa perbaikan kesehatan masyarakat berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas hidup secara umum. Dimensi ini juga terkait erat dengan kemajuan di sektor pendidikan dan daya beli, yang pada akhirnya mempengaruhi akses dan kualitas layanan kesehatan.

Secara keseluruhan, indikator kesehatan di Kabupaten Konawe menunjukkan bahwa meskipun masih terdapat tantangan seperti prevalensi stunting yang cukup tinggi dibanding ambang batas WHO (20%), namun arah perbaikannya sudah sangat jelas dan menunjukkan keberhasilan program pembangunan kesehatan yang lebih inklusif. Langkah selanjutnya adalah mempertajam intervensi berbasis data, memperluas jangkauan program gizi dan sanitasi, serta memastikan ketersediaan dan pemerataan tenaga medis berkualitas di seluruh kecamatan. Kesehatan untuk semua hanya dapat terwujud apabila layanan dasar menjangkau seluruh siklus kehidupan dan kelompok masyarakat tanpa terkecuali.

2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas Yang Merata

Rapor Pendidikan Kabupaten Konawe

Kondisi pendidikan di Kabupaten Konawe menunjukkan kemajuan yang berarti dalam aspek partisipasi, namun masih menghadapi tantangan serius dalam hal kualitas pembelajaran, kesenjangan capaian antarwilayah, serta mutu lembaga pendidikan nonformal. Data Rapor Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun 2024 menempatkan nilai Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan sebesar 61, tergolong dalam kategori "Tuntas Muda", yang mengindikasikan bahwa layanan dasar pendidikan

belum sepenuhnya terpenuhi secara menyeluruh dan merata di seluruh wilayah.

Partisipasi warga usia sekolah tergolong sangat tinggi di Konawe. Tingkat partisipasi PAUD (usia 5–6 tahun), pendidikan dasar (usia 7–12 tahun), dan pendidikan menengah pertama (usia 13–15 tahun) masing-masing mencapai lebih dari 99%. Ini menunjukkan bahwa akses terhadap layanan pendidikan sudah relatif terbuka di berbagai jenjang. Di sisi lain, aspek lingkungan belajar seperti rasa aman, penghargaan terhadap kebinekaan, dan suasana kondusif untuk pembelajaran menunjukkan tren positif di sebagian besar sekolah, mencerminkan keberhasilan pembangunan iklim sekolah yang mendukung perkembangan karakter siswa.

Meskipun partisipasi tinggi, kualitas pembelajaran di Kabupaten Konawe masih belum memadai. Hasil asesmen nasional menunjukkan bahwa kemampuan numerasi siswa di tingkat PAUD, SD, dan SMP masih di bawah standar nasional. Kemampuan literasi juga belum merata, meskipun beberapa sekolah menunjukkan hasil baik. Kesenjangan kualitas antarsatuan pendidikan masih besar, terutama pada sekolah kesetaraan seperti PKBM, yang mengalami penurunan tajam dalam tingkat partisipasi dari 100% (2022) menjadi hanya 73,85% (2024). Hal ini menunjukkan adanya penurunan minat atau keterbatasan akses terhadap program pendidikan nonformal, yang sebenarnya krusial dalam menanggulangi putus sekolah.

Mutu pendidikan anak usia dini (PAUD) juga menjadi perhatian. Dari total satuan PAUD yang ada, hanya sekitar 43% yang telah berakreditasi minimal B, menandakan perlunya peningkatan manajemen dan kualitas layanan PAUD. Sementara itu, pada tingkat masyarakat umum, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Konawe hanya sebesar 38,04, jauh di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Tenggara (72,31). Tingkat kunjungan ke perpustakaan sangat rendah (0,0575 per hari), koleksi perpustakaan belum memadai, dan rasio tenaga perpustakaan masih rendah (0,538). Semua ini menggambarkan lemahnya budaya baca dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan literasi.

Tabel 2. 15 Ringkasan Hasil Capaian Rapor Pendidikan Kabupaten Konawe, 2025

[illegible]

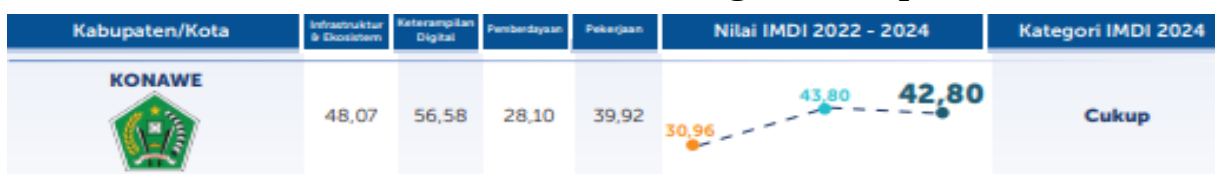
Sumber; Rapor Pendidikan Indonesia, 2024

Indeks Literasi Digital Kabupaten Konawe

Indeks Literasi Digital Kabupaten Konawe tahun 2024 menunjukkan capaian sebesar 42,80, yang termasuk dalam kategori "cukup", namun masih berada di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Tenggara yang mencapai 43,44. Capaian ini menempatkan Konawe di posisi yang masih membutuhkan penguatan ekosistem dan pemberdayaan digital, terutama untuk mendukung transformasi digital daerah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Secara rinci, pilar yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap skor literasi digital Konawe adalah Keterampilan Digital, dengan skor 60,14, mencerminkan adanya peningkatan kapasitas individu dalam mengakses dan menggunakan teknologi informasi. Namun demikian, pilar Pemberdayaan masih menunjukkan angka yang rendah yakni 26,21, menandakan rendahnya pemanfaatan teknologi dalam aktivitas produktif, sosial, maupun ekonomi masyarakat.

Gambar 2. 14 Kondisi Indeks Literasi Digital Kabupaten Konawe



Indeks Masyarakat digital 2024, komdigi RI

Pilar Infrastruktur dan Ekosistem juga masih berada pada skor menengah sebesar 48,07, yang mengindikasikan keterbatasan infrastruktur dasar seperti akses internet, fasilitas TIK di institusi pendidikan, dan kapasitas jaringan digital desa. Pilar Pekerjaan memperoleh nilai 38,02, menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam sektor ketenagakerjaan, kewirausahaan digital, dan ekonomi kreatif masih belum optimal.

Kondisi ini menjadi tantangan strategis bagi Kabupaten Konawe untuk mempercepat transformasi digital secara merata dan inklusif. Upaya peningkatan literasi digital masyarakat perlu difokuskan pada penguatan ekosistem digital di tingkat desa, peningkatan kualitas layanan perpustakaan berbasis digital, penguatan kapasitas guru dalam pembelajaran berbasis TIK, serta pelibatan generasi muda dalam inovasi digital dan kewirausahaan berbasis teknologi. Dengan strategi yang terencana dan kolaboratif lintas sektor, peningkatan Indeks Literasi Digital dapat menjadi pendorong utama dalam membentuk masyarakat yang adaptif terhadap perubahan global serta mendukung visi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Berdasarkan data tahun 2024, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Konawe hanya mencapai 38,04 poin, jauh tertinggal dibandingkan rerata Provinsi Sulawesi Tenggara yang mencapai 72,31 poin. Capaian ini menunjukkan bahwa kondisi literasi fungsional masyarakat Kabupaten Konawe masih berada pada level rendah, sehingga menjadi perhatian strategis dalam perencanaan pembangunan pendidikan.



Gambar 2. 15 Angka Literasi dan Numerasi di Kab. Konawe

Rendahnya IPLM ini berkorelasi dengan indikator-indikator turunan lainnya, antara lain:

- Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan sangat rendah (0,03),
- Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan hanya 0,538,
- Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan sangat minim, yakni hanya 0,0575 kali per hari per orang,
- Dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi perpustakaan pun terbatas (hanya 9,87%).

Data tersebut menunjukkan bahwa infrastruktur literasi belum terbangun secara kuat dan partisipasi masyarakat dalam budaya membaca masih sangat lemah.

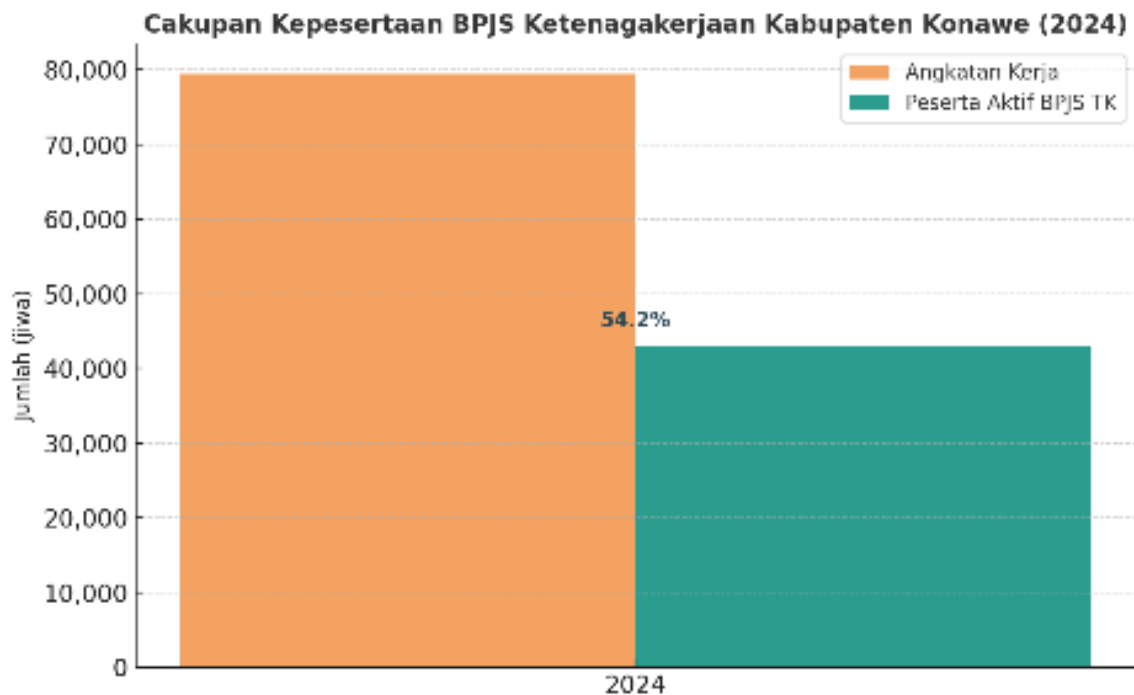
Akses terhadap fasilitas literasi seperti perpustakaan belum merata. Nilai pemerataan layanan perpustakaan di Konawe hanya 0,39, jauh di bawah provinsi. Ini mengindikasikan bahwa masih banyak desa dan sekolah yang belum memiliki atau belum memanfaatkan perpustakaan secara optimal. Distribusi koleksi buku dan tenaga pustakawan pun belum menjangkau secara adil seluruh kecamatan, terutama wilayah pedesaan dan tertinggal.

2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang adaptif

Perlindungan Ketenaga Kerjaan

Dalam rangka memperkuat sistem perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif, Pemerintah Kabupaten Konawe telah menunjukkan kemajuan signifikan pada sektor ketenagakerjaan melalui peningkatan cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Pada tahun 2024, jumlah angkatan kerja tercatat sebanyak 79.388 jiwa, dengan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan mencapai 43.028 jiwa atau sebesar 54,20 persen dari total angkatan kerja. Capaian ini mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah dalam menjamin perlindungan dasar tenaga kerja terhadap risiko sosial, seperti kecelakaan kerja, kematian, kehilangan pekerjaan, hingga jaminan hari tua.

Grafik 2. 21 Cakupan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan



Sumber ; BPJS Ketenagakerjaan

Cakupan tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam membangun sistem perlindungan sosial yang berdaya tahan terhadap guncangan ekonomi dan sosial, terutama di sektor informal yang dominan di wilayah Konawe. Meskipun angka partisipasi belum sepenuhnya optimal, namun. Capaian tersebut selaras dengan arah pembangunan nasional dan daerah dalam membentuk perlindungan sosial yang tidak hanya bersifat responsif terhadap risiko, tetapi juga proaktif dalam menyiapkan masyarakat pekerja yang tangguh secara ekonomi. Ke depan, peningkatan cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan diharapkan menjadi pendorong utama terwujudnya sistem jaminan sosial daerah yang inklusif, terjangkau, dan berbasis data yang akurat.

Perlindungan Kesehatan

Selama periode 2020 hingga 2023, Pemerintah Kabupaten Konawe menunjukkan capaian signifikan dalam memperluas cakupan jaminan sosial kesehatan sebagai bagian dari sistem perlindungan sosial yang adaptif. Cakupan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang mencakup BPJS Kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) maupun Non-PBI, terus mengalami peningkatan. Total penduduk yang telah tercakup

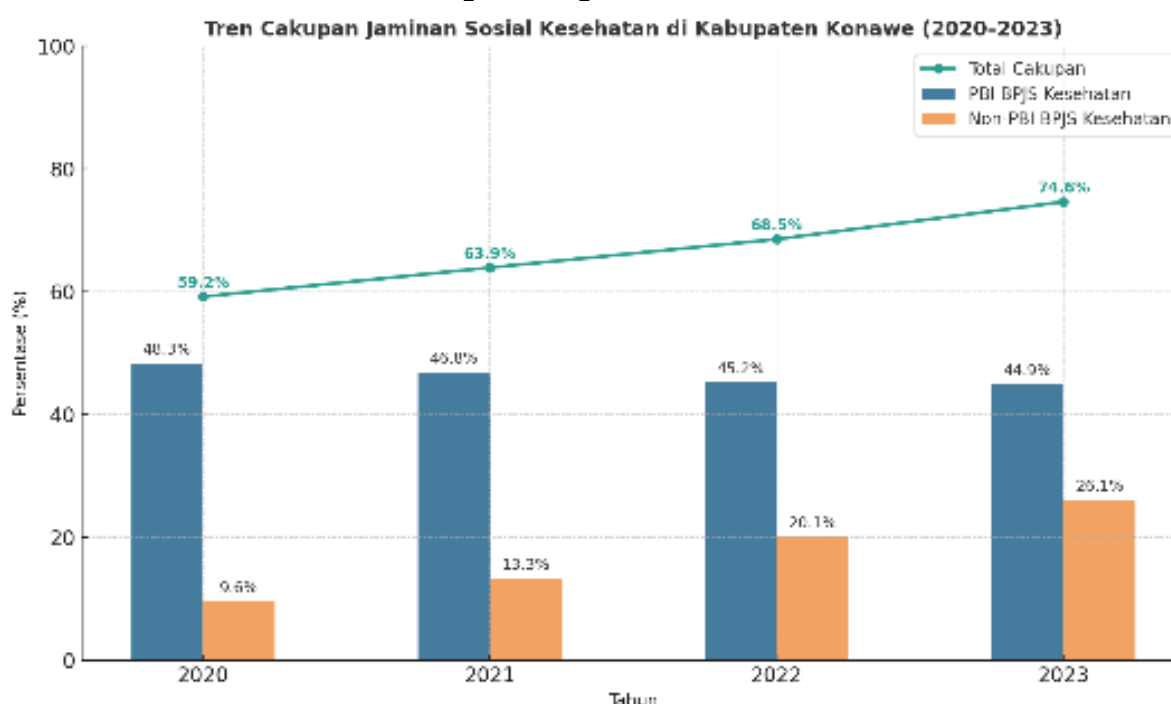
oleh berbagai skema jaminan kesehatan meningkat dari 59,19 persen pada tahun 2020 menjadi 74,63 persen pada tahun 2023.

Kepesertaan JKN melalui skema PBI tetap menjadi yang dominan, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dan pusat dalam menjamin akses layanan kesehatan dasar bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan. Meski proporsinya menurun secara relatif dari 48,34 persen (2020) menjadi 44,91 persen (2023), hal ini diimbangi dengan peningkatan tajam kepesertaan Non-PBI yang mencerminkan peningkatan kesadaran dan kapasitas ekonomi masyarakat untuk mendaftar secara mandiri. Peserta Non-PBI tumbuh lebih dari dua kali lipat, dari 9,55 persen menjadi 26,10 persen pada periode yang sama.

Selain itu, keberadaan alternatif skema perlindungan seperti Jamkesda, asuransi swasta, dan kepesertaan melalui perusahaan juga mulai menunjukkan kontribusi, meskipun masih dalam skala terbatas. Hal ini menunjukkan mulai terbangunnya keragaman sistem perlindungan yang bersifat komplementer di tingkat lokal.

Capaian ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Konawe telah bergerak menuju sistem perlindungan sosial yang lebih inklusif dan adaptif terhadap dinamika sosial dan ekonomi masyarakat. Meski demikian, tantangan masih tersisa dalam menjangkau kelompok non-formal dan masyarakat marginal, serta dalam memastikan kualitas layanan yang diterima oleh peserta JKN secara merata. Oleh karena itu, ke depan dibutuhkan strategi terpadu yang mengedepankan perluasan cakupan, peningkatan literasi jaminan kesehatan, dan penguatan tata kelola layanan kesehatan yang adil dan berkelanjutan.

Grafik 2. 22 Cakupan Kepesertaan BPJS Kesehatan



Sumber; BPJS Kesehatan

Perlindungan Sosial Nonkontributif

Perlindungan sosial nonkontributif di Kabupaten Konawe selama periode 2020–2024 menunjukkan capaian yang cukup signifikan dalam menjangkau kelompok masyarakat miskin dan rentan. Program-program bantuan sosial yang bersumber dari pemerintah pusat maupun daerah telah dijalankan secara konsisten, dengan jangkauan penerima manfaat yang cukup luas dan tersebar merata di seluruh wilayah kecamatan.

Hingga tahun 2024, terdapat lebih dari 56.000 rumah tangga penerima manfaat dari program-program utama seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Program Sembako, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Capaian ini setara dengan lebih dari 20% dari total rumah tangga di Kabupaten Konawe, dan lebih dari 80% dari total rumah tangga miskin yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Grafik 2. 23 Cakupan Bantuan Sosial



Sumber: BPJS Kesehatan

Meskipun demikian, tantangan masih dihadapi terkait akurasi data penerima manfaat, integrasi sistem informasi kesejahteraan sosial, serta ketersediaan data mikro pada kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia tanpa pendamping, dan anak terlantar. Pemerintah Kabupaten Konawe telah menginisiasi penguatan sistem verifikasi dan validasi data melalui pemutakhiran DTKS dan kolaborasi lintas sektor.

Upaya ke depan diarahkan pada pengembangan perlindungan sosial yang lebih adaptif, responsif, dan berbasis risiko, termasuk integrasi bansos dengan program pemberdayaan ekonomi lokal. Selain itu, penguatan kapasitas kelembagaan dan mekanisme pemantauan evaluasi program menjadi komponen penting untuk memastikan efektivitas jangka panjang dari perlindungan sosial nonkontributif sebagai fondasi ketahanan sosial masyarakat Konawe.

2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Salah satu pilar penting dalam pembangunan masyarakat yang berkeadaban adalah penguatan nilai-nilai spiritual, etika, dan budaya lokal. Namun demikian, penyusunan arah kebijakan pembangunan daerah dalam aspek “Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju” di Kabupaten Konawe masih menghadapi tantangan krusial, yaitu minimnya ketersediaan data

Distribusi bantuan sosial juga semakin adaptif terhadap dinamika ekonomi dan bencana, sebagaimana tercermin dalam implementasi BLT El Nino tahun 2023–2024, yang menysasar masyarakat terdampak fenomena cuaca ekstrem dan tekanan harga pangan. Program tersebut menunjukkan responsivitas pemerintah daerah dalam mendukung keberlanjutan daya beli dan ketahanan sosial ekonomi masyarakat.

resmi dan mutakhir, terutama terkait Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) dan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) di tingkat kabupaten.

Hingga saat ini, data paling terbaru yang tersedia berasal dari tahun 2021, di mana Kabupaten Konawe mencatat nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) sebesar 76,19, menjadikannya sebagai salah satu dari lima kabupaten dengan tingkat kerukunan tertinggi di Sulawesi Tenggara. Nilai tersebut menunjukkan tingkat toleransi, kesetaraan, dan kerja sama antarumat beragama yang relatif tinggi. Namun, tidak tersedianya data lanjutan untuk tahun 2022 hingga 2024 membuat penilaian terhadap tren kerukunan sosial menjadi tidak optimal, terutama dalam konteks perencanaan kebijakan jangka menengah dan upaya mitigasi terhadap potensi disrupsi sosial.

2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Indeks Perlindungan Anak

Kabupaten Konawe menunjukkan capaian yang progresif dalam bidang perlindungan anak dan pembangunan keluarga yang berkualitas. Hal ini tercermin dari nilai Indeks Perlindungan Anak (IPA) tahun terakhir yang mencapai 67,100, menempatkan Kabupaten Konawe di posisi ketiga tertinggi di antara seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Capaian ini mengindikasikan keberhasilan pemerintah daerah dalam membangun sistem perlindungan anak yang komprehensif melalui penyediaan layanan kesehatan, pendidikan dasar, serta perlindungan hukum bagi anak-anak. Tingginya nilai indeks tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Konawe telah mampu mewujudkan ekosistem yang relatif aman dan mendukung tumbuh kembang anak, baik melalui program formal seperti edukasi hak anak di sekolah, maupun melalui intervensi sosial dan perlindungan dari risiko kekerasan dan eksploitasi. Selain itu, peran aktif kelembagaan seperti Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak turut memperkuat intervensi pemerintah daerah dalam mempercepat pencapaian target RPJMD pada sektor ini.

Dalam konteks pembangunan keluarga berkualitas dan masyarakat inklusif, capaian ini menjadi salah satu pondasi penting dalam mewujudkan

generasi muda yang sehat secara fisik, mental, dan sosial. Upaya ini juga sejalan dengan strategi pengarusutamaan hak anak dan keluarga dalam kebijakan pembangunan daerah, yang mencakup penguatan edukasi parenting, peningkatan akses layanan dasar untuk keluarga kurang mampu, serta promosi kesetaraan gender dalam lingkungan domestik.

Namun demikian, ke depan masih diperlukan penguatan data spasial dan sektoral yang lebih terintegrasi untuk memastikan bahwa setiap kebijakan perlindungan anak dan keluarga dapat menjangkau kelompok rentan, termasuk anak-anak disabilitas, anak terlantar, dan keluarga dengan risiko sosial tinggi. Sinergi lintas sektor, serta dukungan dari pemerintah pusat dan organisasi masyarakat sipil, menjadi kunci keberlanjutan dari capaian yang telah diraih Kabupaten Konawe.

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Konawe selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan menggembirakan. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Konawe meningkat dari 92,65% pada tahun 2020 menjadi 93,81% pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan perkembangan positif dalam kesetaraan Pembangunan serta mencerminkan penguatan peran perempuan dalam mengakses hasil-hasil pembangunan, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. Namun masih menyisakan tantangan berupa kesenjangan representasi perempuan pada bidang politik dan jabatan struktural.

Kenaikan Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang stabil selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa kebijakan pengarusutamaan gender yang diterapkan di Konawe mulai menunjukkan hasil positif. Peningkatan partisipasi perempuan dalam pendidikan, akses terhadap layanan kesehatan yang merata, serta pemberdayaan ekonomi perempuan di tingkat rumah tangga maupun komunitas menjadi faktor pendorong utama. Selain itu, keterlibatan perempuan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes), pelatihan wirausaha, dan penyuluhan kesehatan reproduksi turut memperkuat pencapaian ini.

Nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 93,81% menandakan bahwa kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan semakin menipis. Artinya, perempuan di Konawe telah memperoleh manfaat pembangunan yang hampir setara dengan laki-laki. Capaian ini juga merefleksikan keberhasilan daerah dalam mendorong inklusivitas pembangunan dan peningkatan kualitas keluarga sebagai unit sosial dasar pembangunan manusia.

Grafik 2. 24 Indeks Pembangunan Gender Konawe



sumber; BPS Konawe

Meski demikian, beberapa tantangan masih perlu menjadi perhatian, terutama terkait representasi perempuan dalam jabatan struktural dan politik, serta akses perempuan terhadap lapangan kerja formal. Dalam kerangka perencanaan pembangunan jangka menengah 2025–2029, penguatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) perlu terus didorong melalui integrasi

strategi kesetaraan gender dalam setiap program lintas sektor, penyediaan data terpilah, dan peningkatan literasi gender di seluruh lapisan masyarakat

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Struktur demografis Kabupaten Konawe pada tahun 2024 mencerminkan potensi besar bagi penguatan daya saing sumber daya manusia. Dari total penduduk sebanyak 267.139 jiwa, jumlah penduduk yang masuk dalam usia produktif (15–64 tahun) tercatat sebanyak 142.046 jiwa, atau sekitar 60,7% dari total penduduk. Sementara itu, penduduk usia non-produktif yang terdiri dari usia muda (0–14 tahun) dan usia tua (65 tahun ke atas) masing-masing berjumlah 69.028 jiwa dan 22.765 jiwa.

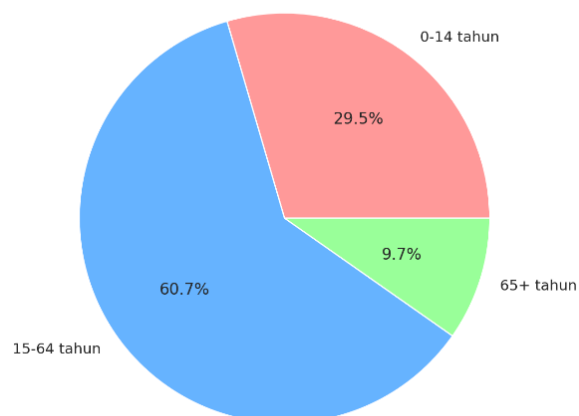
Dari struktur tersebut, rasio ketergantungan total di Kabupaten Konawe berada pada angka 64,62%, yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung beban 65 penduduk usia non-produktif. Rasio ketergantungan muda sebesar 48,60% dan rasio ketergantungan tua sebesar 16,02% menandakan bahwa beban utama masih berasal dari kelompok usia muda.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Konawe sedang berada dalam masa bonus demografi, namun dengan tingkat ketergantungan yang masih cukup tinggi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan kerja, dan akses terhadap layanan kesehatan menjadi sangat penting untuk mengoptimalkan produktivitas penduduk usia kerja serta meminimalkan beban ekonomi terhadap kelompok usia non-produktif.

Penguatan daya saing SDM harus diarahkan pada pengembangan program pendidikan vokasi, pelatihan tenaga kerja, serta perluasan cakupan perlindungan sosial produktif guna mengantisipasi ketimpangan dan menjaga keberlanjutan pembangunan ekonomi daerah.

Grafik 2. 25 Komposisi Penduduk Kabupaten Konawe

Komposisi Penduduk Kabupaten Konawe Tahun 2024

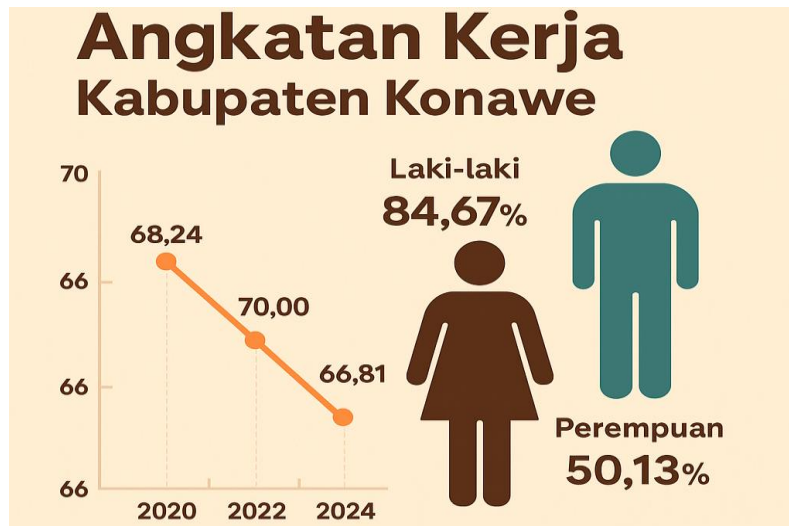


2.1.3.2 Iptek Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

Selama periode 2020 hingga 2024, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Konawe menunjukkan kecenderungan yang relatif stabil dengan fluktuasi yang tidak terlalu tajam. Pada tahun 2020, TPAK tercatat sebesar 68,24 persen, naik menjadi 70,00 persen pada tahun 2021, namun

kemudian menurun ke 66,81 persen pada 2022. Tren ini kembali membaik di tahun-tahun berikutnya, yakni sebesar 67,93 persen pada 2023 dan 68,03 persen pada tahun 2024. Konsistensi TPAK di atas 66 persen mengindikasikan bahwa mayoritas penduduk usia kerja di Konawe aktif secara ekonomi, baik bekerja maupun sedang mencari pekerjaan, sehingga menjadi indikator penting bagi dinamika pembangunan ekonomi daerah.

Grafik 2. 26 Angkatan Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin



Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2024, terdapat kesenjangan partisipasi yang cukup signifikan. TPAK laki-laki mencapai 84,67 persen, sedangkan TPAK perempuan hanya 50,13 persen.

Sumber: BPS Konawe

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki partisipasi yang jauh lebih rendah dalam pasar kerja dibandingkan laki-laki. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor struktural dan kultural, seperti keterbatasan akses terhadap lapangan kerja yang layak, dominasi peran domestik, serta kurangnya dukungan kebijakan afirmatif di dunia kerja.

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Konawe menunjukkan tren yang positif dengan penurunan cukup signifikan selama lima tahun terakhir. Dari angka 5,42 persen pada tahun 2020, TPT menurun menjadi 2,95 persen pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja oleh pasar, yang kemungkinan dipengaruhi oleh pertumbuhan industri pengolahan dan kegiatan hilirisasi yang semakin masif. Namun demikian, TPT perempuan (3,91%) masih lebih tinggi dibandingkan TPT laki-laki (2,42%), yang menandakan bahwa perempuan masih menghadapi tantangan lebih besar dalam memperoleh pekerjaan.

Pada tahun 2024, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Konawe mencapai 137.559 orang, terdiri dari 133.504 orang bekerja dan 4.055 orang penganggur. Sementara itu, jumlah penduduk usia kerja yang tergolong bukan angkatan kerja mencapai 64.658 orang, didominasi oleh perempuan sebanyak 48.599 orang. Fakta ini mengindikasikan perlunya dorongan kebijakan yang lebih proaktif untuk meningkatkan partisipasi ekonomi perempuan, melalui pelatihan kerja, fasilitasi kewirausahaan perempuan, hingga perluasan lapangan kerja yang ramah gender.

Secara umum, data ketenagakerjaan di Kabupaten Konawe menggambarkan bahwa meskipun partisipasi angkatan kerja dan penyerapan tenaga kerja cukup baik, tantangan utama yang perlu dijawab dalam lima tahun ke depan adalah pengurangan kesenjangan partisipasi gender serta penguatan akses terhadap pekerjaan yang produktif, layak, dan berkelanjutan bagi seluruh penduduk usia kerja. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan ketenagakerjaan dalam RPJMD ke depan harus diarahkan untuk mendorong reformasi pasar tenaga kerja yang inklusif, memperluas program padat karya, serta menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif terhadap transformasi ekonomi lokal.

Rasio PDRB Industri Pengolahan sebagai Cermin Produktivitas Ekonomi Konawe



Sektor industri pengolahan merupakan salah satu penggerak utama perekonomian Kabupaten Konawe dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan data PDRB atas dasar harga konstan tahun 2020, kontribusi industri pengolahan terhadap total PDRB Kabupaten Konawe pada tahun 2024 mencapai Rp11.799,22 miliar dari total Rp39.423,26 miliar, sehingga menghasilkan rasio sebesar 29,92%. Capaian ini menegaskan posisi strategis sektor ini dalam struktur ekonomi daerah.

Gambar 2. 16 Rasio PDRB Industri Pengolahan Konawe

Angka tersebut menunjukkan bahwa hampir sepertiga dari keseluruhan output ekonomi Kabupaten Konawe ditopang oleh aktivitas industri pengolahan, khususnya yang berbasis pada hilirisasi komoditas nikel dan logam lainnya. Keberadaan kawasan industri Morosi sebagai klaster industri besar telah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan nilai tambah melalui proses pengolahan bahan mentah menjadi produk setengah jadi maupun jadi, selaras dengan kebijakan nasional hilirisasi mineral.

Rasio ini juga mencerminkan adanya transformasi ekonomi dari sektor primer menuju sektor sekunder, serta menjadi indikator meningkatnya produktivitas tenaga kerja dan teknologi dalam proses produksi. Tingginya rasio ini memperlihatkan kapasitas daerah dalam menarik investasi, menyerap tenaga kerja, dan menghasilkan output bernilai tambah tinggi.

Namun demikian, dominasi sektor industri pengolahan juga menimbulkan tantangan struktural, terutama dalam hal ketahanan ekonomi jangka panjang, keberlanjutan lingkungan, serta keseimbangan kontribusi sektor lainnya seperti pertanian, UMKM, dan ekonomi kreatif. Oleh karena itu, arah pembangunan ke depan perlu difokuskan pada diversifikasi sektor unggulan, peningkatan daya saing inovasi daerah, serta penguatan keterkaitan antara industri pengolahan dengan sektor-sektor pendukung lainnya melalui pendekatan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Indeks Inovasi Daerah: Progres Transformasi Menuju Tata Kelola yang Inovatif

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan progresif, Kabupaten Konawe menunjukkan tren peningkatan pada Indeks Inovasi Daerah selama tiga tahun terakhir. Berdasarkan data resmi Kemendagri, skor inovasi daerah Kabupaten Konawe meningkat dari 14,90 poin pada tahun 2022, menjadi 24,34 poin pada tahun 2023, dan mencapai 34,63 poin pada tahun 2024. Kenaikan skor tersebut mencerminkan adanya inisiatif awal dalam penguatan aspek kelembagaan, digitalisasi layanan, serta dokumentasi praktik-praktik inovatif di lingkungan pemerintahan.

Meskipun demikian, berdasarkan klasifikasi nasional, capaian tersebut masih berada dalam kategori "Kurang Inovatif", dengan batas minimal menuju kategori "Inovatif" adalah 50 poin. Kondisi ini

mengindikasikan bahwa Kabupaten Konawe masih menghadapi tantangan struktural dan teknis, terutama terkait rendahnya kapasitas pengembangan ekosistem inovasi, belum optimalnya dukungan regulatif, serta masih terbatasnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan akademisi.

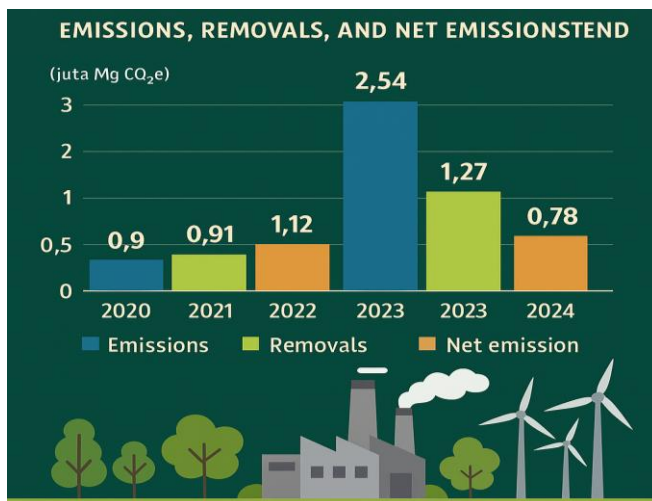
Dalam konteks pembangunan jangka menengah, penguatan indeks inovasi daerah menjadi salah satu instrumen strategis untuk mempercepat transformasi kinerja birokrasi serta meningkatkan produktivitas sektor-sektor ekonomi berbasis pengetahuan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah sistematis antara lain: pembentukan kelembagaan inovasi daerah, penyusunan regulasi inovasi daerah, pengembangan inkubator inovasi layanan publik, serta digitalisasi proses kerja berbasis smart governance.

Dengan tren positif yang telah ditunjukkan, Pemerintah Kabupaten Konawe perlu mempercepat akselerasi reformasi birokrasi yang berbasis inovasi secara terencana, inklusif, dan terukur, agar mampu bertransformasi dari daerah yang "kurang inovatif" menjadi "daerah inovatif" pada periode RPJMD 2025–2029.

2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, Kabupaten Konawe menghadapi tantangan penting dalam menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan. Berdasarkan data global tentang cadangan karbon dan emisi hutan, Konawe tercatat memiliki potensi stok karbon di atas permukaan tanah (aboveground carbon stocks) sebesar $\pm 75,3$ juta Mg (Megagram) C pada tahun 2000, dengan kepadatan rata-rata mencapai 631 Mg C/ha pada kawasan berhutan lebat. Angka ini menunjukkan tingginya kapasitas ekologis daerah dalam menyimpan karbon, yang merupakan salah satu indikator fundamental dalam pembangunan ekonomi hijau.

Grafik 2. 27 Kondisi Emisi Karbon Kabupaten Konawe



Namun demikian, data emisi karbon dari sektor kehutanan menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Pada tahun 2021, total emisi karbon hutan mencapai 2,5 juta Mg CO₂e, sementara kemampuan serapan (removals) hanya sebesar 1,1 juta Mg CO₂, menghasilkan net flux

atau emisi bersih sebesar +1,38 juta Mg CO₂e. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Konawe masih merupakan emitter neto, yang berarti pengelolaan sektor LULUCF (Land Use/Penggunaan Lahan, Land Use Change/Perubahan Penggunaan Lahan, dan Forestry/Kehutanan) belum optimal dalam mendukung agenda ekonomi hijau.

Dalam konteks ekonomi biru, Kabupaten Konawe memiliki potensi signifikan melalui pemanfaatan sumber daya pesisir, sungai, dan danau, khususnya dalam subsektor perikanan budidaya dan tangkap. Namun, potensi ini belum sepenuhnya diintegrasikan dalam kebijakan pembangunan berbasis keberlanjutan

2.1.3.4 Transformasi Digital

Transformasi digital merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, pelayanan publik yang adaptif, serta peningkatan produktivitas ekonomi daerah berbasis teknologi. Di Kabupaten Konawe, pengarusutamaan transformasi digital masih berada pada tahap awal dan menghadapi sejumlah tantangan struktural, baik dari sisi infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia, maupun pemanfaatan teknologi dalam sektor-sektor strategis.

Hingga saat ini, ketersediaan data yang dapat menggambarkan capaian pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Kabupaten Konawe masih sangat terbatas. Belum tersedianya indikator seperti Indeks Pembangunan TIK (IP-TIK), rasio desa berakses internet, serta jumlah tenaga kerja di bidang digital menjadi kendala dalam menyusun kebijakan yang

berbasis bukti (evidence-based policy) untuk mendukung akselerasi transformasi digital.

Namun demikian, terdapat sejumlah indikasi awal yang menunjukkan arah kebijakan transformasi digital telah mulai dirintis. Di antaranya adalah:

- Penerapan sistem informasi pemerintahan daerah berbasis daring di beberapa perangkat daerah;
- Digitalisasi layanan administrasi kependudukan dan perpajakan daerah secara bertahap;
- Pemanfaatan media sosial dan website resmi dalam diseminasi informasi pembangunan;
- Inisiatif pengembangan literasi digital melalui kegiatan pendidikan formal dan nonformal.

2.1.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Kabupaten Konawe menunjukkan peran strategis dalam mendukung integrasi ekonomi domestik dan global, terutama melalui kontribusinya dalam aktivitas ekspor yang mendominasi struktur perdagangan luar negeri Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini tercermin dari tren distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Net Ekspor sebesar 35,92% pada tahun 2024.

Tabel 2. 16 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran di Kabupaten Konawe

PDRB Pengeluaran	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran di Kabupaten Konawe					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsumsi Rumah Tangga	58,53	54,34	50,52	43,90	37,77	36,11
Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPR)	1,19	1,07	0,99	0,88	0,78	0,79
Konsumsi Pemerintah	16,11	13,63	12,07	9,89	8,34	8,52
Pembentukan Modal Tetap Bruto	33,09	29,45	28,84	24,71	20,48	19,09
Perubahan Inventori	0,02	0,01	0,02	0,02	0,89	0,57
Net Ekspor	-8,94	1,50	7,56	20,46	31,75	34,92
PDRB	100	100	100	100	100	100

Sumber; BPS Konawe

2.1.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Indeks Desa Membangun (IDM)

Sebagai salah satu instrumen pengukuran kemajuan pembangunan desa, Indeks Desa Membangun (IDM) menjadi indikator strategis dalam menilai kapasitas desa dalam aspek kemandirian, ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi. IDM juga menjadi dasar dalam penetapan arah kebijakan afirmatif pembangunan perdesaan.

Berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), **Kabupaten Konawe** menunjukkan tren positif dalam pengentasan desa tertinggal yaitu 100 desa dari total 291 desa pada tahun 2022.

Stabilitas Ekonomi Makro Kabupaten Konawe

Stabilitas ekonomi makro merupakan pilar fundamental dalam menjaga kesinambungan fiskal dan mendukung kebijakan pro-stabilitas, pro-pertumbuhan, dan pro-pemerataan di Kabupaten Konawe. Dalam konteks pembangunan daerah, pengelolaan fiskal yang kredibel, sistem perpajakan yang sehat, dan pengendalian inflasi yang terkendali menjadi prasyarat utama untuk menciptakan ruang fiskal yang berkelanjutan dan mendukung investasi jangka panjang.

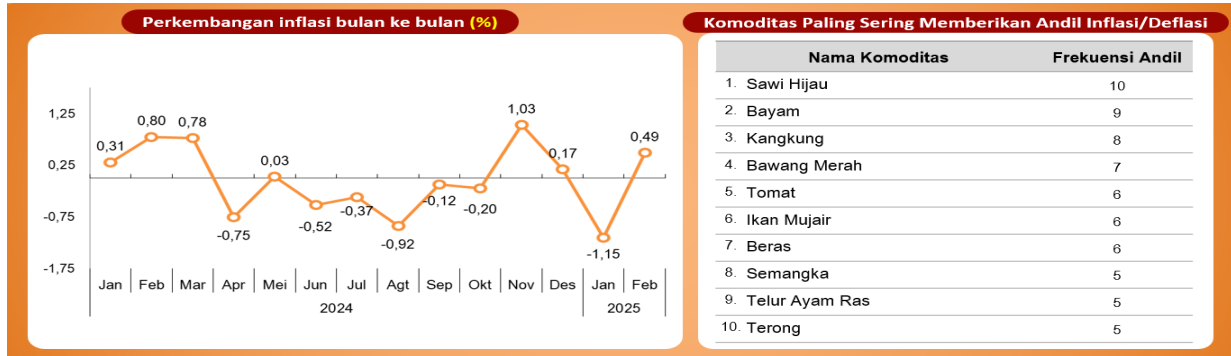
Pada aspek Pengendalian inflasi daerah sangat dipengaruhi oleh dinamika pasokan pangan, efisiensi distribusi, serta fluktuasi harga komoditas energi dan bahan pokok. Kabupaten Konawe sebagai daerah yang tengah tumbuh secara pesat, menghadapi tantangan menjaga stabilitas harga di tengah peningkatan aktivitas ekonomi dan konsumsi. Koordinasi kebijakan antara Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, dan stakeholder terkait dalam pengendalian harga serta pemantauan ketersediaan barang menjadi kunci utama untuk memastikan inflasi daerah tetap dalam kisaran yang stabil dan terkendali.

Inflasi Kabupaten Konawe

Perkembangan inflasi di Kabupaten Konawe selama periode tahun 2024 hingga awal 2025 menunjukkan dinamika yang fluktuatif, mencerminkan ketergantungan perekonomian lokal terhadap faktor musiman, pasokan komoditas pangan, dan intervensi kebijakan pemerintah.

Inflasi menjadi indikator penting untuk menilai stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat, sehingga pemantauan dan pengelolaannya menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan.

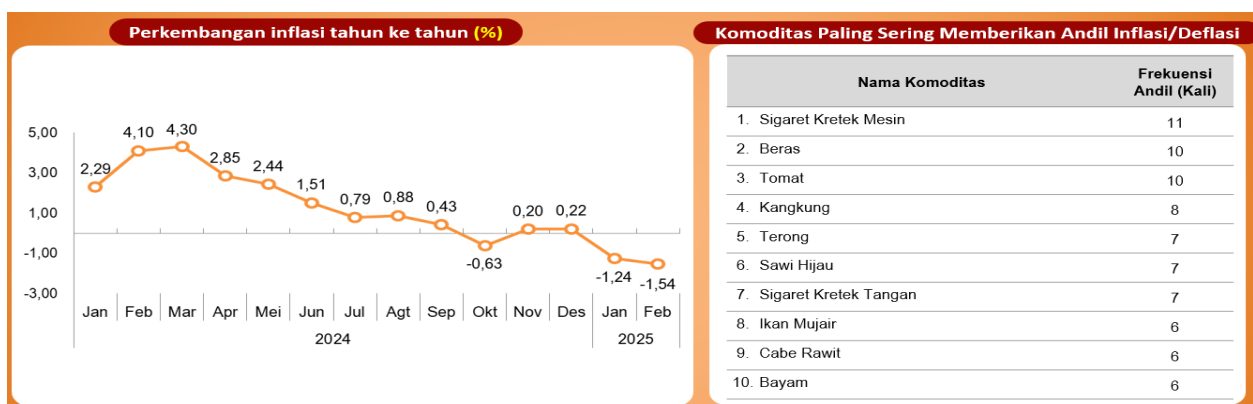
Grafik 2. 28 Perkembangan Inflasi bulan-bulan Konawe



Sumber: BPS Konawe

Dari sisi inflasi bulanan (month-to-month/m-to-m), sepanjang tahun 2024 Kabupaten Konawe mengalami beberapa episode inflasi bulanan yang fluktuatif. Inflasi tertinggi tercatat pada bulan November 2024 sebesar 1,03%, sementara deflasi terdalam terjadi pada Agustus 2024 sebesar -0,92%. Di awal tahun 2025, inflasi m-to-m mengalami penurunan yang signifikan, dengan deflasi sebesar -1,15% pada Januari dan -0,49% pada Februari. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh kebijakan nasional berupa pemberian diskon tarif listrik sebesar 50 persen bagi pelanggan rumah tangga PLN, yang secara langsung menekan komponen pengeluaran rumah tangga dan menurunkan tekanan inflasi.

Grafik 2. 29 Perkembangan inflasi tahun-tahun



Sementara itu, inflasi tahunan (year-on-year/y-o-y) juga menunjukkan tren yang menurun tajam. Dari posisi 4,30% pada Maret 2024, angka inflasi terus merosot hingga mengalami deflasi tahunan sebesar -1,54% pada Februari 2025. Tren ini menunjukkan adanya tekanan permintaan yang menurun dan dampak kuat dari pengendalian harga energi serta stabilitas pasokan bahan pangan lokal.

Analisis komoditas yang paling sering memberikan andil terhadap inflasi dan deflasi menunjukkan bahwa inflasi di Kabupaten Konawe sangat dipengaruhi oleh harga-harga kebutuhan pokok, terutama kelompok sayuran seperti sawi hijau, bayam, kangkung, tomat, serta komoditas strategis lainnya seperti beras dan bawang merah. Sementara itu, komoditas seperti rokok kretek mesin dan tangan, serta bahan pangan segar, tercatat konsisten menjadi penyumbang utama perubahan harga secara tahunan. Hal ini mencerminkan pentingnya penguatan sektor pertanian dan stabilisasi harga bahan pangan sebagai strategi utama pengendalian inflasi daerah.

Secara umum, laju inflasi di Kabupaten Konawe sepanjang periode ini berada dalam kondisi yang relatif terkendali, meskipun tetap menunjukkan kerentanan terhadap faktor eksternal dan kebijakan pusat. Oleh karena itu, penguatan cadangan pangan strategis, stabilisasi distribusi logistik, serta pemantauan harga komoditas secara real-time perlu menjadi bagian dari kebijakan daerah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi daya beli Masyarakat.

Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas di Kabupaten Konawe adalah 0,83, berikut ini perkembangan angka kriminalitas di Kabupaten Konawe Tahun 2020-2024.

Tabel 2. 17 Angka Kriminalitas

No.	Jenis Kriminalitas	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kasus pembunuhan	2	2	5	1	-
2	Jumlah kasus penganiayaan Berat	2	1	71	1	1
3	Pencurian dengan Kekerasan	0	0	0	0	16
4	Jumlah kasus pencurian Kendaraan Bermotor	12	0	9	3	9
5	Pasal 359 KUHP	2	3	214	269	-
6	Pembakaran	1	0	0	0	-
7	Perjudian	3	0	4	1	2

No.	Jenis Kriminalitas	2020	2021	2022	2023	2024
8	Jumlah Kejahatan seksual	1	1	1	1	1
9	Pengerusakan	3	7	0	1	4
10	Jumlah kasus nakoba	17	20	22	22	14
11	Jumlah penduduk	257,011	261,116	266.299	269.520	267.179
12	Angka Kriminalitas/ 100.000 Penduduk	16,73	13,02	122,47	110,93	17,6

(Sumber : BPS Konawe 2024)

Data angka kriminalitas di Kabupaten Konawe selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup mencolok, baik dari sisi jumlah maupun jenis tindak kriminal. Kasus pembunuhan relatif stabil dan rendah, sementara kasus penganiayaan berat melonjak drastis pada 2022. Kasus pencurian dengan kekerasan baru muncul di 2024, dan pencurian kendaraan bermotor mengalami tren naik-turun. Pelanggaran terkait Pasal 359 KUHP meningkat tajam pada 2022 dan 2023, namun tidak tercatat pada 2024. Kejahatan seperti pembakaran, perjudian, dan pengerusakan menunjukkan pola tidak konsisten, sedangkan kejahatan seksual tetap konstan setiap tahunnya. Kasus narkoba terbilang tinggi, terutama pada 2022 dan 2023, meskipun menurun di 2024. Tingkat kriminalitas per 100.000 penduduk mengalami lonjakan pada 2022, namun kemudian menurun secara signifikan di tahun-tahun berikutnya, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di wilayah ini. Data ini mengindikasikan adanya penurunan tingkat kriminalitas relatif terhadap pertumbuhan populasi.

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang berintegritas dan Adaptif

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, Kabupaten Konawe menunjukkan kemajuan bertahap dalam penguatan aspek regulasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif. Hal ini tercermin dari sejumlah indikator kunci, antara lain Indeks Reformasi Hukum, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Indeks Integritas Daerah, dan capaian Indeks Pelayanan Publik.

Tabel 2. 18 Indikator Urusan Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	-	-	-	-	66,98
2	Indeks SPBE	Indeks	1,70	1,70	1,70	1,84	2,92
3	Indeks Pelayanan Publik	Zona	Merah	Merah	Merah	Merah	Hijau
4	Indeks Integritas Daerah	Indeks	64	64,32	65	65,5	66,21

Sumber : Bagian Hukum, Dinas Kominfo, Bagian Orpeg, Inspektorat Konawe

Capaian Indeks Reformasi Hukum baru tersedia pada tahun 2024 dengan skor 66,98, menandakan bahwa upaya awal pembenahan sistem hukum daerah mulai dapat diukur secara kuantitatif. Nilai tersebut berada pada kategori “cukup baik”, yang mengindikasikan masih perlunya penguatan terhadap peraturan daerah, penataan regulasi yang sinkron antar level pemerintahan, serta peningkatan kapasitas aparatur dalam perumusan dan implementasi kebijakan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Indeks SPBE meningkat dari 1,70 pada tahun 2020 menjadi 2,92 pada tahun 2024 yang mencerminkan adanya kemajuan, namun capaian tersebut masih berada pada kategori “kurang” sehingga masih perlu dilakukan percepatan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis digital.

Di sisi lain, Indeks Integritas Daerah mengalami peningkatan secara konsisten dari 64,00 pada tahun 2020 menjadi 66,21 pada tahun 2024. namun tren peningkatannya masih relatif lambat sehingga perlu upaya lebih intensif untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Disisi lain tren ini juga menunjukkan adanya perbaikan dalam praktik tata kelola yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan etika aparatur. Kenaikan ini juga mengindikasikan bahwa sistem pencegahan korupsi dan pengawasan internal mulai efektif, meskipun masih terdapat tantangan dalam membangun budaya birokrasi yang sepenuhnya bersih dan melayani.

Namun, tantangan utama dalam domain tata kelola justru terlihat dari Indeks Pelayanan Publik, yang mana dari hasil evaluasi Ombudsman selama tahun 2020 hingga 2023 berada dalam zona merah, dan baru memasuki zona hijau pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa kualitas pelayanan publik Kabupaten Konawe selama empat tahun awal periode RPJMD sebelumnya berada dalam kategori buruk, mencakup lemahnya standar pelayanan, rendahnya kepuasan masyarakat, dan belum maksimalnya fungsi pengawasan kinerja unit layanan. Perubahan zona menjadi hijau pada tahun 2024 mencerminkan adanya terobosan kebijakan, reformasi internal organisasi perangkat daerah, serta peningkatan kualitas SDM pelayanan dalam satu tahun terakhir. Namun karena perubahan ini baru terjadi di tahun terakhir, maka konsistensi perbaikan dan replikasi praktik baik ke seluruh OPD masih menjadi tantangan utama ke depan.

Secara umum, capaian indikator dalam domain regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Konawe telah menapaki fondasi penting menuju pemerintahan yang bersih, efisien, dan responsif terhadap dinamika lingkungan strategis. Kendati demikian, capaian ini masih menyisakan ruang perbaikan terutama dalam hal konsistensi reformasi hukum, percepatan transformasi digital lintas sektor, dan penguatan integritas kelembagaan secara menyeluruh.

2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Yang Tangguh, Dan Demokrasi Substansial

Capaian kinerja urusan pemerintahan bidang hukum berkeadilan, keamanan nasional yang tangguh, dan demokrasi substansial selama periode 2020–2024 menunjukkan tren yang berbeda pada dua indikator utama. Persentase penegakan Peraturan Daerah (PERDA) mengalami peningkatan signifikan dari 87,50 persen pada tahun 2020 menjadi 100 persen sejak tahun 2021 hingga 2024. Hal ini menggambarkan adanya konsistensi dalam penegakan regulasi daerah, meskipun capaian sempurna yang stabil ini perlu ditinjau lebih lanjut agar benar-benar mencerminkan implementasi yang substantif, bukan hanya formal administratif. Keberhasilan capaian penegakan PERDA didorong oleh komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan regulasi yang ada, dukungan perangkat hukum serta

aparatur yang memadai, dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap aturan daerah

Tabel 2. 19 Indikator Urusan Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Yang Tangguh, Dan Demokrasi Substansial

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase Penegakan PERDA	Persen	87,50	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Pengambilan Keputusan	Kelompok	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Sumber: Bagian Hukum, Bappeda, Satpol PP

Sementara itu, Indikator jumlah masyarakat yang terlibat dalam pengambilan keputusan pada periode 2020–2024 menunjukkan tren positif yang menandakan bahwa Kabupaten Konawe senantiasa menjaga prinsip partisipasi dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan. Meskipun secara angka capaian kinerja terlihat stabil pada 10 kelompok, namun secara substansi indikator ini mencerminkan keterlibatan seluruh stakeholder strategis, antara lain perangkat daerah, instansi vertikal, DPRD, akademisi, tim ahli penyusunan RPJMD, perbankan, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pemerintah desa, dan NGO. Konsistensi pelibatan multipihak tersebut menjadi bukti bahwa mekanisme perencanaan pembangunan, khususnya melalui forum Musrenbang RKPD, telah berjalan inklusif dan demokratis. Dengan pola ini, setiap keputusan pembangunan yang ditetapkan tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga mengakomodasi aspirasi dari bawah serta memperkuat legitimasi kebijakan yang dihasilkan.

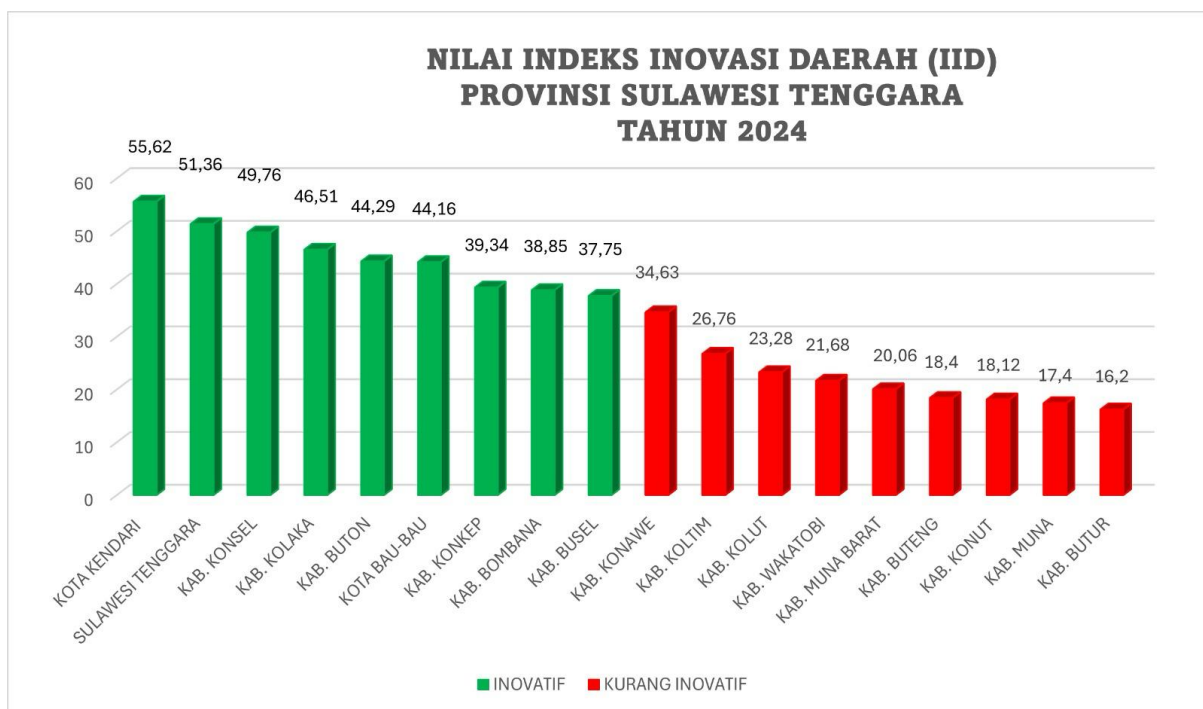
2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi Dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Ketangguhan daerah dalam menghadapi tantangan geopolitik, ekonomi, dan sosial tidak hanya bergantung pada aspek pertahanan fisik dan diplomasi formal, tetapi juga ditentukan oleh kemampuan daerah dalam menciptakan kebijakan yang inovatif, solutif, dan adaptif. Dalam konteks ini, Indeks Inovasi Daerah menjadi salah satu indikator strategis untuk mengukur kapasitas daerah dalam mendorong transformasi tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kemajuan.

Kabupaten Konawe berkomitmen untuk meningkatkan kinerja inovasi di sektor publik guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing. Inovasi daerah mencakup pembaruan dalam pelayanan publik, kebijakan daerah, sistem kelembagaan, serta pemanfaatan teknologi informasi yang mampu mempercepat penyelesaian masalah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Peningkatan nilai Indeks Inovasi Daerah juga menjadi simbol kesiapan Konawe dalam memperkuat diplomasi antarwilayah, menjalin kemitraan strategis, serta menunjukkan eksistensi daerah sebagai bagian dari sistem pertahanan dan ketahanan nasional secara menyeluruh. Oleh karena itu, strategi inovasi menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya membangun Konawe yang tangguh, adaptif, dan mampu memberi pengaruh positif dalam lingkup kawasan maupun nasional.

Grafik 2. 30 Indeks Inovasi Daerah Prov Sultra Tahun 2024



2.1.4.4 Kinerja Urusan Pemerintah Daerah

2.1.4.4.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe. Serangkaian indikator yang digunakan

dalam menilai capaian pembangunan pada bidang ini rata-rata menunjukkan perkembangan positif.

Tabel 2. 20 Perkembangan Capaian Indikator Bidang Pendidikan

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	94.26	91.70	91.56	92.87	92.10
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	99.63	95.02	96.77	93.87	99.28
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	84.87	86.23	87.21	87.13	93.10
4	Angka partisipasi kasar (APK) Sekolah Dasar	Persen	108.84	107.43	108.79	108.04	107.41
5	Angka partisipasi kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama	Persen	83.02	83.17	88.51	86.23	107.41
6	Angka pendidikan yang ditamatkan (APT SD)	Persen	93.65	94.43	93.45	95.65	92.09
7	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Persen	99.63	99.30	98.86	98.77	94.39
8	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	Persen	93.75	93.83	93.87	93.26	93.10
9	Angka Putus Sekolah(APS) SD/MI	Persen	0.61	0.80	1.54	0.51	0.60
10	Angka Putus Sekolah(APS) SMP/MTs	Persen	0.00	0.00	3.30	1.9	0.60
11	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persen	97.43	97.10	97.48	98.05	90.55
12	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persen	96.98	96.27	98.12	97.61	97.96
13	Angka Melanjutkan (AM)dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	96.31	97.74	93.29	97.7	93.18
14	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persen	97.89	96,,52	97.31	98.97	98.50
15	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persen	68.31	75.58	79.94	84.06	85.02
16	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	Persen	83.58	83.58	83.58	83.58	82.09
17	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Persen	0.75	0.77	0.75	0.77	0.93
18	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Persen	8.78	9.05	9.18	8.92	0.99
19	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	Persen	8.83	8.72	8.50	6.07	9.14
20	Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata	Persen	0.00	0.00	10.46	9.01	13.24
21	Angka melek hurufpenduduk usia 15-24tahun, perempuan danlaki-laki	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
22	Penduduk yang berusia>15 Tahun melek huruf(tidak buta aksara)	Persen	96.10	93.76	97.91	97.16	97.99
23	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	86.37	80.14	85.90	86.42	71.15

Sumber : Dikbud Konaawe

Pada periode tahun 2020 hingga 2024, capaian kinerja sektor pendidikan di Kabupaten Konawe menunjukkan perkembangan yang relatif positif meskipun masih terdapat beberapa dinamika yang perlu menjadi perhatian. Tingkat partisipasi warga negara usia 7–12 tahun yang

berpartisipasi dalam pendidikan dasar tetap tinggi dan mendekati angka ideal, sedangkan tingkat partisipasi warga usia 13–15 tahun pada jenjang pendidikan menengah pertama terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar secara konsisten berada di atas 100 persen, menandakan tingginya keterjangkauan layanan pendidikan dasar. Sementara itu, APK Sekolah Menengah Pertama menunjukkan peningkatan signifikan pada akhir periode, yang mencerminkan semakin meluasnya akses terhadap pendidikan lanjutan di Kabupaten Konawe.

Angka putus sekolah pada jenjang SD relatif rendah dan dapat dikendalikan di bawah satu persen, sedangkan pada jenjang SMP sempat mengalami kenaikan pada tahun 2022 namun berhasil ditekan kembali pada tahun 2024. Capaian angka kelulusan untuk jenjang SMP/MTs tetap stabil di atas 96 persen, namun untuk jenjang SD/MI pada tahun 2024 tercatat mengalami penurunan yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs maupun dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA secara umum berada pada kisaran yang tinggi dan stabil, menandakan keberlanjutan jenjang pendidikan formal di Kabupaten Konawe cukup terjamin.

Perkembangan kondisi sarana dan prasarana sekolah dasar mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, terlihat dari persentase sekolah dasar dengan kondisi bangunan baik yang meningkat secara konsisten. Namun demikian, kondisi bangunan untuk jenjang sekolah menengah pertama dan atas cenderung stagnan bahkan sedikit menurun pada tahun terakhir. Rasio guru dan murid yang fluktuatif serta menurunnya persentase guru yang memiliki kualifikasi minimal S1/D-IV menjadi catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti untuk memastikan mutu layanan pendidikan tetap terjaga.

Pencapaian indikator-indikator tersebut tidak terlepas dari sejumlah faktor pendorong yang mendukung peningkatan kinerja sektor pendidikan, di antaranya keberlanjutan program wajib belajar, dukungan pembiayaan melalui berbagai skema bantuan pendidikan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dasar dan menengah. Di sisi lain,

masih terdapat faktor penghambat seperti belum optimalnya layanan pendidikan anak usia dini yang tercermin dari penurunan angka partisipasi PAUD, terbatasnya pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik.

Dengan demikian, upaya terus ditingkatkan dalam berbagai aspek pendidikan di Kabupaten Konawe perlu dilakukan untuk mencapai standar yang lebih baik dan memberikan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh siswa.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe. Serangkaian indikator yang digunakan dalam menilai capaian pembangunan pada bidang ini rata-rata menunjukkan perkembangan positif.

Tabel 2. 21 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Bidang Kesehatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Persen	0,07	0,1	0,1	0,98	0,97
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	60,47	75,95	83,6	74,06	58,64
4	Persentase ibu bersalin Mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	81,06	89,88	89,46	86,1	71,76
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	85,6	90,33	93,22	88,39	74,4
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	69,32	84,56	78,21	91,82	83,31
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yg mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	16,11	23,14	73,71	85,65	86,42
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	37,76	47,5	56,36	69,03	71,53
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	54,28	62,98	89,69	82,75	86,64
10	Persentase penderita hipertensi yg mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	24,69	47,56	50,96	61,46	62,16
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	26,14	87,03	80,9	100	88,39
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	37,17	93,4	68,31	92,05	90,45
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	49,87	61,87	59,66	67,89	72,68
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan	Persen	14,11	59,98	66,62	74,5	51,24

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
	pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar						
15	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	per 1000 kelahiran hidup	1,68	0,48	4,52	6,68	10,95
16	Angka kelangsungan hidup bayi	per 1000 kelahiran hidup	1,68	0,48	4,52	6,68	10,95
17	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	per 1000 kelahiran hidup	0,21	0,24	0	0,22	0,82
18	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	per 1000 kelahiran hidup	5,26	3,64	2,88	0	9,04
19	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	per 100,000 kelahiran hidup	168,46	218,18	164,41	155,8	82,15
20	Rasio posyandu per satuan balita	per satuan balita	1	1,5	1,47	2,05	1,48
21	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	per satuan penduduk	0,03	0,03	0,03	0,03	69,25
22	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	per satuan penduduk	0,01	0,01	0,01	0,01	0,7781
23	Rasio dokter per satuan penduduk	per satuan penduduk	0,51	0,7	0,52	0,36	0,45
24	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	per satuan penduduk	0,51	0,7	0,52	0,36	9,34
25	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	33,12	44,94	41,63	42,65	100
26	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	81,06	89,88	89,67	81,23	70,53
27	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	82,2	64,59	63,46	35,98	21,94
28	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
29	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	Persen	105,54	92	90,38	86,77	62,04
30	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	per 100.000 penduduk	2,08	0	2,86	2,86	2,69
31	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	Persen	62,81	0,14	31,65	46,8	13,57
32	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	33,85	58,7	61,58	66,59	78,51
33	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	per 100.000 penduduk	54,99	112,91	167,71	157,47	404,21
34	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	per 100.000 penduduk	6,42	5,61	5,55	7,07	10,11
35	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	Persen	78,92	47,19	39,15	37,41	32,48
36	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	Persen	89,18	76,79	86,85	62,17	62,65
37	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
38	Penderita diare yang ditangani	Persen	33,06	39,43	25,88	32,95	94,7
39	Angka kejadian Malaria	Persen	0,05	0	0,02	0,02	0,0027
40	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	Persen	92,31	0,00	100,00	100,00	100,00
41	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	Persen	0,01	0,0036	0,0052	0,0039	0,0856
42	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persen	1	1	0	0	48,9
43	Cakupan puskesmas	Persen	100	100	100	103,57	103,57
44	Cakupan pembantu puskesmas	Persen	15,01	15,01	15,01	28,9	29,06
45	Cakupan pelayanan nifas	Persen	71,65	75,66	0	85,97	65,7
46	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persen	1	34,35	0	0	80,42
47	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	Persen	0	0	0	0	89,6
48	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Persen	0	0	0	0	49,11
49	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	Persen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
50	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Konawe tahun 2023

Capaian indikator pelayanan publik bidang kesehatan di Kabupaten Konawe selama periode 2020–2024 menunjukkan perkembangan yang bervariasi, dengan beberapa indikator mengalami kemajuan yang signifikan, sementara sebagian lainnya mengalami stagnasi bahkan penurunan. Indikator yang menunjukkan tren positif antara lain cakupan penanganan komplikasi kebidanan yang meningkat secara konsisten hingga mencapai 100% pada tahun 2024, cakupan penemuan dan penanganan kasus demam berdarah dengue (DBD) yang stabil di angka 100%, serta penanganan balita gizi buruk yang sudah tertangani secara penuh sejak tahun 2022. Selain itu, indikator pelayanan dasar seperti cakupan imunisasi dasar lengkap dan rasio puskesmas per penduduk juga menunjukkan kinerja yang cukup baik, meskipun masih perlu penguatan cakupan di wilayah tertentu.

Namun demikian, sejumlah indikator penting mengalami penurunan kinerja yang cukup tajam. Pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, serta bayi baru lahir mengalami penurunan drastis pada dua tahun terakhir, yang mengindikasikan penurunan efektivitas layanan kesehatan ibu dan anak (KIA). Cakupan desa/kelurahan dengan Universal Child Immunization (UCI) juga menurun signifikan dari 82,20% pada tahun 2020 menjadi hanya 21,94% pada tahun 2024. Selain itu, indikator imunisasi campak pada anak usia di bawah satu tahun menurun dari 105,54% menjadi 62,04% dalam periode yang sama. Tren peningkatan prevalensi Tuberkulosis (TBC) yang sangat tajam, dari 54,99 kasus per 100.000 penduduk pada tahun 2020 menjadi 404,01 kasus pada tahun 2024.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kabupaten Konawe. Sub urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan wilayah, konektivitas antar kawasan, serta peningkatan kualitas infrastruktur dasar yang layak bagi masyarakat. Sub urusan ini mencakup penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, irigasi, drainase, serta pengaturan dan pengendalian tata ruang.

Pembangunan infrastruktur jalan dalam hal panjang jalan yang telah terbangun untuk kewenangan kabupaten dalam kondisi mantap pada tahun 2024 sebesar 49,86%.

Tabel 2. 22 Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten menurut Jenis Permukaan dan Kondisi Jalan, 2024

Panjang Jalan	Jenis Permukaan			Kondisi Jalan (km)			
(km)	Aspal (km)	Beton (km)	Kerikil (km)	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
784,48	396,60	7,75	380,13	347,78	43,33	13,21	380,16

Total panjang jalan di Kabupaten Konawe tercatat 784,48 km, dengan komposisi permukaan jalan terdiri dari 396,60 km beraspal, 7,75 km beton, dan 380,13 km jalan kerikil. Dari sisi kondisi, jalan dengan kategori baik mencapai 347,78 km atau sekitar 44,3 persen dari total panjang jalan. Jalan dengan kondisi sedang sepanjang 43,33 km (sekitar 5,5 persen), sedangkan kondisi rusak ringan hanya 13,21 km (sekitar 1,7 persen). Namun, yang menjadi perhatian utama adalah panjang jalan dengan kondisi rusak berat yang mencapai 380,16 km atau sekitar 48,5 persen dari total panjang jalan.

Tabel 2. 23 Status Jalan Kewenangan Kabupaten

Kondisi	Kategori	Panjang Jalan		Penanganan	Persentase (%)
		KM	%		
MANTAP	Baik	347,78	44,3326	Pemeliharaan Rutin	49,86
	Sedang	43,33	5,5234	Pemeliharaan Rutin	
TIDAK MANTAP	Rusak Ringan	13,21	1,6839	Pemeliharaan Berkala	50,14
	Rusak Berat	380,16	48,4601	Rekonstruksi	
	Total	784,48	100,00		100,00

Berdasarkan kondisi jalan kewenangan Kabupaten Konawe, dari total panjang jalan 784,48 km, hanya sekitar 44,33 persen dalam kondisi baik dan 5,52 persen dalam kondisi sedang. Dengan demikian, jalan yang dikategorikan mantap mencapai total 49,86 persen atau kurang dari separuh dari keseluruhan panjang jalan. Sementara itu, jalan dengan kategori tidak mantap masih mendominasi dengan proporsi 50,14 persen. Rinciannya, 1,68 persen dalam kondisi rusak ringan yang membutuhkan pemeliharaan berkala, dan 48,46 persen atau hampir setengah total panjang jalan dalam kondisi rusak berat sehingga memerlukan penanganan rekonstruksi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh jalan Kabupaten Konawe belum mantap, dengan hampir setengahnya berada dalam kondisi rusak berat. Penanganan utama yang diperlukan adalah rekonstruksi jalan secara bertahap, disertai peningkatan program pemeliharaan rutin dan berkala untuk menjaga jalan dalam kondisi baik agar tidak cepat mengalami kerusakan. Peningkatan kualitas jalan akan berdampak langsung pada kelancaran mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan Keputusan Menteri PU No. 332/KPTS/M/2025 tentang Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Penggunaan Jalan Serta Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pada Jalan Arteri Primer dan Jalan Kolektor Primer-1

Tabel 2. 24 Panjang Jalan Menurut Kewenangan, 2024

Kewenangan	Panjang Jalan (km)
Nasional	110,42
Provinsi	184,47
Kabupaten	784,48
Total	1.079,37

Sumber : Kementerian PU

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2024, total panjang jalan di Kabupaten Konawe mencapai 1.079,37 km. Dari jumlah tersebut, jalan dengan kewenangan nasional sepanjang 110,42 km atau sekitar 10,2 persen dari total panjang jalan. Jalan kewenangan provinsi memiliki panjang 184,47 km atau sekitar 17,1 persen. Sementara itu, jalan kewenangan kabupaten mendominasi dengan panjang 784,48 km, setara dengan 72,7 persen dari total jaringan jalan di Konawe.

Komposisi ini menunjukkan bahwa tanggung jawab terbesar dalam penyediaan dan pemeliharaan jalan berada di tingkat kabupaten, mengingat lebih dari dua pertiga panjang jalan berada di bawah kewenangan pemerintah daerah. Hal ini menegaskan pentingnya alokasi anggaran yang memadai untuk infrastruktur jalan kabupaten, mengingat kondisi jalan tersebut berperan langsung dalam mendukung aksesibilitas masyarakat, konektivitas antarwilayah, serta kelancaran distribusi barang dan jasa di Kabupaten Konawe.

Tabel 2. 25 Daftar Jembatan Kab. Konawe berdasarkan Tipe Jembatan

NO	TIPE JEMBATAN	JUMLAH UNIT	PANJANG (M)
1	BETON	118	1048,15
2	RANGKA BAJA	3	74
3	SEMI PERMANEN	74	615,5
4	KAYU	0	0

Sumber; Dinas PUPR Konawe

Berdasarkan data infrastruktur jembatan, Kabupaten Konawe memiliki 118 unit jembatan beton dengan total panjang 1.048,15 meter. Jenis jembatan ini mendominasi dan relatif lebih kokoh serta permanen dibandingkan tipe lainnya. Selain itu, terdapat 3 unit jembatan rangka baja dengan panjang 74 meter, serta 74 unit jembatan semi permanen dengan panjang 615,5 meter. Sementara itu, untuk jembatan kayu tidak lagi tercatat keberadaannya, yang menunjukkan adanya pergeseran dari infrastruktur yang bersifat sementara menuju jembatan permanen.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun sebagian besar infrastruktur jembatan di Kabupaten Konawe sudah berbahan beton, masih terdapat jumlah yang cukup besar jembatan semi permanen. Hal ini berpotensi membatasi kelancaran aksesibilitas masyarakat, terutama pada musim hujan atau ketika terjadi bencana yang dapat mempercepat kerusakan jembatan non-permanen.

Selain itu, terdapat indikator irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten dalam pencapaian kinerja dibidang infrastruktur;

Tabel 2. 26 Kondisi D.I Kewenangan Kabupaten, 2024

Kewenangan	Jumlah DI	Jenis Irigasi	Luas Areal (Ha)		Panjang Saluran (km)
			Potensial	Fungsional	
KABUPATEN	74	Irigasi Permukaan	10.927,88	6.722,44	127,49
	5	Irigasi Rawa Lebak	283,00	63,00	2,19
PROVINSI	3	Irigasi Permukaan	3.457,39	3.326,73	51,11
PUSAT	3	Irigasi Permukaan	23.508,00	16.590,00	269,69
JUMLAH	85		38.176,27	26.702,17	450,48

Sumber : Dinas PUPR Konawe

Pada tahun 2024, Kabupaten Konawe memiliki total 85 daerah irigasi (DI) dengan luas areal potensial sebesar 38.176,27 hektar. Dari luas potensial tersebut, yang sudah berfungsi secara optimal baru mencapai 26.702,17 hektar atau sekitar 69,9 persen. Total panjang saluran irigasi yang terdata adalah 450,48 km.

Berdasarkan kewenangan, daerah irigasi terbagi menjadi tiga kategori. Pertama, DI kewenangan kabupaten mencakup 79 unit yang terdiri atas 4 irigasi permukaan dan 5 irigasi rawa lebak, untuk irigasi permukaan memiliki luas potensial sebesar 10.927,88 hektar, dimana yang sudah fungsional baru 6.722,44 hektar, dengan panjang saluran 127,49 km kemudian untuk irigasi rawa lebak memiliki luas potensial sebesar 282,00 km dimana yang sudah fungsional sebesar 63,00 km, dengan panjang saluran sebesar 2,19 Km. Kedua, DI kewenangan provinsi terdiri dari 3 unit irigasi permukaan dengan luas potensial 3.457,39 hektar, hampir seluruhnya fungsional (3.326,73 hektar atau 96,2 persen), dan panjang saluran 51,11 km. Ketiga, DI kewenangan pusat terdiri dari 3 unit irigasi permukaan dengan luas potensial yang jauh lebih besar, yakni 23.508 hektar, dengan luas fungsional 16.590 hektar (sekitar 70,6 persen), serta panjang saluran 269,69 km.

Data tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan daerah irigasi di Konawe masih menghadapi tantangan besar, khususnya pada kewenangan kabupaten yang mendominasi jumlah unit DI tetapi memiliki tingkat fungsionalisasi relatif rendah. Sebaliknya, irigasi kewenangan provinsi memiliki tingkat keberfungsian yang lebih baik, sementara irigasi kewenangan pusat memiliki cakupan areal yang luas namun masih terdapat gap antara luas potensial dan fungsional. Kondisi ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas pengelolaan, pemeliharaan, serta rehabilitasi jaringan irigasi terutama di tingkat kabupaten agar pemanfaatan lahan pertanian lebih optimal dalam mendukung ketahanan pangan daerah.

Tabel 2. 27 Sistem Penyediaan air Minum (SPAM)

Jumlah Rumah		Sumber Air Bersih (Rumah)			
		Perpipaan PDAM	Perpipaan Non PDAM	Sumur Gali/Sumur Bor	Sungai/Hujan/Lainnya
64.067		5.774	11.410	44.471	2.412
%		9,01	17,81	69,41	3,76
Perpipaan		17.184		SR %	
		26,82			
SPAM OPERATOR PDAM		KET.			
1	Kota Unaaha	Beroperasi			
2	IKK Lambuya	Beroperasi			
3	IKK Amonggedo	Beroperasi			
4	IKK Meluhu	Beroperasi			
5	IKK Anggaberu	Gabung Ke Unaaha			
6	IKK Sampara	Tidak Beroperasi			
7	IKK Abuki	Tidak Beroperasi			
8	IKK Pondidaha	Tidak Beroperasi			

Sumber; Data Survey Infrastruktur Bappeda Konawe

Dari 64.067 rumah, tercatat 17.184 sambungan rumah (SR) perpipaan atau 26,82%. Artinya, 73,18% rumah belum terlayani perpipaan dan masih mengandalkan sumber non-perpipaan. Di antara sumber yang digunakan, sumur gali/bor mendominasi (44.471 rumah; 69,41%), sedangkan sungai/hujan/lainnya masih digunakan oleh 2.412 rumah (3,76%). Pada layanan perpipaan yang ada, non-PDAM (11.410 rumah; 17,81%) lebih besar dibanding PDAM (5.774 rumah; 9,01%), sehingga porsi pelayanan perpipaan saat ini lebih banyak disediakan di luar jaringan PDAM.

Kondisi operasional SPAM PDAM menunjukkan 4 IKK beroperasi (Kota Unaaha, Lambuya, Amonggedo, Meluhu), 1 IKK bergabung ke Unaaha (Anggaberu), dan 3 IKK tidak beroperasi (Sampara, Abuki, Pondidaha). Sebaran status ini menandakan bahwa kinerja pelayanan perpipaan PDAM belum merata antar-wilayah. Jumlah SR perpipaan yang tercatat (17.184) berada dalam konteks jaringan yang sebagian unitnya tidak beroperasi, sehingga peluang perluasan layanan sangat dipengaruhi oleh keberfungsian IKK. Dengan komposisi tersebut, ketergantungan rumah tangga pada sumber air tanah masih tinggi, sementara kapasitas layanan perpipaan—khususnya PDAM—belum menjadi sumber utama penyediaan air bersih di tingkat rumah tangga.

Tabel 2. 28 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase rumah tinggal bersanitasi (yang telah dibangun daerah berbanding dengan jumlah rumah)	Persen	3.80	3.96	5.05	5.83	6.34
2	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	27	32	26	25	27
3	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	per satuan bangunan	0	0	0	0	0.13
4	Ketaatan terhadap RTRW	Persen	92	81	93	77	93

Sumber : Dinas PUPR Konaawe

Dalam bidang pekerjaan umum, capaian beberapa indikator masih menunjukkan kondisi yang belum optimal. Persentase rumah tinggal bersanitasi mengalami peningkatan dari 3,80 persen pada tahun 2020 menjadi 6,34 persen pada tahun 2024, namun laju peningkatan relatif lambat dan masih jauh dari target universal access. Kondisi drainase juga belum menunjukkan perbaikan signifikan, dimana capaian berfluktuasi dari 27 persen pada tahun 2020, sempat naik menjadi 32 persen pada tahun 2021, namun kembali turun hingga 25 persen pada tahun 2023, sebelum naik sedikit ke angka 27 persen pada tahun 2024. Fluktuasi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan pemeliharaan dan perawatan infrastruktur drainase, adanya kerusakan akibat intensitas curah hujan yang tinggi, serta alih fungsi lahan yang tidak disertai dengan sistem drainase yang memadai, sehingga capaian kinerjanya belum stabil dari tahun ke tahun.

Di sisi lain, kepatuhan terhadap perizinan bangunan mulai menunjukkan perbaikan meskipun masih rendah. Rasio bangunan ber-IMB yang pada tahun 2020 hingga 2023 tidak menunjukkan capaian, meningkat menjadi 0,13 pada tahun 2024. Untuk ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), capaian berfluktuasi cukup signifikan, dimana pada tahun 2020 berada di angka 92 persen, turun menjadi 81 persen pada tahun 2021, kembali naik ke 93 persen pada tahun 2022, turun drastis menjadi 77 persen pada tahun 2023, dan akhirnya naik kembali ke 93 persen pada tahun 2024. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap tata ruang sangat dipengaruhi oleh konsistensi pengendalian dan pengawasan.

Secara keseluruhan, indikator layanan dasar permukiman di Kabupaten Konawe masih menghadapi tantangan yang cukup besar. Akses air minum dan sanitasi masih rendah, pengelolaan drainase belum stabil, serta kepatuhan terhadap tata ruang dan perizinan bangunan masih memerlukan penguatan. Hal ini menegaskan perlunya intervensi yang lebih terarah melalui program percepatan peningkatan akses air minum dan sanitasi, perbaikan sistem drainase, serta penguatan regulasi dan pengawasan tata ruang.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kabupaten Konawe. Sub urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan Penyediaan Rumah Layak Huni dan penataan kawasan kumuh.

Tabel 2. 29 Kondisi Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jumlah Rumah	Backlog Rumah		Rumah Tidak Layak Huni		Kawasan Kumuh		Pemenuhan Listrik (Rumah)		
	Rumah	%	Rumah	%	Kawasan	Luas (HA)	PLN (Rumah)	Menyambung Tetangga	PLTS/Genset (Non PLN)
64.067	11.621	18,14	7.350	11,47	15	352,50	59.242	3.989	836

Sumber : Survei Data Infrastruktur Konawe

Berdasarkan data perumahan di Kabupaten Konawe, tercatat jumlah rumah sebanyak 64.067 unit. Dari jumlah tersebut, masih terdapat backlog rumah sebanyak 11.621 unit atau setara dengan 18,14 persen, yang menunjukkan kebutuhan hunian layak masih cukup tinggi. Selain itu, terdapat 7.350 unit rumah tidak layak huni (RTLH) atau sekitar 11,47 persen, yang menandakan perlunya peningkatan kualitas hunian masyarakat.

Terkait dengan permukiman, terdapat 15 kawasan kumuh dengan total luas mencapai 352,50 hektar. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penanganan kawasan kumuh menjadi salah satu agenda prioritas dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Dari aspek akses terhadap listrik, mayoritas rumah tangga sudah tersambung jaringan PLN sebanyak 59.242 rumah, namun masih terdapat 3.989 rumah yang bergantung pada sambungan listrik dari tetangga dan 836 rumah yang menggunakan sumber energi alternatif seperti PLTS atau genset non-PLN.

Data ini mengindikasikan bahwa selain kebutuhan akan penambahan rumah baru untuk mengurangi backlog, terdapat tantangan serius dalam peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, penanganan kawasan kumuh, serta perluasan akses energi listrik yang merata dan berkelanjutan.

Tabel 2. 30 Daftar Kawasan Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Konawe, Berdasarkan SK Bupati Konawe Tentang Penetapan Perumahan Kumuh Dan Pemukiman Kumu

No	Nama Lokasi/Kawasan	Luas (Ha)		Lingkup Administrasi		Kependudukan			Koordinat		Kekumuhan		Pertimbangan Lain		Legalitas Tanah	Prioritas
				Kel/Desa	Kecamatan	Jumlah	Kepadatan	Klasifikasi	Lintang	Bujur	Nilai	Tingkat	Nilai	Tingkat		
1	Kawasan Mopu	79,37	30,96	Puuruy	Morosi	924	29,84	Rendah	4°47'51,72"	122°25'24,6"	40	Sedang	11	Tinggi	Lahan Legal	B1/2
2			48,41	Morosi	Morosi	1104	22,81	Rendah	4°47'51,72"	122°25'24,6"	40	Sedang	11	Tinggi	Lahan Legal	B1/2
3	Kawasan Asaki	14,00	14,00	Asaki	Lambuya	918	65,57	Rendah	3°57'50,04"	122°4'13,8"	30	Ringan	11	Tinggi	Lahan Legal	C1/3
4	Kawasan Anggopiu	14,51	14,51	Anggopiu	Uepai	1682	115,92	Rendah	3°52'54,84"	122°2'12,48"	27	Ringan	11	Tinggi	Lahan Legal	C1/3
5	Kawasan Konawe	5,87	5,87	Konawe	Konawe	787	134,07	Rendah	3°51'59,76"	122°5'6"	25	Ringan	7	Sedang	Lahan Legal	C3/6
6	Kawasan Tudaone	9,91	9,91	Tudaone	Konawe	1030	103,41	Rendah	3°31'55,92"	122°32'20,4"	25	Ringan	7	Sedang	Lahan Legal	C3/6
7	Kawasan Tongauna	27,06	27,06	Tongauna	Tongauna	1135	41,94	Rendah	3°49'31,8"	122°0'15,84"	37	Ringan	7	Sedang	Lahan Legal	C3/6
8	Kawasan Puosu	25,96	25,96	Puosu	Tongauna	1313	50,58	Rendah	3°46'24,6"	122°59'18,6"	29	Ringan	7	Sedang	Lahan Legal	C3/6
9	Kawasan Puunaaha	8,97	8,97	Puunaaha	Unaaha	1237	137,90	Rendah	3°51'46,8"	122°2'26,16"	35	Ringan	7	Sedang	Lahan Legal	C3/6
10	Kawasan Latoma	30,67	30,67	Latoma	Unaaha	1068	34,82	Rendah	3°52'3,72"	122°3'11,88"	16	Ringan	7	Sedang	Lahan Legal	C3/6
11	Kawasan Wawonggole	26,41	26,41	Wawonggole	Unaaha	2137	80,92	Rendah	3°51'28,44"	122°2'27,24"	20	Ringan	11	Tinggi	Lahan Legal	C1/3
12	Kawasan Parauna	40,07	40,07	Parauna	Anggaberu	1109	27,15	Rendah	3°50'57,12"	122°5'3,84"	25	Ringan	11	Tinggi	Lahan Legal	C1/3
13	Kawasan Lawulo	40,05	40,05	Lawulo	Anggaberu	1429	32,21	Rendah	3°50'9,96"	122°5'16,44"	17	Ringan	11	Tinggi	Lahan Legal	C1/3
14	Kawasan Wawotobi	20,08	20,08	Wawotobi	Wawotobi	1776	88,45	Rendah	3°52'36,12"	122°6'50,04"	25	Ringan	11	Tinggi	Lahan Legal	C1/3
15	Kawasan Inalahi	5,81	5,81	Inalahi	Wawotobi	708	121,86	Rendah	3°52'7,32"	122°6'47,16"	22	Ringan	11	Tinggi	Lahan Legal	C1/3
16	Kawasan Lalosabila	3,71	3,71	Lalosabila	Wawotobi	295	79,51	Rendah	3°52'28,2"	122°6'16,2"	21	Ringan	11	Tinggi	Lahan Legal	C1/3
JUMLAH		352,50														
1	Luas Kewenangan Pusat	289,67														
2	Luas Kewenangan Provinsi	28,51														
3	Luas Kewenangan Kabupaten	34,32														

Berdasarkan SK Bupati Konawe Tahun 2023, telah ditetapkan sebanyak 16 desa kelurahan kawasan kumuh dengan total luas keseluruhan 352,50 hektar. Kawasan kumuh tersebut tersebar di berbagai desa/kelurahan dan kecamatan di Kabupaten Konawe, antara lain di Puuruy, Morosi, Asaki, Anggopiu, Konawe, Tudaone, Tongauna, Puosu, Puunaaha, Latoma, Wawonggole, Parauna, Lawulo, Wawotobi, Inalahi, dan Lalosabila.

Dari sisi luas kawasan, terdapat variasi yang cukup signifikan, mulai dari kawasan dengan luas terkecil 3,71 hektar (Kawasan Lalosabila) hingga yang terbesar mencapai 79,37 hektar (Kawasan Mopu). Sementara itu, jumlah penduduk yang bermukim di kawasan tersebut juga bervariasi, dengan kepadatan penduduk yang pada umumnya masuk kategori rendah, meskipun terdapat kawasan dengan tingkat kepadatan relatif lebih tinggi seperti Asaki (65,57 jiwa/ha) dan Lalosabila (79,51 jiwa/ha).

Jika dilihat dari aspek kekumuhan, sebagian besar kawasan tergolong dalam kategori ringan, dengan beberapa kawasan berada pada kategori sedang seperti Kawasan Mopu dan Morosi. Pertimbangan lain dalam penentuan prioritas penanganan kawasan ini juga memperlihatkan bahwa sebagian besar kawasan masuk kategori tinggi, yang berarti membutuhkan perhatian segera dalam perencanaan penanganan.

Dari sisi legalitas tanah, seluruh kawasan tercatat sebagai lahan legal, sehingga memberikan dasar hukum yang jelas untuk pelaksanaan program penataan dan peningkatan kualitas permukiman. Selanjutnya, kawasan ini juga telah dikelompokkan dalam prioritas penanganan yang ditandai dengan kode seperti B/1, C/1, dan C/3.

Dengan demikian, SK Bupati Konawe Tahun 2023 ini menjadi rujukan penting dalam menentukan arah kebijakan dan program penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Konawe, baik dari segi penentuan lokasi prioritas, bentuk intervensi, maupun skala penanganan sesuai dengan tingkat kekumuhan yang ada.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 2. 31 Capaian Kinerja Bidang Trantibumlinmas

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	PERSEN	100	90	50	70	50
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	PERSEN	77,78	88,89	77,78	88,89	77,78
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	ORANG	152.031	163.756	250	250	250
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiap-siagaan terhadap bencana	ORANG	22.009	7.437	7.437	7.500	7.500
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	ORANG	1.048	886	886	886	886
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	PERSEN	100	100	100	100	100
7	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	PERSEN	100	100	100	100	100
9	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	PERSEN	100	100	100	100	100
10	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	PERSEN	100	100	100	100	100
11	Persentase Penegakan PERDA	PERSEN	87,5	100	100	100	100

Sumber ; BPBD, Dinas Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran

Selama periode 2020 hingga 2024, capaian kinerja pada urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibum Linmas), penanggulangan bencana, dan penegakan perda menunjukkan dinamika yang signifikan, dengan keberhasilan di beberapa indikator namun juga diiringi oleh tantangan yang perlu mendapat perhatian serius dalam perencanaan pembangunan ke depan.

Pada aspek ketenteraman dan ketertiban umum, capaian penyelesaian gangguan Trantibum mengalami penurunan cukup tajam dari 100% pada tahun 2020 menjadi hanya 50% pada tahun 2024. Fluktuasi capaian ini mengindikasikan bahwa mekanisme penyelesaian kasus belum sepenuhnya stabil dan efektif. Hal ini dapat disebabkan oleh lemahnya koordinasi antarpenegak hukum, belum optimalnya sistem aduan masyarakat, serta belum adanya sistem pelacakan penyelesaian kasus secara digital dan terintegrasi.

Sebaliknya, indikator penegakan PERDA menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan. Persentase penegakan PERDA meningkat dari 87,50% pada tahun 2020 dan konsisten mencapai 100% sejak tahun 2021 hingga 2024. Hal ini menunjukkan bahwa secara kelembagaan, upaya penegakan hukum telah mengalami penguatan yang positif. Namun demikian, indikator persentase penegakan Perda dan Perkada lainnya masih menunjukkan pola fluktuatif (berpola zig-zag) antara 77,78% hingga 88,89%, yang mengindikasikan belum konsistennya pelaksanaan penegakan di lapangan, serta belum adanya skala prioritas perda yang difokuskan untuk ditegakkan secara berkelanjutan.

Capaian di bidang operasional penanggulangan kebakaran justru menunjukkan kinerja yang stabil dan baik. Seluruh indikator layanan kebakaran seperti cakupan layanan, kecepatan respon (response time), dan cakupan petugas Linmas berada pada posisi 100% selama lima tahun berturut-turut. Hal ini menunjukkan bahwa sistem layanan darurat telah berjalan sesuai standar dan tersedia secara merata di wilayah kabupaten. Meskipun demikian, jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran stagnan pada angka 886 orang sejak tahun 2021, yang dapat mengindikasikan kurangnya pelaporan berbasis kejadian atau ketidaksesuaian antara data administrasi dan kejadian riil di lapangan.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Dalam UU No. 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Tabel 2. 32 Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Sosial

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persen	75,07	90,85	90,97	89,65	100,00
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota	Persen	93,88	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	80,10	88,92	81,30	84,89	78,74
4	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	80,10	88,92	81,30	84,89	78,74
6	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persen	66,67	66,67	100,00	100,00	100,00
8	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	93,88	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	77,69	94,93	100,00	100,00	71,01

Sumber : Dinas Sosial

Selama periode 2020 hingga 2024, kinerja pelayanan publik di bidang sosial di Kabupaten Konawe menunjukkan capaian yang cukup progresif, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar kelompok rentan dan respon tanggap darurat bencana. Indikator pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan/pengemis yang dilayani di luar panti mengalami peningkatan signifikan dari 75,07 persen pada tahun 2020 menjadi 100 persen pada tahun 2024. Begitu pula dengan indikator pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana serta pemberian bantuan sosial selama masa tanggap darurat yang konsisten berada pada angka 100 persen sejak tahun 2021, mencerminkan kinerja tanggap darurat yang sangat baik dan kesiapan sistem penanganan bencana secara menyeluruh.

Di sisi lain, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang menunjukkan kecenderungan fluktuatif dan bahkan mengalami penurunan, khususnya pada indikator yang berkaitan dengan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Capaian persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial dan yang tertangani mengalami penurunan dari 88,92 persen pada tahun 2021 menjadi 78,74 persen pada tahun 2024. Penurunan yang

cukup signifikan juga terjadi pada indikator persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima bantuan sosial, yang pada tahun 2023 sempat mencapai 100 persen, namun anjlok menjadi 71,01 persen pada tahun 2024. Tren ini menunjukkan adanya persoalan yang cukup mendasar dalam hal pendataan, validasi, dan kontinuitas program per sosial yang berdampak pada kelompok paling rentan di masyarakat.

Beberapa faktor pendorong capaian positif tersebut antara lain adalah komitmen pemerintah daerah dalam memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan sosial seperti panti sosial dan WKBSM (Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat), serta koordinasi lintas sektor yang berjalan baik, khususnya dalam penanganan bencana. Sementara itu, faktor penghambat capaian kinerja teridentifikasi antara lain lemahnya pemutakhiran data sosial, ketergantungan terhadap program pusat seperti DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), terbatasnya SDM pendamping di tingkat desa, serta belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan sosial.

2.1.4.4.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

Pelayanan publik di bidang ketenagakerjaan Kabupaten Konawe menunjukkan sejumlah capaian yang signifikan dalam lima tahun terakhir, meskipun masih terdapat tantangan mendasar yang perlu menjadi perhatian utama dalam perencanaan pembangunan ke depan.

Tabel 2. 33 Indikator Urusan Tenaga Kerja

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja	Persen	41,90	45,18	42,76	56,32	79,44
2	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Per1000 kasus	15,56	9,78	5,43	18,18	32,94
3	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	Persen	92	92	35	66	71

Sumber; Dinas Nakertrans Konawe

Terjadi peningkatan yang cukup positif dan signifikan dari tahun 2020 (41,90%) ke 2024 (79,44%) pada indikator Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja. Ini menunjukkan bahwa kinerja layanan penempatan tenaga kerja (baik dalam maupun luar negeri) mengalami peningkatan efektivitas. Kenaikan yang cukup tajam khususnya antara 2022 (42,76%) ke 2023 (56,32%) dan kemudian ke 2024 (79,44%) dapat mencerminkan peningkatan akses informasi pasar kerja, penguatan sistem Antar Kerja, dan perluasan peluang kerja melalui kolaborasi dengan dunia usaha dan industri.

Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun (Per 1000 Kasus). Data mengalami fluktuasi—turun dari 15,56 (2020) ke 5,43 (2022), namun melonjak kembali menjadi 32,94 pada 2024. Penurunan hingga 2022 mencerminkan kondisi hubungan industrial yang sempat membaik. Namun lonjakan signifikan setelahnya (terutama pada 2024) disebabkan oleh lemahnya lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Diperlukan intervensi berupa penguatan mediasi, sosialisasi regulasi ketenagakerjaan, dan peningkatan kapasitas pengawas hubungan industrial.

Besaran Pemeriksaan Perusahaan bersifat Fluktuatif, dari capaian tinggi pada 2020–2021 (92%) menurun drastis di 2022 (35%), kemudian naik kembali ke 71% di 2024. Penurunan tajam tahun 2022 masih menjadi salah satu dampak pandemi, atau refocusing anggaran. Namun, upaya perbaikan terlihat dari peningkatan pemeriksaan pada tahun-tahun berikutnya.

Pemeriksaan perusahaan penting sebagai alat kontrol atas pemenuhan standar ketenagakerjaan, keselamatan kerja, dan jaminan sosial tenaga kerja.

Secara umum, indikator kinerja menunjukkan kecenderungan peningkatan pada aspek tata kelola hubungan industrial dan layanan penempatan tenaga kerja, namun belum diikuti oleh perbaikan kualitas tenaga kerja secara menyeluruh.

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi fokus utama dalam upaya mencapai kesetaraan gender dan kesejahteraan sosial. Pemberdayaan perempuan meliputi beragam aspek, mulai dari akses terhadap pendidikan dan pekerjaan hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan dan pencegahan kekerasan. Disisi lain perlindungan anak melibatkan upaya untuk menjamin hak-hak dasar anak, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari eksploitasi, kekerasan, serta diskriminasi. Implementasi kebijakan dan program-program yang responsif gender serta adanya penegakan hukum yang efektif menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi perempuan dan anak-anak. Dengan memperhatikan kedua aspek ini secara holistik, masyarakat dapat memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Tabel 2. 34 Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	PERSEN	0.03	0.08	0.05	0.08	0.90
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	PERSEN	0.03	0.01	0.02	0.02	0.03
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Per100.000 Penduduk	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01
4	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	PERSEN	7.44	6.23	8.17	8.91	11.17
5	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	PERSEN	26.67	26.67	27.59	31.03	13.33
6	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	PERSEN	92.38	93.06	91.83	91.09	88.83
7	Rasio KDRT	PERSEN	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	PERSEN	0.00	0.00	0	0	0
9	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	PERSEN	30.77	16.67	100	100	100.00
10	Rasio APMperempuan/laki-laki diSD	PERSEN	97.81	97.98	95.20	95.98	96.25
11	Rasio APMperempuan/laki-laki diSMP	PERSEN	76.3	76.37	76.06	73.61	73.80
12	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian	PERSEN	43.56	47.56	44.00	43.13	43.15

Sumber; Dinas P3A Konawe

Selama periode 2020–2024, kinerja Kabupaten Konawe dalam penyelenggaraan pelayanan publik berbasis kesetaraan gender dan perlindungan perempuan dan anak menunjukkan capaian yang variatif. Salah satu indikator penting, yakni proporsi Anggaran Responsif Gender (ARG) terhadap total belanja langsung APBD, mengalami peningkatan signifikan dari hanya 0,03 persen pada tahun 2020 menjadi 0,90 persen pada tahun 2024. Meski demikian, angka ini masih tergolong rendah dan menunjukkan bahwa pendekatan penganggaran berbasis gender belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam proses perencanaan dan penganggaran di seluruh perangkat daerah.

Meski demikian, rasio kasus kekerasan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tercatat masih sangat rendah (<0,02 persen), yang patut diduga bukan semata karena minimnya kejadian, melainkan karena rendahnya pelaporan, masih kuatnya stigma sosial.

Dalam aspek pemberdayaan, partisipasi perempuan di sektor ekonomi, khususnya angkatan kerja, tergolong tinggi dan stabil, mencapai lebih dari 93 persen selama lima tahun terakhir. Namun, tingkat partisipasi perempuan di sektor politik dan birokrasi masih rendah dan fluktuatif. Representasi perempuan di lembaga legislatif, yang sempat mencapai 31,03 persen pada tahun 2023, justru mengalami penurunan tajam menjadi 13,33 persen pada tahun 2024. Sementara itu, partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah hanya mencapai 11,17 persen pada akhir periode. Hal ini mencerminkan perlunya penguatan afirmasi dan kebijakan yang mendorong

peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di sektor publik.

Di bidang pendidikan, meskipun rasio angka partisipasi murni (APM) perempuan terhadap laki-laki di jenjang SD relatif setara, ketimpangan mulai terlihat di jenjang SMP. Ketimpangan ini disebabkan oleh berbagai faktor struktural seperti keterbatasan akses geografis, kondisi sosial ekonomi, serta praktik perkawinan anak dan norma budaya yang membatasi akses perempuan terhadap pendidikan tinggi. Hal ini perlu menjadi perhatian serius dalam rangka memutus mata rantai ketimpangan gender yang bersifat struktural dan berkelanjutan.

Berdasarkan tren capaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun Kabupaten Konawe telah menunjukkan komitmen awal dalam pelayanan publik yang ramah gender dan responsif terhadap anak, tantangan-tantangan strategis masih harus dihadapi. Kesenjangan dalam layanan pemulihan korban, masih minimnya pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan, serta rendahnya representasi perempuan dalam pengambilan keputusan.

3. Urusan Pangan

Skor PPH berguna untuk menilai situasi konsumsi atau ketersediaan pangan, baik jumlah dan komposisi/keragaman pangan serta perencanaan konsumsi atau ketersediaan pangan. Skor Pola Pangan Harapan 2019 didapat dari Perhitungan menggunakan data dasar hasil Survei Ekonomi Nasional tahun 2019. Skor PPH ideal adalah 100 yang menunjukkan keberagaman tingkat konsumsi pangan di suatu wilayah. Tujuan utama penyusunan Pola Pangan Harapan adalah untuk membuat suatu nasionalisasi pola konsumsi yang dianjurkan yang terdiri dari kombinasi aneka ragam pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi dan sesuai citarasa (FAO-RAPA, 1989). Realisasi Skor PPH di Kabupaten Konawe dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 35 Capaian Skor PPH Kabupaten Konawe

No	Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram/Kapita/Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
			Kkal/Kapita	%	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	310,1	1.204	62,2	57,3	0,5	31,1	28,7	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	40,4	103	5,3	4,9	0,5	2,7	2,5	2,5	2,5
3	Pangan Hewani	145,9	194	10,0	9,2	2,0	20,0	18,4	24,0	18,4
4	Minyak dan Lemak	20,9	188	9,7	9,0	0,5	4,9	4,5	5,0	4,5
5	Buah/Biji Berminyak	3,0	17	0,9	0,8	0,5	0,4	0,4	1,0	0,4
6	Kacang-kacangan	15,7	45	2,3	2,1	2,0	4,6	4,3	10,0	4,3
7	Gula	15,2	56	2,9	2,6	0,5	1,4	1,3	2,5	1,3
8	Sayur dan Buah	231,8	104	5,4	4,9	5,0	26,9	24,7	30,0	24,7
9	Lain-lain	53,8	26	1,3	1,2	-	-	-	-	-
	Total		1.935	100,0	92,1		92,0	84,8	100,0	81,1

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan

Skor PPH Tahun 2024 **81,1**, Skor PPH Tahun 2023 85,3 menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2. 36 Konsumsi Energi Perhari dan Protein Per hari

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Energi Per Hari	Konsumsi Protein Per Hari		
		% AKE*)	Gram/ Kapita	%	% AKP**)
1	Padi-padian	57,3	27,4	-	48,1
2	Umbi-umbian	4,9	0,3	-	0,5
3	Pangan Hewani	9,2	23,1	-	40,5
4	Minyak dan Lemak	9,0	0,0	-	0,0
5	Buah/Biji Berminyak	0,8	0,2	-	0,4
6	Kacang-kacangan	2,1	3,6	-	6,4
7	Gula	2,6	0,0	-	0,0
8	Sayur dan Buah	4,9	4,1	-	7,2
9	Lain-lain	1,2	0,9	-	1,6
	Total	92,1	59,6	-	104,6

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan

Konsumsi protein masyarakat telah mencapai 104,6% dari Angka Kecukupan Protein (AKP) → melebihi kebutuhan rata-rata nasional, menunjukkan kecukupan protein sudah terpenuhi. Total konsumsi energi masyarakat per hari sebesar 92,1% dari Angka Kecukupan Energi (AKE) yang direkomendasikan.

Pola konsumsi pangan masyarakat Konawe sudah cukup baik dari segi protein, namun masih perlu ditingkatkan dalam hal keragaman sumber energi, khususnya buah, sayur, dan protein nabati. Edukasi gizi seimbang dan penguatan ketahanan pangan berbasis lokal (seperti umbi-umbian, kacang-kacangan) menjadi penting untuk mencegah defisiensi mikronutrien dan penyakit degeneratif.

4. Urusan Pertanahan

Capaian Indikator Kinerja Daerah bidang Pertanahan hingga tahun 2024 dapat diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 37 Gambaran Urusan Pertanahan di Kabupaten Konawe

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase luas lahan bersertifikat	PERSEN	-	-	-	-	61,00
2	Penyelesaian izin lokasi	PERSEN	-	-	-	-	80

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Konawe

Rendahnya persentase lahan bersertifikat yang baru mencapai 61% pada tahun 2024 juga menjadi perhatian serius, karena masih tingginya jumlah lahan yang tidak memiliki kepastian hukum berpotensi menimbulkan konflik agraria, menghambat akses permodalan masyarakat, dan menjadi hambatan dalam investasi daerah. belum optimalnya penanganan sengketa tanah melalui mekanisme mediasi. Selain itu, permasalahan tumpang tindih kewenangan antara instansi vertikal dan daerah dalam urusan pertanahan juga menjadi tantangan yang perlu segera diatasi.

5. Urusan Lingkungan hidup

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, komponen kualitas lingkungan hidup yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu indikator kualitas air, kualitas udara dan kualitas tutupan lahan. Untuk mengukur kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah digunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang menggambarkan kondisi kualitas air (Indeks Kualitas Air-IKA), udara (Indeks Kualitas Udara-IKU) dan tutupan lahan (Indeks Kualitas Tutupan Lahan). IKLH merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang

secara substantif merupakan indikator status atau mutu lingkungan hidup. IKLH dapat digunakan sebagai data dan informasi untuk formulasi kebijakan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh berbagai pihak baik pemerintah maupun masyarakat luas.

Tabel 2. 38 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

No.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	INDEKS	81,73	86,37	79,21	82,31	79,31
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	PERSEN	77,31	77,3	80,7	78,39	81,8
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemda Kab/Kota	PERSEN	25	12,5	12,5	33,33	40
4	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada/Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
5	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ada/Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
6	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	DOKUMEN	1	1	0	1	2
7	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	PENGHARGAAN	0	0	0	0	0
8	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	PERSEN	100	100	100	100	100
9	Persentase cakupan area pelayanan	PERSEN	0,03	0,03	0,03	0,03	00,02
10	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	SKOR	1	1	1	1	0
11	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	PERSEN	100	100	100	100	100
12	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	PERSEN	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup

Capaian kinerja pembangunan bidang lingkungan hidup Kabupaten Konawe selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mengalami fluktuasi dengan capaian tertinggi pada tahun 2021 sebesar 86,37 dan terendah pada tahun 2022 sebesar 79,21. Secara umum, capaian ini mengindikasikan masih adanya tantangan dalam menjaga stabilitas kualitas lingkungan, yang erat kaitannya dengan kinerja sektor-sektor lain seperti pengelolaan sampah dan pengendalian pencemaran. Di sisi lain, persentase pengelolaan sampah menunjukkan tren positif, dari 77,31% pada tahun 2020 meningkat menjadi 81,8% pada tahun 2024, walaupun sempat mengalami penurunan di tahun 2023. Kinerja ketaatan pelaku usaha terhadap perizinan lingkungan juga mengalami peningkatan dari 25% pada tahun 2020 menjadi 40% di tahun 2024, mencerminkan peningkatan efektivitas pengawasan dan pembinaan oleh Pemerintah Daerah.

Tabel 2. 39 Kondisi Persampahan Kota Unaaha

Kecamatan	Kelurahan / Desa	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Timbulan Sampah (ton/hari)	Jumlah Timbulan Sampah (ton/tahun)
UNAAHA				
KOTA UNAHA	Kel. Puunaaha	2.890	1,16	421,94
	Kel. Tumpas	3.579	1,43	522,53
	Kel. Arombu	2.110	0,84	308,06
	Kel. Latoma	1.027	0,41	149,94
	Kel. Ambekairi	3.081	1,23	449,83
	Kel. Tuoy	2.080	0,83	303,68
	Kel. Asinua	3.028	1,21	442,09
	Kel. Unaaha	1.371	0,55	200,17
	Kel. Wawonggole	2.336	0,93	341,06
	Kel. Inolobunggadue	1.476	0,59	215,50
	Kel. Tobeu	776	0,31	113,30
	Kel. Asambu	1.022	0,41	149,21
		24.776	9,91	3.617,30
WAWOTOB				
KOTA UNAHA	Kel. Ranoeya	1.918	0,77	280,03
	Kel. Nohu - nohu	1.281	0,51	187,03
	Kel. Kasupute	1.173	0,47	171,26
	Kel. Hopa - hopa	1.094	0,44	159,72
	Kel. Wawotobi	1.740	0,70	254,04
	Kel. Bose - bose	734	0,29	107,16
	Kel. Lalosabila	1.548	0,62	226,01
	Kel. Inalahi	2.675	1,07	390,55
	Kel. Puusinauwi	631	0,25	92,13
	Kel. Inolobu	648	0,26	94,61
	Kel. Kulahi	1.136	0,45	165,86
	Kel. Palarahi	1.428	0,57	208,49
	Desa Kasumewuho	751	0,30	109,65
	Desa Analahumbuti	1.428	0,57	208,49
	Desa Nario Indah	1.100	0,44	160,60
	Desa Anggotoa	956	0,38	139,58
	Desa Karandu	1.075	0,43	156,95
	Desa Korumba	670	0,27	97,82
	Desa Kukuluri	853	0,34	124,54
		22.839	9,14	3334,49
ANGGABERI				
KOTA UNAHA	Kel. Lawulo	1.405	0,56	205,13
	Kel. Unaasi	1.296	0,52	189,22

Kecamatan	Kelurahan / Desa	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Timbulan Sampah (ton/hari)	Jumlah Timbulan Sampah (ton/tahun)
	Kel. Parauna	1.206	0,48	176,08
	Kel. Anggaberu	1.318	0,53	192,43
	Kel. Toriki	752	0,30	109,79
	Desa Lerehoma	241	0,10	35,19
	Desa Wundongohi	396	0,16	57,82
	Kel. Andabia	514	0,21	75,04
		7.128	2,85	1040,69
TONGAUNA				
KOTA	Kel. Puosu	1.359	0,54	198,41
	Kel. Sendang Mulia Sari	2.009	0,80	293,31
	Kel. Mekar Sari	1.414	0,57	206,44
	Kel. Mataiwoi	781	0,31	114,03
	Desa Ambepulu	928	0,37	135,49
	Kel. Tongauna	1.160	0,46	169,36
	Desa Asao	1.405	0,56	205,13
	Desa Lalonggowuna	881	0,35	128,63
	Desa Momea	871	0,35	127,17
	Desa Andeposandu	535	0,21	78,11
		11.343	4,54	1656,08
KONawe				
KOTA UNAAHA	Kel. Bungguosu	1.063	0,43	155,20
	Kel. Tudaone	1.293	0,52	188,78
	Kel. Tawanga	652	0,26	95,19
	Kel. Konawe	1.472	0,59	214,91
	Desa Mokowu	720	0,29	105,12
	Desa Puuwonua	575	0,23	83,95
	Desa Sanggona	802	0,32	117,09
	Desa Asoniwowo	679	0,27	99,13
	Desa Hudoa	881	0,35	128,63
	Desa Uete	502	0,20	73,29
	Desa Uelawu	993	0,40	144,98
	Desa Wonua Mbae	556	0,22	81,18
		10.188	4,08	1.487,45
UEPAI				
	Baruga	844	0,34	123,22
	Langgomea	1.192	0,48	174,03
	Matahoalu	664	0,27	96,94
	Tawarotobota	703	0,28	102,64
	Tawamelewe	745	0,30	108,77
	Uepai	1.210	0,48	176,66
	Ameroro	1.204	0,48	175,78

Kecamatan	Kelurahan / Desa	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Timbunan Sampah (ton/hari)	Jumlah Timbunan Sampah (ton/tahun)
	Amaroa	652	0,26	95,19
	Rawua	1.348	0,54	196,81
	Anggopiu	1.773	0,71	258,86
	Olo-oloho	549	0,22	80,15
	Humboto	922	0,37	134,61
	Kasaeda	539	0,22	78,69
	Tanggodipo	564	0,23	82,34
	Tamesandi	899	0,36	131,25
	Anggawo	239	0,10	34,89
	Puuroda Jaya	390	0,16	56,94
	Panggulawu	398	0,16	58,11
		14.835	5,93	2.165,91
Wilayah Kota Unaaha		62.526	25,01	9.128,80
Wilayah Pelayanan Sampah		40.397	17,35	6.332,60
Wilayah Kota yang tidak dilayani		22.129	8,85	3.230,83
Penanganan di Wilayah Pelayanan Sampah (Kinerja Angkut)			13,54	4.942,10
Persentase Penanganan Sampah di Wilayah Pelayanan (%)				78,04
Persentase Penanganan Sampah di Wilayah Perkotaan Unaaha (%)				83,79
Persentase Pelayanan sampah di Wilayah Perkotaan Unaaha (%)				64,61
Persentase tidak ada pelayanan sampah di Wilayah Perkotaan Unaaha (%)				35,39

Sumber : Data Penduduk (Kabupaten Konawe Dalam Angka Tahun 2024)

	Deliniasi Kota Unaaha
	Wilayah Pelayanan Persampahan

Tingginya jumlah penduduk dan produksi sampah di pusat kota (Kel. Tumpas, Puunaaha, Arombu) memerlukan penanganan intensif. Masih ada 35,39% wilayah perkotaan yang belum mendapat layanan persampahan, ini berpotensi menyebabkan: Timbunan sampah liar, risiko pencemaran lingkungan, serta gangguan kesehatan masyarakat. Efektivitas pengangkutan masih belum optimal di beberapa wilayah, hanya 78,04% sampah yang berhasil ditangani dari wilayah pelayanan. Wilayah Kota Unaaha menghasilkan timbunan sampah yang cukup besar dan menjadi masalah utama, dengan dominasi di Kecamatan Unaaha dan Wawotobi. Ketersediaan layanan pengangkutan sampah masih belum merata, terutama di wilayah luar pelayanan (± 22 ribu jiwa).

6. Urusan Kependudukan dan catatan sipil

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Kependudukan dan Catatan Sipil diimplementasikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Untuk meningkatkan akurasi data, mulai tahun 2019 dilakukan perekaman data kependudukan dengan program KTP-el. Hal ini untuk mencegah terjadinya kepemilikan KTP ganda dan pengadministrasian yang lebih akurat. Rasio penduduk ber-KTP di Kabupaten Konawe relatif meningkat setiap tahunnya yaitu dari tahun 2018 sebesar 88,89% menjadi 90,14% pada tahun 2020, namun demikian pada tahun 2021 rasio penduduk berKTP mencapai 89,92, sedikit mengalami penurunan dikarenakan kondisi Pandemi Covid-19 menyebabkan jumlah perekaman tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Pada tahun 2022, rasio penduduk ber KTP meningkat menjadi 93,57% seiring menurunnya dampak pandemi Covid-19. Data jumlah penduduk ber-KTP Kabupaten Konawe Tahun 2019-2023 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 40 Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Tahun 2020-2024

URAIAN	Satuan	CAPAIAN INDIKATOR				
		2020	2021	2022	2023	2024
Perekaman KTP elektronik	Persen	90,14	89,92	93,57	98,09	98,73
Persentase anak usia 0-17 tahun yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)	Persen	3,89	8,01	5,51	6,37	28,60
Kepemilikan Akta Kelahiran	Persen	90,47	93,33	90,47	99,12	99,61
Jumlah OPD pemanfaatan data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja sama	Persen	0	0	0	27,27	27,27
Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	per satuan penduduk	86,62	89,27	90,23	93,57	98,09
Rasio Pasangan Berakte Nikah	Persen	100	100	48,24	50,44	51,94
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/Be lum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber : Dinas ADMINDUKAPIL Konawe

Capaian kinerja pelayanan administrasi kependudukan Kabupaten Konawe pada periode 2020–2024 menunjukkan perkembangan yang relatif positif. Perekaman KTP elektronik mengalami peningkatan signifikan dari 90,14 persen pada tahun 2020 menjadi 98,73 persen pada tahun 2024, mendekati target nasional sebesar 99 persen. Capaian ini juga diikuti dengan rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk yang mengalami tren serupa. Kepemilikan akta kelahiran menunjukkan konsistensi tinggi dengan rata-rata di atas 90 persen dan mencapai 99,61 persen pada akhir periode, disertai dengan cakupan penerbitan akta kelahiran yang telah mencapai 100 persen sejak tahun 2020.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian khusus. Persentase anak usia 0–17 tahun yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) memang mengalami kenaikan signifikan dari 3,89 persen pada tahun 2020 menjadi 28,60 persen pada tahun 2024, namun capaian ini masih jauh dari target nasional dan mengindikasikan perlunya percepatan layanan Kartu Identitas Anak (KIA) melalui integrasi dengan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemanfaatan data kependudukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru mencapai 27,27 persen pada tahun 2023–2024 setelah sebelumnya berada pada angka nol, yang menunjukkan bahwa pemanfaatan database kependudukan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah belum optimal.

Permasalahan lain yang menonjol adalah penurunan rasio pasangan bersertifikat nikah secara signifikan, dari 100 persen pada tahun 2020 menjadi hanya 51,94 persen pada tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan permasalahan sosial-hukum yang serius dimana masih tingginya angka pernikahan yang tidak tercatat atau kurangnya koordinasi antara Kantor Urusan Agama (KUA) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Fenomena ini berpotensi menimbulkan dampak sosial dan hukum, khususnya terkait perlindungan anak, hak-hak perempuan, serta legalitas dokumen keluarga.

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melakukan suatu upaya untuk membangun potensi desa dengan melibatkan masyarakat

dalam proses pembangunan. Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengurangi ketimpangan sosial. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe dalam hal ini telah melakukan beberapa kegiatan dan telah mengumpulkan data dari tahun 2020 hingga 2024 dapat di lihat pada tabel di bawah.

Tabel 2. 41 Perkembangan Capaian Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
1.	Persentase pengentasan desa tertinggal	Persen	39,06	29	97,82	71,42	62,5
2.	Persentase peningkatan status desa mandiri	Persen	0	0	0	0	0
3.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Persen	100	100	100	100	100
4.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Lembaga	10	10	10	10	10
5.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Lembaga	10	10	10	10	10
6.	Persentase LSM aktif	Persen	4,81	3,09	8,93	5,15	5,15
7.	Persentase PKK aktif	Persen	100	100	100	100	100
8.	Persentase Posyandu aktif	Persen	100	100	100	100	100

Sumber Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2024

Capaian kinerja pembangunan pelayanan publik di tingkat desa Kabupaten Konawe selama periode 2020–2024 menunjukkan adanya perkembangan yang cukup signifikan, khususnya dalam aspek pengentasan desa tertinggal dan penguatan kelembagaan sosial masyarakat. Persentase pengentasan desa tertinggal meningkat secara tajam dari 39,06 persen pada tahun 2020 menjadi 97,82 persen pada tahun 2022. Meskipun demikian, pada tahun 2023 dan 2024 terjadi penurunan menjadi 71,42 persen dan 62,5 persen, yang mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga keberlanjutan hasil program pemberdayaan desa tersebut.

Di sisi lain, persentase peningkatan status desa mandiri belum menunjukkan perkembangan yang berarti, bahkan berada pada angka 0 persen selama lima tahun berturut-turut. Hal ini mencerminkan belum optimalnya transformasi desa dari status berkembang atau maju menuju desa mandiri, meskipun telah terjadi kemajuan dalam pengentasan desa

tertinggal. Capaian ini menunjukkan perlunya strategi khusus dalam mendorong percepatan kemajuan status desa secara lebih sistematis dan berkelanjutan.

Capaian positif lainnya terlihat pada cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang tercatat sebesar 100 persen setiap tahunnya. Ini menjadi indikasi bahwa seluruh desa di Kabupaten Konawe telah memiliki fasilitas dasar pemerintahan desa yang memadai. Namun, tantangan selanjutnya terletak pada peningkatan pemanfaatan dan profesionalisme pengelolaan fasilitas tersebut untuk mendukung pelayanan publik yang lebih baik di tingkat desa.

Dari sisi kelembagaan, jumlah rata-rata kelompok binaan seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan PKK stabil di angka 10 lembaga per desa selama lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan konsistensi keberadaan kelembagaan lokal, meskipun belum dapat diukur efektivitas dan kontribusinya terhadap pembangunan desa. Sebaliknya, tingkat partisipasi LSM dalam pembangunan desa masih tergolong rendah dan fluktuatif, dengan persentase tertinggi hanya sebesar 8,93 persen pada tahun 2022 dan kembali stagnan di angka 5,15 persen pada dua tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah desa dengan LSM belum terbangun secara optimal.

Kelembagaan sosial seperti PKK dan Posyandu menunjukkan performa sangat baik dengan persentase keaktifan mencapai 100 persen secara konsisten setiap tahun. Ini merupakan kekuatan sosial yang penting dalam mendukung program kesehatan, pendidikan nonformal, dan pemberdayaan keluarga di tingkat desa. Ke depan, kelembagaan ini perlu didorong untuk berinovasi, meningkatkan kualitas layanan, serta memanfaatkan teknologi dalam penyampaian program kepada masyarakat.

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Capaian Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat dilihat dalam uraian tabel dibawah ini

Tabel 2. 42 Indikator Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Rata-Rata	0,00	2,30	2,28	2,26	2,11
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	76,83	55,97	71,09	71,09	67,11
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	14,11	19,96	20,77	13,09	9,22
4	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Peresen	1,89	1,83	1,83	0,84	1,79
5	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	Persen	27,78	27,78	27,78	27,78	27,78
6	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Rata-rata	0,00	52,19	52,19	52,19	52,19
7	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	Persen	76,83	55,97	71,09	71,09	71,09
8	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR15–19)	per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun	0,00	0,00	1,5	1,5	1,5
9	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	37,61	32,61	32,31	33,73	33,73
10	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	30,16	78,43	61,57	61,57	61,57
11	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	61,84	63,73	63,73	63,73	63,73
12	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persen	52,70	43,73	43,73	43,73	43,73
13	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persen	47,19	44,16	44,16	44,16	44,16
14	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Persen	158,62	13,79	13,79	13,79	13,79
15	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Persen	155,17	55,17	55,17	55,17	55,17
16	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Persen	57,29	5,97	5,97	5,97	5,97
18	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	Persen	71,43	71,43	71,43	71,43	71,43
20	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas PPKB Konawe

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, capaian kinerja program pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Konawe menunjukkan tren yang relatif positif pada aspek pengendalian kelahiran, namun masih menghadapi tantangan pada aspek keberlanjutan layanan dan keterlibatan lintas sektor. Angka Kelahiran Total (TFR) mengalami penurunan dari 2,30 pada tahun 2021 menjadi 2,11 pada tahun 2024,

mendekati angka ideal pengendalian penduduk. Penurunan ini sejalan dengan menurunnya persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need), dari 20,77% pada tahun 2022 menjadi 9,22% di tahun 2024. Hal ini mencerminkan meningkatnya akses dan efektivitas pelayanan KB kepada pasangan usia subur.

Meskipun demikian, tren penggunaan kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR) mengalami penurunan dari 76,83% pada tahun 2020 menjadi 67,12% pada tahun 2024, dan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) stagnan di kisaran 32–33%. Tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi juga menurun dan stagnan sejak 2022, berada pada angka 61,57%. Fenomena ini menandakan masih adanya tantangan dalam menjaga komitmen dan kesinambungan penggunaan kontrasepsi, yang dapat mempengaruhi keberhasilan pengendalian kelahiran dalam jangka panjang.

Di sisi lain, keterlibatan institusi dalam mendukung program KB, seperti peran aktif perangkat daerah dalam penguatan Kampung KB, belum menunjukkan peningkatan signifikan, tetap berada pada angka 27,78% selama lima tahun terakhir. Kelompok bina keluarga seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Remaja (BKR), dan Lansia (BKL) juga tidak menunjukkan perkembangan cakupan yang berarti. Hal ini menandakan perlunya strategi penguatan pendekatan berbasis siklus kehidupan keluarga yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Namun demikian, keberhasilan Kabupaten Konawe dalam menjaga cakupan 100% pendayagunaan petugas lapangan (PKB/PLKB dan PPKBD), cakupan data mikro keluarga di seluruh desa, serta kelompok pembinaan 8 fungsi keluarga menjadi kekuatan utama dalam mendukung ketahanan keluarga. Kinerja ini menunjukkan bahwa pondasi kelembagaan program pengendalian penduduk telah tersedia secara merata hingga ke tingkat desa/kelurahan.

9. Urusan Perhubungan

Capaian kinerja sektor transportasi dan konektivitas wilayah di Kabupaten Konawe selama periode 2020–2024 menunjukkan ketimpangan antara ketersediaan infrastruktur dasar dengan penyediaan layanan

transportasi publik yang memadai. Rasio konektivitas antar kabupaten/kota tergolong tinggi, meningkat dari 82,50 pada tahun 2020 menjadi 85,62 pada tahun 2024, menandakan bahwa jaringan jalan antar wilayah relatif terhubung dengan baik. Volume to capacity (V/C) ratio pada jalan kabupaten/kota juga menunjukkan kondisi lalu lintas yang masih terkendali, di mana angka rasio berada di bawah 0,5, bahkan menurun menjadi 0,19 pada tahun terakhir. Namun demikian, data lain menunjukkan bahwa moda angkutan umum nyaris tidak berfungsi selama lima tahun berturut-turut. Jumlah penumpang dan barang yang diangkut oleh moda angkutan umum tercatat nol, Hingga tahun 2023, tidak ada uji KIR dan kepemilikan KIR tercatat, dan baru pada 2024 terdapat peningkatan signifikan yaitu 647 kendaraan diuji dan 67,06 % kepemilikan KIR . Data ini menunjukkan lemahnya layanan transportasi publik, yang harus dipandang sebagai masalah serius dalam penyediaan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat.

Tabel 2. 43 Urusan Perhubungan

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Rasio konektivitas kab/kota	Nilai	82,50	82,50	85,5	85,5	85,62
2	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	Ratio	0,29	0,32	0,35	0,31	0,19
3	Jumlah uji kir angkutan umum	kir	0	0	0	0	647
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	3	2	1	1	1
5	Persentase layanan angkutan darat	Persen	0,2604	0,2604	0,2604	0,2604	0
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	Persen	0	0	0	0	67,06
7	Pemasangan Rambu- rambu	Persen	0	0,20	37,4	44,2	0
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	per jumlah kendaraan	0,027	0,026	0,025	0,025	0,025

Sumber : Dinas Perhubungan

Sementara itu, jumlah fasilitas simpul transportasi seperti terminal, pelabuhan laut, dan bandara justru mengalami penurunan dari 3 unit pada 2020 menjadi hanya 1 unit pada 2024 yaitu terminal. Persentase layanan angkutan darat yang sempat stagnan pada angka 0,2604 persen selama

empat tahun, justru menurun menjadi nol persen pada tahun terakhir. Selain itu, pemasangan rambu-rambu lalu lintas sempat meningkat di pertengahan periode namun kembali tidak dilanjutkan pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan semakin menurunnya keberadaan moda transportasi umum, yang disebabkan oleh minimnya penyedia layanan, rendahnya minat investasi sektor transportasi, serta pergeseran masyarakat ke penggunaan kendaraan pribadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam konektivitas fisik, namun belum diimbangi dengan penguatan sistem layanan transportasi publik. Minimnya perhatian terhadap angkutan umum, lemahnya regulasi trayek, serta terbatasnya fasilitas transportasi menjadi faktor penghambat utama dalam mewujudkan sistem mobilitas yang efisien, aman, dan terjangkau.

10. Urusan Statistik

Pada periode tahun 2020 hingga 2024, pengelolaan data statistik di Kabupaten Konawe menunjukkan capaian yang relatif stabil dan konsisten pada tingkat kinerja administratif yang tinggi.

Tabel 2. 44 Perkembangan Capaian Urusan Statistik

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100
3	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/Tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Buku "PDRB"	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Hal ini tercermin dari capaian 100 persen Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan maupun evaluasi pembangunan daerah. Selain itu, keberadaan dokumen statistik utama, seperti Kabupaten Dalam Angka dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), berhasil diterbitkan secara rutin setiap tahun. Untuk Sistem data terintegrasi yang baru mulai hadir pada 2021 hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan SDM pengelola data yang belum

sepenuhnya memiliki kapasitas teknis dan kelembagaan memadai pada tahun 2020.

Beberapa tantangan yang diidentifikasi antara lain adalah masih terbatasnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengelola data di sebagian besar OPD, integrasi dan sinkronisasi data lintas sektor yang belum optimal, serta infrastruktur pendukung sistem data yang memerlukan peningkatan keamanan, pemutakhiran, dan pemeliharaan berkelanjutan.

11. Urusan Komunikasi dan Informatika

Semakin meningkatnya kemampuan masyarakat dalam penggunaan dan penguasaan teknologi komunikasi dan informatika, maka pemerintah sebagai regulator maupun aktor dalam pembangunan perlu mengatur dan mengendalikan kebutuhan masyarakatnya khususnya dalam urusan jaringan komunikasi agar mempermudah urusan pemerintah dalam melakukan pelayanan pada masyarakat. Tersedianya infrastruktur menara telekomunikasi sebagai pendukung yang utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan indikator kerja lainnya dalam pelayanan. Cakupan layanan menara telekomunikasi dan indikator kerja lainnya hal tersebut diperlihatkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 45 Perkembangan Capaian Urusan Komunikasi dan Infromasi

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	0	0	0	42	85
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	18,75	18,75	18,75	37,50	100,00
3	Persentase masyarakat yg menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemda kab/kota	Persen	72,60	96,53	73,24	49,78	68,34
4	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Persen	0,00	0,00	35,71	62,07	100
5	Cakupan Layanan Telekomunikasi	Persen	60,30	65,28	69,81	73,92	77.28
6	Persentase penduduk yang menggunakan HP/ telepon	Persen	36,30	47,50	36,62	24,89	87.41

Sumber : Dinas Kominfo Konawe

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, pelayanan publik bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Konawe menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, khususnya pada dua tahun terakhir. Peningkatan kinerja paling mencolok dan menjadi lompatan besar terlihat

pada indikator keterhubungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo, yang pada tahun 2020 hingga 2022 berada di angka 0%, kemudian meningkat tajam menjadi 42% pada tahun 2023 dan 85% pada tahun 2024. Hal ini menandakan adanya komitmen serius dari pemerintah daerah untuk memperkuat konektivitas digital antar-perangkat daerah guna mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan terintegrasi.

Capaian layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi juga menunjukkan lompatan yang sangat signifikan. Selama tiga tahun pertama (2020–2022), capaian berada pada angka tetap 18,75%, lalu meningkat menjadi 37,5% pada tahun 2023, dan mencapai angka sempurna 100% pada tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Konawe telah berhasil mentransformasikan penyelenggaraan layanan publik ke dalam platform digital secara menyeluruh. Di sisi lain, penyebaran informasi publik kepada masyarakat mengalami fluktuasi. Setelah mencapai angka tertinggi sebesar 96,53% pada tahun 2021, capaian indikator ini menurun secara bertahap hingga hanya mencapai 68,34% pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan bahwa strategi komunikasi publik belum berjalan konsisten dan belum sepenuhnya didukung oleh infrastruktur akses informasi yang merata serta keterbatasan masyarakat dalam mengakses teknologi informasi.

Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat kecamatan mengalami pertumbuhan yang positif dan terarah. Dari 0% pada tahun 2020–2021, capaian meningkat menjadi 35,71% pada 2022, 62,07% pada 2023, dan mencapai 100% pada 2024. Keberhasilan ini mencerminkan peran KIM yang semakin strategis sebagai mitra pemerintah dalam menyebarluaskan informasi publik, meningkatkan literasi digital masyarakat, serta memperkuat peran masyarakat dalam pembangunan daerah. Cakupan layanan telekomunikasi juga menunjukkan peningkatan dari 60,30% pada tahun 2020 menjadi 77,28% pada tahun 2024. Meskipun peningkatan ini tergolong moderat, namun tetap menunjukkan adanya perluasan jangkauan layanan komunikasi ke wilayah-wilayah yang sebelumnya belum terlayani.

Adapun indikator penggunaan HP/telepon oleh masyarakat mengalami fluktuasi yang cukup tajam. Setelah mencapai 50,36% pada tahun 2022, angka ini menurun drastis menjadi 24,89% pada tahun 2023, sebelum kembali melonjak menjadi 87,41% pada tahun 2024. Fluktuasi ini disebabkan oleh dinamika sosial-ekonomi masyarakat dan variasi dalam metode pengumpulan data. Namun, capaian tahun 2024 menunjukkan bahwa akses terhadap perangkat komunikasi mengalami peningkatan tajam, yang berimplikasi positif terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam sistem layanan publik berbasis teknologi.

Capaian-capaian tersebut tidak terlepas dari faktor pendorong seperti komitmen kuat pemerintah daerah terhadap digitalisasi pelayanan, pembangunan infrastruktur telekomunikasi, pemberdayaan masyarakat melalui KIM, serta meningkatnya penetrasi teknologi komunikasi. Namun demikian, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur pada awal periode, penurunan efektivitas penyebaran informasi publik, serta ketimpangan akses di wilayah tertentu masih perlu mendapatkan perhatian serius. Oleh karena itu, strategi pembangunan ke depan perlu difokuskan pada perluasan akses, penguatan literasi digital, dan integrasi sistem layanan publik berbasis teknologi informasi yang inklusif dan berkelanjutan.

12. Urusan Koperasi

Urusan koperasi secara umum mencakup pendirian, pengelolaan, dan pengembangan usaha berdasarkan prinsip koperasi. Ini melibatkan proses registrasi, manajemen keuangan, pengembangan usaha, serta pemberdayaan anggota melalui pendidikan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Selain itu, koperasi juga menjalin hubungan dengan pihak eksternal untuk mempromosikan kepentingan anggota dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Tabel 2. 46 Indikator Urusan Koperasi

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Koperasi yg berkualitas	Persen	23,01	7,80	10,42	10,34	13,01

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Meningkatnya Usaha Mikro yg menjadi wirasausaha	Persen	0,91	3,04	3,87	5,94	6,03
3	Persentase koperasi aktif	Persen	57,53	57,53	41,93	38,24	28,21
4	Persentase UKM nonBPR/LKM aktif	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase BPR/LKMaktif	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas Koperasi

Pelayanan publik pada sektor koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Konawe selama periode lima tahun terakhir menunjukkan dinamika yang kompleks. Capaian indikator “meningkatnya koperasi yang berkualitas” menunjukkan tren fluktuatif dan cenderung menurun secara umum. Pada tahun 2020, capaian indikator ini berada pada angka 23,01 persen, kemudian mengalami penurunan tajam menjadi 7,80 persen pada tahun 2021, dan mengalami sedikit kenaikan bertahap hingga mencapai 13,01 persen pada tahun 2024. Pola ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi, namun kualitas koperasi di Konawe belum tumbuh secara berkelanjutan. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya jumlah koperasi yang aktif secara kelembagaan dan fungsional. Data menunjukkan bahwa persentase koperasi aktif mengalami penurunan signifikan dan menjadi masalah serius dari 57,53 persen pada tahun 2020 menjadi hanya 28,21 persen pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan masih banyak koperasi yang tidak melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT), tidak memiliki kegiatan usaha yang berjalan, atau hanya tercatat secara administratif tanpa aktivitas ekonomi yang nyata.

Sebaliknya, capaian indikator “meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha” menunjukkan tren positif dan konsisten selama lima tahun terakhir. Dari angka 0,91 persen pada tahun 2020, indikator ini terus meningkat hingga mencapai 6,03 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan tumbuhnya minat dan kapasitas pelaku usaha mikro untuk bertransformasi menjadi wirausaha yang produktif dan mandiri. Ini dapat dikaitkan dengan berbagai intervensi pemerintah baik pusat maupun

daerah dalam bentuk pelatihan, stimulus ekonomi, dan perluasan akses pasar melalui media digital pasca pandemi COVID-19.

Sementara itu, indikator persentase UKM non-BPR/LKM aktif dan persentase BPR/LKM aktif secara konsisten tercatat sebesar 100 persen selama periode analisis. Meskipun demikian, angka ini lebih mencerminkan stabilitas administratif daripada kualitas layanan atau daya jangkauan yang sesungguhnya terhadap masyarakat, khususnya kelompok rentan dan pelaku usaha mikro di perdesaan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan evaluasi yang lebih dalam dan berbasis kualitas terhadap lembaga keuangan mikro dan lembaga pembiayaan rakyat di tingkat lokal.

Dari hasil analisis tersebut, dapat diidentifikasi sejumlah faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja sektor koperasi dan UKM. Faktor pendorong meliputi adanya dukungan kebijakan dari pemerintah, pemanfaatan teknologi digital oleh pelaku usaha. Namun demikian, masih terdapat sejumlah faktor penghambat yang signifikan, antara lain rendahnya kapasitas manajerial koperasi, kurangnya pembinaan secara berkelanjutan, terbatasnya sistem pendataan dan monitoring, serta lemahnya koordinasi lintas sektor dalam pembinaan koperasi dan usaha mikro.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun sektor usaha mikro menunjukkan potensi pertumbuhan yang baik, kondisi kelembagaan koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan masih lemah dan membutuhkan perhatian serius

13. Urusan Penanaman Modal

Pemerintah Kabupaten Konawe aktif dalam mendorong investasi demi pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah membuat regulasi, mempromosikan investasi, memberikan pelayanan perizinan yang efisien, mengembangkan infrastruktur, melibatkan masyarakat lokal dan mengawasi pelaksanaan investasi. Semua ini dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan menguntungkan bagi investor serta masyarakat Konawe.

Tabel 2. 47 Capaian Indikator Urusan Penanaman Modal Kabupaten Konawe

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase peningkatan investasi dikabupaten/kota	Persen	86%	-73%	-81%	-185,9	-56,79%
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	34.774.631.884.343	20.056.609.126.437	11.088.193.731.959	3.878.901.058.424	2.474.000.665.555

Sumber Data : PTSP, 2025

Capaian kinerja urusan penanaman modal Kabupaten Konawe selama periode 2020–2024 menunjukkan tren yang cukup fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Persentase peningkatan investasi pada tahun 2020 sempat mencatat angka positif sebesar 86 persen, namun sejak tahun 2021 hingga 2024 justru mengalami kontraksi berturut-turut masing-masing sebesar -73 persen, -81 persen, -185,9 persen, dan -56,79 persen. Hal ini menunjukkan lemahnya iklim penanaman modal daerah, sekaligus menegaskan adanya risiko kebergantungan pada investasi berskala besar tanpa diimbangi penguatan investasi lokal yang lebih berkelanjutan

Hal ini sejalan dengan nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) yang terealisasi di Kabupaten Konawe yang mengalami penurunan signifikan dari Rp34,77 triliun pada tahun 2020 menjadi hanya Rp2,47 triliun pada tahun 2024. Meskipun demikian, rasio daya serap tenaga kerja dari investasi yang masuk tetap konsisten pada angka 100 persen, yang berarti bahwa setiap investasi yang terealisasi tetap mampu menyerap tenaga kerja sesuai target.

Kinerja yang menurun ini dipengaruhi oleh tingginya ketergantungan pada investasi berskala besar di sektor tertentu, keterbatasan infrastruktur pendukung, serta kurangnya diversifikasi sektor investasi. Selain itu, promosi daerah dalam menarik investor baru masih belum optimal sehingga aliran investasi belum mampu dikonsolidasikan secara berkelanjutan. Di sisi lain, faktor pendorong yang tetap menjaga daya serap tenaga kerja berasal dari minat investasi pada sektor-sektor tertentu serta dukungan kebijakan

pemerintah yang meski belum optimal, tetap memberikan dasar positif bagi masuknya investasi di daerah.

Tabel 2. 48 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Urusan Pelayanan Perizinan, Triwulan II 2025

NO.	UNSUR PELAYANAN	KODE UNSUR	NILAI TERTIMBANG
1.	Persyaratan	U-1	0,37
2.	Prosedur	U-2	0,36
3.	Waktu Pelayanan	U-3	0,37
4.	Biaya/Tarif	U-4	0,42
5.	Produk Layanan	U-5	0,36
6.	Kompetensi Pelaksana	U-6	0,36
7.	Perilaku Pelaksana	U-7	0,37
8.	Sarana dan Prasarana, saran dan masukan	U-8	0,35
9.	Penanganan Pengaduan	U-9	0,40
JUMLAH			3,364

Sumber: Dinas PTSP Kab. Konawe

Nilai rata-rata tertimbang di peroleh dengan mengalikan nilai rata-rata dengan nilai penimbang yang besarnya ditetapkan sebesar 0,11. Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah nilai rata-rata tertimbang adalah **3,364**. Nilai rata-rata tertimbang ini digunakan sebagai dasar pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat (SKM) secara keseluruhan. Untuk memudahkan Interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100, maka nilai rata-rata tertimbang di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25. Dengan demikian maka Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Konawe Tahun 2025 adalah **3,364 X 25 = 84,092** Mutu Pelayanan **B** dengan Interpretasi **BAIK**.

Tabel 2. 49 Target dan Realisasi Investasi PMDN/PMA, Tahun 2020-2024

URAIAN	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Penanaman Modal Dalam Negeri	Rupiah	7.565.000.000	7.915.000.000	3.014.000.689	129.961.840.171	4.409.527.272
Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri	Rupiah	4.011.000.000	5.333.432.112	7.082.657.000	290.778.313	394.252.088

URAIAN	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Penanaman Modal Asing	Rupiah	6.125.782.227.205	92.919.125.396	1.930.032.712	105.347.947.645	8.819.054.544
Realisasi Penanaman Modal Asing	Rupiah	36.323.777.853.551	8.248.284.343	21.307.700.000	1.381.512.465	2.079.748.577

Sumber; Dinas PTSP

Selama periode 2020–2024, perkembangan investasi di Kabupaten Konawe mengalami fluktuasi yang cukup signifikan baik pada sisi rencana maupun realisasi. Untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), rencana investasi berfluktuasi dari Rp7,56 miliar pada tahun 2020, meningkat sedikit pada 2021, kemudian menurun drastis menjadi Rp3,01 miliar pada 2022. Namun pada 2023 terjadi lonjakan besar hingga Rp129,96 miliar sebelum kembali turun menjadi Rp4,41 miliar pada 2024. Dari sisi realisasi, investasi PMDN relatif kecil dan cenderung tidak stabil. Pada tahun 2020, realisasi mencapai Rp4,01 miliar dan sempat meningkat menjadi Rp7,08 miliar pada 2022. Akan tetapi, realisasi turun drastis pada 2023 menjadi hanya Rp290 juta sebelum naik sedikit menjadi Rp394 juta pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun rencana investasi PMDN sempat melonjak sangat tinggi pada 2023, realisasinya justru jauh dari target.

Sementara itu, Penanaman Modal Asing (PMA) menunjukkan pergerakan yang jauh lebih besar nominalnya. Rencana investasi PMA pada 2020 sangat tinggi, mencapai Rp6,12 triliun, tetapi kemudian menurun tajam pada 2021 dan tahun-tahun berikutnya, bahkan hanya sekitar Rp8,8 miliar pada 2024. Realisasi PMA juga menunjukkan pola yang sama: sangat besar pada 2020 dengan Rp36,32 triliun, namun setelah itu turun tajam, hanya sekitar Rp8,24 miliar pada 2021, Rp21,3 miliar pada 2022, Rp1,38 miliar pada 2023, dan Rp2,07 miliar pada 2024.

14. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Bidang Kepemudaan mempunyai tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan pengembangan, pembinaan, penataan dan pengawasan pemuda.

Pemuda merupakan aset pembangunan terutama di bidang SDM, sebagai pemersatu langkah-langkah pendukung dalam pembangunan. Peran

organisasi kepemudaan dalam pembangunan sangat dibutuhkan. Program dan kegiatan kepemudaan serta keolahragaan diupayakan dapat meningkatkan dinamika kegiatan kepemudaan dan olahraga yang dilakukan oleh masyarakat. Sejak tahun 2020-2024 telah dilaksanakan berbagai kegiatan kepemudaan dan keolahragaan baik di tingkat Kabupaten maupun Provinsi. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel ;

Tabel 2. 50 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					KETERANGAN
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	
	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	0,67	0,70	0,81	0,87	1,57	
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	1,90	1,89	1,94	2,00	3,88	
	Peningkatan prestasi olahraga	Cabor	1,00	-	-	1,00	-	
	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	78,05	87,80	0,00	84,44	83,57	
	Persentase wirausaha muda	Persen	56,28	73,70	73,89	76,04	79,51	
	Cakupan pembinaan olahraga	Persen	57,14	60,00	71,43	71,43	72,63	
	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Persen	92,50	100,00	90,91	80,00	78,34	
	Cakupan pembinaan atlet muda	Persen	76,92	68,75	71,25	69,41	72,94	
	Jumlah atlet berprestasi	Atlet	-	1,00	1,00	1,00	2,00	
	Jumlah prestasi olahraga	Cabor	12,00	11,00	15	-	2,00	

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olah raga Kabupaten Konawe, 2025

Capaian kinerja urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Konawe selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang beragam, dengan kecenderungan positif pada aspek partisipasi pemuda dan kewirausahaan, namun masih menghadapi tantangan pada aspek pembinaan dan prestasi olahraga. Indikator tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri mengalami peningkatan signifikan dari 0,67 persen pada tahun 2020 menjadi 1,57 persen pada tahun 2024, sementara partisipasi pemuda dalam organisasi sosial dan kepemudaan juga meningkat dari 1,90 persen menjadi 3,88 persen dalam periode yang sama. Persentase wirausaha muda menunjukkan tren yang sangat baik, tumbuh dari 56,28 persen pada tahun 2020 menjadi 79,51 persen di akhir periode. Capaian ini mengindikasikan bahwa kebijakan pemberdayaan pemuda dan pengembangan ekonomi kreatif telah berjalan cukup efektif.

Namun demikian, indikator pada sektor olahraga menunjukkan kecenderungan yang menurun dan belum stabil. Jumlah cabang olahraga (cabor) yang mencatatkan prestasi menurun drastis dari 15 cabor pada tahun 2022 menjadi hanya 2 cabor pada tahun 2024, sementara jumlah atlet berprestasi stagnan di angka dua orang selama dua tahun terakhir. Cakupan

pelatih bersertifikasi yang sempat mencapai 100 persen pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 78,34 persen pada tahun 2024, dan cakupan pembinaan atlet muda masih fluktuatif tanpa tren peningkatan yang jelas. Selain itu, persentase organisasi pemuda yang aktif menurun dari 87,80 persen pada tahun 2021 menjadi 83,57 persen pada tahun 2024, yang mengindikasikan perlunya penguatan kelembagaan dan dukungan terhadap organisasi kepemudaan di tingkat lokal serta perlu strategi revitalisasi organisasi pemuda agar tetap menjadi wadah pengembangan kapasitas, kreativitas, dan kepemimpinan.

Pencapaian tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor pendorong meliputi adanya dukungan kebijakan pemberdayaan pemuda, fasilitasi kegiatan organisasi, dan sinergi antarperangkat daerah terkait, khususnya dalam mendukung pengembangan kewirausahaan dan partisipasi sosial. Di sisi lain, faktor penghambat yang diidentifikasi antara lain keterbatasan sarana dan prasarana olahraga, belum optimalnya pelatihan dan pembinaan atlet serta pelatih, rendahnya intensitas kompetisi lokal, serta belum tersedianya sistem monitoring dan evaluasi yang komprehensif terhadap program kepemudaan dan olahraga.

15. Urusan Kebudayaan

Urusan Kebudayaan di Kabupaten Konawe dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe.

Tabel 2. 51 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen	29.17	33.33	37.50	37.50	80.00
2	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Event	3	3	1	3	5
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Objek	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Belum Ada
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Objek	1	1	1	1	2

Sumber : DIKBUD Konawe

Capaian kinerja urusan kebudayaan di Kabupaten Konawe selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan pada beberapa indikator strategis, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang belum berkembang secara optimal. Indikator

pelestarian cagar budaya mengalami kemajuan yang signifikan, dari 29,17 persen pada tahun 2020 menjadi 80 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam upaya perlindungan dan pelestarian cagar budaya lokal, yang menjadi aset penting dalam pembangunan berkelanjutan berbasis budaya. Di sisi lain, penyelenggaraan festival seni dan budaya mengalami fluktuasi, namun menunjukkan tren yang positif di tahun 2024 dengan capaian lima kegiatan, menandakan adanya pemulihan dan penguatan aktivitas budaya.

Namun demikian, capaian pada indikator jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi belum menunjukkan perkembangan yang berarti serta menjadi kelemahan besar Kabupaten Konawe. Selama lima tahun terakhir, tidak terdapat capaian dalam kegiatan tersebut, menandakan adanya stagnasi dalam upaya pendokumentasian dan revitalisasi kekayaan budaya lokal. Hal ini disinyalir disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia. Sementara itu, indikator jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu menunjukkan tren stabil pada angka satu objek per tahun selama 2020–2023, dan mulai meningkat menjadi dua objek pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan mulai tumbuhnya pendekatan terpadu dalam pengelolaan cagar budaya, meskipun masih pada skala terbatas.

Secara umum, capaian kinerja urusan kebudayaan selama periode 2020–2024 menunjukkan adanya kemajuan yang positif, khususnya dalam aspek pelestarian dan penyelenggaraan kegiatan budaya.

16. Urusan Perpustakaan

Perpustakaan memiliki peran yang sangat strategis dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan menuju masyarakat cerdas, kritis dan inovatif, disamping sebagai pelestari nilai budaya di masyarakat. Pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan diarahkan pada meningkatnya kegemaran membaca masyarakat (*reading habit society*) menuju masyarakat belajar (*learning society*) yang berujung pada peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu, perpustakaan harus menyediakan koleksi yang lengkap dan mudah serta murah.

Peningkatan minat baca masyarakat dapat dilihat salah satunya dengan meningkatnya jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan, seperti terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 52 Indikator Capaian Kinerja Perpustakaan Kabupaten Konawe

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Range	0	0	0	0	53.25
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	0	0	77.68	36.47	38.04
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	persatuan penduduk	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16
4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	Orang	434	849	616	438	754
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul Buku	14901	14901	14901	16051	17083
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang	0	3	9	12	12

Sumber: *) Data Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Konawe, 2024.

Capaian kinerja pelayanan perpustakaan daerah Kabupaten Konawe selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang fluktuatif dengan kecenderungan perbaikan di tahun akhir. Selama empat tahun pertama, nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat tercatat nol, namun mengalami peningkatan signifikan menjadi 53,25 pada tahun 2024. Peningkatan ini disebabkan adanya perhatian pemerintah daerah terhadap intervensi program literasi yang mulai berjalan efektif di tahun terakhir. Di sisi lain, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat mencapai angka tertinggi sebesar 77,68 pada tahun 2022, namun mengalami penurunan drastis di tahun-tahun berikutnya, yang mencerminkan belum konsistennya pelaksanaan program literasi secara berkelanjutan.

Meskipun jumlah koleksi judul buku mengalami peningkatan dari 14.901 menjadi 17.083 judul, rasio perpustakaan terhadap jumlah penduduk tidak menunjukkan perubahan berarti dan justru sedikit menurun dari 0,17 menjadi 0,16. Hal ini mengindikasikan bahwa perluasan akses terhadap fasilitas perpustakaan masih menjadi tantangan. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun juga berfluktuasi, yang menunjukkan bahwa kunjungan masyarakat sangat tergantung pada adanya kegiatan insidental atau program tertentu. Kemudian untuk data jumlah pustakawan,

tenaga teknis, dan penilai bersertifikat menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 belum ada tenaga yang memiliki sertifikat (0 orang), kemudian mulai meningkat menjadi 3 orang pada 2021, naik lagi menjadi 9 orang pada 2022, bertambah menjadi 12 orang pada 2023, dan stagnan di angka 12 orang pada 2024. Perkembangan ini mencerminkan adanya peningkatan kapasitas SDM bidang perpustakaan, meskipun pada dua tahun terakhir sudah mencapai titik stagnasi sehingga masih diperlukan upaya lanjutan untuk memperluas sertifikasi tenaga pustakawan.

Beberapa faktor pendorong capaian kinerja tersebut antara lain adalah mulai aktifnya kebijakan literasi daerah, peningkatan dukungan anggaran pada tahun akhir, serta tumbuhnya kesadaran literasi di masyarakat. Sementara itu, hambatan utama meliputi minimnya jumlah pustakawan profesional, belum optimalnya pemanfaatan perpustakaan desa atau kelurahan, serta lemahnya kesinambungan dan koordinasi antar program.

17. Urusan Kearsipan

Pengelolaan kearsipan daerah mencakup kegiatan pengelolaan, penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip pada unit kerja dan kalurahan. Untuk dapat menerapkan pengelolaan arsip yang handal dan sesuai dengan kaidah kearsipan perlu diadakan kegiatan pembinaan kearsipan dan penyelamatan serta pelestarian dokumen/arsip.

Pencapaian kegiatan pembinaan kearsipan pada unit kerja dan kalurahan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Keberhasilan pengelolaan arsip daerah tidak terlepas dari kesadaran masing-masing unit kerja dan kalurahan tentang pentingnya arsip. Pencapaian kegiatan penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan semakin bertambahnya khasanah arsip yang tersimpan di lembaga kearsipan daerah. Capaian Pengelolaan Kearsipan dapat dilihat dari peningkatan unit kerja yang sudah menerapkan arsip sesuai kaidah kearsipan.

Tabel 2. 53 Indikator Capaian Kearsipan Kabupaten Konawe

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	PERSEN	100%	100%	100%	100%	100%
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara utk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
3	Jumlah kegiatan Peningkatan SDM pengelola kearsipan	KEG	2	2	2	2	2

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, 2025

Capaian kinerja urusan kearsipan Kabupaten Konawe selama periode 2020–2024 menunjukkan tren yang stabil dan optimal. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti pertanggungjawaban nasional secara konsisten mencapai 100% setiap tahun. Hal ini mencerminkan bahwa seluruh arsip yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan telah tersedia sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Demikian pula, tingkat keberadaan dan keutuhan arsip juga berada pada level 100% sepanjang periode evaluasi, yang menunjukkan bahwa arsip-arsip yang ada terpelihara dengan baik, tidak mengalami kehilangan maupun kerusakan yang signifikan, serta dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Pada aspek penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola kearsipan, Pemerintah Kabupaten Konawe melaksanakan dua kegiatan peningkatan kompetensi SDM setiap tahun secara konsisten. Upaya ini menjadi salah satu faktor yang mendukung tercapainya kinerja yang stabil, di samping kepatuhan tinggi terhadap regulasi kearsipan dan keberadaan sistem pengelolaan arsip yang telah mapan. Namun demikian, jumlah kegiatan yang relatif terbatas tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan pengelolaan arsip yang semakin kompleks, khususnya terkait transformasi digital dan penguatan keamanan data.

Meskipun capaian indikator utama berada pada level maksimal, kinerja kearsipan Kabupaten Konawe dinilai masih bersifat stagnan karena tidak adanya peningkatan atau pengembangan indikator baru yang lebih progresif.

2.1.4.4.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Peran sektor kelautan dan perikanan dalam pengembangan perekonomian di Kabupaten Konawe sangatlah utama, karena sektor ini sangat diperlukan dalam upaya mendukung pemenuhan kebutuhan pangan (protein hewani), menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Konawe.

Sektor perikanan di Kabupaten Konawe terdiri dari Produksi perikanan tangkap, budidaya, cakupan bina kelompok nelayan dan Produksi perikanan kelompok nelayan. Perkembangan kinerja urusan perikanan selama periode lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi. Gambaran kinerja urusan perikanan di Kabupaten Konawe periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tabel 2. 54 Gambaran Urusan Perikanan di Kabupaten Konawe Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kab/kota	Ton/Tahun	4.098,90	5.336,90	16.617,50	15.709,2	26.948,41

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(sumber data: one data KKP)						
2	Konsumsi ikan	Kg/Kap/Tahun	70,51	70,78	72,32	73,38	73,38
3	Cakupan bina kelompok nelayan	KUB/Tahun	33,33	38,10	41,67	24,24	27,78

Sumber; Dinas Perikanan Konawe

Capaian kinerja urusan perikanan di Kabupaten Konawe selama periode 2020–2024 menunjukkan tren yang secara umum positif, terutama pada indikator produksi dan konsumsi. Produksi perikanan mengalami peningkatan signifikan dari 4.098,90 ton pada tahun 2020 menjadi 26.948,41 ton pada tahun 2024. Demikian pula dengan tingkat konsumsi ikan per kapita yang meningkat dari 70,51 kg menjadi 73,38 kg per tahun, menunjukkan peningkatan akses dan minat masyarakat terhadap konsumsi ikan sebagai bagian dari ketahanan pangan lokal. Namun demikian, tren capaian indikator lainnya menunjukkan dinamika yang perlu dicermati. Cakupan pembinaan kelompok nelayan (Kelompok nelayan yang diberikan bantuan oleh pemda) mengalami fluktuasi, di mana pada tahun 2023 terjadi penurunan tajam sebelum kembali naik pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan masih perlunya penguatan kelembagaan agar organisasi nelayan lebih berdaya dan berkelanjutan.

. Capaian tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor pendorong utama, antara lain kebijakan pemerintah daerah yang konsisten dalam memberikan dukungan sarana dan prasarana produksi perikanan, meningkatnya kesadaran konsumsi ikan di masyarakat, serta kontribusi kelompok nelayan dalam mendukung hasil produksi daerah.

Di sisi lain, beberapa faktor penghambat juga menjadi tantangan dalam pencapaian kinerja yang optimal, seperti keterbatasan kapasitas kelembagaan nelayan, belum meratanya pembinaan kelompok

2. Urusan Pariwisata

Sektor pariwisata Kabupaten Konawe memiliki peranan yang sangat penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan sektor pariwisata melalui penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan

wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja serta pengembangan usaha wisata.

Sektor pariwisata merupakan salah satu penggerak perekonomian yang mampu memberikan kontribusi terhadap kemakmuran daerah, sehingga pembangunan sektor pariwisata bertujuan untuk menghasilkan manfaat sosial, budaya, dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Keberhasilan pembangunan sektor pariwisata dapat dilihat dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, percepatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dapat dilakukan dengan mempromosikan pengembangan pariwisata. Tingkat keberhasilan pembangunan sektor pariwisata Kabupaten Konawe dapat dilihat pada Tabel ;

Tabel 2. 55 Perkembangan Capaian Urusan Pariwisata

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	30,77	40,74	-	-	-
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yg datang	Persen	45,41	67,14	65,31	71,21	70,51
3	Tingkat hunian akomodasi	Persen	31,79	47,86	54,39	63,86	54,39
4	Kunjungan wisata	Persen	17,58	11,55	21,23	25,78	36,63
5	Lama kunjungan Wisata	Hari	105,00	115,00	215,00	321,00	70,00

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olah raga dan Pariwisata Kabupaten Konawe, 2025

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, capaian kinerja sektor pariwisata Kabupaten Konawe menunjukkan tren yang bervariasi pada beberapa indikator utama. Pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara mengalami peningkatan pada awal periode, yakni sebesar 30,77 persen di tahun 2020 dan 40,74 persen di tahun 2021, namun mengalami stagnasi pada tiga tahun berikutnya. Hal ini mengindikasikan rendahnya keberlanjutan promosi wisata internasional serta belum optimalnya daya saing destinasi wisata lokal di tingkat global. Sementara itu, perjalanan

wisatawan nusantara menunjukkan tren yang cukup positif, meningkat dari 45,41 persen di tahun 2020 menjadi 70,51 persen di tahun 2024, mencerminkan potensi kuat sektor wisata domestik. Tingkat hunian akomodasi pun mengalami peningkatan signifikan dari 31,79 persen menjadi 63,86 persen di tahun 2023, sebelum turun menjadi 54,39 persen pada tahun 2024. Kunjungan wisata juga menunjukkan tren positif, naik dari 17,58 persen menjadi 36,63 persen dalam lima tahun terakhir.

Capaian-capaian tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendorong, antara lain potensi sumber daya alam dan budaya lokal yang menjadi daya tarik wisata, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pariwisata, serta stabilitas sosial dan keamanan daerah. Namun demikian, terdapat pula berbagai faktor penghambat, seperti kurangnya promosi destinasi secara terintegrasi, lemahnya kapasitas SDM pariwisata, serta belum optimalnya pengembangan kawasan wisata yang berkelanjutan

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa sektor pariwisata Kabupaten Konawe memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi daerah, khususnya melalui optimalisasi kunjungan wisatawan nusantara dan peningkatan kontribusi terhadap PAD.

3. Urusan Pertanian

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor dengan kontribusi terbesar dalam perekonomian daerah Kabupaten Konawe. Sektor pertanian menjadi tumpuan mata pencaharian mayoritas penduduk Kabupaten Konawe dan sebagai penyedia bahan pertanian masyarakat, sehingga urusan bidang pertanian ini perlu mendapatkan perhatian khusus untuk mewujudkan Pertanian di wilayah Kabupaten Konawe.

Capaian kinerja urusan pertanian Khususnya di dinas Tanam pangan dan holtikultura Kabupaten Konawe Tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 56 Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pertanian

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	PERSEN	24,85	22,98	19,26	15,98	15,6

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	PERSEN	99.12	99.04	99.39	40.42	88.77
3	Cakupan bina kelompok petani	PERSEN	8.56	8.1	7.41	9.17	9.63

Sumber: Dinas TPHP, BPS Konawe

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, kontribusi sektor pertanian dan perkebunan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Konawe menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2020, sektor ini masih memberikan kontribusi sebesar 24,85 persen terhadap PDRB daerah. Namun, angka tersebut terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun hingga mencapai 15,60 persen pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan terjadinya pergeseran struktur ekonomi daerah, yang ditandai dengan meningkatnya peran sektor-sektor non-pertanian, seperti industri pengolahan dan pertambangan, dalam struktur PDRB.

Meski demikian, kontribusi produksi yang dihasilkan oleh kelompok tani terhadap sektor pertanian masih tergolong sangat dominan, yakni di atas 99 persen pada tahun 2020 hingga 2022. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar aktivitas produksi pertanian masih ditopang oleh kelompok petani, yang pada dasarnya merupakan aktor ekonomi rakyat di tingkat desa. Namun demikian, pada tahun 2023 terjadi penurunan drastis kontribusi kelompok tani menjadi hanya 40,42 persen, sebelum kembali naik ke angka 88,77 persen pada tahun 2024. Fluktuasi tajam ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan kinerja sektor pertanian yang disebabkan oleh faktor eksternal seperti gangguan iklim dan alih fungsi lahan.

4. Urusan Perdagangan

Pemerintah Kabupaten Konawe memiliki peran penting dalam mengelola sektor perdagangan di wilayahnya. Mereka bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan dan regulasi perdagangan, seperti izin usaha dan standar kualitas produk.

Tabel 2. 57 Indikator Urusan Pedagangan

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	58,05	65,72	65,72	65,72	31,02
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	16,69	16,69	16,69	60,11	76,72
3	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya (UTTP) bertanda tera sah yg berlaku	%	64,00	83,35	83,35	83,46	83,46
4	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	-	-	5,27	4,22	3,69

Sumber : Dinas Koperindag

Selama periode tahun 2020 hingga 2023, capaian kinerja dalam aspek perizinan pelaku usaha di Kabupaten Konawe menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan, dengan persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan meningkat dari 58,05% menjadi 65,72%. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem perizinan dan meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk menjalankan usahanya secara legal. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan tajam pada indikator ini, yaitu sebesar 31,02%. Yang menandakan ada kemunduran tata kelola perizinan yang perlu segera dibenahi untuk menjaga iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Di sisi lain, realisasi kinerja distribusi pupuk mengalami peningkatan yang sangat signifikan mulai tahun 2023 hingga 2024, dari 16,69 Kg menjadi 76,72 Kg. Peningkatan ini menunjukkan perbaikan dalam pengelolaan distribusi pupuk bersubsidi maupun non-subsidi serta penguatan pengawasan yang dilakukan oleh dinas terkait. Hal ini diharapkan dapat mendukung stabilitas harga dan produksi sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomian daerah.

Pelayanan metrologi, khususnya dalam hal alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapan (UTTP) yang bertanda tera sah, menunjukkan capaian

yang konsisten dan stabil di angka sekitar 83% sejak tahun 2021. Hal ini menandakan tingginya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya tera ulang serta efektifnya pengawasan oleh unit metrologi legal Kabupaten Konawe. Pelayanan ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan konsumen dan memastikan keadilan dalam transaksi perdagangan.

Sementara itu, cakupan bina usaha informal yang baru mulai dicatat sejak tahun 2022 mengalami tren penurunan, dari 5,27% pada 2022 menjadi 3,69% pada 2024. Hal ini menunjukkan masih adanya kelemahan dalam keberlanjutan program pembinaan usaha informal, termasuk keterbatasan data valid serta kurang optimalnya pendampingan yang diberikan. Padahal, sektor informal memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat.

5. Urusan Perindustrian

Capaian kinerja pelayanan publik di sektor industri kecil dan menengah (IKM) Kabupaten Konawe selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang belum sepenuhnya menggambarkan peningkatan kualitas tata kelola sektor industri secara menyeluruh.

Tabel 2. 58 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	Persen	-	-	0,53	45	70,56
2	Cakupan bina kelompok pengrajin	Persen	-	33,33	22,22	33,33	-

Sumber; Dinas Perindustrian dan perdagangan Konawe

Salah satu indikator yang mengalami perkembangan cukup signifikan adalah pertambahan jumlah industri kecil dan menengah, yang mengalami kenaikan dari 0% pada tahun 2020–2021, menjadi 0,53% di tahun 2022, dan melonjak tajam menjadi 45% pada tahun 2023 serta 70,56% pada tahun 2024. Pertumbuhan tersebut mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas industri di tingkat lokal, baik dari sisi jumlah pelaku usaha maupun potensi ekonomi sektoral.

Salah satu indikator lain yang juga mengalami fluktuasi adalah cakupan bina kelompok pengrajin. Pada tahun 2021 dan 2023, capaian masing-masing sebesar 33,33%, namun menurun di tahun 2022 menjadi

22,22%, dan kembali stagnan di 0% pada tahun 2024. Ketidakkonsistenan tersebut menunjukkan belum adanya kesinambungan program pembinaan kelompok usaha produktif, serta lemahnya dukungan terhadap pengembangan industri berbasis kearifan lokal dan potensi wilayah.

6. Urusan Transmigrasi

Rendahnya capaian kinerja ini disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya minimnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, serta terbatasnya informasi yang diterima masyarakat mengenai peluang transmigrasi, khususnya melalui skema swakarsa. Di samping itu, keterbatasan infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan potensial transmigrasi juga menjadi faktor penghambat dalam mendorong keberhasilan program ini. Capaian transmigran swakarsa yang baru muncul sebesar 0,60% pada 2024 menunjukkan bahwa program ini hampir tidak berjalan atau nyaris mati dalam beberapa tahun terakhir. Namun demikian, munculnya capaian awal transmigran swakarsa pada tahun 2024 dapat menjadi momentum awal untuk membangun pendekatan yang lebih sistematis dan terencana dalam pengembangan transmigrasi

Tabel 2. 59 Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi

INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
		TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
Persentase transmigran swakarsa	PERSEN	0	0	0	0	0,60%

Sumber: Dinas Nakertrans

2.1.4.4.4 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Unsur Perencanaan

Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Konawe pada periode 2020–2024 menunjukkan konsistensi dan kepatuhan terhadap regulasi perencanaan nasional. Seluruh dokumen perencanaan utama yang terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) telah tersedia setiap tahun dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah. Keberadaan dokumen-dokumen ini menjadi

landasan penting dalam menjamin kesinambungan arah pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan Kabupaten Konawe.

Konsistensi antara dokumen perencanaan juga terjaga dengan baik sepanjang periode tersebut. Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD setiap tahun tercatat mencapai 100 persen, menunjukkan bahwa seluruh sasaran jangka menengah mampu diterjemahkan dengan baik ke dalam perencanaan tahunan. Hal yang sama terlihat pada konsistensi antara RKPD dengan APBD yang selalu mencapai 100 persen, menandakan bahwa seluruh program prioritas yang telah direncanakan benar-benar diakomodasi dalam penganggaran daerah. Selain itu, kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW juga terjaga di angka 100 persen setiap tahun, yang mengindikasikan perhatian Pemda terhadap prinsip penataan ruang, keseimbangan ekologi, dan keberlanjutan pembangunan wilayah.

Tabel 2. 60 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan

INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					KETERANGAN
		TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ADA/TIDAK	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ADA/TIDAK	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ADA/TIDAK	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ADA/TIDAK	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	PERSEN	100	100	100	100	100	
Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	PERSEN	100	100	100	100	100	
Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	PERSEN	100	100	100	100	100	

Sumber : bappeda Konawe

Capaian ini didorong oleh beberapa faktor penting, antara lain kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap regulasi nasional, ketersediaan dokumen tata ruang sebagai pedoman pembangunan, koordinasi kelembagaan perencanaan yang baik melalui Bappeda, serta pemanfaatan system digitalisasi yang mempermudah integrasi antar dokumen perencanaan. Namun demikian, masih terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu menjadi perhatian, seperti perlunya peningkatan kualitas perencanaan berbasis data yang lebih akurat, penguatan integrasi antara perencanaan dan sistem monitoring-evaluasi, serta pembaruan RTRW agar selalu relevan dengan dinamika pembangunan daerah dan kebutuhan investasi wilayah.

2. Urusan Manajemen Keuangan

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah. Salah satu bentuk prestasi dari kinerja pengelolaan keuangan yang juga merupakan indikator keberhasilan pengelolaan keuangan adalah tercapainya opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Data-data pengelolaan keuangan Kabupaten Konawe dapat dilihat pada Tabel dibawah ini

Tabel 2. 61 Capaian Kinerja Urusan Keuangan

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
1.	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Persen	16,88	17,9	20,95	24,1	23,93
2.	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi tranfer expenditure	Persen	40,79	39,32	42,7	56,33	50,74
3.	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	Perbandingan antara belanja langsung terhadap total APBD	Persen	17,96	24,53	35,33	36,22	0
5.	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	Persen	22,38	30,98	21,39	16,51	16,59
6.	Penetapan APBD	Status	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu
7.	Manajemen Aset	Status	ya	ya	ya	ya	ya
8.	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dlm APBD tahun sebelumnya	Persen	0,15	0,51	6,39	4,94	3,45

Sumber : BPKAD Konawe

Selama periode 2020 hingga 2024, kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Konawe menunjukkan dinamika yang mencerminkan adanya perbaikan tata kelola, namun juga mengindikasikan sejumlah tantangan mendasar. Dari sisi pengelolaan belanja, rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan menunjukkan tren peningkatan dari 16,88 persen pada tahun 2020 menjadi 23,93 persen pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan membesarnya porsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah, yang berpotensi mengurangi ruang fiskal untuk belanja pembangunan dan pelayanan publik.

Rasio belanja urusan pemerintahan umum juga menunjukkan tren meningkat dari 40,79 persen pada tahun 2020 menjadi 50,74 persen pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa terjadi inefisiensi anggaran dimana belanja rutin dan administrasi masih mendominasi struktur pengeluaran daerah, sementara porsi untuk belanja pembangunan cenderung lebih kecil. Sementara itu, rasio belanja langsung terhadap total APBD menunjukkan peningkatan dari 17,96 persen menjadi 36,22 persen, yang merupakan indikasi positif bahwa alokasi anggaran mulai bergeser ke arah kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sebaliknya, belanja tidak langsung mengalami penurunan dari 58,34 persen ke 48,68 persen, mendukung arah efisiensi fiskal yang lebih baik. Namun demikian, distribusi anggaran ke wilayah kecamatan dan desa menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Bagi hasil kabupaten ke tingkat bawah menurun tajam dari 30,98 persen pada tahun 2021 menjadi hanya 15,64 persen pada tahun 2024. Kondisi ini dapat memperlemah kapasitas fiskal wilayah dalam mendukung pembangunan lokal dan pelayanan dasar di tingkat desa. Di sisi lain, penetapan APBD setiap tahun dilakukan tepat waktu, menandakan adanya kepatuhan terhadap siklus penganggaran dan koordinasi yang baik antara eksekutif dan legislatif.

3. Unsur Pengawasan

Peran pengawasan dalam pembangunan di Kabupaten Konawe sangat penting, karena fungsi ini sangat diperlukan dalam upaya menjamin penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang ada. Fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah RKPD Kabupaten Konawe 2026 dilaksanakan melalui pemeriksaan, evaluasi dan reviu. Realisasi pelaksanaan fungsi pengawasan tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 62 Capaian Kinerja Urusan Pengawasan

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	2	2	3	3	3
2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	2	2	3	3	3

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	Persentase tindak lanjut temuan	Persen	67,95	75,81	85,59	97,37	100
4	Persentase pelanggaran pegawai	Persen	0,09	0,13	0,10	0,07	0,25
5	Jumlah temuan BPK	Temuan	444	474	499	256	357

Sumber : Inspektorat

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, capaian kinerja pada aspek pengawasan dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Konawe menunjukkan arah yang positif, meskipun masih terdapat tantangan yang perlu dibenahi. Indikator Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mengalami peningkatan dari Level 2 pada tahun 2020 dan 2021 menjadi Level 3 sejak tahun 2022 hingga 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pengendalian internal di lingkungan Pemerintah Daerah semakin terstruktur dan terdokumentasi. Sejalan dengan itu, kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga meningkat dari Level 2 menjadi Level 3 sejak tahun 2022, menunjukkan peningkatan kapasitas kelembagaan dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Capaian persentase tindak lanjut terhadap temuan hasil audit menunjukkan perbaikan yang signifikan, dari 67,95% pada tahun 2020 menjadi 100% pada tahun 2024. Kinerja ini tidak hanya mencerminkan komitmen perangkat daerah dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, tetapi juga menunjukkan bahwa sebagian temuan dari tahun-tahun sebelumnya berhasil diselesaikan. Sementara itu, indikator persentase pelanggaran pegawai menunjukkan tren yang relatif rendah, meskipun pada tahun 2024 terjadi kenaikan menjadi 0,25% dari posisi 0,07% pada tahun sebelumnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun pengawasan semakin kuat, masih terdapat tantangan dalam membangun budaya integritas yang konsisten di lingkungan birokrasi.

Jumlah temuan BPK menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada tahun 2023, jumlah temuan menurun signifikan menjadi 256 dari 499 pada tahun sebelumnya, namun kembali meningkat menjadi 357 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan tata kelola keuangan belum berlangsung secara merata dan berkelanjutan di seluruh perangkat daerah. Keberadaan

fluktuasi ini dapat menjadi refleksi atas masih lemahnya kontrol internal dan perlunya pembinaan berkelanjutan.

Capaian positif tersebut didorong oleh beberapa faktor utama, di antaranya adalah komitmen pimpinan daerah terhadap tata kelola pemerintahan yang akuntabel, peningkatan kapasitas SDM pengawasan, serta dukungan regulasi dan sistem yang memadai. Di sisi lain, capaian kinerja juga dihadapkan pada berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia pengawasan, belum meratanya pemahaman perangkat daerah terhadap mekanisme pengendalian intern, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam sistem pengawasan.

4. Unsur Pengadaan

Berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (1) huruf e dan huruf g sampai dengan o Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa ,Pemerintah Peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia. Capaian Indikator Kinerja Daerah bidang pengadaan hingga tahun 2023 dapat diuraikan dalam tabel berikut

Tabel 2. 63 Gambaran Urusan pengadaan di Kabupaten Konawe

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yg ditanda tangani pada kuartal pertama	Persen	0	0	22,35	28,19	15,04
2	Persentase jumlah pengadaan yg dilakukan dgn metode kompetitif	Persen	8,79	25,99	8	70,09	18,18

Sumber : Bagian ULP

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Konawe dalam bidang pengadaan barang/jasa dan pelaksanaan proyek konstruksi selama periode 2020–2024 menunjukkan pola yang fluktuatif dan kecenderungan penurunan pada akhir periode. Indikator persentase proyek yang dibawa ke tahun berikutnya melalui penandatanganan kontrak pada kuartal pertama berada pada posisi ideal sebesar 0% pada tahun 2020 dan 2021,

mencerminkan efektivitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Namun, pada tahun 2022 hingga 2024, angka ini meningkat secara signifikan, masing-masing mencapai 22,35%, 28,19%, dan 15,04%. Kecenderungan ini menunjukkan terjadinya penurunan kinerja dalam ketepatan waktu pelaksanaan proyek, yang berpotensi berdampak pada keterlambatan manfaat pembangunan yang diterima masyarakat.

Dalam aspek pengadaan, persentase pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif mengalami ketidakstabilan dari tahun ke tahun. Setelah meningkat dari 8,79% pada tahun 2020 menjadi 25,99% di tahun 2021, capaian ini kembali menurun ke 8,00% pada tahun 2022. Meskipun sempat melonjak drastis pada tahun 2023 mencapai 70,09%, capaian ini kembali turun menjadi 18,18% di tahun 2024. Selain itu, rasio nilai belanja yang dilaksanakan melalui pengadaan juga terus menurun dari 59,88% pada tahun 2020 hingga mencapai titik terendah sebesar 12,10% pada tahun 2024. Penurunan ini dapat mengindikasikan rendahnya efektivitas belanja daerah, potensi dominasi metode non-kompetitif, serta lemahnya penyiapan dokumen dan perencanaan kegiatan oleh perangkat daerah.

5. Unsur Kepegawaian

Tabel berikut menunjukkan Capaian kinerja urusan kepegawaian ;

Tabel 2. 64 Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	448,75	448,75	531,74	982,88	735,30
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	1,54	1,54	1,54	4,72	3,02
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Hari	90	90	90	90	90
5	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	0,68	0,73	0,77	0,53	0,49
6	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	13,84	13,84	17,61	17,06	27,81

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
7	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	36	36	38	38	35
8	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Orang	1.113	1.006	936	1023	695
9	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	2.620	2.762	2.695	2618	2572

Sumber : BPSDM Konawe

Selama periode 2020 hingga 2024, capaian kinerja sumber daya aparatur di Kabupaten Konawe menunjukkan tren yang relatif positif dengan sejumlah dinamika. Rasio pegawai dengan tingkat pendidikan tinggi dan menengah terus mengalami peningkatan signifikan, dari 448,75% pada tahun 2020 menjadi 982,88% pada tahun 2023, sebelum mengalami penurunan ke angka 735,30% pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan adanya komitmen terhadap peningkatan kualitas pendidikan ASN meskipun masih memerlukan upaya stabilisasi pada akhir periode.

Selanjutnya, rasio pegawai fungsional mengalami tren peningkatan, dari 1,54% pada tahun 2020 menjadi 3,02% pada tahun 2024. Peningkatan ini erat kaitannya dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi melalui konversi jabatan struktural ke jabatan fungsional. Pencapaian lainnya yang patut diapresiasi adalah terjaganya rasio jabatan fungsional yang telah bersertifikat kompetensi pada angka 100% sepanjang periode, menandakan bahwa seluruh pemangku jabatan tersebut telah memenuhi persyaratan kompetensi sesuai standar jabatan.

Namun demikian, rata-rata lama pendidikan dan pelatihan ASN tidak mengalami peningkatan, stagnan pada angka 90 hari per tahun. Persentase ASN yang mengikuti diklat fungsional justru mengalami penurunan dari 0,77% pada tahun 2022 menjadi hanya 0,49% pada tahun 2024. Sebaliknya, persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural meningkat secara signifikan dari 13,84% pada tahun 2020 menjadi 27,81% pada tahun 2024, menunjukkan dorongan positif dalam penguatan kapasitas kepemimpinan ASN.

Dari sisi struktur jabatan, terdapat penurunan jumlah jabatan administrasi secara tajam dari 1.113 pada tahun 2020 menjadi 695 pada tahun 2024, seiring dengan penerapan kebijakan nasional penyederhanaan

birokrasi. Sementara itu, jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu cenderung stabil pada kisaran 2.600-an orang. Jumlah jabatan pimpinan tinggi pun relatif stabil di angka 35–36 orang per tahun.

Capaian tersebut didorong oleh beberapa faktor, seperti implementasi kebijakan nasional tentang reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas ASN melalui pendidikan dan pelatihan, serta dorongan terhadap percepatan konversi jabatan ke fungsional. Di sisi lain, capaian juga dihadapkan pada tantangan seperti keterbatasan anggaran pelatihan, akses terhadap diklat yang belum merata di seluruh OPD, serta lemahnya perencanaan kebutuhan pelatihan berbasis kompetensi.

6. Unsur Transparansi dan Partisipasi Publik

Capaian kinerja pelayanan publik di Kabupaten Konawe selama periode 2020–2024 menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, terutama dalam aspek keterbukaan informasi kepada masyarakat. Pada indikator persentase informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan publik, capaian selama empat tahun pertama (2020–2023) berada pada angka 0 persen. Hal ini disebabkan belum dilaksanakannya ketersediaan data terkait perhitungan indikator tersebut akses informasi terkait sumber daya pelayanan publik, seperti data sumber daya manusia, anggaran operasional, dan sarana-prasarana yang digunakan oleh perangkat daerah. Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi peningkatan drastis hingga mencapai 99,47 persen, yang mencerminkan adanya upaya serius pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan.

Tabel 2. 65 Capaian Kinerja Urusan Transparansi dan Partisipasi Publik

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Persen		-	-	-	99,47
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Persen	-	-	100	100	100

Sumber; Kominfo Konawe

7. Unsur Penelitian dan Pengembangan

Capaian kinerja urusan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Konawe sepanjang periode 2020–2024 menunjukkan adanya dinamika perkembangan yang cukup signifikan. Pada awal periode, indikator masih berada pada angka nol, khususnya pada implementasi rencana kelitbangan, pemanfaatan hasil penelitian, fasilitasi perangkat daerah, maupun kebijakan inovasi. Namun sejak tahun 2022 mulai terlihat adanya peningkatan, meskipun relatif rendah, terutama pada indikator implementasi rencana kelitbangan yang tumbuh dari 0,33 persen pada 2022 menjadi 31,58 persen pada 2024. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan menunjukkan perkembangan yang lambat pada 2020–2021 sebesar 0%, melonjak pada 2022–2023 sebesar 100%, namun kembali menurun menjadi 83,33% pada 2024 sehingga menandakan belum konsistennya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan. Begitu pula dengan fasilitasi perangkat daerah dalam penerapan inovasi yang mulai terlihat pada 2023 dengan capaian 51,6 persen dan stabil pada 2024, capaian ini masih tergolong rendah dikarenakan belum semua organisasi perangkat daerah (OPD) mengusulkan inovasinya. Adapun kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah memperlihatkan capaian yang cukup tinggi, dari kondisi nol persen hingga 2022, kemudian meningkat tajam menjadi 100 persen pada 2023 dan bertahan hingga 2024.

Tabel 2. 66 Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	Persen	0	0,00	0,33	20,8	31,58
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	Persen	0	0	100	100	83,33
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	Persen	0	0	0	51,6	51,61
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	Persen	0	0	0	100,0	100,00

Sumber : Balitbang Konawe

Capaian ini didorong oleh adanya dukungan kebijakan pemerintah daerah serta perhatian pemerintah pusat terhadap kinerja inovasi daerah,

meningkatnya kebutuhan perangkat daerah akan solusi berbasis penelitian, dan kolaborasi dengan perguruan tinggi maupun lembaga penelitian. Namun demikian, masih terdapat sejumlah kendala yang perlu diperhatikan, antara lain keterbatasan kapasitas kelembagaan litbang daerah, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, lemahnya koordinasi antar-perangkat daerah dalam mengimplementasikan rencana litbang, serta belum meratanya fasilitasi inovasi yang baru mencakup separuh perangkat daerah. Selain itu, capaian indikator yang mencapai angka sempurna pada beberapa aspek perlu ditinjau kembali agar tidak hanya mencerminkan keberhasilan administratif, melainkan juga substansi implementasi yang memberi dampak nyata bagi masyarakat.

8. Unsur Sekretariat Dewan

Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe selama periode tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang sangat positif dengan tingkat capaian seluruh indikator yang konsisten berada pada angka 100 persen setiap tahunnya. Indikator tersebut meliputi tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat kelengkapan DPRD, tersusunnya serta terintegrasinya program-program DPRD dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik jangka menengah (RPJMD) maupun tahunan (RKPD), serta integrasi program DPRD ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Sekretariat DPRD. Capaian ini mengindikasikan bahwa tata kelola kelembagaan, proses administrasi, dan sinergi lintas fungsi dalam mendukung tugas DPRD telah berjalan secara efektif dan sistematis.

Keberhasilan tersebut didorong oleh beberapa faktor utama, antara lain konsistensi penerapan sistem perencanaan berbasis kinerja, tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, serta adanya komitmen bersama antara Sekretariat DPRD dan perangkat daerah dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran oleh DPRD. Selain itu, penggunaan sistem informasi perencanaan yang terintegrasi turut mempercepat dan mempermudah proses penyusunan dokumen perencanaan. Namun demikian, keberhasilan ini juga menghadapi sejumlah potensi tantangan, seperti keterbatasan inovasi dalam pengembangan dukungan substansi program DPRD, ketergantungan pada personel kunci

tertentu, serta kurangnya pengukuran terhadap efektivitas program yang telah diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan.

2.1.5 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

1. Urusan Kesehatan

A. Jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten / Kota Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang kesehatan sebagai berikut :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil.
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin.
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir.
4. Pelayanan Kesehatan Balita.
5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar.
6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif.
7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut.
8. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi.
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus.
10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ).
11. Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB.
12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV

B. Target pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM Bidang Kesehatan pada tahun 2024 yakni :

- Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil ditargetkan mencapai 100%;
- Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin ditargetkan mencapai 100%;
- Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir ditargetkan 100%;
- Persentase pelayanan kesehatan balita ditargetkan 100%;

- Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar ditargetkan 100%;
- Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif ditargetkan 100%;
- Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut ditargetkan 100%;
- Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi ditargetkan 100%;
- Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus (DM) ditargetkan 100%;
- Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat ditargetkan 100%;
- Persentase pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkolosis (TB) ditargetkan 100%;
- Persentase pelayanan kesehatan orang beresiko dengan risiko terinfeksi HIV ditargetkan 100%;

C. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM Bidang Kesehatan pada tahun 2024 yakni :

- Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil dari target 100% terealisasi sebesar 58,64%;
- Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin dari target 100% terealisasi sebesar 71,76%;
- Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir dari target 100% terealisasi sebesar 74,40%;
- Persentase pelayanan kesehatan balita dari target 100% terealisasi sebesar 83,31%;
- Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar dari target 100% terealisasi sebesar 86,42%;
- Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif dari target 100% terealisasi sebesar 74,60%;
- Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut dari target 100% terealisasi sebesar 86,64%;

- Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi dari target 100% terealisasi sebesar 62,16%;
- Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus (DM) dari target 100% terealisasi sebesar 88,39%;
- Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat dari target 100% terealisasi sebesar 90,45%;
- Persentase pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (TB) dari target 100% terealisasi sebesar 72,68%;
- Persentase pelayanan kesehatan orang beresiko dengan risiko terinfeksi HIV dari target 100% terealisasi sebesar 51,24%;

D. Alokasi Anggaran

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Konawe 1,707,655,804, Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Konawe yang bersumber dari APBD Kab. Konawe sebesar Rp.180.656.768.105 dengan Alokasi Anggaran Penerapan SPM Pada Satker PD Rp.10,990,872,294, APBD DAU Rp. 612,579,000, APBD DAK Non Fisik Rp. 10.378,293,294.

E. Dukungan Personil

Dalam pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024, Dinas Kesehatan Kab. Konawe didukung oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 2.404 personil pegawai yang terdiri dari: 912 orang PNS dan 1.492 P3K Dinas Kesehatan

F. Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Kesehatan

Permasalahan dalam suatu kegiatan merupakan sesuatu yang harus dicari solusi dalam pelaksanaan pencapaian SPM bidang kesehatan. Terdapat beberapa kendala atau permasalahan yang sering dijumpai, adapun kendala dan solusi dijabarkan sebagai berikut:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Permasalahan

- a. Pemakaian target estimasi pada setiap pelayanan kesehatan yang dianggap tinggi dari target rill.

- b. Standar kuantitas pada pelayanan kesehatan Ibu hamil adalah kunjungan 6 kali selama periode kahamilan (K6).
- c. Masih enggan untuk melakukan pemeriksaan difasyankes.
- d. Perpindahan penduduk dari dalam dan luar Kab. Konawe yang sangat cepat sehingga menyulitkan pemantauan dan pencatatan khususnya pada Ibu Hamil.
- e. Pencatatan dan pelaporan dari fasilitas kesehatan swasta yang belum terakomodir dengan baik.

Solusi

- a. Meningkatkan peran aktif dan dukungan dari Praktik Bidan Mandiri.
- b. Melakukan pelayanan kesehatan ibu hamil serta mengoptimalkan pencatatan dan pelaporan ibu hamil.
- c. Optimalisasi pencatatan dan pelaporan secara digital (Aplikasi e-kohort).

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Permasalahan

- a. Perpindahan penduduk dari luar Kab. Konawe yang sangat cepat dari berbagai kalangan sosial ekonomi, sehingga jika terdapat masalah kesehatan membutuhkan penanganan yang komprehensif melibatkan lintas program dan lintas sektor.
- b. Masih terdapat ibu hamil yang merencanakan/melakukan persalinannya di dukun sehingga mempengaruhi capaian persalinan tenaga kesehatan.
- c. Masih terdapat ibu hamil yang merencanakan/melakukan persalinannya diluar wilayah Kab. Konawe sehingga mempengaruhi capaian persalinan.

Solusi

- a. Meningkatkan kerja sama antara petugas kesehatan dan dukun terlatih.
- b. Koordinasi dengan faskes disekitarnya dalam melakukan pelayanan kesehatan ibu bersalin serta mengoptimalkan pencatatan dan pelaporan ibu bersalin.

- c. Optimalisasi pencatatan dan pelaporan secara digital (Aplikasi E-Kohort).
- d. Kader melakukan pendataan ibu bersalin di wilayah masing-masing sesuai dengan sasaran ibu hamil di wilayahnya.
- e. Meningkatkan kerja sama antara petugas kesehatan dan dukun terlatih.

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Berikut beberapa upaya untuk meningkatkan pelayanan diantaranya:

- a. Meningkatkan peran aktif kader kesehatan untuk melakukan peningkatan pelayanan pada kesehatan bayi baru lahir.
- b. Meningkatkan pelayanan melalui Telemedicine ataupun melalui WA Group.
- c. Meningkatkan peran aktif dan dukungan dari praktik bidan Mandiri dalam pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA).

4. Pelayanan Kesehatan Balita

Permasalahan

- a. Beberapa kader posyandu kurang aktif dalam pelaksanaan sweeping/kunjungan rumah.
- b. Orang tua tidak lagi membawa balitanya ke posyandu jika imunisasi dasar lengkap sudah terpenuhi.
- c. Masih terbatasnya penanggungjawab program balita yang memiliki kemampuan melakukan MTBS/SDIDTK.

Solusi

- a. Menyarankan kader melakukan sweeping langsung kerumah warga dan melalui kelompok penimbangan (tingkat RT).
- b. Pelatihan dan pembinaan penanggungjawab program balita (MTBS/SDIDTK).
- c. Meningkatkan peran aktif kader dalam pendataan balita.

5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Permasalahan

- a. Pergantian petugas program kadang menyebabkan petugas baru belum memahami dengan baik data anak usia pendidikan dasar yang terhenti atau tidak lagi mendapatkan pelayanan kesehatan.

- b. Pelayanan kesehatan bagi anak usia pendidikan dasar yang terhenti atau tidak lagi terpenuhi belum dapat ditangani secara optimal oleh puskesmas.

Solusi

- a. Pembuatan SK programer perlu dibuat untuk memperkuat keberadaan programer.
- b. Puskesmas diharapkan memahami betul aturan yang ada pada Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang penerapan standar pelayanan minimal dan PMK nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan sehingga benar dalam pengisian SPM.
- c. Optimalisasi penggunaan Aplikasi-Raport Kesehatan.

6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Permasalahan

- a. Untuk memenuhi definisi operasional pelayanan SPM Bidang kesehatan, penyediaan bahan habis pakai (BHP) masih terbatas.
- b. Puskesmas belum memahami kegiatan apa saja yang masuk sesuai dengan definisi operasional SPM.

Solusi

- a. Penambahan bahan habis pakai dari berbagai sumber dana, misal DAU dll.
- b. Melakukan skrining disetiap kelurahan, instansi pemerintah, tempat badah dan tempat umum
- c. Memberikan penjelasan kepada programer mengenai definisi operasional standar pelayanan minimal bidang kesehatan

7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Permasalahan

- a. Definisi operasional untuk pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar belum bisa dipenuhi oleh puskesmas dalam melakukan pelayanan.
- b. Rotasi/mutasi pegawai menyebabkan pemahaman programer pelayanan kesehatan lansia terbatas.

Solusi

- a. Pelatihan dan pembinaan petugas penanggungjawab program kesehatan lansia.
- b. Menyediakan tele-konsultasi melalui WA Group.

8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Permasalahan

- a. Penyakit hipertensi dianggap sepele jika belum menunjukkan gejala sehingga banyak orang dengan hipertensi tidak melakukan pengobatan secara rutin.
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan skrining kesehatan sehingga banyak orang yang tidak mengetahui jika dirinya menderita hipertensi.

Solusi

- a. Adanya penerbitan regulasi yang mengikat dunia usaha, pendidikan, institusi, pabrik untuk melakukan skrining ditempat usahanya.
- b. Pemenuhan media promosi kesehatan termasuk media infografis .
- c. Peningkatan pelayanan menggunakan sistem via WA.

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)

Berikut upaya peningkatan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus tetap harus dipertahankan.

Solusi

- a. Tetap melakukan screning secara teratur kepada setiap masyarakat yang beresiko.
- b. Peningkatan pelayanan menggunakan Telemedicine atau Wa Online.
- c. Pemenuhan media promosi kesehatan.

10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

Permasalahan

- a. Keluarga Penderita kurang berminat untuk mengantarkan keluarganya ke fasyankes.
- b. Kunjungan kesehatan jiwa menurun drastis karena pasien langsung datang kerumah sakit tanpa melalui puskesmas.

- c. Programmer kurang pencatatan dan pelaporan serta data pasien dari fasilitas pelayanan kesehatan perorangan belum terakomodir dengan baik.

Solusi

- a. Membuat format manual sebagai format validasi terhadap data yang diinput pada aplikasi.
- b. Pemenuhan media promkes termasuk media infografis.

11. Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis (TB)

Permasalahan

- a. Pemeriksaan laboratorium bakteriologis tuberkulosis dilakukan dipuskesmas.
- b. Dari 2 (dua) rumah sakit di Konawe, baru 1 Rumah Sakit yang rutin melaporkan pelayanan TB.

Solusi

- a. Pelatihan/peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk semua fasyankes.
- b. Perlunya Pengawas Minum Obat (PMO) untuk membantu kinerja Programmer.
- c. Puskesmas melakukan advokasi dengan membuat Surat Perjanjian Kerja Sama bersama rumah sakit, yang melibatkan lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat.

12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Permasalahan

- a. Pencatatan dan pelaporan dalam E-Kohort Ibu Hamil masih belum lengkap karena belum mencakup hasil pemeriksaan HIV.
- b. Terdapat perbedaan pencatatan Skrining HIV pada pasien TB dalam Aplikasi Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB)

Solusi

- a. Penguatan regulasi yang mendukung program nasional terutama TB dan HIV kepada faskes swasta .
- b. Kolaborasi lintas program dengan membentuk tim khusus TB-HI

2. Urusan Pekerjaan Umum

A. Jenis pelayanan dasar

Pelayanan dasar bidang pekerjaan umum yang dilaksanakan adalah :

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari. Formulasi yang digunakan untuk mengukur capaian keberhasilannya adalah :

$$= \frac{\text{Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangganya mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindung didalam sebuah Kabupaten}}{\text{Jumlah total rumah tangga diseluruh Kabupaten tersebut}} \times 100\%$$

2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Formulasi yang digunakan untuk mengukur capaian keberhasilannya adalah :

$$= \frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk} + \text{jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT} + \text{jumlah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\text{Jumlah rumah di Kabupaten}} \times 100\%$$

B. Target pencapaian SPM

Target pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum pada tahun 2024 yakni :

- Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari ditargetkan mencapai 100%;
- Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik ditargetkan mencapai 100%;

C. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum pada tahun 2024 yakni :

- Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari ditargetkan mencapai 100% dapat terealisasi 98,02%;
- Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik ditargetkan mencapai 100% dapat terealisasi 16,51%;

D. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD dan APBN tahun 2024 dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah Kabupaten Konawe, yakni :

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dialokasikan dalam APBD sebesar **Rp. 9.606.002.470**
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik dialokasikan sebesar **Rp. 5.364.721.700**

E. Dukungan Personil

Dukungan personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM dilingkup Dinas Pekerjaan Umum adalah :

Pegawai yang menyelenggarakan tugas ini seluruhnya berjumlah **17** Orang, berdasarkan kualifikasi pendidikan formal dan pangkat golongan dengan rincian sebagai berikut :

Kualifikasi tingkat Pendidikan sebagai berikut :

- S2 : 1 orang
- S1 : 10 orang
- SLTA : 4 orang
- D3 : 3 orang

Kualifikasi pangkat dan golongan sebagai berikut ;

- Golongan II : 4 orang
- Golongan III : 12 orang
- Golongan IV : 1 orang

F. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Dukungan dana dalam perencanaan dan monev yang belum memadai.
2. Kesadaran masyarakat yang kurang dalam penggunaan air, khususnya dalam hal pemeliharaan sarana dan prasarana yang terbangun.
3. Kesadaran masyarakat yang masih kurang akan pentingnya tangki septik yang layak dan aman agar tidak mencemari air tanah.
4. Monitoring dan evaluasi masih minim untuk menghasilkan data capaian SPM tiap tahun.

Solusi :

1. Kualitas perencanaan dan pemrograman perlu ditingkatkan untuk menyusun rencana dan program yang optimal, dalam hal pendanaan supaya pencapaian SPM dapat tercapai sesuai amanat SPM untuk pelayanan dasar dan kebutuhan masyarakat.
2. Sosialisasi dan edukasi ke masyarakat ditingkatkan agar sarana yang terbangun digunakan dan dipelihara oleh masyarakat sebaik mungkin.

3. Monitoring dan Evaluasi perlu ditingkatkan agar pencapaian SPM dapat berjalan sesuai yang direncanakan.

3. Urusan Perumahan Rakyat

A. Jenis pelayanan dasar

Pelayanan dasar bidang perumahan rakyat yang dilaksanakan adalah :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana. Formulasi yang digunakan untuk mengukur capaian keberhasilannya adalah :

$$= \frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani tahun } n}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun } n} \times 100\%$$

2. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah. Formulasi yang digunakan untuk mengukur capaian keberhasilannya adalah :

$$= \frac{\text{Rumah tangg penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan} + \text{rumah tangga penerima subsidi uang sewa}}{\text{Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerimaan pelayanan}} \times 100\%$$

B. Target pencapaian SPM

Target pencapaian SPM Bidang perumahan rakyat pada tahun 2024 yakni :

- Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana ditargetkan 100%;
- Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah di tahun 2024 ditarget sebesar 100%

C. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM Bidang perumahan rakyat pada tahun 2023 yakni :

- Realisasi Indikator Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana tahun 2024 sebesar 100%.
- Realisasi Indikator Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah di tahun 2024 sebesar 100%.

D. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari APBD Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2024. Adapun alokasi anggaran Bidang Perumahan dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan berjumlah Rp. 1.925.000.000.

E. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM, Jumlah pegawai bidang perumahan tahun 2024 sebanyak 11 orang dengan rincian sebagai berikut :

- a. PNS/CPNS : 11 orang
- b. Honorer : 8 orang
- c. TFL DAK Reguler : - orang

Jumlah tenaga PNS/CPNS sebanyak 11 orang, berdasarkan kualifikasi pendidikan formal dan pangkat golongan dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2. 67 Dukungan Personil yang Mendukung Pencapaian SPM
Urusan Perumahan Kabupaten Konawe Tahun 2024**

Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan								
	S3	S2	S1	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD
11	-	3	6	-	-	-	3	-	-

F. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- a. Lokasi sulit dijangkau oleh peralatan, tetapi pekerjaan tetap dilaksanakan.
- b. Sulit menemukan lahan baru untuk relokasi rumah, terutama bagi rumah yang berada di bantaran sungai.
- c. Anggaran Pemerintah Daerah untuk penanggulangan bencana longsor dan angin kencang masih sangat terbatas.
- d. Masyarakat tidak mampu memberikan kontribusi biaya untuk pembangunan rumahnya.

Solusi :

- a. Masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan sedang maupun ringan diharapkan dapat memperbaiki sendiri dengan biaya swadaya.
- b. Masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan berat juga diharapkan dapat membangun kembali secara swadaya apabila rumah tersebut akan dikembangkan.
- c. Masyarakat yang tinggal di bantaran sungai diharapkan dapat mengungsi atau membangun kembali rumahnya di lokasi yang lebih aman, dan apabila diperlukan relokasi maka pemerintah diharapkan dapat menyiapkan lahan untuk pembangunan kembali di tempat yang lebih layak.
- d. Diperlukan komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- e. Diharapkan adanya kerja sama dengan pihak swasta atau melalui program CSR untuk memberikan bantuan dalam penanganan rumah yang terdampak longsor dan banjir.
- f. Melaksanakan program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) dan menyediakan hunian layak bagi keluarga miskin maupun yang tinggal di kawasan rawan bencana melalui relokasi.

4. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

A. Jenis pelayanan dasar

Pelayanan dasar bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan adalah :

1. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana
2. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum
3. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran

B. Target pencapaian SPM

Target pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2024 yakni :

- Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana
ditergetkan 100%

- Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum ditargetkan 100%
- Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran ditargetkan 100%

C. *Realisasi*

Realisasi pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2024 yakni :

- Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana realisasi 100 dari ditargetkan 100%
- Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum realisasi 85 dari ditargetkan 100%
- Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran realisasi 85 dari ditargetkan 100%

D. *Alokasi Anggaran*

Alokasi anggaran untuk melaksanakan pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2024 masing-masing sebesar :

- Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban dialokasikan sebesar Rp.3.384.818.400,-;
- Program Penanggulangan Bencana dialokasikan sebesar Rp. 12.580.403.500
- Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dialokasikan sebesar Rp. 1.361.490.150,-;

E. *Dukungan Personil*

1. Pegawai yang menyelenggarakan SPM Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum; berjumlah 284 orang yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Honorer yang berada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe :

Kualifikasi tingkat pendidikan sebagai berikut ;

- S2 : 4 orang
- S1 : 28 orang
- SMA : 251 orang

- D3 : 1 Orang

Kualifikasi pangkat dan golongan sebagai berikut ;

- Pembina Utama Muda (IV/c) : 1 orang
- Pembina Tk. I (IV/b) : 1 orang
- Pembina (IV/a) : 3 orang
- Penata TK.I (III/d) : 8 orang
- Penata (III/c) : 3 orang
- Penata Muda TK.I (III/b): 13 orang
- Penata Muda (III/a) : 1 orang
- Pengatur Tk. I (II/d) : 7 orang
- Pengatur (II/c) : 11 orang
- Pengatur Muda Tk. I (II/b) : 2 orang
- Pengatur Muda (II/a) : 4 orang
- Pegawai Non PNS : 235 orang

2. Pegawai yang menyelenggarakan SPM Pelayanan informasi rawan bencana, Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan, dan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana berjumlah 77 orang yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Non PNS (Pegawai Honorer) yang berada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Konawe :

- Eselon II / b : 1 Orang
- Eselon III / b : 4 Orang
- Eselon IV / a : 9 Orang
- Staf (PNS) : 14 Orang
- Staf (PHL) : 50 Orang

F. Permasalahan dan Solusi

- Satuan Polisi Pamong Praja :

1. Permasalahan : Belum adanya personil PPNS

Solusi : Memberikan kesempatan kepada PNS Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengikuti pelatihan PPNS guna mengoptimalkan penindakan, penyelidikan dan penyidikan pelanggaran PERDA.

2. Permasalahan : Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.

Solusi : Mengusulkan penambahan anggaran ke Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas operasional.

3. Permasalahan : Terbatasnya anggaran kegiatan operasional maupun pelaksanaan penindakan pelanggaran PERDA.

Solusi : Mengusulkan penambahan anggaran untuk kebutuhan operasional lapangan.

4. Permasalahan : Peraturan Daerah yang ada saat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Solusi : Melakukan revisi atas produk peraturan daerah dan menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

5. Permasalahan : Lemahnya fungsi koordinasi dan sinergi antara dinas/ instansi terkait.

Solusi : Meningkatkan kerjasama yang intensif dengan berbagai pihak guna mengoptimalkan penyelenggaraan ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat.

➤ **Badan Penanggulangan Bencana Daerah :**

1. Masalah : Ada beberapa indikator SPM sub bidang bencana yang tidak mendapatkan dukungan dana

2. Solusi : Memaksimalkan kegiatan / program yang mendapat dukungan dana dan melaksanakan kegiatan dengan membahas pambaruan tergait dengan target SPM maupun definisi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dalam menyusun pambaruan Standar Pelayanan Minimal (SPM) itu perlu melibatkan instansi yang

berkompeten didalamnya agar target capaiannya lebih relevan dengan realitanya.

5. Urusan Sosial

A. Jenis pelayanan dasar

Pelayanan dasar bidang sosial yang dilaksanakan adalah :

1. Rehabilitasi social dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti. Terbagi ata empat pelayanan yakni pelayanan untuk disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandang pengemis. Dimana Formulasi yang digunakan untuk mengukur capaian keberhasilan keempat SPM diatas adalah :

$$= \frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar}}{\text{Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis}} \times 100\%$$

2. Perlindungan social bagi korban bencana alam dan sosial. Formulasi yang digunakan untuk mengukur capaian keberhasilannya adalah :

$$= \frac{\text{Jumlah korban bencana alam sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran}}{\text{Populasi korban bencana alam dan sosial didaerah kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah}} \times 100\%$$

B. Target pencapaian SPM

Target pencapaian SPM Bidang Sosial pada tahun 2024 yakni :

- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti skala Kabupaten/Kota ditargetkan 100%.
- Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti Skala Kabupaten/kota ditargetkan 100%;
- Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Skala Kabupaten/Kota ditargetkan 100%;
- Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di luar Panti skala Kabupaten/Kota ditarget 100%;
- Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial ditargetkan 100%

C. *Realisasi*

Realisasi pencapaian SPM sosial pada tahun 2024 yakni :

- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti skala Kabupaten/Kota ditargetkan 100% dan terealisasi sebesar 100 % sehingga capaiannya menjadi 100%
- Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti Skala Kabupaten/kota ditargetkan 100 % dan terealisasi sebesar 100 % sehingga capaiannya menjadi 100%
- Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Skala Kabupaten/Kota ditargetkan 100% dan terealisasi sebesar 100 % sehingga capaiannya yang ditargetkan menjadi 100 %
- Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di luar Panti skala Kabupaten/Kota ditarget 100% dilaksanakan
- Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial ditargetkan 100 % terealisasi sebesar 100%

D. *Alokasi Anggaran*

Alokasi Anggaran yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM oleh Dinas Sosial Kabupaten Konawe adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 68 Alokasi Anggaran yang Mendukung Pencapaian SPM Dinas Sosial Kabupaten Konawe Tahun 2024

No	Jenis Belanja	Jumlah Anggaran (RP)
1	APBD	4.566.657.309
2	APBN	
	- KUBE (Kelompok Usaha bersama)	0,00
	- BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)	87.935.300,00
	- Kebencanaan Alam	364.048.500,00
	- Kebencanaan Sosial	0,00
	- PKH (Program Keluarga Harapan)	141.056.200,00
3	Sumbangan Pihak Donatur Bagi PMKS	0,00

No	Jenis Belanja	Jumlah Anggaran (RP)
	Jumlah	1.378.095.094,00

E. Dukungan Personil

Pegawai yang menyelenggarakan SPM pelayanan sosial berjumlah 31 orang yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berada pada Dinas Sosial Kabupaten Konawe :

Tabel 2. 69 Dukungan Personil yang Mendukung Pencapaian SPM Dinas Sosial Kabupaten Konawe Tahun 2024

No	Uraian		Jumlah (orang)	Ket
1	Pegawai		31	
2	Jabatan Eselon			
	a.	Eselon II	1	
	b.	Eselon III	4	
	c.	Eselon IV	11	
	d.	Staf	15	
3	Jabatan Fungsional			
4	Pegawai Menurut Golongan			
	a.	Golongan IV	4	
	b.	Golongan III	27	
	c.	Golongan II	-	
	d.	Golongan I	-	
5	Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan			
	a.	Strata 2 (S2)	5	
	b.	Strata 1 (S1)	14	
	c.	D3	-	
	d.	SMA	10	
	e.	SMP	-	
6	Pegawai Menurut Jenis Kelamin			
	a.	Perempuan	14	
	b.	Laki-Laki	17	

F. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) selalu bertambah akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Perceraian sehingga masih ada yang belum terdata dan terjangkau.
- Terkait hal-hal teknis pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dimana SDM dan sarana prasarana kurang mendukung sehingga pelayanan tidak berjalan optimal.

b. Solusi

- Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, lintas daerah dengan masalah penanganan PPKS
- Meningkatkan kualitas hidup PPKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PPKS dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- Perlunya pelatihan teknis terhadap PNS untuk peningkatan SDM serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dalam penanganan PPKS.

6. Urusan Pendidikan

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan di Kabupaten Konawe menunjukkan perkembangan positif pada sejumlah indikator kinerja, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian untuk mencapai target 100%.

Tingkat Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk warga usia 5–6 tahun mencapai 92,10%, menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini, walaupun masih terdapat selisih 7,9% dari target yang ditetapkan. APS untuk kelompok usia 7–15 tahun (pendidikan dasar) telah mencapai 96,19%, mendekati target 100%, sedangkan APS untuk kelompok usia 7–18 tahun yang mengikuti pendidikan kesetaraan berada pada 89,53%, yang masih memerlukan upaya intensif untuk menjangkau kelompok yang belum berpartisipasi.

Dari sisi mutu pembelajaran, rata-rata kemampuan literasi dan numerasi yang diukur melalui Asesmen Nasional menunjukkan capaian yang bervariasi. Literasi SD berada pada angka 48,38, sedangkan numerasi SD

sebesar 36,28. Untuk tingkat SMP, literasi mencapai 60,75 dan numerasi 59,65. Nilai ini menjadi perhatian penting mengingat kualitas hasil belajar merupakan fondasi peningkatan daya saing sumber daya manusia di masa depan.

Dalam aspek kelembagaan, proporsi satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B telah mencapai 62,98%, sedangkan proporsi guru PAUD formal berkualifikasi S1/D-IV berada pada angka 59,81%. Kedua indikator ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas dan profesionalisme tenaga pendidik serta mutu satuan pendidikan anak usia dini.

Iklim pembelajaran yang kondusif di sekolah juga menjadi fokus pengukuran. Iklim keamanan tercatat sebesar 74,26% di tingkat SD dan 71,42% di tingkat SMP. Iklim kebhinekaan mencapai 72,81% di SD dan 70,11% di SMP, sedangkan iklim inklusivitas berada pada 60,84% di SD dan 62,28% di SMP. Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum suasana belajar telah mendukung keberagaman dan keamanan, namun masih diperlukan penguatan untuk mencapai lingkungan belajar yang sepenuhnya aman, inklusif, dan menghargai perbedaan.

Secara keseluruhan, capaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Konawe memperlihatkan kemajuan yang cukup baik, namun terdapat beberapa indikator, khususnya pada APS pendidikan kesetaraan, kemampuan numerasi, kualifikasi guru PAUD, dan iklim inklusivitas, yang memerlukan intervensi kebijakan lebih terarah. Optimalisasi program perlu diarahkan pada peningkatan pemerataan akses, mutu pendidikan, serta penguatan kapasitas pendidik agar seluruh anak di Kabupaten Konawe dapat memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan.

2.1.6 Kerjasama Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Konawe melalui Bagian Kerja Sama telah menjalin berbagai bentuk kemitraan strategis dengan pemerintah daerah lain, instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga, dan pihak ketiga. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas daerah, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong inovasi di berbagai sektor.

Berikut uraian kegiatan kerja sama yang telah dan akan dilaksanakan:

1. Kerja Sama Pengendalian Inflasi Pemda Kabupaten Konawe dan Pemda Buton Utara sepakat melakukan koordinasi dan sinergi dalam pengendalian inflasi daerah melalui pengendalian harga, pasokan, dan distribusi bahan pangan pokok
2. Kerja Sama Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) Pemda Konawe bersama PT. PBD Sultra melaksanakan kerja sama penerbitan KKPD untuk meningkatkan efisiensi transaksi keuangan daerah, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
3. Kerja Sama Pengembangan Sektor Pertanian Pemda Konawe bekerja sama dengan Universitas Lakidende dalam program pengembangan sektor pertanian, termasuk penyediaan teknologi tepat guna, peningkatan kapasitas petani, dan diversifikasi produk pertanian.
4. Kesepakatan Bersama Akselerasi Pengelolaan Sampah Pemprov Sultra bersama Pemda Konawe menyepakati langkah percepatan pengelolaan sampah, peningkatan kebersihan lingkungan, serta penegakan ketertiban pengelolaan sampah di wilayah kabupaten.
5. Kerja Sama Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Pemda Konawe bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Konawe untuk memberikan pendampingan, bantuan hukum, dan penyelesaian sengketa perdata maupun tata usaha negara yang melibatkan pemerintah daerah.
6. Kerja Sama Hibah antara Dinas PMD dan Tim Penggerak PKK Dalam rangka mendukung pemberdayaan masyarakat dan program PKK, dilakukan perjanjian hibah untuk menunjang pelaksanaan program kerja Tim Penggerak PKK Kabupaten Konawe.
7. Kerja Sama Bidang Pendidikan dan Beasiswa Pemda Konawe menjalin kemitraan dengan Universitas Lakidende, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Universitas Prof. Dr. Moestopo, Universitas Mandala, dan Universitas Halu Oleo untuk penyediaan beasiswa melalui program *Konawe Cerdas*. Kerja sama ini bertujuan meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi putra-putri daerah yang berprestasi maupun kurang mampu secara ekonomi

8. Kerja Sama BPJS Ketenagakerjaan untuk Non-ASN Pemda Konawe bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan sosial bagi tenaga kerja Non-ASN, mencakup jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian
9. Kerja Sama BPJS Ketenagakerjaan bagi Petani Rentan Pemda Konawe bersama BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan program perlindungan sosial bagi petani rentan untuk mengurangi risiko sosial-ekonomi akibat kecelakaan kerja maupun kehilangan pendapatan.

2.1.7 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Dalam konteks pembangunan daerah yang berkelanjutan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran strategis sebagai entitas yang menjembatani kepentingan ekonomi publik dan kegiatan bisnis yang profesional. BUMD tidak hanya ditujukan sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi juga sebagai instrumen untuk menghadirkan layanan publik yang tidak selalu dapat disediakan oleh sektor swasta, terutama pada sektor-sektor yang bernilai strategis bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Konawe telah membentuk dua BUMD, yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Konawe melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1997, dan Perusahaan Daerah Konawe Jaya melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015. Keberadaan kedua BUMD ini pada awalnya diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pemenuhan layanan dasar masyarakat seperti air bersih dan pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengembangan usaha daerah.

Namun, hingga tahun 2024, kinerja kedua BUMD tersebut belum menunjukkan hasil yang optimal. Perusda Konawe Jaya masih dalam status tidak beroperasi secara fungsional sejak dibentuk, sedangkan PDAM Konawe yang masih beroperasi mengalami defisit keuangan yang signifikan serta tantangan dalam meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan. Kedua BUMD juga belum memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta belum menunjukkan peran nyata dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Situasi ini mengindikasikan perlunya langkah strategis yang terstruktur dan terarah untuk merevitalisasi peran BUMD di Kabupaten Konawe. Transformasi kelembagaan, penguatan tata kelola, penyesuaian bentuk hukum sesuai regulasi terbaru, serta penyusunan rencana bisnis berbasis potensi lokal menjadi aspek yang sangat penting untuk segera dilaksanakan. Melalui kerangka kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD 2025–2029, pengembangan BUMD diarahkan untuk menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus penyedia layanan dasar yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat.

Laporan ini disusun sebagai bagian integral dari proses penyusunan RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2025–2029, dengan tujuan untuk:

1. Melakukan evaluasi atas kinerja, tantangan, dan hambatan yang dihadapi BUMD selama periode sebelumnya.
2. Merumuskan strategi pengembangan BUMD yang lebih relevan, adaptif, dan produktif sesuai kebutuhan pembangunan daerah lima tahun ke depan.
3. Memberikan arah kebijakan dan kerangka transformasi kelembagaan, tata kelola, serta model bisnis BUMD agar selaras dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan kebijakan pembangunan daerah.

Penyusunan arah kebijakan dan strategi pengembangan BUMD Kabupaten Konawe merujuk pada regulasi berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 1997 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Konawe;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Konawe Jaya.

A. GAMBARAN UMUM BUMD KABUPATEN KONAWE

Hingga tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Konawe memiliki dua entitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang telah dibentuk berdasarkan peraturan daerah. Kedua BUMD tersebut adalah Perusahaan Daerah Konawe

Jaya dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Konawe, yang masing-masing memiliki karakteristik kelembagaan dan kondisi operasional yang berbeda.

1. Perusahaan Daerah Konawe Jaya

- Dasar hukum: Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2015
- Status operasional: Tidak beroperasi
- Modal: Tidak terdapat modal awal yang efektif
- Penyertaan Modal Daerah (PMD): Tercatat ada, namun belum menghasilkan dampak usaha
- Kondisi kelembagaan: Tidak aktif, belum memiliki struktur manajemen operasional yang berjalan
- Status kinerja: Tidak Aktif

Perusda Konawe Jaya dibentuk untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif daerah, namun hingga kini belum melaksanakan aktivitas usaha secara nyata. Ketiadaan modal efektif dan tidak adanya rencana bisnis menjadi penyebab utama stagnasi lembaga ini. Fungsi kelembagaan belum terbentuk secara menyeluruh dan belum mampu merealisasikan tujuan pendiriannya.

2. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Konawe

- Dasar hukum: Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 1997
- Status operasional: Beroperasi
- Kondisi keuangan: Mengalami kerugian sebesar Rp1.359.314.491 (tahun terakhir)
- Penyertaan Modal Daerah (PMD): Ada, namun belum berdampak signifikan pada efisiensi usaha
- Cakupan layanan: Terbatas pada wilayah-wilayah tertentu
- Status kinerja: Kurang Baik

Meskipun PDAM Konawe masih menjalankan fungsi operasional sebagai penyedia layanan air bersih, kinerja finansial dan efisiensi pelayanan masih jauh dari ideal. Kerugian yang terus terjadi menunjukkan adanya permasalahan struktural dalam manajemen biaya, efektivitas infrastruktur,

dan strategi pengembangan cakupan layanan. Hal ini menunjukkan perlunya intervensi perbaikan kelembagaan, tarif, serta model layanan yang lebih efisien dan inklusif.

B. Permasalahan Umum Pengelolaan BUMD

Berdasarkan kondisi aktual dan hasil evaluasi terhadap kedua BUMD yang dimiliki Kabupaten Konawe, beberapa permasalahan umum yang diidentifikasi antara lain:

- Tidak adanya kegiatan usaha pada Perusda Konawe Jaya, baik dalam bentuk unit layanan, penugasan proyek, maupun aktivitas komersial. Hal ini menunjukkan kelemahan mendasar dalam aspek kelembagaan dan perencanaan bisnis sejak awal pendiriannya.
- PDAM Konawe mengalami kerugian operasional yang besar, dengan pembukuan defisit yang berlangsung terus-menerus. Situasi ini mencerminkan rendahnya efisiensi operasional dan lemahnya pengendalian biaya serta belum optimalnya sistem distribusi dan pemeliharaan infrastruktur.
- Ketiadaan rencana bisnis dan arah strategis jangka menengah dan panjang pada kedua BUMD menyebabkan tidak adanya orientasi usaha, target kinerja, maupun mekanisme monitoring yang efektif. Hal ini menjadi hambatan dalam pengembangan usaha yang berkelanjutan.
- Status kelembagaan masih berbentuk Perusahaan Daerah (Perusda) yang tidak lagi sesuai dengan regulasi terkini, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Bentuk Perusda membatasi fleksibilitas usaha, akses terhadap pembiayaan, dan tata kelola yang lebih profesional, sehingga diperlukan transformasi kelembagaan menjadi Persero.

Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan perlunya penataan ulang yang menyeluruh terhadap kelembagaan, manajemen, dan arah usaha BUMD di Kabupaten Konawe. Reposisi fungsi BUMD ke depan harus diarahkan untuk memperkuat kontribusi terhadap pelayanan dasar dan penguatan ekonomi lokal, dengan dukungan tata kelola yang sehat dan transformasi kelembagaan yang adaptif

C. EVALUASI KINERJA BUMD KABUPATEN KONAWE 2020–2024

a) Aspek Legalitas dan Tata Kelola

Selama periode 2020–2024, aspek legalitas dan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Konawe belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Kedua BUMD yang dimiliki, yaitu Perusda Konawe Jaya dan PDAM Konawe, masih menggunakan bentuk kelembagaan Perusahaan Daerah (Perusda) yang tidak lagi relevan dengan perkembangan regulasi nasional.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, seluruh BUMD seharusnya diklasifikasikan ke dalam dua bentuk hukum utama, yaitu Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perseroan Daerah (Perseroda), dengan struktur organisasi dan tanggung jawab yang jelas serta fleksibilitas kelembagaan yang lebih baik. Namun, hingga akhir 2024, Kabupaten Konawe belum melakukan penyesuaian kelembagaan sesuai ketentuan tersebut.

Selain itu, belum terdapat pemisahan yang tegas antara fungsi pembina (kepala daerah), pengawas (dewan pengawas/komisaris), dan pengelola (direksi). Ketidaktegasan dalam struktur tata kelola tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, lemahnya akuntabilitas, serta rendahnya efektivitas pengambilan keputusan dalam manajemen BUMD.

b) Aspek Operasional

Dari sisi operasional, kinerja BUMD Kabupaten Konawe masih menghadapi tantangan mendasar. Perusda Konawe Jaya, sejak didirikan pada tahun 2015, belum pernah menjalankan aktivitas usaha yang konkret. Ketiadaan unit usaha, perencanaan strategis, serta tim manajemen yang aktif menyebabkan BUMD ini belum berfungsi secara efektif sebagai entitas bisnis milik daerah.

Sementara itu, PDAM Konawe masih menjalankan fungsi pelayanan publik, khususnya dalam penyediaan air bersih. Namun, kualitas layanan yang diberikan belum optimal. Cakupan layanan masih terbatas pada wilayah tertentu, dan tingkat efisiensi operasional masih rendah, yang tercermin dari tingginya biaya operasional dan masih adanya keluhan

masyarakat terkait akses dan kualitas air bersih. Selain itu, tidak adanya sistem pengukuran kinerja pelayanan berbasis indikator layanan publik menyebabkan evaluasi dan perbaikan internal sulit dilakukan secara berkelanjutan.

c) Aspek Keuangan

Kondisi keuangan kedua BUMD menunjukkan kinerja yang tidak sehat sepanjang periode evaluasi. Hingga akhir tahun 2024, tidak terdapat kontribusi signifikan dari BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Konawe. Bahkan, PDAM Konawe mencatatkan kerugian bersih sebesar Rp1,35 miliar, yang menandakan adanya ketidakseimbangan antara pendapatan dan beban operasional.

Perusda Konawe Jaya, yang tidak beroperasi secara fungsional, sama sekali tidak menghasilkan pendapatan. Sementara itu, PDAM yang masih menjalankan layanan publik belum mampu menutup biaya operasional secara mandiri, sehingga masih tergantung pada subsidi atau dukungan APBD dalam bentuk Penyertaan Modal Daerah (PMD).

Ketiadaan model pembiayaan alternatif, seperti kerja sama investasi, kemitraan strategis, atau pengelolaan aset produktif, menyebabkan pembiayaan BUMD sepenuhnya bertumpu pada fiskal daerah. Pola ini berisiko membebani keuangan daerah dalam jangka panjang, terutama apabila tidak dibarengi dengan reformasi manajemen usaha yang signifikan dan berorientasi hasil.

Secara keseluruhan, evaluasi kinerja BUMD Kabupaten Konawe selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa peran BUMD sebagai penyedia layanan publik, pelaku usaha daerah, dan sumber PAD masih belum optimal. Kondisi ini menjadi dasar untuk dilakukannya penataan ulang kelembagaan, perumusan ulang rencana bisnis, dan perbaikan sistem tata kelola secara menyeluruh dalam periode perencanaan 2025–2029.

D. Isu Strategis BUMD Kabupaten Konawe

Dalam upaya mendorong revitalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat berperan sebagai pilar pembangunan ekonomi dan penyedia layanan publik strategis, Pemerintah Kabupaten Konawe mengidentifikasi sejumlah isu strategis yang perlu mendapat perhatian dan

penanganan khusus dalam periode perencanaan 2025–2029. Isu-isu ini mencerminkan akar dari rendahnya kinerja BUMD saat ini serta menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan, strategi, dan program prioritas ke depan.

1. Lemahnya Struktur Permodalan BUMD

Permodalan yang tidak memadai menjadi isu paling mendasar dalam pengembangan BUMD di Kabupaten Konawe. Sejak pembentukannya, Perusda Konawe Jaya tidak memiliki modal awal yang efektif, sementara PDAM Konawe terus mengalami tekanan keuangan akibat kerugian operasional. Ketiadaan modal kerja yang kuat menghambat pengembangan unit usaha, pelaksanaan proyek strategis, serta pemenuhan kebutuhan investasi dasar, termasuk pembenahan infrastruktur dan peningkatan kapasitas layanan.

2. Ketiadaan Rencana Bisnis dan Strategi Usaha

Hingga saat ini, kedua BUMD belum memiliki rencana bisnis (business plan) yang dapat dijadikan pedoman arah pengembangan usaha, proyeksi kinerja, dan strategi ekspansi. Tanpa adanya dokumen perencanaan usaha yang terukur dan realistis, aktivitas BUMD tidak memiliki arah yang jelas, tidak adaptif terhadap dinamika pasar, dan tidak mampu menarik minat investasi dari pihak ketiga. Kondisi ini menyebabkan stagnasi usaha dan kinerja yang tidak optimal.

3. Kelembagaan Belum Sesuai dengan Regulasi Nasional

Status hukum kedua BUMD masih berbentuk Perusahaan Daerah (Perusda) yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Bentuk Perusda membatasi fleksibilitas operasional, tidak memungkinkan partisipasi kepemilikan lintas entitas, serta menyulitkan dalam akses permodalan eksternal dan kemitraan usaha. Transformasi kelembagaan menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) atau Perusahaan Umum Daerah (Perumda) merupakan prasyarat mendesak agar BUMD Konawe dapat bertransformasi menjadi entitas bisnis yang adaptif dan kompetitif.

4. Aset Daerah Belum Dimanfaatkan Secara Produktif

Beberapa aset yang dikelola atau dapat diakses oleh BUMD belum dimanfaatkan secara optimal. Aset-aset strategis seperti tanah, bangunan, atau peluang usaha berbasis komoditas lokal belum dijadikan sebagai sumber nilai ekonomi yang produktif. Ketiadaan pemetaan aset serta belum adanya skema pemanfaatan berbasis hasil usaha atau kemitraan publik-swasta menyebabkan potensi ekonomi daerah menjadi idle dan tidak menghasilkan manfaat fiskal.

5. Kinerja Manajemen dan Sumber Daya Manusia (SDM) Belum Profesional

Manajemen BUMD belum berjalan secara profesional sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG). Belum terdapat sistem pengukuran kinerja, pelatihan SDM, maupun skema insentif berbasis capaian. Rekrutmen manajerial yang tidak berbasis kompetensi dan lemahnya sistem pelaporan keuangan turut berkontribusi terhadap buruknya kinerja organisasi. Hal ini berakibat pada rendahnya efisiensi, lemahnya inovasi, dan stagnasi operasional jangka panjang.

6. Kontribusi Terhadap Pelayanan Publik dan PAD Masih Sangat Minim

Sampai dengan tahun 2024, kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih nihil, dan perannya dalam memperluas akses pelayanan dasar masyarakat juga belum optimal. Meskipun PDAM Konawe merupakan penyedia layanan air bersih, cakupan dan kualitas pelayanannya belum memenuhi standar pelayanan minimum. Sementara itu, Perusda Konawe Jaya tidak berfungsi sama sekali. Hal ini menegaskan perlunya reposisi peran BUMD dari sekadar simbol kelembagaan menjadi aktor pembangunan ekonomi dan pelayanan yang nyata.

E. Implikasi Strategis

Berbagai isu strategis di atas memerlukan pendekatan transformatif dalam lima tahun ke depan. Langkah-langkah seperti reformasi kelembagaan, perencanaan bisnis berbasis potensi daerah, penguatan tata kelola, optimalisasi aset, serta restrukturisasi pembiayaan dan penyertaan modal menjadi kunci dalam menjadikan BUMD sebagai agen pembangunan

daerah yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Konawe

F. Strategi Pengembangan BUMD Kabupaten Konawe 2025–2029

Strategi pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Konawe pada periode 2025–2029 diarahkan untuk menjawab tantangan struktural yang dihadapi selama periode sebelumnya, sekaligus mendorong peran aktif BUMD sebagai penggerak ekonomi lokal dan penyedia layanan dasar publik. Pengembangan BUMD tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kinerja usaha dan pelayanan, tetapi juga untuk mendorong kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penciptaan lapangan kerja dan nilai tambah di daerah.

Strategi pengembangan BUMD disusun dalam dua kerangka utama, yaitu strategi umum yang bersifat lintas sektor dan kelembagaan, serta strategi sektoral yang bersifat spesifik berdasarkan karakteristik unit usaha BUMD.

1. Transformasi Kelembagaan Menjadi Perseroda.

Penyesuaian bentuk hukum dari Perusahaan Daerah (Perusda) menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) menjadi langkah awal yang strategis untuk memperluas fleksibilitas usaha, membuka peluang kemitraan, dan memperkuat tata kelola. Transformasi ini juga merupakan bentuk kepatuhan terhadap regulasi nasional sesuai PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD.

2. Restrukturisasi Bisnis dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Perlu dilakukan audit menyeluruh atas struktur organisasi, unit usaha, dan kompetensi SDM yang ada. Restrukturisasi mencakup reformasi manajemen, peningkatan kapasitas SDM, serta rekrutmen berbasis kompetensi dan profesionalisme sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG).

3. Penyusunan Rencana Bisnis Baru (Business Plan) Berbasis Potensi Lokal

Rencana bisnis jangka menengah dan panjang akan disusun berdasarkan identifikasi potensi unggulan daerah, termasuk sektor pertanian, perdagangan, dan pelayanan dasar. Business plan ini menjadi

acuan dalam pengembangan unit usaha yang adaptif, inklusif, dan berdaya saing.

4. **Klasterisasi Usaha dan Sinergi Antar Sektor**

Pengembangan usaha BUMD diarahkan pada pendekatan klasterisasi berdasarkan sektor strategis, seperti utilitas publik, perdagangan dan pangan, logistik, serta pengelolaan aset. Sinergi antar klaster dan potensi kolaborasi lintas sektor akan dioptimalkan guna meningkatkan efisiensi dan integrasi rantai nilai lokal.

5. **Optimalisasi Penyertaan Modal Daerah Berbasis Penugasan Strategis.**

Penyertaan Modal Daerah (PMD) akan diarahkan secara selektif untuk mendukung proyek strategis BUMD yang berdampak langsung pada pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. PMD akan disertai dengan mekanisme kontrol berbasis kinerja dan pengembalian manfaat kepada daerah.

6. **Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG).**

Untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, seluruh proses bisnis dan manajemen BUMD akan disusun dan diawasi berdasarkan prinsip GCG. Ini mencakup pelaporan keuangan yang diaudit, pengawasan independen, serta sistem manajemen risiko yang memadai.

G. Strategi Sektoral Pengembangan BUMD

a) Klaster Utilitas: PDAM Konawe

Pengembangan PDAM sebagai penyedia layanan dasar air bersih difokuskan pada peningkatan kualitas dan cakupan layanan, serta efisiensi operasional:

- ✓ Modernisasi jaringan distribusi dan sistem pengolahan air.
- ✓ Pengurangan tingkat kehilangan air (Non-Revenue Water) secara signifikan.
- ✓ Peningkatan kapasitas manajemen dan sistem keuangan.
- ✓ Revisi tarif berbasis kemampuan masyarakat dan keberlanjutan usaha.

b) Klaster Perdagangan dan Pangan: Perusda Konawe Jaya

Perusda Konawe Jaya akan difungsikan kembali dan dikembangkan sebagai katalisator ekonomi lokal dengan fokus pada distribusi hasil pertanian dan pengelolaan pasar:

- ✓ Pengembangan unit usaha distribusi hasil pertanian (beras, jagung, komoditas unggulan lainnya).
- ✓ Pengelolaan dan revitalisasi pasar rakyat sebagai simpul ekonomi desa-kota.
- ✓ Pendirian gudang logistik daerah dan sistem transportasi komoditas.
- ✓ Pengembangan usaha di bidang Pangan
- ✓ Penguatan kemitraan dengan UMKM, koperasi, dan petani lokal.

c) Arah Transformasi Jangka Menengah

Seluruh strategi ini akan dilaksanakan secara bertahap selama periode RPJMD, dengan target jangka menengah berupa:

- ✓ Terwujudnya minimal satu Perseroda yang aktif dan sehat secara finansial.
- ✓ Terpenuhinya minimal 80% cakupan layanan air bersih di wilayah pelayanan PDAM.
- ✓ Terciptanya unit usaha BUMD yang mampu menyumbang PAD secara langsung mulai tahun 2027.
- ✓ Terciptanya kemitraan bisnis BUMD dengan swasta atau BUMDes di minimal lima kecamatan.

H. Roadmap Pengembangan BUMD Kabupaten Konawe 2025–2029

Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Konawe diarahkan secara bertahap melalui pendekatan jangka menengah yang terstruktur dan adaptif. Roadmap ini merupakan panduan implementatif dari strategi yang telah dirumuskan, serta menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan, penyusunan program, dan pengalokasian sumber daya daerah.

Peta jalan (roadmap) pengembangan BUMD Kabupaten Konawe tahun 2025–2029 difokuskan pada lima fase pembangunan yang berorientasi pada transformasi kelembagaan, profesionalisasi manajemen, ekspansi usaha

berbasis potensi lokal, dan penguatan kontribusi terhadap pelayanan publik serta Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut adalah tahapan pengembangan yang dirancang secara progresif:

Tahun 2025 – Fase Transformasi Awal: Audit, Regulasi, dan Perencanaan

Tahun pertama menjadi fondasi reformasi total BUMD dengan fokus pada:

- Audit menyeluruh terhadap kondisi keuangan, manajemen, dan aset kedua BUMD.
- Penataan kelembagaan awal, termasuk pengkajian bentuk hukum, status aset, dan struktur organisasi.
- Penyusunan regulasi turunan, termasuk revisi Perda pendirian dan penyesuaian dengan PP 54/2017.
- Penyusunan rencana bisnis (business plan) dan rencana transformasi strategis untuk masing-masing BUMD berdasarkan hasil audit dan potensi daerah.

Tahun 2026 – Fase Penguatan Institusional: Status Baru dan Kapasitas SDM

Fokus pada transformasi kelembagaan menjadi bentuk hukum yang baru dan penguatan struktur internal:

- Perubahan status kelembagaan menjadi Perseroda atau Perumda sesuai karakteristik sektor.
- Rekrutmen dan penataan SDM berbasis kompetensi profesional.
- Penguatan struktur usaha dan tata kelola, termasuk sistem pelaporan dan manajemen risiko.
- Pengembangan awal unit usaha berdasarkan skema kemitraan dan pemanfaatan aset eksisting.

Tahun 2027 – Fase Ekspansi Bisnis: Aktivasi Unit Usaha Baru

Merupakan fase implementasi operasional dari rencana bisnis yang telah disusun:

- Peluncuran unit usaha baru berbasis potensi unggulan daerah, seperti perdagangan hasil pertanian, logistik lokal, dan pengelolaan pasar rakyat.

- Integrasi dengan rantai pasok lokal, termasuk kerja sama dengan petani, pelaku UMKM, dan koperasi.
- Penerapan sistem manajemen kinerja dan sistem reward berbasis capaian usaha.

Tahun 2028 – Fase Modernisasi dan Sinergi: Digitalisasi dan Kemitraan

Tahun keempat difokuskan pada penguatan kualitas pelayanan dan pengembangan kemitraan:

- Digitalisasi layanan, khususnya untuk PDAM (layanan air bersih berbasis aplikasi, billing system).
- Perluasan jaringan kemitraan dengan pihak swasta, BUMDes, atau lembaga keuangan daerah.
- Pengembangan sistem informasi manajemen (SIM BUMD) yang terintegrasi dengan pengawasan daerah.

Tahun 2029 – Fase Konsolidasi dan Ekspansi: Evaluasi dan Rencana Aksi Lanjut

Tahun terakhir dalam periode RPJMD dimanfaatkan untuk mengevaluasi pencapaian dan merancang fase ekspansi lanjutan:

- Evaluasi menyeluruh atas kinerja kelembagaan, keuangan, dan pelayanan BUMD.
- Konsolidasi aset dan unit usaha, serta penataan ulang struktur jika diperlukan.
- Penyusunan rencana ekspansi lanjutan, termasuk kemungkinan Initial Public Offering (IPO) untuk BUMD potensial atau pembentukan anak usaha baru dengan model joint venture, jika dinilai feasible secara bisnis dan regulatif.

Roadmap ini menjadi pedoman dinamis dalam proses reformasi BUMD Kabupaten Konawe untuk lima tahun ke depan. Keberhasilan implementasi roadmap akan sangat ditentukan oleh komitmen pemerintah daerah dalam mendukung transformasi kelembagaan, alokasi modal yang tepat sasaran, serta pengawasan kinerja yang terukur. Dengan pengelolaan yang profesional dan terencana, BUMD Konawe diharapkan mampu menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus agen layanan publik yang berkualitas.

Tabel 2. 70 Roadmap Reformasi BUMD Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029

Tahun	Fokus Pengembangan
2025	Audit dan transformasi kelembagaan, penyusunan regulasi dan business plan
2026	Perubahan status menjadi Perseroda, penguatan SDM dan struktur usaha
2027	Peluncuran unit usaha baru berbasis potensi lokal (pangan, perdagangan)
2028	Digitalisasi dan penguatan layanan publik, perluasan jaringan kemitraan
2029	Evaluasi dan konsolidasi, penyusunan rencana ekspansi atau IPO (jika feasible)

(Sumber : Bagian Perekonomian Setda Konawe, 2025)

I. Rekomendasi Kebijakan Penguatan BUMD Kabupaten Konawe

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, identifikasi isu strategis, serta proyeksi arah pembangunan jangka menengah, maka dibutuhkan sejumlah rekomendasi kebijakan yang bersifat prioritas dan implementatif untuk mewujudkan transformasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai entitas usaha publik yang sehat, profesional, dan berdaya saing.

Rekomendasi ini bertujuan untuk memperkuat kelembagaan BUMD, mendorong efisiensi dan akuntabilitas usaha, serta memperluas peran BUMD dalam mendukung pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi lokal di Kabupaten Konawe.

1. Menerbitkan Peraturan Daerah Baru untuk Transformasi Kelembagaan Menjadi Perseroda

Langkah awal yang sangat krusial adalah melakukan penyesuaian bentuk hukum BUMD dari Perusahaan Daerah (Perusda) menjadi Perseroan Daerah (Perseroda), sesuai amanat PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Transformasi ini memerlukan penerbitan Peraturan Daerah baru yang mengatur struktur, modal, kewenangan, dan mekanisme pengawasan sesuai prinsip tata kelola korporasi. Perubahan bentuk ini akan memberikan keleluasaan bagi BUMD

untuk melakukan ekspansi usaha, menjalin kemitraan, serta mengakses sumber pendanaan non-APBD secara legal dan transparan.

2. Mengalokasikan Penyertaan Modal Daerah (PMD) Secara Selektif untuk Proyek Strategis

Penyertaan Modal Daerah harus diarahkan secara selektif dan produktif dengan mempertimbangkan:

- Kelayakan usaha secara finansial dan sosial,
- Kontribusi terhadap pelayanan dasar masyarakat,
- Potensi pengembalian manfaat terhadap PAD,
- Serta keterkaitannya dengan program prioritas daerah.

PMD sebaiknya tidak diberikan sebagai subsidi rutin, tetapi sebagai modal investasi berbasis penugasan, dengan target dan indikator kinerja yang terukur dan dievaluasi setiap tahun. Mekanisme ini akan mendorong efisiensi penggunaan anggaran dan memacu BUMD untuk lebih bertanggung jawab secara korporatif.

3. Menyusun Rencana Bisnis dan Tata Kelola Profesional Berbasis Good Corporate Governance (GCG)

Setiap BUMD diwajibkan menyusun rencana bisnis (business plan) jangka menengah yang realistis dan berbasis pada potensi unggulan lokal. Rencana ini harus dilengkapi dengan:

- Proyeksi keuangan,
- Strategi pemasaran dan operasional,
- Analisis risiko,
- Dan rencana transformasi kelembagaan.

Selain itu, penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) harus menjadi standar tata kelola, mencakup transparansi keuangan, akuntabilitas manajemen, serta pengawasan oleh dewan pengawas/komisaris yang kompeten dan independen. Dengan tata kelola profesional, BUMD dapat lebih adaptif terhadap dinamika pasar sekaligus lebih akuntabel terhadap publik.

4. Menjadikan BUMD sebagai Mitra Pelayanan Publik dan Penggerak Ekonomi Lokal

BUMD perlu diposisikan bukan hanya sebagai pelaku bisnis, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memperluas akses layanan publik, khususnya di sektor air bersih (PDAM) dan distribusi pangan serta komoditas lokal (Perusda). Dengan model penugasan yang tepat, BUMD dapat mendukung:

- Ketersediaan layanan dasar dengan kualitas yang lebih baik,
- Stabilisasi harga dan distribusi barang kebutuhan pokok,
- Serta penguatan rantai nilai produksi pertanian dan UMKM.

Peran ganda ini akan memberikan dampak berganda terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

5. Mengembangkan Kemitraan Strategis dengan Swasta dan Lembaga Keuangan

Dalam rangka memperluas kapasitas usaha dan mengurangi ketergantungan terhadap APBD, BUMD harus secara aktif menjalin kemitraan strategis dengan:

- Pelaku usaha swasta,
- Lembaga keuangan daerah dan nasional,
- Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),
- Dan pelaku rantai pasok lokal.

Skema kemitraan dapat berupa joint venture, kerja sama operasional (KSO), leasing aset daerah, atau konsesi terbatas, dengan prinsip saling menguntungkan dan berbasis tata kelola yang sehat. Melalui kemitraan ini, BUMD dapat memperoleh akses pada teknologi, pasar, serta permodalan yang dibutuhkan untuk ekspansi usaha secara signifikan.

Rekomendasi kebijakan ini merupakan langkah transformatif untuk membangun kembali kepercayaan terhadap BUMD Konawe, sekaligus membuka jalan bagi kinerja yang lebih produktif, berkelanjutan, dan berorientasi pada hasil nyata. Implementasi yang konsisten dan pengawasan yang kuat akan menjadi kunci keberhasilan transformasi BUMD sebagai alat strategis pembangunan daerah ke depan.

2.2 Gambaran Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Konawe dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerah diarahkan untuk menjamin ketersediaan anggaran bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sementara itu pengelolaan belanja dan pembiayaan daerah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan daerah dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat di daerah.

Analisis kinerja keuangan ini juga menjadi bahan evaluatif dalam menilai sejauh mana perencanaan dan penganggaran yang telah dilakukan dapat menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Dengan meninjau aspek kemandirian fiskal, ketergantungan terhadap dana transfer pusat, serta efisiensi belanja daerah, Pemerintah Kabupaten Konawe dapat merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan yang lebih baik ke depan. Hasil dari evaluasi ini akan menjadi dasar dalam menyusun kerangka pendanaan RPJMD 2025–2029 secara realistis dan terukur.

Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 yang secara khusus mengatur pedoman penyusunan APBD tahun 2025. Peraturan ini menjadi acuan penting bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia dalam menyusun anggaran tahunannya. Peraturan ini membawa beberapa poin penting, di antaranya:

1. Adopsi Skema Ecological Fiscal Transfer (EFT)
2. Perubahan dalam Pendapatan dan Belanja Daerah

Penyesuaian dengan Perkembangan Kebijakan Pusat: Pedoman umum penyusunan APBD ini tentu saja harus disinkronkan dengan peraturan di pemerintah pusat. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan penyusunan rancangan kebijakan umum pada APBD tersebut, serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang sudah disepakati antara DPRD dengan pemerintah daerah. Dalam setiap penyusunan dan pembahasan rancangan APBD tersebut, pemerintah daerah dan DPRD harus

bersikap komprehensif dan lebih cermat dalam melengkapi peraturan perundangan yang sudah dibuat di daerah. DPRD juga harus lebih meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan fungsi legislatif agar menjadi lebih baik. Jika penggunaan APBD dapat dilakukan dengan baik, maka pelaksanaan otonomi daerah pun bisa membuat pelayanan dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Karena saat ini pemerintah menggunakan penganggaran yang berbasis pendekatan kinerja, maka reformasi anggaran di negara kita tidak hanya terdapat pada perubahan struktur APBD.

2.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan masa lalu merupakan refleksi dari kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe dalam mengelola sumber daya fiskal secara efektif dan efisien selama periode 2019–2023. Evaluasi ini meliputi capaian realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, yang menggambarkan konsistensi pemerintah daerah dalam mewujudkan target-target pembangunan serta menjaga keseimbangan fiskal. Melalui analisis ini, dapat diidentifikasi tren pertumbuhan pendapatan daerah, efektivitas belanja dalam mendukung prioritas pembangunan, serta pola pembiayaan yang digunakan untuk mengatasi defisit atau mendukung program strategis daerah.

Capaian realisasi pendapatan daerah Kabupaten Konawe selama periode 2020–2024 menunjukkan fluktuasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, seperti kondisi perekonomian nasional, kebijakan transfer pusat ke daerah, serta kemampuan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Meskipun menghadapi tantangan, pemerintah daerah berhasil mempertahankan tren positif dalam pertumbuhan pendapatan, khususnya melalui sektor-sektor unggulan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang berdampak pada penerimaan PAD. Evaluasi atas komponen pendapatan ini menjadi penting untuk merumuskan strategi peningkatan kapasitas fiskal di masa mendatang, guna memperkuat kemandirian keuangan daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer.

Di sisi belanja daerah, Pemerintah Kabupaten Konawe berupaya menjaga proporsi belanja yang seimbang antara belanja operasional dan belanja modal, dengan tetap mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian target pembangunan daerah. Selama lima tahun terakhir, terdapat kecenderungan peningkatan alokasi belanja modal untuk infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya, yang diharapkan mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Pola pembiayaan daerah juga menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan anggaran, di mana pemerintah memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang tersedia secara hati-hati dan terukur, baik dalam bentuk penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan, guna menutup defisit anggaran atau mendukung program strategis yang bersifat produktif.

1. Realisasi APBD

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kapasitas keuangan daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Konawe menyusun APBD dengan pendekatan berbasis kinerja, yang menitikberatkan pada pencapaian hasil yang terukur sesuai dengan sasaran pembangunan daerah. Penyusunan anggaran ini diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara maksimal, dengan mengutamakan prioritas program yang memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan.

Dalam pelaksanaannya, APBD dirancang untuk memastikan keseimbangan antara belanja pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan publik. Prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, ketepatan waktu, serta akuntabilitas menjadi dasar utama dalam pengelolaan anggaran daerah. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang didanai APBD tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Konawe.

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Konawe meliputi pencapaian kinerja pendapatan daerah, perkembangan belanja daerah dan pembiayaan daerah yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2. 71 Realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Konawe Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	Persen	Selisih
1	2	3	4	5
Pendapatan Daerah				
2020	1.526.702.491.202,00	1.418.857.895.534,63	92,94	107.844.595.667,37
2021	1.405.684.763.300,17	1.433.425.627.092,03	101,97	(27.740.863.791,86)
2022	1.512.605.544.663,00	1.490.004.684.542,31	98,51	22.600.860.120,69
2023	1.765.799.675.743,00	1.652.476.720.349,00	93,58	113.322.955.394,00
2024	1.852.316.755.611,00	1.842.632.264.950	99,48	9.684.490.661,00
Belanja Daerah				
2020	1.179.973.649.740,20	1.115.040.967.179,00	94,50	64.932.682.561,20
2021	1.049.844.609.089,00	1.011.498.883.621,00	96,35	38.345.725.468,00
2022	1.205.803.898.222,00	1.124.024.752.060,00	93,22	81.779.146.162,00
2023	1.485.342.466.772,00	1.364.474.196.660,00	91,86	120.868.270.112,00
2024	1.827.060.490.629,00	1.759.407.218.922,00	96,30	67.653.271.707,00
Penerimaan Pembiayaan				
2020	2.073.863.538,20	2.073.863.538,20	100,00	-
2021	6.075.787.293,83	6.075.787.293,83	100,00	-
2022	67.068.575.460,00	67.068.575.459,86	100,00	0,14
2023	59.511.835.529,00	59.511.835.529,17	100,00	(0,17)
2024	10.424.116.718,00	10.424.116.718,17	100,00	-
Pengeluaran Pembiayaan				
2020	35.980.391.000,00	35.680.391.000,00	99,17	300.000.000,00
2021	35.680.391.000,00	35.680.391.000,00	100,00	-
2022	35.680.391.000,00	35.680.391.000,00	100,00	-
2023	35.680.391.000,00	35.680.391.000,00	100,00	-
2024	35.680.381.700,00	35.680.381.700,00	100,00	-

(Sumber : BPKAD Konawe, 2025)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa data realisasi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Konawe tahun 2020 hingga 2024, terdapat fluktuasi dalam capaian pendapatan dan belanja yang menarik untuk disorot. Pada tahun 2020, target pendapatan daerah sebesar Rp1,52 triliun hanya terealisasi Rp1,42 triliun atau 92,94%, namun meningkat menjadi 101,97% pada tahun 2021 dengan realisasi sebesar Rp1,43 triliun dari target Rp1,40 triliun. Pada 2022, meskipun target meningkat menjadi Rp1,51 triliun, realisasi sedikit menurun ke 98,51%. Tahun 2023 kembali mengalami penurunan persentase realisasi menjadi 93,58%, dan pada 2024 capaian realisasi nyaris sempurna di angka 99,48%.

Sementara itu, belanja daerah juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun tidak seluruhnya mencapai target. Pada 2020, realisasi belanja mencapai 94,50% dari target. Persentase ini cenderung stabil di atas 90%, dengan puncak tertinggi pada tahun 2021 sebesar 96,35% dan terendah pada 2023 yaitu 91,86%. Tahun 2024 kembali meningkat menjadi 96,30% dengan realisasi belanja sebesar Rp1,76 triliun dari target Rp1,83 triliun.

Untuk penerimaan pembiayaan, secara konsisten dari tahun 2020 hingga 2024, seluruh realisasi selalu mencapai 100% dari target, menunjukkan efektivitas dalam perolehan pembiayaan tersebut. Sedangkan pada pengeluaran pembiayaan, capaian juga hampir selalu menyentuh angka 100%, dengan sedikit deviasi hanya pada tahun 2020 sebesar 99,17%. Hal ini menunjukkan adanya pengelolaan keuangan daerah yang cukup stabil dan konsisten dalam lima tahun terakhir.

2. Neraca Daerah

Neraca daerah adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah pada tanggal tertentu. Laporan ini memberikan informasi tentang kondisi keuangan daerah, termasuk sumber daya yang dimiliki dan kewajiban yang harus dipenuhi. Neraca daerah terdiri dari tiga komponen utama:

- a. Aset: Semua sumber daya ekonomi yang dimiliki pemerintah daerah, seperti kas, piutang, persediaan, aset tetap (tanah, bangunan), dan investasi.

- b. Kewajiban: Semua utang atau kewajiban finansial yang harus dibayar oleh pemerintah daerah, seperti pinjaman dan kewajiban jangka pendek lainnya.
- c. Ekuitas Dana: Selisih antara total aset dan total kewajiban, yang mencerminkan kekayaan bersih pemerintah daerah

Perkembangan neraca daerah Kabupaten Konawe dan rata-rata pertumbuhannya dari tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 72 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)

No	Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
I	ASET	2.123.415.773.744,5	2.492.905.505.573,7	2.432.463.665.623,2	2.546.311.267.820,3	2.632.501.480.656,5	6,65
A	ASET LANCAR	30.408.174.213,3	380.349.153.506,5	299.683.204.385,4	239.078.609.469,5	276.130.054.614,2	268,49
1	Kas di Kas Daerah	2.311.799.178,5	61.556.593.944,5	53.302.763.114,9	2.813.830.198,9	51.006.337.986,9	601,89
2	Kas di Bendahara Penerimaan			235.647.000,0	16.940.000,0	62.681.063,0	-92,81
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	315.394.000,0	272.085.739,0	26.469.907,0	9.498.000,0	100.260.482,0	-58,38
4	Kas di BLUD	4.100.909.487,5	7.618.851.421,5	6.329.211.615,5	6.967.252.591,5	4.203.710.403,5	122,86
5	Kas di Bendahara FKTP - JKN	10.165,0	550.345,0	48.131,0	1.725.936,0	71.196,0	2152,22
6	Kas di Bendahara BOS	50.914.587,0	26.279.500,0	19.179.908,0	25.724.000,0	2.325.000,0	-34,81
7	Kas di Bendahara BOK				1.959.606.861,0	2.656.317.135,0	0,00
8	Kas Lainnya	160.537.373,0	274.527.768,0	378.313.207,0	905.145.636,6	224.741.710,0	47,82
9	Piutang Pajak	12.868.760.530,3	222.031.603.553,3	201.425.168.142,3	199.200.205.529,3	206.944.456.816,3	415,07
10	Penyisihan Piutang Pajak	(3.339.601.190,90	(5.298.453.860,74	(24.392.201.605,88	(23.879.437.767,95	(26.901.206.000,40	121,94
11	Piutang Retribusi	70.718.900,0	70.718.900,0	70.718.900,0	359.118.700,0	359.118.700,0	100,00
12	Penyisihan Piutang Retribusi	(7.071.890,00	(7.071.890,00	(35.359.450,00	(1.795.593,50	(35.911.870,00	236,67
13	Piutang Lain-lain PAD yang Sah		22.130.562.847,9	6.980.019.877,2	8.824.069.749,9	13.537.785.263,9	-10,51
14	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah		(611.232.020,63	(664.161.468,59	(657.405.008,69	(649.157.645,12	1,91

No	Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
15	Piutang Transfer Antar Daerah		13.054.483.557,00	20.346.280.209,0	9.328.124.137,0	4.942.540.263,0	0,43
16	Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah		(116.036.569,55)	(217.512.874,35)	0,0	(75.476.853,08)	-3,14
17	Piutang Pendapatan Lainnya	7.452.543.706,0	22.130.562.847,9	22.130.562.847,9	22.130.562.847,9		31,59
18	Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	(765.763.759,52)	(611.232.020,63)	(611.232.020,63)	(611.232.020,63)	(281.063.444,00)	-10,03
19	Piutang Lainnya	0,0	281.063.444,0	281.063.444,0	281.063.444,0	281.063.444,0	0,00
20	Penyisihan Piutang Lainnya	0,0	(281.063.444,00)	(281.063.444,00)	(281.063.444,00)	(281.063.444,00)	0,00
21	Beban Dibayar Dimuka				0,0	0,0	0,00
22	Persediaan	7.189.023.126,3	37.826.359.443,8	14.359.288.945,0	11.686.675.672,0	19.751.460.963,1	88,15
B	INVESTASI JANGKA PANJANG	27.887.239.013,1	27.640.182.441,1	26.280.867.519,6	24.875.249.704,9	23.440.624.081,7	-2,53
1	Investasi Non Permanen						0,00
a	Pinjaman Angsuran Berjangka						0,00
b	Investasi Non Permanen-Dana Bergulir						0,00
2	Investasi Permanen	27.887.239.013,1	27.640.182.441,1	26.280.867.519,6	24.875.249.704,9	23.440.624.081,7	-2,53
a	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	27.887.239.013,1	27.640.182.441,1	26.280.867.519,6	24.875.249.704,9	23.440.624.081,7	-2,53
b	Investasi Permanen Lainnya				0,0		0,00
C	ASET TETAP	1.971.071.588.670,0	1.981.606.939.828,0	1.996.637.085.027,0	2.069.100.634.529,1	2.117.819.979.231,1	3,42
1	Tanah	179.373.359.183,0	182.783.545.883,0	211.032.125.183,0	212.271.794.081,0	214.389.290.281,0	4,53
2	Peralatan dan Mesin	468.954.333.514,0	494.849.573.315,0	539.369.643.137,0	589.184.973.289,0	633.964.738.161,0	8,78
3	Gedung dan Bangunan	980.267.903.806,0	1.057.057.284.186,0	1.095.113.554.117,0	1.198.129.049.190,0	1.302.806.009.359,0	6,85

No	Uraian						Rata-Rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.111.069.063.990,0	1.173.375.585.181,0	1.218.609.415.263,0	1.327.165.848.044,0	1.408.365.598.350,0	6,86
5	Aset tetap Lainnya	62.847.394.153,0	63.132.469.453,0	63.910.854.353,0	66.540.519.161,0	69.022.755.696,0	2,73
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	19.353.212.846,0	8.672.738.510,0	26.530.192.422,0	23.200.466.021,0	22.905.229.521,0	48,09
7	Akumulasi Penyusutan	(850.793.678.822,00	(998.264.256.700,00	(1.157.928.699.447,99	(1.347.392.015.256,88	(1.533.633.642.136,88	14,05
D	DANA CADANGAN		0,0				0,00
1	Dana Cadangan						0,00
E	ASET LAINNYA	94.048.771.848,0	103.309.229.798,0	109.862.508.691,0	213.256.774.116,7	215.110.822.729,4	26,31
1	Tagihan Penjualan Angsuran	0,0	48.272.958.175,9		0,0		0,00
2	Tagihan Jangka Panjang	48.272.958.175,9	1.261.260.000,0	48.272.958.175,9	48.272.958.175,9	48.272.958.175,9	907,49
3	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	1.261.260.000,0	6.078.269.660,0	1.261.260.000,0	1.261.260.000,0	1.261.260.000,0	75,67
4	Aset Tak Berwujud	2.147.252.546,3	(2.557.442.805,67	6.822.568.160,0	8.629.768.660,0	11.450.204.860,0	-143,17
5	Amortisasi Aset Tidak Berwujud			(3.198.023.905,67)	(3.933.225.764,00	(4.899.613.351,33	5,75
6	Aset Lain-lain	88.132.416.751,8	104.947.592.240,8	111.983.239.914,8	214.305.506.698,8	214.305.506.698,8	28,14
7	Akumulasi Penyusutan Aset Lain- lain	(45.765.115.626,00	(54.693.407.473,00	(55.279.493.654,00	(55.279.493.654,00	(55.279.493.654,00	5,39
II	KEWAJIBAN	326.980.576.170,6	232.938.344.874,9	124.499.490.195,2	119.773.966.650,6	67.645.716.660,6	-23,95
A	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	219.939.412.470,6	161.577.572.174,9	88.819.108.495,2	119.773.966.650,6	67.645.716.660,6	-12,17
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	863.777.497,2	2.680.313.258,2	779.797.354,2	1.430.736.505,9	287.663.930,2	33,85
2	Utang Bunga	1.903.590.344,7	1.479.610.183,9	1.013.869.044,3	4.686.320.505,0	166.220.277,0	72,60

No	Uraian						Rata-Rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
3	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	35.680.391.000,0	35.680.391.000,0	35.680.391.000,0	35.680.381.700,0		0,00
4	Pendapatan Diterima Dimuka	97.666.666,6	118.666.666,6	73.666.666,6	72.166.666,6	177.333.333,3	9,93
5	Utang Beban	122.520.527.729,0	80.832.488.105,0	24.565.108.305,0	31.876.755.605,0	23.527.153.605,0	-15,93
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	45.877.835.100,0	19.110.354.109,0	8.935.990.991,0	17.455.549.310,0	8.123.645.853,0	-10,88
7	Utang BLUD	12.995.624.133,0	21.675.748.852,0	17.770.285.134,0	28.572.056.358,0	35.363.699.662,0	13,02
B	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	107.041.163.700,0	71.360.772.700,0	35.680.381.700,0			-52,08
1	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	107.041.163.700,0	71.360.772.700,0	35.680.381.700,0			-52,08
2	Utang Jangka Panjang Lainnya						0,00
III	EKUITAS DANA	1.796.435.197.573,8	2.238.447.829.871,5	2.286.444.844.600,6	2.405.017.970.342,4	2.564.855.763.995,9	11,17
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		2.123.415.773.744,5	2.471.386.174.746,4	2.410.944.334.795,9	2.524.791.936.993,0	2.564.855.763.995,9	6,40

(Sumber : BPKAD Konawe, 2025)

Neraca daerah Kabupaten Konawe tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren positif dengan peningkatan aset dan ekuitas serta penurunan kewajiban. Total aset meningkat dari Rp2,12 triliun menjadi Rp2,63 triliun, didorong oleh lonjakan aset lancar, terutama kas daerah dan piutang pajak, meskipun manajemen likuiditas masih belum konsisten. Piutang pajak yang meningkat beserta penyisihannya mengindikasikan potensi piutang tak tertagih yang perlu diwaspadai. Sementara itu, investasi jangka panjang menurun akibat minimnya penyertaan modal baru dari pemerintah daerah. Aset tetap tumbuh stabil, mencerminkan peningkatan belanja infrastruktur, namun akumulasi penyusutan yang terus naik menunjukkan perlunya perencanaan pemeliharaan yang lebih baik. Aset lainnya juga

mengalami lonjakan, meningkatkan beban amortisasi. Di sisi kewajiban, terdapat penurunan signifikan, terutama dari pelunasan utang jangka panjang kepada pemerintah pusat. Ekuitas meningkat dari Rp1,79 triliun menjadi Rp2,40 triliun, mencerminkan akumulasi surplus dan peningkatan kekayaan daerah. Secara umum, kinerja neraca daerah membaik, namun tetap diperlukan pengelolaan piutang, investasi, dan aset yang lebih terencana dan berkelanjutan.

2.2.2

Proyeksi Pendapatan Dan Belanja Daerah

1. Pendapatan Daerah

Dengan melihat proyeksi asumsi makroekonomi Kabupaten Konawe tahun 2025 hingga tahun 2030 diatas serta melihat performa Pendapatan Daerah dari tahun 2020 hingga tahun 2024, pada masa yang akan datang Pendapatan Daerah diharapkan dapat lebih meningkat, dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Untuk tahun 2025 sampai dengan tahun 2030, dirumuskan proyeksi Pendapatan Daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 73 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2025-2030

No	Uraian	2025	2026	2027	2028	2029	2030
01.01	Pendapatan Asli Daerah	235.456.889.425	244.468.813.575	253.952.306.668	263.934.557.613	274.444.388.921	290.911.052.256
01.01.01	Pajak Daerah	105.706.459.416	110.991.782.386	116.541.371.506	122.368.440.081	128.486.862.085	136.196.073.810
01.01.02	Retribusi Daerah	40.484.948.000	43.318.894.360	46.351.216.965	49.595.802.153	53.067.508.303	56.251.558.801
01.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.401.482.009	4.445.496.829	4.489.951.797	4.534.851.315	4.580.199.828	4.855.011.818
01.01.04	Lain-lain PAD yang SAH	84.864.000.000	85.712.640.000	86.569.766.400	87.435.464.064	88.309.818.705	93.608.407.827
01.02	Pendapatan Transfer	1.589.244.129.846	1.599.407.926.053	1.609.640.245.013	1.619.941.588.344	1.630.312.461.758	1.728.131.209.463
01.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.484.522.225.296	1.493.429.358.648	1.502.389.934.800	1.511.404.274.408	1.520.472.700.055	1.611.701.062.058
01.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	104.721.904.550	105.978.567.405	107.250.310.213	108.537.313.936	109.839.761.703	116.430.147.405
01.03	Lain-lain Pendapatan Daerah yang SAH	15.064.662.417	15.772.701.551	16.514.018.523	17.290.177.394	18.102.815.732	19.188.984.676
01.03.01	Pendapatan Hibah						
01.03.02	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	15.064.662.417	15.772.701.551	16.514.018.523	17.290.177.394	18.102.815.732	19.188.984.676
Total Pendapatan		1.839.765.681.688	1.859.649.441.179	1.880.106.570.204	1.901.166.323.351	1.922.859.666.411	2.038.231.246.396

Sumber; Tim Penyusun

Proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Konawe tahun 2025 hingga 2030 menunjukkan pertumbuhan yang moderat namun stabil, dengan peningkatan dari Rp1,84 triliun menjadi Rp2,09 triliun. Pendapatan ini terdiri dari tiga komponen utama: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD mengalami kenaikan konsisten, terutama dari pajak daerah dan retribusi, mencerminkan meningkatnya kapasitas fiskal daerah. Namun, kontribusi dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan masih kecil dan tumbuh lambat. Sementara itu, pendapatan transfer tetap mendominasi struktur pendapatan, menyumbang sekitar 86% setiap tahun, terutama dari pemerintah pusat. Komponen lain-lain pendapatan juga menunjukkan tren pertumbuhan meski dengan kontribusi yang lebih kecil. Secara keseluruhan, struktur pendapatan ini mencerminkan optimisme fiskal yang realistis, namun juga menggarisbawahi pentingnya strategi untuk meningkatkan kemandirian fiskal melalui

optimalisasi PAD secara berkelanjutan.

2. Belanja Daerah

Berikut ini target proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Konawe tahun 2025 hingga 2030, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 74 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2025-2030

No	Uraian	2025	2026	2027	2028	2029	2030
02.01	Belanja Operasi	1.217.629.265.718	1.218.292.701.723	1.216.378.137.466	1.214.842.001.854	1.213.684.486.978	1.258.093.792.701
02.01.01	Belanja Pegawai	736.171.456.693	732.490.599.410	721.503.240.419	710.680.691.812	700.020.481.435	679.019.866.992
02.01.02	Belanja Barang dan Jasa	460.776.045.901	465.383.806.360	474.691.482.487	484.185.312.137	493.869.018.379	558.685.088.930
02.01.03	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
02.01.04	Belanja Hibah	9.672.891.908	9.189.247.313	8.729.784.947	8.293.295.700	7.878.630.915	8.114.989.842
02.01.05	Belanja Bantuan Sosial	11.008.871.216	11.229.048.640	11.453.629.613	11.682.702.205	11.916.356.249	12.273.846.936
02.02	Belanja Modal	280.324.630.625	291.596.709.530	306.250.904.976	317.469.583.095	332.356.569.881	392.048.175.572
02.02.01	Belanja Modal Tanah	2.025.000.000	2.227.500.000	2.561.625.000	3.073.950.000	3.227.647.500	3.324.476.925
02.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.421.792.777	31.030.228.632	31.650.833.205	32.283.849.869	32.929.526.867	43.917.412.673
02.02.03	Belanja Modal Gedung dan Mesin Bangunan	134.807.963.901	139.548.362.097	145.210.296.580	148.154.502.511	151.157.592.562	185.752.320.339
02.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	107.149.103.487	112.506.558.661	120.382.017.768	126.401.118.656	136.513.208.149	146.269.512.988
02.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.920.770.460	6.284.060.140	6.446.132.423	7.556.162.059	8.528.594.803	12.784.452.647
02.03	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000
02.03.01	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000
02.04	Belanja Transfer	345.401.972.725	350.583.002.316	357.594.662.362	368.322.502.233	375.688.952.278	386.959.620.846
02.04.01	Belanja Bantuan Keuangan	345.401.972.725	350.583.002.316	357.594.662.362	368.322.502.233	375.688.952.278	386.959.620.846
TOTAL BELANJA		1.849.355.869.068	1.866.472.413.569	1.886.223.704.804	1.906.634.087.182	1.927.730.009.137	2.043.101.589.120

Sumber; Tim Penyusun

Selama periode 2025 hingga 2030, total belanja daerah Kabupaten Konawe menunjukkan tren peningkatan stabil, dari sekitar Rp1,84 triliun menjadi Rp2,04 triliun. Komponen terbesar adalah belanja operasi, dari Rp1,217 triliun menjadi Rp1,258. Belanja modal mengalami peningkatan konsisten, terutama pada infrastruktur seperti jalan, jaringan, irigasi, serta gedung dan bangunan. Belanja tidak terduga tetap konstan sebesar Rp6 miliar setiap tahun. Belanja transfer juga meningkat, khususnya bantuan keuangan, dari Rp345,40 miliar menjadi Rp386,95 miliar. Secara keseluruhan, peningkatan belanja modal dan transfer menjadi faktor utama kenaikan total belanja daerah, mencerminkan fokus kebijakan pada pembangunan infrastruktur dan dukungan keuangan.

3. Pembiayaan Daerah

Proyeksi pembiayaan daerah merupakan perkiraan mengenai kebutuhan dan sumber-sumber pembiayaan yang akan digunakan oleh pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di masa mendatang. Proyeksi ini disusun berdasarkan analisis terhadap tren penerimaan dan pengeluaran daerah, kondisi fiskal, serta potensi pembiayaan yang tersedia, baik yang bersumber dari penerimaan pembiayaan seperti sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), maupun dari penerimaan pinjaman daerah atau sumber pembiayaan lainnya. Adapun Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Konawe tahun 2025 hingga tahun 2030 yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 75 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2025-2030

No	Uraian	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	3	4	5	6	7
03.01	Penerimaan Pembiayaan	9.590.187.381	8.822.972.390	8.117.134.599	7.467.763.831	6.870.342.725	6.870.342.725
03.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	9.590.187.381	8.822.972.390	8.117.134.599	7.467.763.831	6.870.342.725	6.870.342.725
03.02	Pengeluaran Pembiayaan	0	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
03.02.01	Penyertaan Modal PERUMDA	0	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
Total Pembiayaan		9.590.187.381	6.822.972.390	6.117.134.599	5.467.763.831	4.870.342.725	4.870.342.725

Sumber; Tim Penyusun

Pembiayaan daerah Kabupaten Konawe pada periode 2025–2030 seluruhnya bersumber dari penerimaan pembiayaan berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Nilai SILPA menunjukkan tren menurun setiap tahun, dari Rp9,59 miliar pada 2025, menjadi Rp8,82 miliar pada 2026, dan terus berkurang hingga Rp6,87 miliar pada 2029 dan 2030. Mulai tahun 2026, terdapat pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal sebesar Rp2 miliar setiap tahun. Kehadiran pos pengeluaran pembiayaan ini menyebabkan total pembiayaan bersih mengalami penurunan lebih tajam. Total pembiayaan yang semula Rp9,59 miliar pada tahun 2025, turun menjadi Rp6,82 miliar pada 2026, Rp6,11 miliar pada 2027, Rp5,46 miliar pada 2028, hingga Rp4,87 miliar pada 2029 dan 2030.

Secara garis besar, proyeksi kerangka pendanaan APBD Kabupaten Konawe tahun 2025 hingga tahun 2030 dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 2. 76 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2025-2030

No	Uraian	2025	2026	2027	2028	2029	2030
01.01	Pendapatan Asli Daerah	235.456.889.425	244.468.813.575	253.952.306.668	263.934.557.613	274.444.388.921	290.911.052.256
01.01.01	Pajak Daerah	105.706.459.416	110.991.782.386	116.541.371.506	122.368.440.081	128.486.862.085	136.196.073.810
01.01.02	Retribusi Daerah	40.484.948.000	43.318.894.360	46.351.216.965	49.595.802.153	53.067.508.303	56.251.558.801
01.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.401.482.009	4.445.496.829	4.489.951.797	4.534.851.315	4.580.199.828	4.855.011.818
01.01.04	Lain-lain PAD yang SAH	84.864.000.000	85.712.640.000	86.569.766.400	87.435.464.064	88.309.818.705	93.608.407.827
01.02	Pendapatan Transfer	1.589.244.129.846	1.599.407.926.053	1.609.640.245.013	1.619.941.588.344	1.630.312.461.758	1.728.131.209.463
01.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.484.522.225.296	1.493.429.358.648	1.502.389.934.800	1.511.404.274.408	1.520.472.700.055	1.611.701.062.058
01.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	104.721.904.550	105.978.567.405	107.250.310.213	108.537.313.936	109.839.761.703	116.430.147.405
01.03	Lain-lain Pendapatan Daerah yang SAH	15.064.662.417	15.772.701.551	16.514.018.523	17.290.177.394	18.102.815.732	19.188.984.676
01.03.01	Pendapatan Hibah						
01.03.02	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	15.064.662.417	15.772.701.551	16.514.018.523	17.290.177.394	18.102.815.732	19.188.984.676
Total Pendapatan		1.839.765.681.688	1.859.649.441.179	1.880.106.570.204	1.901.166.323.351	1.922.859.666.411	2.038.231.246.396
02.01	Belanja Operasi	1.217.629.265.718	1.218.292.701.723	1.216.378.137.466	1.214.842.001.854	1.213.684.486.978	1.258.093.792.701
02.01.01	Belanja Pegawai	736.171.456.693	732.490.599.410	721.503.240.419	710.680.691.812	700.020.481.435	679.019.866.992
02.01.02	Belanja Barang dan Jasa	460.776.045.901	465.383.806.360	474.691.482.487	484.185.312.137	493.869.018.379	558.685.088.930
02.01.03	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	0
02.01.04	Belanja Hibah	9.672.891.908	9.189.247.313	8.729.784.947	8.293.295.700	7.878.630.915	8.114.989.842
02.01.05	Belanja Bantuan Sosial	11.008.871.216	11.229.048.640	11.453.629.613	11.682.702.205	11.916.356.249	12.273.846.936
02.02	Belanja Modal	280.324.630.625	291.596.709.530	306.250.904.976	317.469.583.095	332.356.569.881	392.048.175.572
02.02.01	Belanja Modal Tanah	2.025.000.000	2.227.500.000	2.561.625.000	3.073.950.000	3.227.647.500	3.324.476.925

No	Uraian	2025	2026	2027	2028	2029	2030
01.01	Pendapatan Asli Daerah	235.456.889.425	244.468.813.575	253.952.306.668	263.934.557.613	274.444.388.921	290.911.052.256
02.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.421.792.777	31.030.228.632	31.650.833.205	32.283.849.869	32.929.526.867	43.917.412.673
02.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	134.807.963.901	139.548.362.097	145.210.296.580	148.154.502.511	151.157.592.562	185.752.320.339
02.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Lainnya	107.149.103.487	112.506.558.661	120.382.017.768	126.401.118.656	136.513.208.149	146.269.512.988
02.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.920.770.460	6.284.060.140	6.446.132.423	7.556.162.059	8.528.594.803	12.784.452.647
02.03	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000
02.03.01	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000
02.04	Belanja Transfer	345.401.972.725	350.583.002.316	357.594.662.362	368.322.502.233	375.688.952.278	386.959.620.846
02.04.01	Belanja Bantuan Keuangan	345.401.972.725	350.583.002.316	357.594.662.362	368.322.502.233	375.688.952.278	386.959.620.846
Total Belanja		1.849.355.869.068	1.866.472.413.569	1.886.223.704.804	1.906.634.087.182	1.927.730.009.137	2.043.101.589.120
03.01	Penerimaan Pembiayaan	9.590.187.381	8.822.972.390	8.117.134.599	7.467.763.831	6.870.342.725	6.870.342.725
03.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	9.590.187.381	8.822.972.390	8.117.134.599	7.467.763.831	6.870.342.725	6.870.342.725
03.02	Pengeluaran Pembiayaan	0	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
03.02.01	Penyertaan Modal PERUMDA	0	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
Total Pembiayaan		9.590.187.381	6.822.972.390	6.117.134.599	5.467.763.831	4.870.342.725	4.870.342.725

Sumber; Tim Penyusunan

2.3. Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis Daerah

2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah Konawe mencakup berbagai tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan wilayah secara merata. Dengan keterlibatan berbagai pihak, proses perumusan permasalahan dan analisis isu strategis diharapkan mampu menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif dan menyeluruh terhadap kondisi aktual daerah. Pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaksana langsung di lapangan memiliki pemahaman yang lebih dekat terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat, sementara pemerintah provinsi dan nasional dapat memberikan perspektif makro yang berkaitan dengan kebijakan strategis, program prioritas, serta keterkaitan antar wilayah. Kolaborasi ini akan memastikan bahwa isu-isu pembangunan yang dihadapi daerah tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari kebijakan pembangunan yang lebih luas dan terintegrasi, sehingga tujuan pembangunan nasional dapat dicapai secara merata di seluruh wilayah.

Selain itu, proses dialog antar level pemerintahan ini juga menjadi sarana penting untuk menyelaraskan prioritas pembangunan, menghindari tumpang tindih program, serta memperkuat sinergi pembiayaan dan pelaksanaan kegiatan. Melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang melibatkan stakeholder dari berbagai kalangan, diharapkan dapat diperoleh kesepakatan atas permasalahan pokok yang harus segera ditangani dan isu-isu strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Dengan demikian, perencanaan pembangunan daerah akan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, adaptif terhadap dinamika nasional, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah dan panjang pemerintah pusat.

Tabel 2. 77 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Kualitas sumber daya manusia masih rendah	Kualitas layanan dan pemerataan pendidikan belum optimal	Rata-rata lama sekolah, HLS, APK, APM, angka melek huruf belum optimal; anak putus sekolah dan tidak melanjutkan sekolah masih ada; fasilitas dan kualitas guru belum optimal; distribusi guru dan sarana prasarana tidak merata; rendahnya literasi digital; kurangnya inovasi metode pembelajaran dan pelatihan; ketimpangan akses pendidikan antar wilayah
		Kualitas pelayanan kesehatan belum merata dan efektif	Kematian bayi dan ibu cukup tinggi; cakupan imunisasi rendah, termasuk anak 1 tahun; kasus TBC dan stunting tinggi; distribusi tenaga medis tidak merata; fasilitas kesehatan terbatas; kurangnya edukasi kesehatan dan akses sanitasi yang layak
2	Tingkat kesejahteraan rakyat belum merata	Pertumbuhan ekonomi belum inklusif, Pendapatan masyarakat masih rendah, angka kemiskinan masih tinggi, TPT masih tinggi	Produktivitas kerja dan keterampilan rendah; harga barang dan upah tidak stabil; ketimpangan partisipasi tenaga kerja gender; kurangnya akses pelatihan dan mismatch antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan pasar kerja
			Layanan sosial bagi kelompok rentan terbatas; data kesejahteraan sosial tidak akurat; kapasitas pendamping sosial terbatas
		Perlindungan sosial masih terbatas	Cakupan jaminan sosial rendah; Sistem perlindungan sosial belum inklusif dan belum menjangkau sektor informal
		Ketenagakerjaan dan hubungan industrial lemah	Pengawasan ketenagakerjaan rendah; sinkronisasi program kurang; pelatihan kerja tidak merata
3	Ketergantungan pada sektor primer dan ketimpangan wilayah pembangunan	Produktivitas daerah rendah; pertumbuhan sektor pertanian, perdagangan, dan industri fluktuatif	Ketergantungan ekonomi pada sektor pertambangan dan industri pengolahan khususnya nikel; inovasi daerah rendah dan kelembagaan inovasi belum optimal; minimnya diversifikasi ekonomi dan hilirisasi produk lokal
		Penurunan nilai dan laju investas	Iklim investasi belum kondusif; kelemahan dalam fasilitasi usaha dan insentif; kurangnya promosi dan kemudahan berusaha

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		Ketimpangan pembangunan perkotaan dan perdesaan	Desa tertinggal masih ada; akses layanan dan infrastruktur terbatas
			Alokasi anggaran pembangunan kurang proporsional; perencanaan pembangunan belum inklusif; konektivitas dan akses teknologi informasi desa terbatas; rendahnya kapasitas masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif
4	Kondisi infrastruktur daerah belum optimal	Infrastruktur dasar belum memadai (jalan, drainase, air minum, bangunan, kawasan kumuh),	Kondisi jalan rusak parah, belum menjangkau seluruh wilayah; drainase dan sanitasi buruk; banyak bangunan tidak ber-IMB; rumah tidak layak huni; kawasan kumuh masih ada; cakupan TPU rendah; ketimpangan akses infrastruktur antar wilayah desa dan kota
		kepatuhan terhadap tata ruang masih rendah	pengawasan dan regulasi tata ruang lemah;
5	Belum optimalnya tata kelola pemerintah	Reformasi birokrasi dan tata kelola belum optimal; pelayanan standar minimum belum terpenuhi	Pelaksanaan SPBE dan SPIP belum optimal; kualitas SDM aparatur rendah; pelayanan publik kurang sinergi dan transparan; transformasi digital dan SPBE lambat; partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelayanan rendah; indeks integritas daerah rendah; birokrasi cenderung proyek jangka pendek dan tidak berkelanjutan
		Transformasi digital dan inovasi daerah belum maksimal	Infrastruktur TIK tidak merata; kapasitas ASN dan masyarakat rendah; kelembagaan inovasi lemah
6	Belum optimalnya pelestarian budaya lokal dan ekosistem	Kesetaraan gender rendah; risiko bencana tinggi; kualitas lingkungan dan keamanan rendah	Ketimpangan dan pemberdayaan gender belum merata; representasi perempuan terbatas; ancaman dan kesiapsiagaan bencana rendah; indeks kualitas lingkungan hidup rendah; pengawasan lingkungan kurang efektif; pelanggaran K3 dan PERDA masih terjadi;
		Partisipasi pemuda, kebudayaan, dan literasi rendah	dokumentasi dan revitalisasi budaya lokal kurang; minimnya integrasi kebijakan budaya dalam pembangunan

Sumber; Tim Penyusun, diolah

1) Kualitas sumber daya manusia yang masih rendah

Permasalahan kualitas SDM masih menjadi tantangan utama di Kabupaten Konawe. Hal dapat terlihat oleh Indeks Pembangunan Manusia yang masih berada dibawah rata-rata nasional dimana nilai IPM nasional ditahun 2024 sebesar 75,02, sedangkan nilai IPM Kabupaten Konawe sebesar 74,50, walaupun capaian ini masih tergolong status “Tinggi”. Dalam aspek pendidikan, masih ditemukan ketimpangan layanan dan mutu pendidikan. Rata-rata lama sekolah (RLS), Angka Melek Huruf (AMH), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Kasar (APK) belum menunjukkan capaian yang optimal. Putus sekolah, rendahnya minat melanjutkan pendidikan, belum meratanya distribusi guru, serta sarana prasarana yang belum memadai menjadi faktor penghambat pencapaian kualitas pendidikan yang setara dan inklusif.

Sementara itu, dalam aspek kesehatan, rendahnya derajat kesehatan masyarakat ditandai oleh angka kematian ibu dan bayi yang masih tinggi, dimana angka kematian ibu ditahun 2024 sebesar 82,15% sedangkan angka kematian bayi sebesar 10,95%. Hal ini disebabkan oleh cakupan imunisasi belum merata (termasuk anak usia <1 tahun), serta masih tingginya prevalensi TBC dan stunting. Akses layanan kesehatan yang belum merata, keterbatasan tenaga kesehatan, serta fasilitas kesehatan yang belum memadai memperkuat tantangan dalam pembangunan kesehatan di daerah.

2) Tingkat Kesejahteraan Rakyat Belum Merata

Kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya tercapai. Angka kemiskinan yang masih tinggi mencapai 13,25 pada tahun 2024 meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 13,02 pada tahun 2023. Peningkatan kemiskinan ini tidak berbanding lurus dengan peningkatan PDRB Perkapita Konawe yang semakin meningkat. Artinya, dapat kita katakan bahwa kesejahteraan masyarakat belum merata dan hanya dirasakan oleh sebagian kelompok saja. Meskipun PDRB Per-kapita meningkat, Dalam hal pendapatan masyarakat umumnya masih rendah.

Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas tenaga kerja, kurangnya akses pelatihan kerja, serta minimnya link and match antara keterampilan dan kebutuhan pasar kerja. Tingginya tingkat pengangguran

terbuka (TPT) yang sebesar 4,77% juga mencerminkan belum optimalnya pemanfaatan potensi tenaga kerja daerah. Di sisi lain, perlindungan sosial belum sepenuhnya menjangkau kelompok rentan. Sistem jaminan sosial masih bersifat terbatas dan belum inklusif terhadap sektor informal. Penguatan jaminan sosial berbasis komunitas dan dukungan aksesibilitas masih menjadi kebutuhan penting. Dalam sektor ketenagakerjaan, lemahnya pengawasan hubungan industrial, belum sinkronnya regulasi, serta belum optimalnya layanan pelatihan dan sertifikasi keterampilan menyebabkan posisi pekerja tetap rentan terhadap eksploitasi dan PHK.

3) Ketergantungan pada Sektor Industri Pengolahan dan ketimpangan wilayah pembangunan

Produktivitas daerah belum sepenuhnya optimal. Saat ini sektor lapangan usaha yang memberikan kontribusi tertinggi pada PDRB yaitu sektor industri pengolahan yaitu diatas 50 persen. Situasi ini semakin menjadi perhatian sebab pertanian merupakan sektor unggulan Kabupaten Konawe. Penurunan kontribusi sektor pertanian dan perkebunan terhadap PDRB mengindikasikan lemahnya sektor primer yang diprediksi karena rendahnya cakupan binaan kelompok tani, menurunnya legalitas pelaku usaha, dan lemahnya distribusi serta pengawasan pupuk subsidi.

Ketergantungan pada sektor tertentu semakin mengawatirkan jika permasalahan Di sektor kelautan dan perikanan seperti produksi perikanan tidak stabil dan pembinaan kelompok nelayan menurun, konsumsi ikan per kapita yang belum optimal. Sektor industri juga belum berkembang maksimal karena lemahnya dukungan terhadap pengembangan industri berbasis lokal dan rendahnya pertumbuhan industri kecil dan menengah.

Di sisi lain, penurunan minat investasi menunjukkan iklim usaha yang belum kondusif, antara lain disebabkan oleh lemahnya promosi, kurangnya insentif, dan keterbatasan akses perizinan. Ketimpangan pembangunan wilayah masih nyata, khususnya antara perkotaan dan perdesaan. Alokasi anggaran pembangunan masih belum proporsional. Perencanaan belum sepenuhnya memperhatikan kebutuhan berbasis kewilayahan. Rendahnya konektivitas infrastruktur, akses informasi dan teknologi, serta minimnya

kapasitas masyarakat di wilayah tertinggal menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

4) Kondisi Ifrastruktur Daerah belum Optimal

Kondisi infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, drainase, dan sanitasi masih menjadi kendala utama. Banyak infrastruktur dalam kondisi rusak atau belum menjangkau seluruh wilayah. Kawasan kumuh masih ada di beberapa titik, dengan fasilitas sanitasi yang buruk. Cakupan air minum layak juga masih rendah, dan beberapa kawasan pemukiman padat belum terlayani jaringan air bersih secara optimal. Ketersediaan dan akses terhadap Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah masih terbatas.

Kelemahan juga terdapat dalam aspek pengendalian tata ruang. Pengawasan terhadap implementasi rencana tata ruang belum berjalan efektif, dengan lemahnya regulasi dan penegakan aturan. Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang menjadi ancaman bagi kesinambungan pembangunan daerah.

5) Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintah

Reformasi birokrasi berjalan lambat terlihat dari Tata kelola pemerintahan belum menunjukkan kinerja yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pada tahun 2024 nilai SPBE Kabupaten Konawe tahun 2024 sebar 2,92%. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum optimal. Pelayanan publik masih menghadapi kendala dalam kecepatan, keterbukaan informasi, dan respons terhadap kebutuhan masyarakat.

Transformasi digital dan inovasi layanan publik juga belum berjalan maksimal. Infrastruktur TIK belum merata, kapasitas ASN dalam pemanfaatan teknologi masih terbatas, dan belum terbentuk ekosistem inovasi yang mendukung percepatan pelayanan dan pengambilan kebijakan.

Indeks integritas dan indeks birokrasi masih menunjukkan hasil yang belum menggembirakan yakni sebesar 66,21%. Perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya berbasis bukti dan data yang akurat. Penyusunan proyek pembangunan belum memperhatikan kesinambungan jangka panjang.

6) Belum optimalnya pelestarian budaya lokal dan ekosistem

Identitas dan keberagaman budaya lokal di Kabupaten Konawe belum mendapat perhatian yang memadai. Partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya, termasuk kegiatan seni, ritual adat, dan festival budaya masih rendah. Dukungan regulasi pelindung budaya seperti Perda budaya belum efektif.

Dari sisi lingkungan hidup, kualitas lingkungan masih menghadapi tekanan akibat lemahnya pengawasan dan rendahnya indeks kualitas lingkungan. Persoalan seperti pencemaran, kerusakan kawasan lindung, dan minimnya sanksi terhadap pelanggaran lingkungan masih sering terjadi.

Risiko bencana, khususnya banjir dan tanah longsor, masih tinggi di beberapa wilayah. Kapasitas mitigasi dan kesiapsiagaan belum optimal, baik dari sisi pemerintah daerah maupun masyarakat. Dalam hal kesetaraan gender, masih terdapat kesenjangan dalam akses, partisipasi, dan kontrol perempuan di berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi.

Selain itu, Salah satu tantangan utama Kabupaten Konawe dalam menghadapi perubahan iklim adalah tingginya emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan membuat Indeks Risiko Iklim Kabupaten Konawe tahun 2024 mencapai 157,8 atau kategori sangat tinggi.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan Penyelenggaraan Pemerintah

Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan pemerintah untuk bekerjanya fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan Masyarakat. Seperti yang disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2. 78 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan Penyelenggaraan Pemerintah

Urusan Pemerintahan	Permasalahan Utama
Pendidikan	- Rendahnya angka partisipasi dan pemerataan akses pendidikan formal dan nonformal.- Kualitas pendidikan, mutu guru, dan sarana prasarana pendidikan belum optimal.- Tingginya angka putus sekolah dan rendahnya literasi dasar.- Rendahnya literasi digital masyarakat dan kapasitas pengajaran digital.
Kesehatan	- Keterbatasan dan ketidakmerataan fasilitas dan tenaga kesehatan.- Tingginya angka kematian ibu dan bayi.- Cakupan imunisasi dan pelayanan kesehatan ibu-anak belum optimal.- Prevalensi penyakit menular seperti Tuberkulosis dan stunting masih tinggi.- Kurangnya edukasi kesehatan dan sanitasi lingkungan.
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	- Kondisi infrastruktur jalan kabupaten rusak dan belum merata.- Akses air bersih dan sistem drainase belum optimal.- Rendahnya kepatuhan terhadap tata ruang dan perizinan bangunan.- Kawasan permukiman kumuh dan fasilitas umum belum memadai.
Perumahan Dan Kawasan Permukiman	- Banyak rumah tidak layak huni.- Kawasan kumuh masih luas.- Cakupan pelayanan tempat pemakaman umum (TPU) rendah.
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	-masih terdapat gangguan ketertiban tidak terselesaikan. - Penegakan perda/perkada yang bersifat fluktuatif. - masih rendahnya mitigasi bencana

Urusan Pemerintahan	Permasalahan Utama
Sosial	-Penanganan terhadap PPKS masih belum optimal; Cakupan jaminan sosial rendah; Sistem perlindungan sosial belum inklusif dan belum menjangkau sektor informal
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	- Partisipasi perempuan dalam pembangunan dan pengambilan keputusan rendah.- Perlindungan anak dan perempuan masih kurang optimal.- Kesenjangan gender dan akses pendidikan perempuan signifikan. Belum optimalnya PUG dalam perencanaan dan penganggaran
Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	- Tingginya pengangguran dan mismatch kompetensi dengan pasar kerja.- Kapasitas pelatihan kerja dan pengawasan ketenagakerjaan masih terbatas.- Akses pelatihan dan perlindungan sosial tenaga kerja belum merata.
Perdagangan Dan Perindustrian	- Ketergantungan ekonomi pada sektor pertambangan dan industri pengolahan tertentu.- Rendahnya diversifikasi ekonomi dan inovasi daerah.- Ketidakseimbangan pertumbuhan sektor perdagangan dan industri.
Pertanian Dan Ketahanan Pangan	- Produktivitas pertanian dan peternakan belum optimal.- Kurangnya integrasi agribisnis dan hilirisasi produk.- Ketergantungan pada varietas lokal dan teknologi terbatas.- Ketahanan pangan lokal belum maksimal.
Perikanan	- Pemanfaatan potensi perikanan budidaya masih rendah.- Kapasitas pembudidaya dan akses pasar terbatas.- Sarana dan prasarana perikanan belum memadai.
Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	- Pengelolaan sumber daya alam yang belum berkelanjutan.- Emisi gas rumah kaca tinggi.- Fluktuasi dan penurunan kualitas lingkungan hidup.- Pengawasan lingkungan dan pengelolaan sampah belum optimal.- Risiko bencana dan kesiapsiagaan rendah.
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	- Rendahnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan.- Integrasi dan pemanfaatan data kependudukan antar OPD terbatas.- Akses layanan kependudukan di wilayah terpencil kurang memadai.
Pemberdayaan Masyarakat	-masih terdapat desa tertinggal. - aktivitas LSM yang rendah,
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	- Cakupan pelayanan KB masih belum merata. - Tingkat pemanfaatan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) masih rendah. - Rendahnya capaian keluarga sejahtera yang mandiri ber-KB (UPPKS, - belum optimalnya pengendalian kuantitas penduduk. - Turunnya cakupan kelembagaan PPKS
Perhubungan	- Minimnya layanan angkutan umum dan simpul transportasi.- Pengawasan keselamatan jalan dan pengaturan trayek kurang efektif.- Infrastruktur transportasi belum memadai.
Komunikasi Dan Informasi	-Masih ada OPD yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan layanan internet milik Kominfo. - Keterbatasan cakupan telekomunikasi di beberapa wilayah,
Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM)	- Penurunan kualitas dan jumlah koperasi aktif.- Kapasitas manajerial dan pembinaan usaha mikro terbatas.- Koordinasi dan monitoring usaha mikro belum optimal.

Urusan Pemerintahan	Permasalahan Utama
Penanaman Modal Dan Promosi Investasi	- Penurunan nilai dan laju investasi.- Infrastruktur dan kawasan investasi kurang memadai.- Sistem promosi dan kemudahan berusaha kurang efektif.- <u>Minim insentif investasi inklusif.</u>
Kebudayaan Dan Pariwisata	- Lemahnya dokumentasi dan pelestarian warisan budaya.- Minimnya pengelolaan cagar budaya.- Infrastruktur dan promosi pariwisata belum maksimal.- Kegiatan budaya dan pariwisata tidak stabil dan kurang berkembang.
Kepemudaan Dan Olahraga	- Rendahnya partisipasi pemuda dalam pembangunan.- Kelemahan organisasi kepemudaan.- Pembinaan dan sertifikasi pelatih olahraga kurang optimal.- Prestasi olahraga menurun.
Perpustakaan Dan Kearsipan	- Rendahnya minat baca dan indeks literasi masyarakat.- Rasio dan kunjungan perpustakaan rendah.- Pengelolaan arsip kurang inovatif dan belum terintegrasi sistem elektronik.- Tenaga perpustakaan dan arsiparis profesional terbatas.
Urusan Manajemen Keuangan	Ruang fiskal sempit untuk pembangunan langsung,
Urusan Pengawasan	Masih terdapat Temuan BPK , Kualitas SPIP dan APIP belum optimal, Pelanggaran Pegawai Meningkat
Urusan Kepegawaian	Ketidakseimbangan rasio dan struktur jabatan ASN, Rendahnya partisipasi pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN, Transformasi birokrasi belum optimal, terlihat dari konversi jabatan struktural ke fungsional yang lambat
Urusan Pengadaan	Lemahnya perencanaan dan proses pengadaan, Penggunaan metode pengadaan non-kompetitif dominan
Urusan Penelitian Dan Pengembangan	Rendahnya implementasi dan pemanfaatan hasil kelitbangan secara konsisten, Masih lemahnya kapasitas kelembagaan dan SDM kelitbangan

Sumber : Tim Penyusun Diolah, 2025

2.3.3 Isu Strategi Daerah

1. Isu Global

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah serangkaian tujuan global yang disepakati oleh negara-negara anggota PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) sejak tahun 2015, sebagai kelanjutan dari program *Millennium Development Goals (MDGs)* yang berakhir di tahun 2015. SDGs menjadi pedoman bersama untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan dunia seperti kemiskinan, ketimpangan, kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan kesejahteraan dengan *prinsip "no one left behind"* (tidak ada satu pun yang ditinggalkan).

SDGs bertujuan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa

mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya.

Secara umum, SDGs terbagi dalam 17 tujuan utama yang saling terkait. Berikut daftarnya:

1. Tanpa Kemiskinan (*No Poverty*)
2. Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*)
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera (*Good Health and Well-being*)
4. Pendidikan Berkualitas (*Quality Education*)
5. Kesenjaraan Gender (*Gender Equality*)
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak (*Clean Water and Sanitation*)
7. Energi Bersih dan Terjangkau (*Affordable and Clean Energy*)
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (*Decent Work and Economic Growth*)
9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (*Industry, Innovation, and Infrastructure*)
10. Berkurangnya Kesenjangan (*Reduced Inequalities*)
11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan (*Sustainable Cities and Communities*)
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (*Responsible Consumption and Production*)
13. Penanganan Perubahan Iklim (*Climate Action*)
14. Ekosistem Laut (*Life Below Water*)
15. Ekosistem Daratan (*Life on Land*)
16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh (*Peace, Justice and Strong Institutions*)
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (*Partnerships for the Goals*)

Selain itu, ada beberapa karakteristik SDGs yang sangat penting, antara lain:

1. Universal: berlaku untuk semua negara, baik maju maupun berkembang.
2. Terintegrasi: tujuan-tujuan ini saling terkait dan tidak bisa berdiri sendiri.

3. Partisipatif: melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, dan organisasi internasional.
4. Berorientasi Masa Depan — tidak hanya fokus pada masalah saat ini, tetapi juga dampak jangka panjang.

Penerapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sangat penting dalam upaya menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. SDGs dirancang untuk menjadi pedoman pembangunan jangka panjang hingga tahun 2030, di mana setiap negara diharapkan dapat menyesuaikan target dan indikatornya dengan kondisi serta prioritas nasional masing-masing. Dengan adanya SDGs, pembangunan tidak hanya difokuskan pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan hidup, kualitas pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, serta pemberdayaan masyarakat di berbagai sektor.

Dengan demikian, SDGs juga mendorong kolaborasi antarnegara, antarinstansi, dan antar berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai target-target global tersebut. Partisipasi aktif masyarakat sipil, sektor swasta, lembaga pendidikan, serta organisasi non-pemerintah menjadi elemen penting dalam keberhasilan implementasi SDGs di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Dalam konteks daerah, pelaksanaan SDGs bisa menjadi solusi strategis dalam menghadapi berbagai permasalahan, termasuk isu-isu tenaga kerja, kemiskinan, dan ketimpangan sosial, sehingga pembangunan yang dilakukan benar-benar inklusif, berkelanjutan, dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

2. Isu Nasional

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 pada tanggal 10 Februari 2025. RPJMN 2025-2029 ini merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Sejumlah transformasi dalam tahap pertama ini mencakup

transformasi sosial; ekonomi; tata kelola; supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia; ketahanan sosial budaya dan ekologi; pembangunan wilayah dan sarana prasarana; serta kesinambungan pembangunan. Di dalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”.

Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut:

1. memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan

8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Rencana pembangunan 2025-2029 membidik tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian target sasaran ini diukur dengan sejumlah indikator, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen, indeks modal manusia (IMM) mencapai 0,59 persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen di tahun 2029. Sasaran tersebut diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan.

RPJMN 2025-2029 juga memuat matriks pembangunan, matriks K/L, serta arah pembangunan kewilayahan. RPJMN ini akan menjadi dasar hukum dalam penyusunan rencana strategis K/L, RPJM daerah (RPJMD) dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemda dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, serta rencana kerja pemerintah (RKP) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode satu tahun. RPJMN 2025-2029 juga menjadi pedoman dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMN serta pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Dalam isu kewilayahan RPJMN Tahun 2025-2029 Sulawesi memiliki beberapa isu yang menjadi perhatian pusat yaitu :

1. Nilai tambah dari produktivitas sektor primer masih rendah
2. Kesenjangan ekonomi dan kemiskinan
3. Pembangunan sarana dan prasarana
4. Produktivitas dan daya saing tenaga kerja
5. laju deforestasi dan resiko bencana
6. akses pendidikan dan kesehatan

3. Isu Regional

Dalam Ranwal RPJMD Provinsi Sulawesi tenggara terdapat beberapa isu yang menjadi fokus tahun 2025-2029 yakni:

1. Pertumbuhan ekonomi belum inklusif.
2. Penurunan Angka Kemiskinan
3. Mengurangi Ketimpangan Antarkelompok dan Antarwilayah
4. Daya Saing dan Produktivitas Tenaga Kerja Tenaga Kerja Belum Optimal
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan
6. Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Penunjang lainnya
7. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik
8. Mitigasi Bencana Menuju Pembangunan Berkelanjutan

4. Isu KLHS RPJMD Konawe Tahun 2025-2029

Dalam KLHS RPJMD Konawe tahun 2025-2029 terdapat beberapa isu yang menjadi rekomendasi agar dapat diinternalisasikan ke dalam dokumen RPJMD Konawe yaitu :

1. Peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk
2. Penurunan angka kemiskinan yang masih tinggi dikalangan penduduk
3. Peningkatan distribusi dan konektivitas sarana, prasaranan, serta infrastruktur dasar wilayah
4. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan terintegrasi secara optimal dengan daya dukung wilayah
5. pengelolaan sumber daya alam, keanekaragaman hayati, serta fungsi jasa lingkungan hidup yang berkelanjutan

5. Penentuan isu strategis daerah

Untuk menentukan isu strategis daerah tahun 2025-2029 maka dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2. 79 Penentuan Isu Strategis Daerah Kab. Konawe Tahun 2025-2029

POTENSI DAERAH		PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah penduduk cukup besar dengan proporsi usia produktif mencapai sekitar 60,7%.	Kualitas sumber daya manusia masih rendah	Peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk	Tanpa Kemiskinan (<i>No Poverty</i>)	Nilai tambah dari produktivitas sektor primer masih rendah	Pertumbuhan ekonomi belum inklusif.	Peningkatan Kualitas SDM
	Bonus demografi memberikan peluang besar untuk pengembangan tenaga kerja yang produktif.	Tingkat kesejahteraan rakyat belum merata	Penurunan angka kemiskinan yang masih tinggi dikalangan penduduk	Tanpa Kelaparan (<i>Zero Hunger</i>)	Kesenjangan ekonomi dan kemiskinan	Penurunan Angka Kemiskinan	Peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk
	Terdapat peluang untuk pengembangan keterampilan melalui pelatihan vokasi dan program pengembangan SDM.	Ketergantungan pada sektor primer dan ketimpangan wilayah pembangunan	Peningkatan distribusi dan konektivitas sarana, prasarana, serta infrastruktur dasar wilayah	Kehidupan Sehat dan Sejahtera (<i>Good Health and Well-being</i>)	Pembangunan sarana dan prasarana	Mengurangi Ketimpangan Antarkelompok dan Antarwilayah	Penguatan ekonomi berbasis sektor unggulan dan hilirisasi
Sumber Daya Alam	Cadangan nikel yang melimpah, menjadi basis utama industri pengolahan dan hilirisasi.	Kondisi infrastruktur daerah belum optimal	Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan terintegrasi secara optimal dengan daya dukung wilayah	Pendidikan Berkualitas (<i>Quality Education</i>)	Produktivitas dan daya saing tenaga kerja	Daya Saing dan Produktivitas Tenaga Kerja Belum Optimal	Penguatan infrastruktur wilayah
	Potensi sektor pertanian dengan lahan luas dan subur.	Belum optimalnya tata kelola pemerintah	pengelolaan sumber daya alam, keanekaragaman hayati, serta fungsi jasa lingkungan hidup yang berkelanjutan	Kesetaraan Gender (<i>Gender Equality</i>)	laju deforestasi dan resiko bencana	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik

POTENSI DAERAH		PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Letak Geografis dan Kawasan Strategis	Potensi perikanan, baik budidaya maupun tangkap, di wilayah pesisir dan sungai.	Belum optimalnya pelestarian budaya lokal dan ekosistem		Air Bersih dan Sanitasi Layak (<i>Clean Water and Sanitation</i>)	akses pendidikan dan kesehatan	Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Penunjang lainnya	Kerentanan Terhadap Sosial Budaya dan Ekologi
	Hutan lindung yang berfungsi sebagai penyimpan karbon dan pelestarian keanekaragaman hayati.			Energi Bersih dan Terjangkau (<i>Affordable and Clean Energy</i>)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Pemerataan pembangunan wilayah dan pengurangan kesenjangan
	Posisi strategis sebagai pintu gerbang wilayah daratan Sulawesi Tenggara.			Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (<i>Decent Work and Economic Growth</i>)		Mitigasi Bencana Menuju Pembangunan Berkelanjutan	
	Dekat dengan kawasan industri besar seperti Morosi yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.			Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (<i>Industry, Innovation, and Infrastructure</i>)			
	Kawasan agropolitan dan minropolitan yang mendukung pengembangan sektor pertanian dan perkotaan.			Berkurangnya Kesenjangan (<i>Reduced Inequalities</i>)			

POTENSI DAERAH		PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Infrastruktur dan Konektivitas	Tersedianya jaringan jalan dan transportasi yang menghubungkan pusat-pusat produksi dan permukiman.			Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan (<i>Sustainable Cities and Communities</i>)			
	Infrastruktur dasar yang terus berkembang untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.			Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (<i>Responsible Consumption and Production</i>)			
	Peluang pengembangan infrastruktur digital untuk mempercepat transformasi digital daerah.			Penanganan Perubahan Iklim (<i>Climate Action</i>)			
Ekonomi dan Industri	Industri pengolahan berbasis sumber daya lokal, khususnya industri nikel yang kuat.			Ekosistem Laut (<i>Life Below Water</i>)			
	Potensi pengembangan industri kreatif dan hilirisasi produk pertanian dan perikanan.			Ekosistem Daratan (<i>Life on Land</i>)			

POTENSI DAERAH		PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	Investasi yang terus bertambah di berbagai sektor seperti perbankan, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata.			Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh (<i>Peace, Justice and Strong Institutions</i>)			
Lingkungan dan Ekologi	Stok karbon hutan yang besar mendukung ekonomi hijau dan mitigasi perubahan iklim.			Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (<i>Partnerships for the Goals</i>)			
	Keanekaragaman hayati yang kaya di kawasan hutan dan perairan.						
	Sumber daya air dan lahan yang mendukung pengembangan pertanian dan perikanan berkelanjutan.						
Pembangunan Wilayah dan Desa	Indeks Desa Membangun yang menunjukkan peningkatan desa mandiri dan maju.						
	Potensi pengembangan desa inklusif yang berkelanjutan sebagai basis pemerataan pembangunan.						

POTENSI DAERAH		PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	Kawasan sentra produksi pangan nasional yang strategis.						

Sumber; Tim Penyusun, diolah 2025

b. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Konawe masih menghadapi berbagai tantangan mendasar, khususnya dalam hal mutu pendidikan, kesehatan, dan keterampilan tenaga kerja. Permasalahan ini menjadi akar dari rendahnya daya saing daerah dan terbatasnya produktivitas masyarakat, khususnya pada usia produktif. Dalam bidang pendidikan, mutu layanan dan pemerataan akses masih belum optimal. Masih banyak anak usia sekolah yang putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) masih rendah, sementara fasilitas pendidikan seperti ruang kelas, sarana pembelajaran, serta distribusi guru belum merata dan belum sepenuhnya mendukung proses pembelajaran yang bermutu. Selain itu, rendahnya literasi dan minat baca juga menunjukkan lemahnya budaya belajar yang berkelanjutan di tengah masyarakat.

Kesenjangan mutu dan akses terhadap pendidikan juga berdampak langsung pada rendahnya keterampilan angkatan kerja. Sebagian besar lulusan belum memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja, menyebabkan rendahnya produktivitas dan tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Rendahnya partisipasi dalam pelatihan vokasional dan minimnya program pengembangan keterampilan berbasis industri menjadi salah satu penyebab tidak terserapnya angkatan kerja secara optimal.

Dari sisi kesehatan, masih terdapat kesenjangan layanan dasar terutama di daerah yang sulit dijangkau. Masalah seperti kematian ibu dan bayi, cakupan imunisasi yang belum merata, angka stunting yang tinggi, serta akses layanan kesehatan yang terbatas menjadi tantangan dalam menciptakan SDM yang sehat. Fasilitas kesehatan belum memadai dan distribusi tenaga medis masih timpang, khususnya di Puskesmas dan layanan kesehatan primer.

Selain itu, tantangan baru di era digital juga memerlukan perhatian serius. Tingkat literasi digital masyarakat masih rendah, baik dari aspek pemanfaatan teknologi informasi untuk pembelajaran, pekerjaan, maupun

kewirausahaan. Ini berdampak pada rendahnya kesiapan masyarakat untuk bersaing dalam ekonomi digital dan industri berbasis teknologi.

c. Peningkatan Kualitas Hidup dan kesejahteraan penduduk

Isu kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk di Kabupaten Konawe menjadi aspek strategis yang sangat penting dalam upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Permasalahan ketimpangan sosial dan ekonomi yang masih dirasakan oleh sebagian masyarakat menunjukkan masih terbatasnya pemerataan hasil pembangunan, terutama dalam akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, perumahan layak, dan perlindungan sosial.

Kondisi ini diperparah oleh tingkat pengangguran, keterbatasan peluang kerja yang layak, dan masih tingginya angka pekerja sektor informal yang tidak memiliki jaminan perlindungan sosial. Penduduk usia produktif yang tidak memiliki keterampilan memadai atau akses terhadap pelatihan kerja berpotensi terjebak dalam siklus kemiskinan. Di sisi lain, sebagian masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan atau terpencil mengalami kesenjangan akses terhadap layanan publik, termasuk infrastruktur dasar dan pelayanan sosial yang memadai.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rentan juga dipengaruhi oleh tantangan-tantangan struktural, seperti urbanisasi yang tidak terencana, permasalahan kependudukan (pertumbuhan yang tidak merata), serta terbatasnya intervensi sosial yang tepat sasaran. Kelompok masyarakat tertentu seperti lansia, penyandang disabilitas, anak-anak, dan perempuan kepala keluarga membutuhkan perhatian lebih melalui kebijakan afirmatif dan dukungan sosial yang berkelanjutan.

Peningkatan kualitas hidup tidak hanya bergantung pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga memerlukan penciptaan lingkungan yang sehat, aman, dan inklusif. Oleh karena itu, pembangunan sosial di Kabupaten Konawe ke depan harus diarahkan untuk memperkuat peran keluarga dan komunitas, menyediakan pelayanan sosial yang adil dan terjangkau, serta memberdayakan masyarakat melalui pendekatan berbasis lokal dan partisipatif.

Penjaminan pemenuhan hak-hak dasar penduduk dan peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat akan menjadi kunci utama dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan. Melalui kebijakan yang responsif dan pelayanan publik yang berkualitas, Pemerintah Kabupaten Konawe dituntut untuk mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, tanpa ada yang tertinggal.

d. Penguatan Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan dan Hilirisasi

Pembangunan ekonomi Kabupaten Konawe diarahkan untuk mendorong pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan melalui pemanfaatan potensi sektor unggulan yang dimiliki daerah secara optimal. Kabupaten Konawe memiliki keunggulan strategis pada sektor pertambangan, pertanian, perikanan, dan industri pengolahan, termasuk potensi pengembangan industri kreatif. Namun demikian, belum optimalnya hilirisasi komoditas unggulan menjadi tantangan serius dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah.

Sektor pertambangan, khususnya nikel, merupakan salah satu pilar utama ekonomi Konawe. Namun, kontribusi sektor ini terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat masih terbatas karena dominasi kegiatan pada tahap hulu (ekstraksi) dan belum sepenuhnya berkembang ke arah hilirisasi industri. Padahal, keberadaan kawasan industri seperti Morosi seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berbasis manufaktur dan industri pengolahan.

Di sektor pertanian dan perikanan, Konawe memiliki potensi produksi yang melimpah, tetapi masih menghadapi kendala pada sisi produktivitas, infrastruktur pascapanen, dan akses pasar. Diversifikasi komoditas unggulan belum maksimal, sementara nilai tambah dari hasil pertanian dan perikanan masih rendah akibat minimnya fasilitas pengolahan dan industri rumah tangga berbasis lokal. Akibatnya, kontribusi sektor-sektor ini terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penyerapan tenaga kerja belum optimal.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih berkualitas, kebijakan pembangunan ekonomi Konawe perlu difokuskan pada transformasi struktural yang berbasis sektor unggulan melalui hilirisasi

dan peningkatan produktivitas. Hal ini mencakup penguatan riset dan inovasi produk unggulan, pembangunan kawasan industri lokal, fasilitasi investasi yang berorientasi nilai tambah, serta dukungan infrastruktur ekonomi dan logistik yang memadai.

Selain itu, sinergi lintas sektor perlu diperkuat agar program penguatan sektor unggulan dan hilirisasi dapat mendorong terciptanya lapangan kerja, peningkatan ekspor, dan tumbuhnya ekonomi kreatif lokal. Dengan langkah-langkah strategis ini, Kabupaten Konawe dapat mempercepat pembangunan ekonomi yang berdaya saing tinggi dan inklusif bagi seluruh masyarakat.

e. Penguatan Infrastruktur Wilayah

Pembangunan infrastruktur wilayah merupakan faktor kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Di Kabupaten Konawe, kondisi infrastruktur dasar dan penunjang masih menghadapi berbagai kendala baik dari sisi pemerataan, kualitas, maupun keterjangkauan antarwilayah. Hal ini terutama dirasakan di wilayah pedesaan, pesisir, dan daerah pinggiran yang belum sepenuhnya terkoneksi dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

Infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, listrik, dan fasilitas pendidikan serta kesehatan, merupakan kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi secara merata untuk mendorong peningkatan produktivitas masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Keterbatasan infrastruktur jalan yang layak menjadi hambatan dalam distribusi barang, jasa, serta mobilitas penduduk, yang berdampak langsung pada daya saing wilayah dan efektivitas pelayanan pemerintahan.

Selain itu, tantangan pembangunan juga meliputi keterbatasan infrastruktur digital yang berperan penting dalam mendukung transformasi digital pemerintahan dan dunia usaha. Pemerataan akses internet, peningkatan kapasitas jaringan komunikasi, serta digitalisasi layanan publik menjadi kebutuhan penting seiring dengan meningkatnya tuntutan efisiensi dan keterjangkauan layanan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Konawe perlu mempercepat pembangunan dan pemerataan infrastruktur wilayah, baik fisik maupun digital, dengan pendekatan wilayah yang berkeadilan.

Intervensi strategis diarahkan pada: Peningkatan konektivitas antarwilayah dan kawasan melalui pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan, Penyediaan infrastruktur dasar berbasis kebutuhan masyarakat perdesaan, Percepatan pembangunan sistem penyediaan air minum dan sanitasi yang layak, Pengembangan kawasan strategis dan pusat pertumbuhan ekonomi baru, Digitalisasi layanan publik dan perluasan akses internet ke wilayah terpencil.

Dengan penguatan infrastruktur wilayah yang merata dan inklusif, Kabupaten Konawe diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta memperkuat kapasitas pelayanan publik yang efektif dan efisien.

f. Optimalisasi tata kelola pemerintahan yang baik

Dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas, Pemerintah Kabupaten Konawe memandang perlu untuk melanjutkan reformasi birokrasi secara menyeluruh. Isu strategis ini diarahkan pada peningkatan akuntabilitas dan kinerja aparatur, profesionalisme ASN, serta efisiensi pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Tantangan utama yang dihadapi meliputi rendahnya kualitas layanan publik yang belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan masyarakat, masih terbatasnya kapasitas aparatur dalam menjalankan tugas berbasis sistem merit, serta belum optimalnya keterbukaan informasi dan partisipasi publik dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Konawe menekankan pada: Penguatan kapasitas dan integritas aparatur, Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, Pemanfaatan teknologi digital, Penguatan koordinasi antar perangkat daerah, Peningkatan kualitas kelembagaan. Dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance), Pemerintah Kabupaten Konawe berharap mampu meningkatkan kepercayaan publik, mendorong partisipasi masyarakat, serta menciptakan iklim pemerintahan yang kondusif bagi percepatan pembangunan daerah.

g. Kerentanan Terhadap Sosial, Budaya, dan Ekologi

Kabupaten Konawe menghadapi tantangan serius dalam bentuk meningkatnya kerentanan terhadap bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, abrasi, dan potensi gempa bumi. Kerentanan ini diperburuk oleh menurunnya kualitas lingkungan akibat alih fungsi lahan, aktivitas pertambangan yang belum sepenuhnya terkendali, degradasi kawasan hutan dan pesisir, serta belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Di sisi lain, dampak perubahan iklim global semakin memperbesar risiko bencana hidrometeorologis, seperti meningkatnya frekuensi banjir dan kekeringan, serta potensi kerusakan wilayah pesisir akibat abrasi dan gelombang tinggi. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konservasi lingkungan, pengelolaan sampah, serta rendahnya pemanfaatan energi terbarukan turut memperparah tekanan terhadap daya dukung ekosistem.

Selain tantangan ekologis, Kabupaten Konawe juga menghadapi risiko sosial dan budaya, termasuk menurunnya pelestarian nilai-nilai budaya lokal, perubahan sosial akibat urbanisasi dan modernisasi, serta lemahnya ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi bencana maupun tekanan eksternal lainnya. Kondisi ini diperburuk oleh belum optimalnya kapasitas adaptif dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, serta kurangnya ruang partisipatif dalam pelestarian budaya dan lingkungan.

Kerentanan sosial, budaya, dan ekologi ini harus dipandang secara integratif sebagai hambatan nyata terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam hal perlindungan ekosistem darat dan laut, adaptasi terhadap perubahan iklim, pengurangan risiko bencana, serta pelestarian warisan budaya dan kearifan lokal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kesadaran kolektif, kapasitas kelembagaan, serta sinergi antarsektor dalam membangun ketahanan sosial-ekologis masyarakat Konawe.

h. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Pengurangan Kesenjangan

Ketimpangan pembangunan antarwilayah di Kabupaten Konawe masih menjadi tantangan utama yang menghambat pemerataan hasil

pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Ketimpangan ini mencakup aspek sosial, ekonomi, dan infrastruktur yang belum berkembang secara proporsional di seluruh wilayah kecamatan, terutama di desa tertinggal dan wilayah perdesaan.

Akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, serta infrastruktur transportasi masih belum merata. Daerah-daerah terpencil masih mengalami keterbatasan dalam jangkauan pelayanan publik dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi, sehingga memperlambat pertumbuhan wilayah dan memperlebar kesenjangan dengan wilayah yang lebih maju.

Perbedaan kualitas sumber daya manusia, tingkat kemiskinan yang bervariasi, serta rendahnya tingkat investasi di wilayah tertentu juga menjadi faktor yang memperdalam ketimpangan antardaerah. Kondisi geografis yang menantang dan keterbatasan anggaran turut memperkuat kesenjangan dalam pembangunan wilayah, khususnya antara wilayah pesisir, dataran rendah, dan daerah hinterland yang belum sepenuhnya terkoneksi secara fisik dan ekonomi.

Selain itu, terdapat kesenjangan pendapatan dan kesempatan kerja antar kelompok sosial yang disebabkan oleh disparitas akses terhadap pendidikan dan keterampilan kerja. Hal ini berpotensi menimbulkan eksklusi sosial dan memperkuat siklus kemiskinan di kelompok masyarakat tertentu. Kesenjangan ini tidak hanya berimplikasi terhadap rendahnya daya saing daerah dan terbatasnya pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan melemahkan kohesi sosial di masyarakat. Untuk itu, pembangunan di Kabupaten Konawe perlu didorong secara inklusif, dengan memastikan distribusi pembangunan yang lebih adil dan merata di seluruh wilayah dan kelompok masyarakat.

BAB III

VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Visi, Misi Dan Tujuan Sasaran Daerah

3.1.1 Visi dan Misi

A. Visi

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan merata di Kabupaten Konawe, serta menjawab tantangan dan harapan masyarakat menuju masa depan yang lebih sejahtera, Bupati Konawe periode 2025–2029 menetapkan visi dan misi sebagai landasan arah pembangunan daerah. Visi dan misi ini dirumuskan berdasarkan potensi unggulan daerah, dinamika sosial-ekonomi, serta aspirasi masyarakat yang berkembang, dengan komitmen kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Visi dan misi ini menjadi pedoman strategis dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka visi pembangunan Konawe yang hendak dicapai periode tahun 2025-2029 adalah:

***“KONAWA YANG BERDAYA SAING, SEJAHTERA, ADIL DAN
BERKELANJUTAN”***

Visi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

BERDAYA SAING

Kabupaten Konawe memiliki kemampuan untuk bersaing secara efektif di tingkat regional, nasional, bahkan internasional. Ini mencakup keunggulan dalam produktivitas, inovasi, kualitas sumber daya manusia, dan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik

SEJAHTERA

Masyarakat Konawe menikmati kualitas hidup yang baik, termasuk kemakmuran ekonomi, akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, terpenuhinya kebutuhan dasar serta kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis

ADIL

Pembangunan dan kesejahteraan didistribusikan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat dan wilayah di Kabupaten Konawe, tanpa diskriminasi. Setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan.

BERKELANJUTAN

Pembangunan Konawe dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan. Kemajuan yang akan dicapai saat ini tidak akan mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang.

B. Misi

Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, diperlukan misi-misi strategis yang menjabarkan langkah-langkah nyata dan terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Misi disusun sebagai penjabaran operasional dari visi, agar setiap aspek pembangunan memiliki fokus dan arah yang selaras dengan tujuan jangka panjang daerah. Misi-misi ini mencerminkan komitmen Bupati Konawe periode 2025–2029 dalam menjawab berbagai tantangan daerah, mengoptimalkan potensi yang dimiliki, serta memastikan seluruh kebijakan berpihak pada kepentingan rakyat. Melalui misi yang terstruktur dan berorientasi hasil, diharapkan pembangunan Konawe dapat dilaksanakan secara efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Misi tercapainya visi tersebut dirumuskan dalam 6 misi utama pembangunan Konawe sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan akses Pendidikan dan layanan Kesehatan yang berkualitas
2. Meningkatkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi lokal dan inovasi teknologi
3. Mengoptimalkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan partisipatif
4. Memperkuat ketahanan sosial dan budaya masyarakat dengan melestarikan kearifan lokal, nilai-nilai tradisional, dan kerukunan antarumat beragama

5. Menerapkan pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
6. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur antara desa dan kota

Keenam misi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

MISI 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pemerataan Akses Pendidikan dan Layanan Kesehatan Yang Berkualitas

Pendidikan dan kesehatan merupakan investasi jangka panjang untuk masa depan Konawe. Misi ini akan fokus pada perluasan dan peningkatan mutu fasilitas pendidikan dan kesehatan, termasuk sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, dan puskesmas di seluruh wilayah. Program-program seperti beasiswa, pelatihan vokasi, dan pendidikan karakter akan diimplementasikan untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja lokal. Di bidang kesehatan, akan dilakukan peningkatan layanan preventif dan kuratif, serta program-program kesehatan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan gaya hidup sehat. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas, Konawe akan lebih siap menghadapi tantangan global dan memanfaatkan peluang pembangunan.

Untuk memperkuat upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Konawe, akan dikembangkan program-program inovatif yang mengintegrasikan teknologi dan kearifan lokal. Di bidang pendidikan, akan diimplementasikan sistem pembelajaran berbasis digital yang memungkinkan akses terhadap materi pendidikan berkualitas tinggi, bahkan di daerah terpencil. Kemitraan dengan industri lokal akan dibentuk untuk mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, terutama di sektor unggulan seperti pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Dalam aspek kesehatan, akan diperkenalkan sistem *telemedicine* yang menghubungkan puskesmas di desa dengan rumah sakit rujukan di kota, memungkinkan konsultasi jarak jauh dan peningkatan kualitas layanan kesehatan di daerah terpencil.

MISI 2: Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Desa Melalui Pengembangan Potensi Lokal dan Inovasi Teknologi Pertanian

Dalam upaya mewujudkan misi tersebut, Kabupaten Konawe akan mengembangkan program-program terintegrasi yang menghubungkan sektor pertanian, pariwisata, dan UMKM. Di bidang pertanian, akan diimplementasikan sistem pertanian presisi berbasis teknologi, seperti penggunaan drone untuk pemetaan lahan dan pemantauan tanaman, serta aplikasi mobile untuk manajemen pertanian. Hal ini akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas petani lokal. Sektor pariwisata akan dikembangkan melalui konsep desa wisata yang menampilkan keunikan pertanian dan budaya setempat, seperti wisata petik buah, festival panen, dan demonstrasi pengolahan hasil pertanian tradisional. Ini akan menciptakan sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat desa dan mempromosikan produk lokal.

Sementara itu, UMKM akan didorong untuk mengolah hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah tinggi, seperti makanan olahan, kosmetik alami, atau kerajinan berbahan dasar pertanian. Program pelatihan e-commerce dan digital marketing akan membantu UMKM memperluas jangkauan pasar mereka. Dengan mengintegrasikan ketiga sektor ini, Konawe dapat menciptakan rantai nilai yang kuat, di mana pertanian menyediakan bahan baku, pariwisata menjadi sarana promosi, dan UMKM berperan sebagai penggerak ekonomi kreatif. Sinergi ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk lokal, menciptakan lapangan kerja baru, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara signifikan.

MISI 3: Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, dan Partisipatif

Untuk mendukung optimalisasi tata kelola pemerintahan dalam konteks pembangunan daerah, Kabupaten Konawe akan menerapkan sistem e-government yang terintegrasi dari tingkat desa hingga kabupaten. Sistem ini akan mencakup platform pelaporan dan pemantauan proyek pembangunan secara real-time, yang dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini akan meningkatkan transparansi dan memungkinkan partisipasi publik

dalam pengawasan pelaksanaan program pemerintah. Selain itu, akan dibentuk tim khusus yang terdiri dari perwakilan pemerintah, akademisi, dan masyarakat untuk melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan dan program pembangunan.

Pelatihan kepemimpinan dan manajemen publik akan diberikan secara rutin kepada aparatur pemerintah di semua tingkatan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam memberikan layanan publik yang berkualitas. Untuk mendorong inovasi dalam tata kelola, akan diadakan kompetisi tahunan antar desa dan kecamatan dalam mengimplementasikan program pembangunan yang kreatif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan dapat tercipta budaya pemerintahan yang responsif, inovatif, dan berorientasi pada hasil, sehingga dapat mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Konawe secara menyeluruh.

MISI 4: Memperkuat Ketahanan Sosial dan Budaya Masyarakat Dengan Melestarikan Kearifan Lokal, Nilai-Nilai Tradisional, dan Kerukunan Antar Umat Beragama

Langkah ini adalah upaya untuk mempertahankan identitas dan kohesi sosial di tengah arus modernisasi. Misi ini akan melibatkan program-program pelestarian budaya seperti festival seni tradisional, revitalisasi bahasa daerah, dan dokumentasi pengetahuan lokal. Selain itu, akan dipromosikan dialog antar agama dan etnis untuk membangun pemahaman dan toleransi. Penguatan lembaga adat dan organisasi masyarakat juga akan dilakukan untuk memelihara nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Dengan ketahanan sosial dan budaya yang kuat, masyarakat Konawe diharapkan dapat mempertahankan jati dirinya sambil tetap terbuka terhadap kemajuan dan perkembangan global.

Pengembangan konsep pariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal di Konawe akan menjadi katalis untuk memperkuat ketahanan sosial dan budaya sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain paket wisata "Sehari Menjadi Warga Lokal", Konawe juga akan mengadakan festival budaya tahunan yang menampilkan keragaman seni, kuliner, dan tradisi dari berbagai etnis di daerah ini. Festival ini akan menjadi ajang bagi seniman

lokal untuk menampilkan karya mereka, sekaligus menjadi daya tarik wisata yang unik. Desa-desa adat akan didorong untuk mengembangkan produk wisata khas, seperti tur pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal atau kelas memasak makanan tradisional. Untuk mendukung ini, akan diadakan pelatihan bagi masyarakat lokal tentang manajemen homestay, pemandu wisata budaya, dan pemasaran digital produk wisata.

MISI 5: Menerapkan Pembangunan Berkelanjutan Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan

Misi ini akan melibatkan implementasi kebijakan dan program yang mendorong praktik-praktik ramah lingkungan dalam industri dan pertanian, pengembangan energi terbarukan, serta konservasi hutan dan keanekaragaman hayati. Pengelolaan sampah dan limbah yang efektif, serta edukasi masyarakat tentang gaya hidup berkelanjutan juga akan menjadi prioritas. Dalam aspek budaya, akan dilakukan upaya pelestarian situs-situs bersejarah dan promosi wisata budaya yang berkelanjutan. Dengan pendekatan pembangunan yang holistik ini, kita akan berupaya untuk memastikan kesejahteraan jangka panjang bagi generasi saat ini dan masa depan. Kita berkomitmen kuat untuk menempatkan keberlanjutan lingkungan dan pelestarian budaya sebagai pilar utama dalam pembangunan, dengan tetap fokus pada praktik ramah lingkungan, konservasi sumber daya alam, dan perlindungan warisan budaya untuk masa depan generasi Konawe.

MISI 6: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Antara Desa dan Kota

Upaya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur antara desa dan kota untuk mengurangi kesenjangan wilayah merupakan upaya strategis untuk memastikan pertumbuhan yang seimbang di seluruh Kabupaten Konawe. Misi ini mencakup pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi di daerah pedesaan, serta pengembangan fasilitas publik seperti pasar, sekolah, dan pusat kesehatan. Dengan memperbaiki konektivitas dan aksesibilitas, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, dan menciptakan peluang investasi yang lebih merata di seluruh wilayah Konawe.

Pemerataan pembangunan infrastruktur akan membuka peluang besar untuk pengembangan ekonomi lokal yang lebih dinamis. Pembangunan jalan yang menghubungkan desa-desa terpencil dengan pusat kota akan memudahkan akses wisatawan ke destinasi ekowisata atau desa wisata yang belum terjamah, menciptakan potensi baru dalam industri pariwisata Konawe. Infrastruktur telekomunikasi yang memadai akan memungkinkan pelaku UMKM di pedesaan untuk memanfaatkan platform e-commerce dan media sosial, memperluas jangkauan pasar mereka ke tingkat nasional bahkan internasional.

3.1.2. Tujuan Dan Sasaran Daerah

Tujuan dan sasaran adalah hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis.

Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan kedalam sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Sasaran RPJMD selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi Kepala daerah terpilih, sekurang-kurangnya berisasisasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Hal ini dimaksudkan agar sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Konawe merupakan sarana untuk melaksanakan dan sekaligus upaya untuk mewujudkan sasaran dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Konawe Tahun 2025-2045.

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur. Indikator kinerja tersebut merupakan tolok ukur keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati Konawe. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib pelayanan dasar dan wajib non pelayanan dasar, maupun urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintah dalam

mendukung pelaksanaan misi RPJMD. Perumusan tujuan dan sasaran menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan indikator kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Indikator kinerja Kepala Daerah selanjutnya diterjemahkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah didukung oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Dengan demikian, apa yang ingin dicapai atau diubah dalam pembangunan 5 (lima) tahun kedepan menjadi semakin jelas dan dapat diukur pencapaiannya. Berdasarkan hasil perumusan, maka ditetapkan tujuan dan sasaran masing-masing misi yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut:

Misi 1

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pemerataan Akses Pendidikan dan Layanan Kesehatan Yang Berkualitas dengan tujuan ***“Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul”***

Sasaran dari tujuan yang dimaksud adalah:

1. Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat
- Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat

Misi 2

Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Desa Melalui Pengembangan Potensi Lokal dan Inovasi Teknologi Pertanian, dengan tujuan ***“Mewujudkan Struktur Ekonomi yang Inklusif dan Bedaya Saing”***

Sasaran dari tujuan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pemerataan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penciptaan Lapangan Kerja dan Penguatan Ekonomi Lokal yang Inklusif
2. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi

Misi 3

Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, dan Partisipatif dengan tujuan ***“Meningkatnya efektivitas, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan responsif”***

Sasaran dari tujuan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan antikorupsi

Misi 4

Memperkuat Ketahanan Sosial dan Budaya Masyarakat Dengan Melestarikan Kearifan Lokal, Nilai-Nilai Tradisional, dan Kerukunan Antar Umat Beragama, yang mana tujuannya adalah ***“Meningkatkan Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat”***

Sasaran dari tujuan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Terlestarnya Tradisi, Seni dan Praktik Budaya Lokal sebagai Identitas Masyarakat
2. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman, dan toleran melalui penguatan kerukunan antar umat beragama serta penurunan angka kriminalitas
3. Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif

Misi 5

Menerapkan Pembangunan Berkelanjutan Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan. Tujuannya adalah ***“Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Ekosistem Melalui Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan”***

Sasaran dari tujuan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Kemandirian Pangan yang Berkelanjutan
2. Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas dan Resiliensi terhadap Bencana

Misi 6

Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Antara Desa dan Kota, yang bertujuan untuk ***“Meningkatkan Aksesibilitas dan Pemerataan Infrastruktur Dasar yang Mendukung Konektivitas Wilayah, Pelayanan Publik, dan Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah”***

Sasaran dari tujuan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya konektivitas wilayah dan pemerataan akses infrastruktur dasar untuk menurunkan disparitas antar wilayah.

Tabel 3. 1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029

NO	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM					
					TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030
					TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
VISI : KONAWE YANG BERDAYA SAING, SEJAHTERA, ADIL DAN BERKELANJUTAN										
I	MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN DAN LAYANAN KESEHATAN YANG BERKUALITAS									
1.1	Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	74,50	75,10	75,50	75,70	76,10	76,50	76,90
1.1.1	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	70,61	70,71	70,81	70,91	71,01	71,11	71,21
1.1.2	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	Rata Rata Lama Sekolah	Tahun	9,69	9,75	10,09	10,43	10,77	11,11	11,45
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,05	13,26	13,36	13,46	13,56	13,66	13,76
II	MENINGKATKAN DAYA SAING EKONOMI DAERAH MELALUI PENGEMBANGAN POTENSI LOKAL DAN INOVASI TEKNOLOGI									
2.1	Mewujudkan Struktur Ekonomi yang Inklusif dan Bedaya Saing	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,26	3,34	3,42	3,50	3,58	3,66	3,74
		PDRB Per Kapita	Rp. Juta Per Tahun	45,88	50,76	56,51	63,44	71,65	81,52	93,26
		Rasio Gini	Angka	0,302	0,300	0,298	0,295	0,293	0,290	0,288
2.1.1	Meningkatnya Pemerataan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penciptaan Lapangan Kerja dan Penguatan Ekonomi Lokal yang Inklusif	Angka Kemiskinan	%	13,27	12,27	12,25	10,12	9,05	8,07	7,09
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,95	2,88	2,75	2,70	2,50	2,10	2,00
2.1.2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	11,82	15,43	18,32	17,28	16,16	14,79	13,52

NO	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM					
					TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030
					TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
III	MENGOPTIMALKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKIF DAN PARTISIPATIF									
3.1	Meningkatkan Efektivitas, Akuntabilitas, dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Transparan dan Responsif	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Nilai	65,82	68,00	71,00	73,00	76,00	79,00	81,00
3.1.1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Antikorupsi	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	69,01	69,01	71,00	74,00	75,50	77,00	78,50
		Nilai SAKIP	Nilai	67,27	68,00	71,00	73,00	76,00	79,00	81,00
		Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (IPKD MCSP)	Nilai	58,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Nilai Capaian Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Nilai	3,406	3,550	3,700	3,850	4,000	4,200	4,500
		Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai	88,87	89,87	90,37	90,87	91,37	91,87	92,37
IV	MEMPERKUAT KETAHANAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT DENGAN MELESTARIKAN KEARIFAN LOKAL, NILAI-NILAI TRADISIONAL, DAN KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA.									
4.1	Meningkatkan Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Nilai	-	55,00	57,00	59,50	62,00	64,50	67,00
4.1.1	Terfestarinya Tradisi, Seni dan Praktik Budaya Lokal sebagai Identitas Masyarakat	Persentase Tradisi, Seni, Cagar, dan Warisan Budaya yang Dilestarikan	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.1.2	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman, dan toleran melalui penguatan kerukunan antar umat beragama serta penurunan angka kriminalitas	Angka Kriminalitas (crime rate)	Per 100.000 penduduk	193,95	129,00	128,00	127,00	103,27	103,11	103,00
		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Nilai	-	85,00	88,00	91,00	94,00	97,00	100,00
4.1.3	Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	93,81	93,65	93,80	93,95	94,10	94,25	94,40

NO	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM					
					TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030
					TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
V	MENERAPKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DENGAN MEMPERHATIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN									
5.1	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Ekosistem Melalui Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	-	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00
5.1.1	Terwujudnya Kemandirian Pangan yang Berkelanjutan	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	17,14	15,80	14,50	13,20	11,90	10,50	9,00
5.1.2	Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas dan Resiliensi terhadap Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	79,31	82,65	82,82	83,00	83,17	83,34	83,34
		Indeks Resiko Bencana	Nilai	155,79	155,59	155,39	155,19	154,90	154,70	154,50
VI	MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR ANTARA DESA DAN KOTA									
6.1	Meningkatkan Aksesibilitas dan Pemerataan Infrastruktur Dasar yang Mendukung Konektivitas Wilayah, Pelayanan Publik, dan Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah	Indeks Infrastruktur	Nilai	-	50,00	51,50	53,00	54,50	56,00	57,50
6.1.1	Meningkatnya Konektivitas Wilayah dan Pemerataan Akses Infrastruktur Dasar untuk Menurunkan Disparitas Antar Wilayah	Rasio konektivitas kab/kota	Nilai	85,62	85,62	87,00	88,00	89,00	90,00	91,00
		Persentase Desa Mandiri	%	0,000	0,003	0,014	0,021	0,027	0,034	0,041

Sumber; Tim Penyusun

3.2 Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Strategi dan arah kebijakan merupakan bagian penting dari perencanaan yang bersifat komprehensif dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2025–2029 secara efektif dan efisien. Perencanaan ini disusun melalui pengagendaan berbagai program pembangunan daerah yang mendukung pencapaian visi dan misi sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya. Penyusunan strategi dan arah kebijakan tersebut dilakukan secara selaras dengan misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah, serta menjadi dasar dalam pelaksanaan transformasi, reformasi, dan peningkatan kinerja birokrasi. Untuk mencapai visi dan misi yang telah dirumuskan, maka dibutuhkan strategi, arah kebijakan, serta program pembangunan yang terarah dan berkelanjutan untuk periode berikutnya, yaitu tahun 2025–2029. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, arah kebijakan dalam RPJMD juga harus memuat tahapan pembangunan tahunan (milestone) sebagai panduan bagi Kabupaten Konawe dalam menjalankan pembangunan di periode tersebut.

Setiap program pembangunan dilengkapi dengan indikator kinerja yang berfungsi sebagai instrumen perencanaan dan pengendalian pembangunan tahunan, sehingga perkembangan hasil pembangunan dapat diukur dengan jelas hingga akhir periode RPJMD. Indikator kinerja program yang disusun dalam bentuk hasil (*outcomes*) menjadi acuan utama dalam menentukan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh OPD yang memiliki tanggung jawab kewenangan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun penunjang. Rancangan proyektif mengenai rencana atau target capaian juga disajikan untuk setiap tahun perencanaan selama kurun waktu lima tahun, memberikan gambaran tentang prospek pencapaian target serta menjadi acuan kinerja bagi setiap OPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Berkaitan dengan hal tersebut, kebutuhan pendanaan untuk setiap program prioritas juga digambarkan secara proyektif, berdasarkan hasil evaluasi terhadap kerangka pendanaan yang dapat dicapai pada lima tahun anggaran terakhir.

3.2.1 Tahapan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029



Gambar 3. 1 Penahapan Pembangunan Kabupaten Konawe

Pentahapan pembangunan merupakan langkah strategis yang dijadikan prioritas pembangunan tahunan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kepala Daerah. Dalam konteks Kabupaten Konawe, fokus kebijakan pembangunan daerah untuk periode tahun 2025–2029 telah ditetapkan secara terarah dan berkelanjutan. Penetapan fokus ini mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah dalam menjawab tantangan pembangunan serta mengoptimalkan potensi daerah

Tahap 1 (Tahun 2026): Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui pemerataan akses pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas

Pada tahap pertama tahun 2026, fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan akses pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas. Upaya ini dilakukan dengan memperluas jangkauan fasilitas kesehatan serta meningkatkan mutu layanan kesehatan dasar agar kualitas kesehatan masyarakat semakin baik. Di bidang pendidikan, pemerintah mendorong pemerataan akses pendidikan formal dan non-formal serta peningkatan kualitas pembelajaran guna meningkatkan derajat pendidikan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan di seluruh wilayah.

Tahap 2 (Tahun 2027): Meningkatkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi lokal dan inovasi teknologi

Pada tahap kedua tahun 2027, fokus pembangunan daerah diarahkan pada peningkatan daya saing ekonomi Kabupaten Konawe melalui

optimalisasi potensi lokal dan inovasi teknologi di sektor pertanian. Upaya ini bertujuan mendorong pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja baru serta memperkuat ekonomi lokal yang inklusif. Pengembangan sektor pertanian modern diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian daerah, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Dengan demikian, pembangunan ekonomi daerah tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi Kabupaten Konawe secara berkelanjutan.

Tahap 3 (Tahun 2028): Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan partisipatif serta Memperkuat ketahanan sosial dan budaya masyarakat dengan melestarikan kearifan lokal, nilai-nilai tradisional, dan kerukunan antar umat beragama.

Pada tahap ketiga tahun 2028, fokus pembangunan Kabupaten Konawe diarahkan pada optimalisasi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan partisipatif, dengan menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pencegahan korupsi. Selain itu, penguatan ketahanan sosial dan budaya masyarakat dilakukan melalui upaya pelestarian tradisi, seni, dan praktik budaya lokal yang menjadi identitas daerah. Penguatan kerukunan antar umat beragama juga menjadi prioritas guna menjaga harmoni sosial. Pemerintah berkomitmen mewujudkan keluarga berkualitas melalui kebijakan yang mendukung kesetaraan gender serta mendorong terbangunnya masyarakat yang inklusif. Dengan strategi ini, diharapkan tercipta masyarakat Konawe yang berdaya secara sosial dan budaya sekaligus memiliki tata kelola pemerintahan yang profesional dan terpercaya.

Tahap 4 (Tahun 2029): Menerapkan pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan serta Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur antara desa dan kota

Pada tahap 4 tahun 2029, fokus pembangunan diarahkan pada penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan kelestarian lingkungan sekaligus mewujudkan pemerataan infrastruktur antara desa dan kota. Upaya ini ditandai dengan peningkatan pemerataan pembangunan antar desa, khususnya melalui pengurangan kesenjangan antara desa tertinggal dengan desa berkembang maupun desa maju. Pemerintah daerah juga mendorong terwujudnya pemerataan infrastruktur dasar di seluruh wilayah sebagai fondasi utama untuk mempercepat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu, kemandirian

pangan yang berkelanjutan menjadi prioritas melalui penguatan sektor pertanian berbasis potensi lokal dan teknologi ramah lingkungan. Peningkatan kualitas lingkungan hidup turut menjadi perhatian penting dengan pengelolaan sumber daya alam secara lestari serta penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko bencana. Keseluruhan strategi ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan pembangunan yang inklusif dan ramah lingkungan di seluruh kawasan.

Tahap 5 (Tahun 2030): KONAWE Yang Berdaya Saing, Sejahtera, Adil Dan Berkelanjutan

Konawe menjadi daerah yang mampu bersaing di tingkat regional, nasional, bahkan internasional melalui peningkatan produktivitas, inovasi, kualitas sumber daya manusia, dan penguatan infrastruktur pendukung. Masyarakatnya diharapkan menikmati kualitas hidup yang layak, termasuk kesejahteraan ekonomi, akses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta terpenuhinya kebutuhan dasar. Pemerataan pembangunan menjadi fokus agar seluruh lapisan masyarakat mendapatkan manfaat secara adil tanpa diskriminasi. Pembangunan dilakukan berlandaskan prinsip keberlanjutan demi keseimbangan ekonomi, sosial, dan kelestarian lingkungan.

Tabel 3. 2 Tujuan, Sasaran dan Strategis Daerah

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
VISI : "KONAWE YANG BERDAYA SAING, SEJAHTERA, ADIL DAN BERKELANJUTAN"		
MISI 1 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pemerataan akses pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas		
Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul	Sasaran 1. Meningkatya kualitas layanan Kesehatan masyarakat	Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan secara merata di seluruh wilayah
		Digitalisasi layanan kesehatan dan peningkatan manajemen informasi kesehatan
	Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas layanan Pendidikan Masyarakat	Pemerataan akses pendidikan dasar dan menengah yang layak dan terjangkau
		Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan
MISI 2 : Meningkatkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi lokal dan inovasi teknologi		

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
VISI : "KONAWA YANG BERDAYA SAING, SEJAHTERA, ADIL DAN BERKELANJUTAN"		
Mewujudkan Struktur Ekonomi yang Inklusif dan Bedaya Saing	Sasaran 1. Meningkatnya Pemerataan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penciptaan Lapangan Kerja dan Penguatan Ekonomi Lokal yang Inklusif	Pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal
		Penguatan jaringan ekonomi lokal
		Perlindungan sosial ekonomi kelompok rentan
	Sasaran 2. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Penguatan sektor produktif utama
		Peningkatan investasi dan kemudahan berusaha
		Pengembangan infrastruktur ekonomi
MISI 3 : Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efefik dan partisipatif		
Meningkatkan Efektivitas, Akuntabilitas, dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Transparan dan Responsif	Sasaran 1. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan antikorupsi	Penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas kinerja pemerintahan
		Reformasi birokrasi yang efisien dan responsif
		Digitalisasi layanan dan sistem pemerintahan daerah
		Peningkatan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan
MISI 4 : Memperkuat ketahanan sosial dan budaya masyarakat dengan melestarikan kearifan lokal, nilai-nilai tradisional, dan kerukunan antar umat beragama.		
Meningkatkan Ketahanan Sosial budaya masyarakat	Sasaran 1. Terlestariinya Tradisi, Seni dan Praktik Budaya Lokal sebagai Indentitas Masyarakat	Revitalisasi budaya lokal dan warisan daerah
		Integrasi nilai-nilai budaya dalam pembangunan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
VISI : "KONAWE YANG BERDAYA SAING, SEJAHTERA, ADIL DAN BERKELANJUTAN"		
	Sasaran 2. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman, dan toleran melalui penguatan kerukunan antar umat beragama serta penurunan angka kriminalitas	Penguatan forum dan dialog lintas agama
		Pendidikan toleransi dan nilai-nilai kebangsaan
	Sasaran 3. Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	Penguatan institusi keluarga dan pemberdayaan perempuan
MISI 5 : Menerapkan pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan		
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan ekosistem melalui pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Sasaran 1. Terwujudnya Kemandirian Pangan yang Berkelanjutan	Penguatan ketahanan dan kedaulatan pangan lokal
		Dukungan kebijakan pangan yang adaptif terhadap perubahan iklim
	Sasaran 2. Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas dan Resiliensi terhadap Bencana	Penguatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam
		Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
		Peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana
MISI 6 : Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur antara desa dan kota		
Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan infrastruktur dasar yang mendukung konektivitas wilayah, pelayanan publik, dan pengurangan kesenjangan antarwilayah	Sasaran 1. Meningkatnya Konektivitas Wilayah dan Pemerataan Akses Infrastruktur Dasar untuk Menurunkan Disparitas Antar Wilayah	Akselerasi pembangunan desa tertinggal dan kawasan perdesaan
		Integrasi pembangunan kawasan perdesaan dengan pusat pertumbuhan
		Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pelayanan dasar yang merata
		Penguatan konektivitas antar wilayah dalam kabupaten
		Pendekatan pembangunan berbasis spasial dan keadilan wilayah

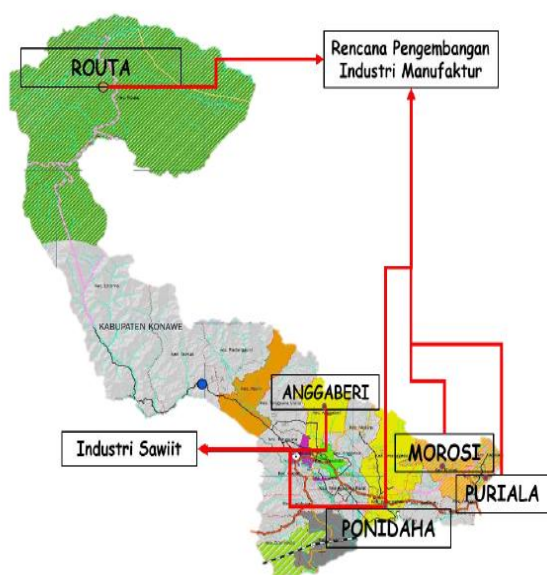
1. Arah Pengembangan Wilayah

A. Arah Pengembangan Wilayah pada RPJPD Kabupaten Konawe Tahun 2025-2045

Dalam Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Konawe mengembangkan strategi pembangunan wilayah yang komprehensif berdasarkan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Pengembangan ini bertujuan untuk mengoptimalkan seluruh potensi wilayah melalui pendekatan terintegrasi yang mencakup aspek infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan prinsip keberlanjutan.

Sebagai bagian dari upaya menyelaraskan pembangunan dengan RPJMN 2025–2029 dan RPJMD Provinsi, Pemerintah Kabupaten Konawe mengadopsi pendekatan klaster kawasan strategis yang memetakan pembangunan berdasarkan potensi unggulan lokal. Setiap klaster mencerminkan prioritas pembangunan sektor unggulan yang diintegrasikan dengan daya dukung lingkungan dan kebutuhan masyarakat setempat.

Gambar 3. 2 Rencana Pengembangan Kawasan Kab. Konawe



Sumber: Peta Kabupaten Konawe, Tahun 2024

Dalam kerangka pembangunan nasional, Kabupaten Konawe memiliki empat Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang menjadi prioritas. Pertama, KSN Bendungan Pelosika di Kecamatan Asinua yang difokuskan untuk mendukung sektor pertanian, pengairan, dan energi. Kedua, KSN Kawasan Industri Konawe yang tersebar di Kecamatan Morosi, Bondoala, dan Kopiala, dirancang sebagai pusat pengembangan industri pertambangan, pengolahan hasil pertanian, dan manufaktur untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, KSN Sorowako dan sekitarnya di Kecamatan Route dan Latoma yang merupakan pusat pertambangan nikel terpenting di wilayah ini. Keempat, KSN Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai di Kecamatan Onembute dan Puriala yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi dan dikembangkan untuk ekowisata berkelanjutan.

Pembangunan infrastruktur air menjadi tulang punggung pengembangan wilayah ini. Tiga proyek bendungan besar sedang dikembangkan untuk mendukung pertanian dan penyediaan air bersih. Bendung Wawotobi dirancang untuk pengelolaan sumber daya air yang optimal, termasuk irigasi dan pengendalian banjir. Bendungan Pelosika yang sedang dalam proses pembangunan diproyeksikan menjadi bendungan terbesar di wilayah tersebut dan akan memberikan dampak ekonomi-sosial yang signifikan. Bendungan Ameroro yang rencananya akan diresmikan oleh Presiden pada April atau Mei diharapkan dapat menciptakan pasokan air yang stabil untuk berbagai kebutuhan masyarakat.

Sektor pariwisata bahari juga mendapat perhatian khusus dengan pengembangan tiga destinasi utama yaitu Pulau Bokori, Tarunipa, dan Sawah Pulo. Ketiga lokasi ini menawarkan keindahan alam eksotis dengan pantai berpasir putih dan terumbu karang yang menawan. Berbagai aktivitas wisata bahari seperti snorkeling, diving, dan berlayar dikembangkan untuk menarik wisatawan, yang pada gilirannya akan memberikan pendapatan tambahan bagi masyarakat lokal dan mempromosikan keindahan alam Kabupaten Konawe ke tingkat yang lebih luas. Pengembangan pariwisata ini diarahkan berbasis masyarakat (*Community Based Tourism*) dengan melibatkan koperasi lokal dan pelaku UMKM. Target pengunjung ditetapkan mencapai 100.000 wisatawan per tahun pada 2029 dengan penekanan pada prinsip ekowisata dan konservasi pesisir.

Secara keseluruhan, strategi pengembangan pusat pertumbuhan wilayah Kabupaten Konawe menggunakan pendekatan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan. Integrasi antara pembangunan infrastruktur air, pengembangan kawasan industri dan pertambangan, pelestarian lingkungan dan budaya, serta pengembangan pariwisata diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Strategi ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi regional, tetapi juga menjaga keseimbangan lingkungan untuk generasi mendatang.

B. Arah Pengembangan Wilayah Kabupaten Konawe pada RPJMN Tahun 2025-2029

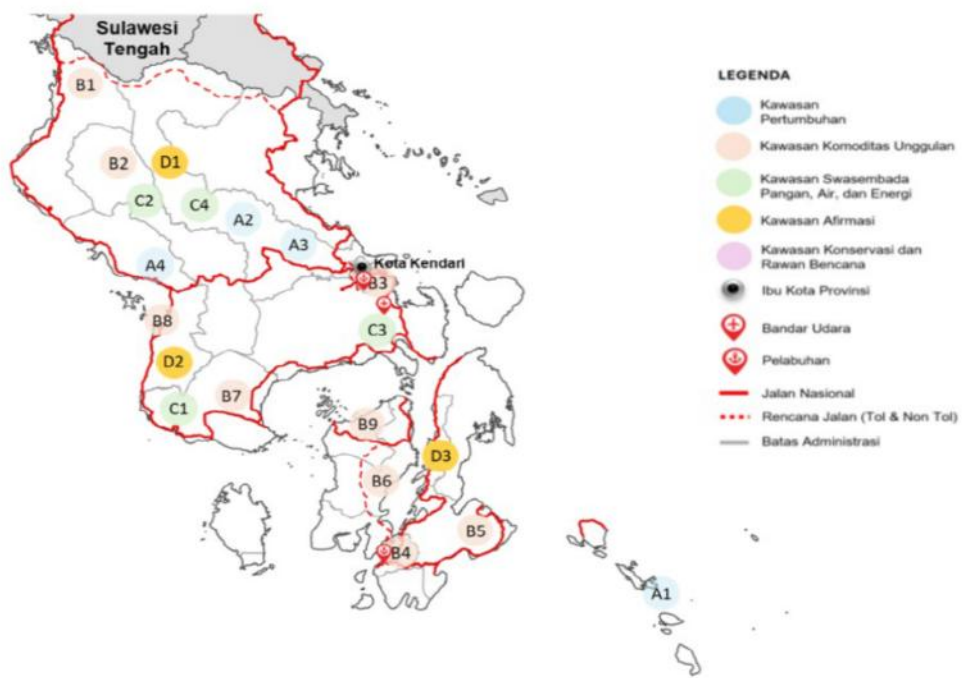
Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 telah menetapkan arah pembangunan kewilayahan yang komprehensif untuk Provinsi Sulawesi Tenggara. Kebijakan ini membagi wilayah provinsi ke dalam empat kategori kawasan strategis yang

masing-masing memiliki fokus pengembangan spesifik sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayahnya.

Kawasan Pertumbuhan menjadi motor penggerak ekonomi regional dengan empat lokasi prioritas. Destinasi Pariwisata Prioritas Wakatobi (A.1) memanfaatkan keindahan bahari yang telah dikenal secara internasional. Kawasan Perkotaan Kecil Kabupaten Konawe (A.2) dikembangkan sebagai pusat pelayanan wilayah, sementara Kawasan Industri Pengelolaan Hasil Tambang di Konawe (A.3) dan Kolaka (A.4) menegaskan peran strategis Sulawesi Tenggara sebagai produsen mineral penting nasional, khususnya nikel yang semakin vital dalam era transisi energi global.

Kawasan Komoditas Unggulan didominasi oleh sektor perikanan tangkap yang tersebar di delapan wilayah pesisir, mulai dari Kota Kendari, Kota Baubau, hingga kabupaten-kabupaten seperti Buton, Muna, Bombana, Kolaka, dan Muna Barat. Ini menunjukkan komitmen untuk mengoptimalkan potensi maritim Sulawesi Tenggara yang memiliki garis pantai panjang dan kaya sumber daya laut. Sementara itu, perkebunan kakao di Kolaka Utara dan Kolaka Timur menegaskan posisi provinsi ini sebagai produsen kakao terbesar di Indonesia timur.

Gambar 3.3. Arah Pembangunan Kewilayahan di Provinsi Sulawesi Tenggara Berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029



Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

Gambar 3. 3 Arah Pembangunan Kewilayahan di Provinsi Sulawesi Tenggara Berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029

Ketahanan pangan menjadi prioritas melalui pengembangan Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi di empat kabupaten yaitu Bombana, Kolaka Timur, Konawe Selatan, dan Konawe. Keempat wilayah ini ditetapkan sebagai lumbung pangan Sulawesi Tenggara, yang strategis untuk mendukung ketahanan pangan regional dan nasional. Pembangunan infrastruktur air seperti bendungan-bendungan besar yang telah direncanakan akan sangat mendukung produktivitas kawasan ini.

Dalam rangka melaksanakan program prioritas nasional untuk mencapai swasembada pangan, energi dan air hingga tahun 2030 kabupaten konawe menjadi salah satu kabupaten prioritas yaitu program cetak sawah seluas 1.400 Ha.

Program transmigrasi tetap menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan wilayah melalui Kawasan Afirmasi. Tiga lokasi transmigrasi yaitu Asinua di Konawe, Anawua di Kolaka, dan Mutiara di Muna dirancang untuk mendukung pemerataan pembangunan dan mengatasi ketimpangan demografis antar wilayah.

Yang menarik adalah penetapan empat Proyek Strategis Nasional berupa kawasan industri modern: Indonesia Giga Industry Park, Kolaka Resources Industrial Park, ASPIRE Stargate, dan Tekno Hijau Konasara. Kehadiran mega proyek ini menandai transformasi Sulawesi Tenggara dari ekonomi berbasis ekstraktif menuju industri pengolahan bernilai tambah tinggi, khususnya dalam konteks hilirisasi mineral dan pengembangan industri hijau.

Secara keseluruhan, arah kebijakan RPJMN 2025-2029 untuk Sulawesi Tenggara menunjukkan pendekatan pembangunan yang seimbang antara eksploitasi sumber daya alam dengan prinsip keberlanjutan, industrialisasi dengan ketahanan pangan, serta modernisasi dengan pemerataan. Keberhasilan implementasi kebijakan ini akan sangat bergantung pada sinergi antar sektor, kesiapan infrastruktur pendukung, dan kemampuan daerah dalam menarik investasi sekaligus melindungi kepentingan masyarakat lokal.

Beberapa proyek strategi nasional yang berada di Kabupaten Konawe adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Arah Pembangunan Kewilayahan berdasarkan RPJMN 2025-2029 di Kabupaten Konawe

KODE	RPJMN 2025-2029	
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI
A2	Kawasan Perkotaan Kecil Kabupaten Konawe: (KECAMATAN MOROSI)	Pengembangan Kawasan Perkotaan Kecil berbasis industri di Kabupaten Konawe, dengan output:
		Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan;
		Penyediaan dan peningkatan layanan konektivitas transportasi;
		Bantuan pembangunan rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pekerja;
		Bantuan pembangunan rumah swadaya;
		Pemugaran permukiman kumuh;
		Penyediaan hunian layak dan terjangkau;
		Pemenuhan layanan dasar air minum;
		Pemenuhan layanan persampahan;
		Penanganan air limbah domestik;
		Penyediaan ruang terbuka hijau.
A3	Kawasan Industri Pengolahan Hasil Tambang Sulawesi Tenggara	Peningkatan nilai tambah dan kompleksitas industri pengolahan berbasis mineral dan sumber daya alam (nikel dan logam dasar) di Kabupaten Konawe dan Kabupaten Kolaka, dengan output:
		Jalan shortcut kawasan industri konawe dan jembatan tabanggele – pebunooha;
		Hasil monitoring pembangunan fasilitas pengolahan pemurnian mineral dalam negeri;
		Industri smelter/pemurnian/pengolahan nikel hidrometalurgi yang termonitor dan terevaluasi perkembangannya;
		Industri battery precursor berbasis NMC yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan investasi;
		Industri katoda nikel yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan investasi;
		Industri baterai nasional yang terfasilitasi dalam rangka penguatan struktur industri dalam negeri;
		Rekomendasi keprospekan sumber daya mineral;
		Kebijakan penguatan industri logam berbasis pengolahan nikel;
		Standar dalam rangka mendukung ekspor dan pengawasan produk;
		Fasilitasi pendampingan SMK yang <i>link and match</i> dengan industri, yang relevan dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA);
		Industri logam dalam negeri yang terfasilitasi dalam pemenuhan kebutuhan logam infrastruktur untuk IKN;
		ndustri <i>special steel</i> yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan investasi; dan

KODE	RPJMN 2025-2029	
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI
		Pembangunan jalan akses KI Konawe.
		Pembangunan/revitalisasi sentra IKM
C4	Kawasan Lumbung Pangan Sulawesi Tenggara	Pengembangan lumbung pangan Sulawesi Tenggara dengan hilirisasi komoditas pertanian unggulan yang berkelanjutan, dengan <i>output</i> :
		Jaringan irigasi tersier yang direhabilitasi;
		Pendampingan dan pelatihan pascapanen;
		Pengolahan mendukung peningkatan nilai tambah;
		Pendampingan dan pelatihan pascapanen;
		Pengolahan mendukung peningkatan nilai tambah.
D1	Kawasan Transmigrasi	Pengembangan Kawasan Transmigrasi Asinua di Kabupaten Konawe, dengan <i>output</i> : Fasilitasi pengurusan sertifikat hak milik tanah transmigrasi;
		Pemberian bantuan peralatan pascapanen;
		Pengembangan sarana permukiman, jalan dan jembatan di kawasan transmigrasi.

(Sumber: RPJMN 2025-2029)

Arah pengembangan wilayah Kabupaten Konawe dalam RPJMN 2025–2029 menempatkan Konawe sebagai simpul strategis pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tenggara dengan peran ganda sebagai pusat industri nasional, lumbung pangan regional, dan kawasan transmigrasi berkelanjutan. Sinergi kebijakan pusat dan daerah diarahkan untuk memperkuat struktur ekonomi, meningkatkan daya saing wilayah, serta mendorong pemerataan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

- Pertama, pada aspek pengembangan kawasan perkotaan kecil, Kecamatan Morosi ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan baru yang berbasis industri. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah diarahkan untuk menyediakan layanan pendidikan yang terintegrasi dengan kebutuhan ketenagakerjaan, memperkuat konektivitas transportasi, serta meningkatkan akses perumahan layak dan terjangkau. Upaya ini dilengkapi dengan program bantuan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pekerja industri, bantuan rumah swadaya, serta penataan kawasan kumuh. Di samping itu, layanan dasar seperti air minum, pengelolaan persampahan, penanganan air limbah domestik, dan penyediaan ruang terbuka hijau

menjadi prioritas untuk mewujudkan lingkungan perkotaan yang sehat, produktif, dan berkelanjutan.

- Kedua, dalam pengembangan kawasan industri pengolahan hasil tambang, Kabupaten Konawe memegang peran sentral bersama Kabupaten Kolaka sebagai basis industri nikel nasional. Arah kebijakan pembangunan difokuskan pada peningkatan nilai tambah mineral melalui hilirisasi industri logam dasar. Infrastruktur strategis seperti jalan shortcut kawasan industri Konawe, jembatan Tabanggele–Pebunooha, serta akses jalan menuju kawasan industri menjadi prioritas pembangunan. Pemerintah juga memfasilitasi monitoring pembangunan smelter, pengembangan industri nikel hidrometalurgi, battery precursor, industri katoda nikel, serta industri baterai nasional untuk mendukung transisi energi dan penguatan industri domestik. Selain itu, pengembangan sentra IKM logam serta pendampingan pendidikan kejuruan melalui SMK link and match dengan dunia usaha dan dunia industri diarahkan untuk memperkuat rantai pasok dan memastikan keterhubungan tenaga kerja lokal dengan kebutuhan industri.
- Ketiga, Kabupaten Konawe juga ditetapkan sebagai bagian dari kawasan lumbung pangan Sulawesi Tenggara. Arah kebijakan diarahkan pada penguatan kapasitas produksi pertanian melalui rehabilitasi jaringan irigasi tersier, peningkatan pascapanen melalui pendampingan dan pelatihan, serta pengolahan hasil pertanian yang mendukung peningkatan nilai tambah. Kebijakan ini akan memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung kedaulatan pangan nasional. Fokus pada komoditas unggulan seperti padi, jagung, dan perkebunan strategis diharapkan mampu menjadikan Konawe sebagai pusat penyedia pangan berkelanjutan bagi kawasan regional.
- Keempat, Kecamatan Asinua ditetapkan sebagai lokasi pengembangan kawasan transmigrasi. Arah kebijakan diarahkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat transmigran melalui fasilitasi sertipikat hak milik tanah, pemberian bantuan peralatan pascapanen, serta pembangunan sarana permukiman, jalan, dan jembatan. Langkah ini tidak hanya memperkuat kesejahteraan masyarakat transmigrasi tetapi juga mempercepat keterhubungan kawasan pedalaman dengan pusat pertumbuhan ekonomi di sekitarnya.

Secara keseluruhan, arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Konawe dalam RPJMN 2025–2029 mempertegas peran daerah sebagai pilar industri, lumbung pangan, dan kawasan transmigrasi produktif. Melalui intervensi yang terintegrasi di bidang perkotaan, industri, pertanian, dan transmigrasi, Konawe diarahkan menjadi simpul pertumbuhan baru yang mampu mendorong daya saing ekonomi nasional sekaligus mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

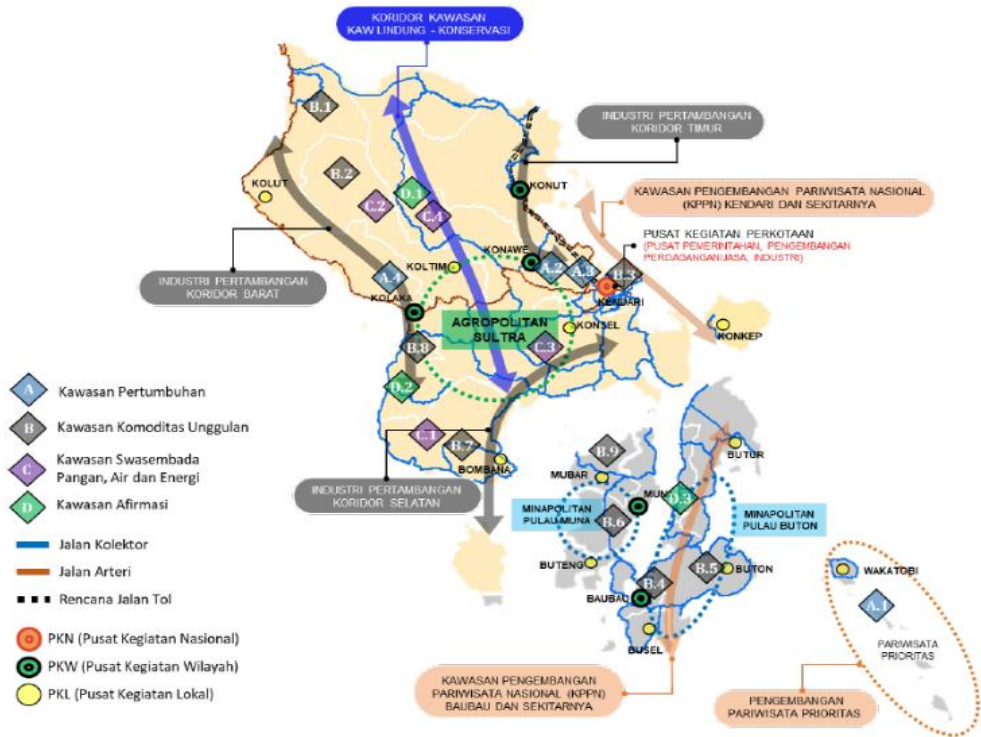
C. Arah Pengembangan Wilayah Sulawesi Tenggara pada RPJMD Tahun 2025-2029

Provinsi Sulawesi Tenggara sedang menjalani transformasi besar-besaran melalui kebijakan pembangunan kewilayahan yang komprehensif. Dengan membagi wilayah menjadi dua karakteristik geografis utama - daratan yang mencakup 9 kabupaten/kota dan kepulauan yang meliputi 8 kabupaten/kota - provinsi ini merancang strategi pembangunan yang disesuaikan dengan keunikan masing-masing wilayah.

Di wilayah daratan, Kawasan Pesisir Kendari dan sekitarnya menjadi episentrum pengembangan ekonomi baru. Pantai Toronipa dan Pulau Bokori tidak lagi sekadar destinasi wisata lokal, melainkan sedang ditransformasi menjadi magnet pariwisata terintegrasi yang didukung infrastruktur modern.

Bersamaan dengan itu, Pelabuhan Perikanan Samudera di Kota Kendari dikembangkan sebagai pusat industri pengolahan perikanan yang akan mengolah hasil tangkapan dari perairan Konawe dan Konawe Kepulauan. Sinergi antara pariwisata bahari dan industri perikanan ini menciptakan ekosistem ekonomi yang saling menguatkan.

Gambar 3.4. Arah Kebijakan Kewilayahan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029



Gambar 3. 4 Arah Kebijakan Kewilayahan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029

Sumber; RPJMD Prov Sultra Tahun 2025-2029

Sementara pesisir berkembang dengan pariwisata dan perikanan, wilayah pedalaman daratan menjadi arena industrialisasi berbasis mineral. Kabupaten Konawe, Kolaka, dan Konawe Selatan yang kaya nikel tidak lagi puas hanya menjadi pemasok bahan mentah. Melalui pembangunan Kawasan Industri Indonesia Pomalaa Industrial Park dan Virtue Dragon Nickel Industry, daerah ini bertransformasi menjadi pusat industri hilir nikel. Dari smelter yang menghasilkan stainless steel hingga pabrik battery precursor dan battery pack untuk kendaraan listrik, Sulawesi Tenggara memposisikan diri di garda depan revolusi kendaraan listrik global. Yang lebih menarik, semua ini dilakukan dengan komitmen dekarbonisasi untuk mencapai Net Zero Emissions, menunjukkan bahwa industrialisasi tidak harus mengorbankan lingkungan.

Tidak melupakan ketahanan pangan, lima kabupaten - Bombana, Kolaka, Kolaka Timur, Konawe, dan Konawe Selatan - ditetapkan sebagai kawasan swasembada pangan. Bendungan Pelosika yang sedang dibangun akan menjadi jantung irigasi yang menghidupkan ribuan hektar sawah. Kolaka Timur dipilih sebagai pusat pengolahan hasil pertanian, menciptakan rantai nilai dari produksi hingga pengolahan yang terintegrasi. Sementara itu, perkebunan kakao di Kolaka Utara dan Kolaka Timur terus dikembangkan

untuk mempertahankan posisi provinsi sebagai produsen kakao terbesar di Indonesia timur.

Beralih ke wilayah kepulauan, Wakatobi bersinar sebagai permata pariwisata prioritas nasional. Dengan menerapkan prinsip blue, green, dan circular economy, pengembangan Wakatobi tidak sekadar mengejar kunjungan wisatawan, tetapi membangun destinasi berkelanjutan yang melindungi kekayaan bahari sambil memberdayakan masyarakat lokal. Pulau Buton dan sekitarnya dikembangkan sebagai jejaring pendukung yang memperkuat posisi Wakatobi dalam peta pariwisata nasional.

Kota Baubau di Pulau Buton memainkan peran ganda - sebagai pintu gerbang pariwisata sekaligus pusat industri perikanan melalui Pelabuhan Perikanan Nusantara. Kawasan Minapolitan Buton mengintegrasikan aktivitas penangkapan ikan di perairan sekitar dengan industri pengolahan modern yang dilengkapi sistem rantai dingin. Ini memastikan ikan-ikan dari laut Banda tidak hanya dijual mentah, tetapi diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi.

Yang menarik, Sulawesi Tenggara tidak hanya fokus pada sektor-sektor tradisional. Provinsi ini ambisius mengembangkan industri masa depan melalui hilirisasi rumput laut yang melimpah di perairannya. Dari sekadar petani rumput laut, masyarakat pesisir didorong naik kelas menjadi produsen karagenan, kosmetik, biofuel, bahkan bioplastik. Koperasi-koperasi rumput laut diperkuat untuk meningkatkan posisi tawar petani, sementara industri hilir diundang berinvestasi untuk mengolah komoditas ini menjadi produk bernilai tinggi.

Lebih jauh lagi, dengan memanfaatkan keunggulan sebagai produsen nikel, provinsi ini masuk ke industri kendaraan listrik. Tidak hanya memproduksi baterai, tetapi membangun ekosistem lengkap dari hilirisasi grafit, pengembangan SDM vokasi, hingga infrastruktur pengisian daya. Bahkan ekonomi sirkular melalui industri daur ulang baterai sudah dipikirkan sejak awal.

Semua transformasi ini ditopang oleh pembangunan infrastruktur masif. Jaringan listrik diperluas dengan menambah PLTMH dan PLTS untuk energi bersih. Sistem air minum dan sanitasi dibangun di setiap kawasan prioritas. Jaringan telekomunikasi 4G dan fiber optik menjangkau pelosok untuk memastikan tidak ada yang tertinggal dalam era digital. Pelabuhan-pelabuhan seperti Lapuko, Sikeli, dan Raha diperluas. Bandara-bandara di Kolaka Utara, Wakatobi, dan Baubau ditingkatkan kapasitasnya.

Program transmigrasi di Asinua (Konawe), Anawua (Kolaka), dan Mutiara (Muna) memastikan pemerataan pembangunan dan distribusi penduduk. Sementara itu, pembangunan rumah susun untuk pekerja industri dan masyarakat berpenghasilan rendah di Morosi dan kawasan industri lainnya menunjukkan bahwa industrialisasi harus berjalan beriringan dengan kesejahteraan pekerja.

Melihat keseluruhan gambaran ini, Sulawesi Tenggara sedang menjalani transformasi dari provinsi penghasil bahan mentah menjadi pusat industri bernilai tambah tinggi, dari destinasi wisata lokal menjadi tujuan pariwisata internasional, dari produsen pertanian tradisional menjadi lumbung pangan modern. Semua ini dilakukan dengan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Jika berhasil diimplementasikan dengan baik, Sulawesi Tenggara akan menjadi model pembangunan regional yang mengintegrasikan potensi darat dan laut, tradisi dan modernitas, ekstraksi dan konservasi, menjadi pusat pertumbuhan baru di Indonesia Timur yang berkelanjutan dan inklusif.

D. Arah Pengembangan Wilayah Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029

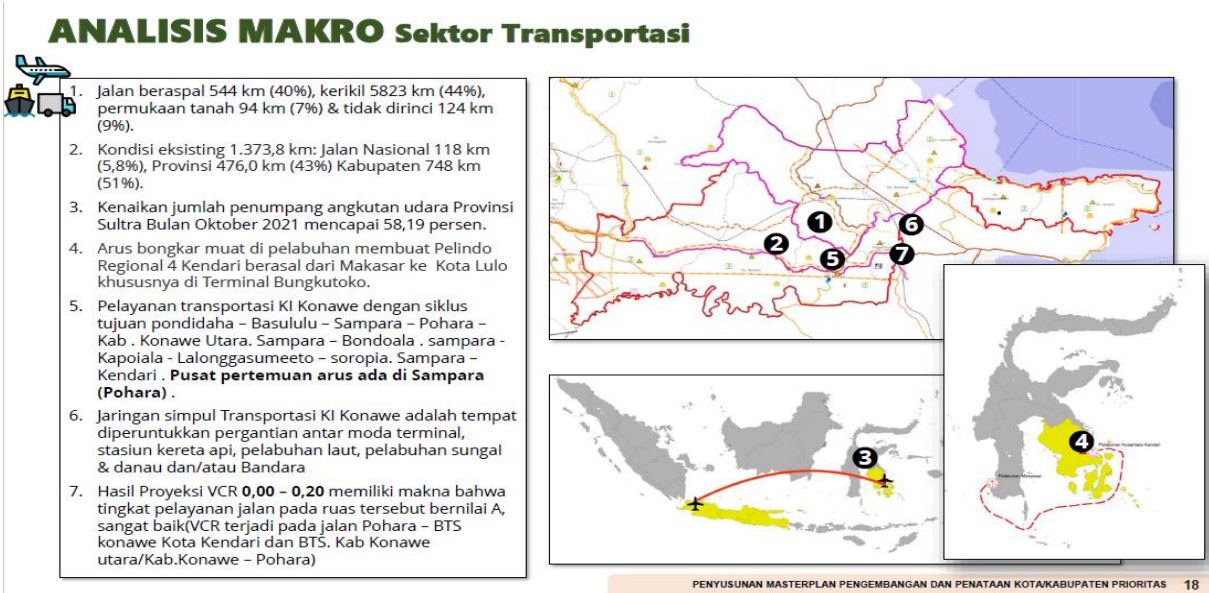
Secara makro, arah pengembangan kewilayahan Konawe harus ditambahkan pada kebijakan industri nasional yang mendorong daya saing, hilirisasi, dan penyebaran pusat pertumbuhan di luar Jawa. Kawasan Industri (KI) Konawe telah tercantum sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional, sehingga berperan sebagai jangkar pertumbuhan berbasis industri teknologi menengah-tinggi. Implikasi utamanya: kebijakan ruang, infrastruktur, SDM, dan layanan publik daerah perlu diselaraskan untuk memperkuat ekosistem investasi dan memastikan nilai tambah ekonomi terjadi di Konawe, bukan sekadar pada tahap ekstraksi komoditas.



Gambar 3. 5 Analisis Makro Kebijakan Nasional Sektor Industri

(Sumber : Bappenas;2024)

Hilirisasi dan nilai tambah lintas-klaster. RPJPD/RPJMD, RZWP3K, dan RTRW memberikan sinyal konsisten bahwa keunggulan komparatif Konawe nikel, perikanan, pertanian/perkebunan, dan pariwisata—harus ditransformasikan menjadi keunggulan kompetitif melalui industrialisasi dan penguatan rantai nilai. Fokusnya adalah pendalaman industri (smelter dan turunannya), *agro-processing* (kakao, kelapa, hasil hutan), serta *cold chain* perikanan yang terhubung ke pasar domestik dan ekspor. Kebijakan daerah karenanya diarahkan pada peningkatan kualitas SDM industri (vokasi terapan, sertifikasi), ketersediaan utilitas kawasan (air baku, energi, IPAL terpadu), serta insentif kemitraan UMKM–koperasi sebagai pemasok dalam rantai pasok industri.

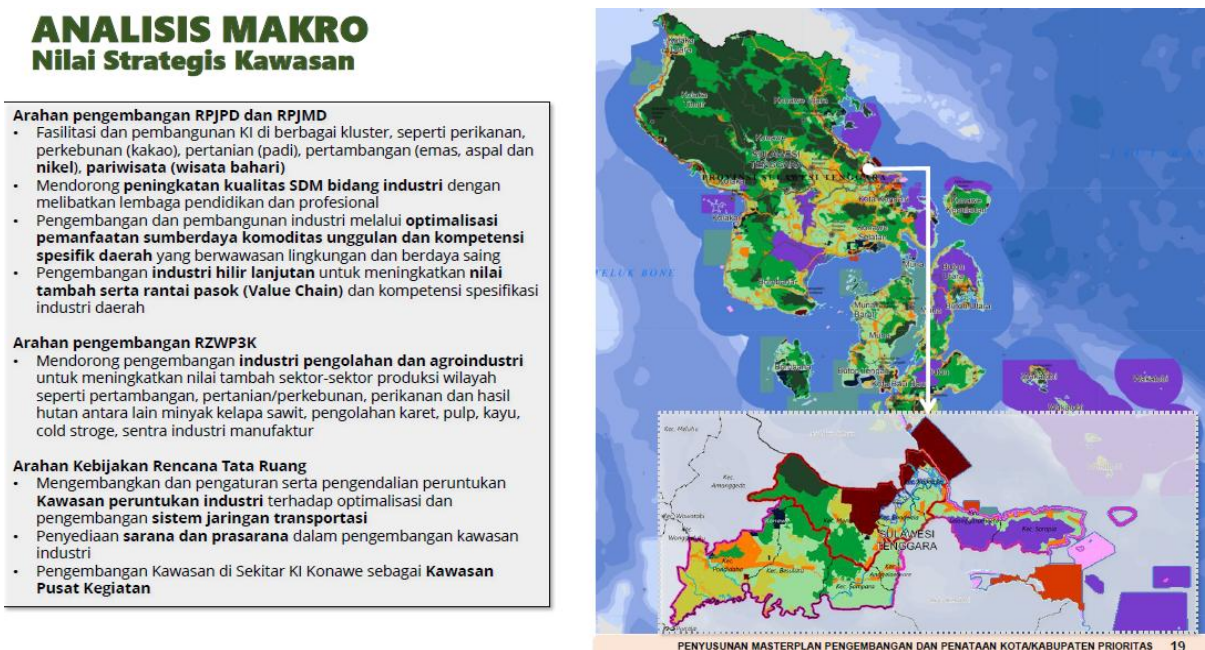


Gambar 3. 6 Analisis Makro Sektor Transportasi

(Sumber : Bappenas;2024)

Sistem transportasi sebagai tulang punggung. Secara makro-transportasi, struktur jaringan jalan nasional–provinsi–kabupaten di Konawe membentuk koridor utama Kendari–Unaaha yang menyambungkan

hinterland agribisnis dengan pelabuhan dan *gateway* udara. Arus barang industri dan logistik harian berputar pada simpul Sampara–Pohara menuju pelabuhan di Kendari/Bungkutoko dan koridor pesisir Soropia; bandara Haluoleo menopang mobilitas orang dan koneksi antar-pulau. Hasil kajian kapasitas menegaskan perlunya peningkatan Level of Service di ruas-ruas strategis serta penataan *staging area*, angkutan barang, dan pengelolaan simpang agar waktu tempuh KI–pelabuhan terjaga dan biaya logistik turun.



Gambar 3. 7 Penahapan Pembangunan Kabupaten Konawe

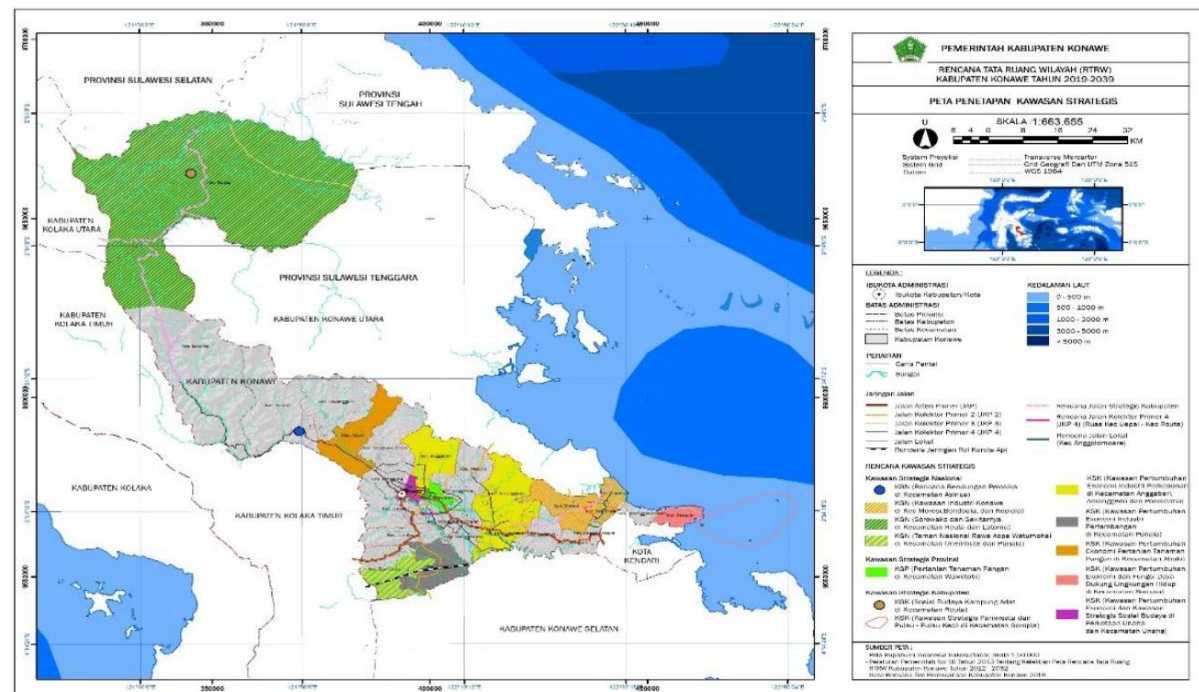
(Sumber : Bappenas;2024)

Penguncian tata ruang dan daya dukung lingkungan. Dari perspektif penataan ruang, makro-kawasan menetapkan kawasan peruntukan industri dan permukiman pendukung secara tegas, melindungi kawasan lindung/mangrove, serta mengelola sempadan sungai–pesisir untuk mitigasi banjir dan abrasi. Di ruang laut, RZWP3K mengarahkan pengembangan pelabuhan perikanan, budidaya laut, serta jalur pelayaran sehingga *supply chain* perikanan menyatu dengan sistem logistik darat. Prinsip ekonomi sirkular (pemanfaatan *by-product*, pengurangan limbah) menjadi prasyarat agar pertumbuhan industri sejalan dengan kualitas lingkungan. Konsekuensi kebijakan wilayah.

1. Pengembangan Wilayah Berbasis Klaster

Dalam menghadapi dinamika pembangunan yang semakin kompleks dan cepat, Pemerintah Kabupaten Konawe dalam pengembangan wilayah memilih pendekatan *klaster kawasan* sebagai landasan strategis pembangunan daerah. Pilihan ini didasarkan pada realitas geografis Konawe yang sangat beragam mulai dari pesisir, dataran rendah pertanian, hingga

Pengembangan berbasis klaster mendorong efisiensi dalam investasi infrastruktur dan program pembangunan, karena intervensi diarahkan pada kawasan yang memiliki nilai strategis tertentu, seperti kawasan industri nikel di Morosi, kawasan agroindustri di Unaaha dan Wawotobi, serta kawasan pariwisata bahari di Soropia dan Bokori. Selain itu, pendekatan ini memperkuat sinergi antar-sektor dan menciptakan ekosistem ekonomi yang saling terhubung dalam satu rantai nilai, mulai dari hulu ke hilir. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak lagi bersifat sektoral semata, tetapi juga terintegrasi secara spasial dan struktural.



Sumber ; RTRW Kab. Konawe

Tabel 3. 4 Pengembangan Berbasis Klaster

Nama Kecamatan	Potensi Utama	Nama Klaster
Route	Pertambangan nikel	Zona Pertambangan dan Kawasan Lindung
Asinua	Pertanian dan perkebunan serta kawasan Transmigrasi	Zona Perkotaan dan Hilirisasi Pertanian–Perkebunan
Amonggedo	Pertanian dan perkebunan	
Konawe	Pertanian dan perkebunan	
Meluhu	Pertanian dan perkebunan	
Pondidaha	Pertanian dan perkebunan	
Tongauna	Pertanian dan perkebunan	
Tongauna Utara	Pertanian dan perkebunan	
Uepai	Pertanian dan perkebunan	
Wonggeduku	Pertanian dan perkebunan	
Wonggeduku Barat	Pertanian dan perkebunan	
Anggaberu	Pertanian dan perkebunan	
Wawotobi	Pertanian dan perkebunan dan penyangga perkotaan	
Padangguni	Pertanian dan perkebunan	
Abuki	Pertanian dan perkebunan	
Unaaha	Pusat administrasi dan pertumbuhan	
Onembute	Jagung dan padi	
Puriala	Tematik Hortikultura dan Industri Peternakan	
Lambuya	Tematik Hortikultura dan Industri Peternakan	
Besulutu	Tematik Hortikultura dan Industri Peternakan	
Route	Tematik Hortikultura dan Industri Peternakan	
Latoma	Tematik Hortikultura dan Industri Peternakan	
Perhutanan Sosial	Tematik Hortikultura dan Industri Peternakan	
Bondoala	Penyangga kota kecil	Zona Industri, Penyangga Perkotaan, dan Pariwisata
Kapoiala	Penyangga kota kecil	
Sampara	Penyangga kota kecil	
Soropia	Kawasan pariwisata	
Morosi	Kawasan industri	
Anggalomoare	Penyangga kota kecil	
Lalonggasumeeto	Penyangga kota kecil	

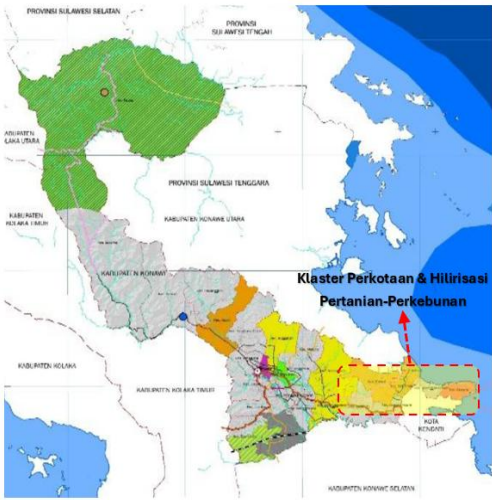
Sumber; Tim Penyusun

Pembagian Klaster dalam Arah kebijakan kewilayahan Kabupaten Konawe tahun 2025–2029 disusun sebagai kerangka strategis spasial dalam mendukung pencapaian visi pembangunan daerah yang berdaya saing, sejahtera, adil, dan berkelanjutan. Kebijakan ini diarahkan untuk mendorong pengembangan wilayah yang terintegrasi, seimbang, dan berkeadilan melalui pendekatan klaster kawasan berbasis potensi sumber daya lokal, daya dukung lingkungan, konektivitas antarwilayah, dan kesesuaian dengan tata ruang wilayah. Penyusunan arah kewilayahan ini juga dilakukan secara harmonis dengan dokumen perencanaan nasional (RPJMN 2025–2029), provinsi (RPJMD Sulawesi Tenggara), dan dokumen rencana jangka panjang

daerah (RPJPD Konawe 2005–2025 dan RPJPD 2025–2045). Secara teknis, kebijakan kewilayahan difokuskan pada tiga zonasi pengembangan utama:

1) **Klaster Industri, Penyangga Perkotaan, dan Pariwisata:**

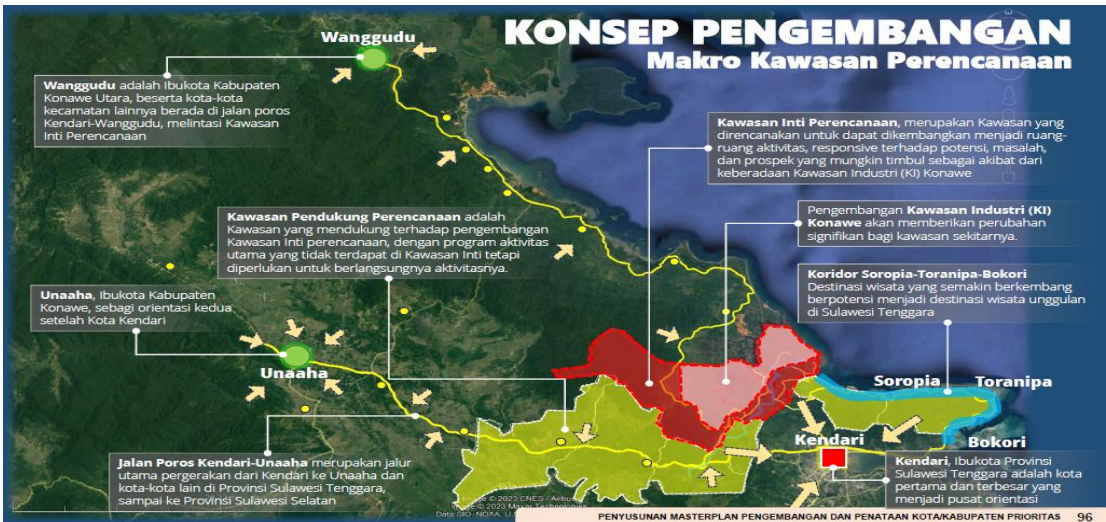
Meliputi Kecamatan Morosi, Bondoala, Sampara, Soropia, Lalonggasumeeto, Anggalomoare, dan Kapoiala. Kawasan ini diarahkan sebagai koridor industri strategis berbasis hilirisasi nikel dan logistik nasional, sekaligus sebagai kawasan transisi perkotaan yang menopang kebutuhan Kota Kendari. Intervensi diarahkan pada penguatan infrastruktur dasar, pembangunan pelabuhan, jembatan konektivitas, pengembangan pasar induk regional, pengendalian kawasan kumuh, serta pelestarian kawasan pesisir dan pariwisata bahari berbasis masyarakat (minawisata / konsep yang menggabungkan aktivitas perikanan atau budidaya perairan (minapolitan) dengan pariwisata, menciptakan sektor ekonomi yang terintegrasi dan berkelanjutan).



Gambar 3. 9 Klaster Satu

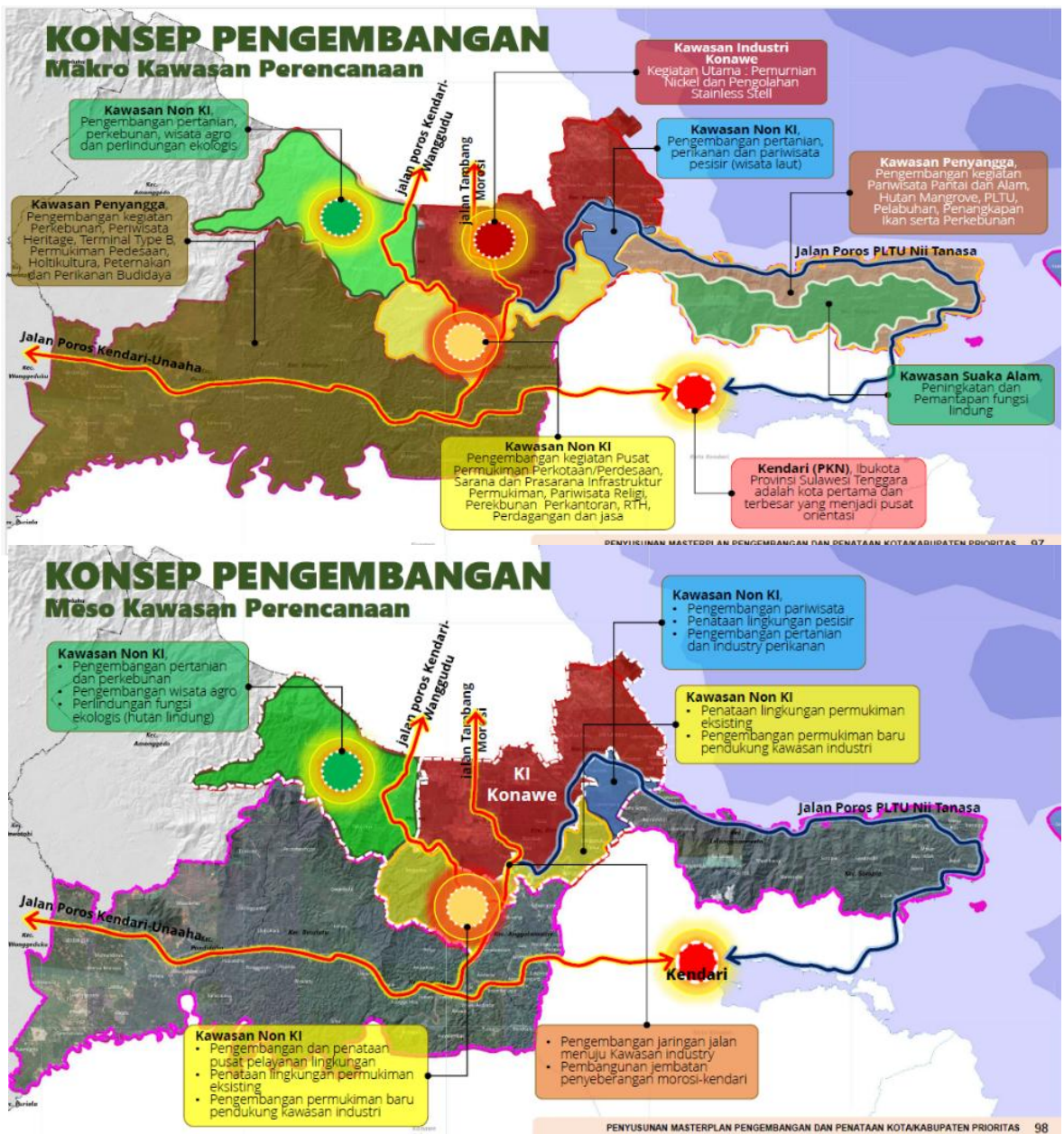
2) **Pengembangan Kawasan Perkotaan Kecil Morosi dan sekitarnya**

Pengembangan ruang Kabupaten Konawe dalam RPJMD 2025–2029 menggunakan pendekatan bertingkat (makro-meso-mikro) untuk memastikan keterpaduan antara strategi ekonomi, ketahanan sosial-lingkungan, dan tata kelola. Setiap tingkat menyatakan fungsi kawasan, struktur jaringan, dan standar teknis minimum, serta diikat oleh urutan prioritas investasi dan pengendalian pemanfaatan ruang.



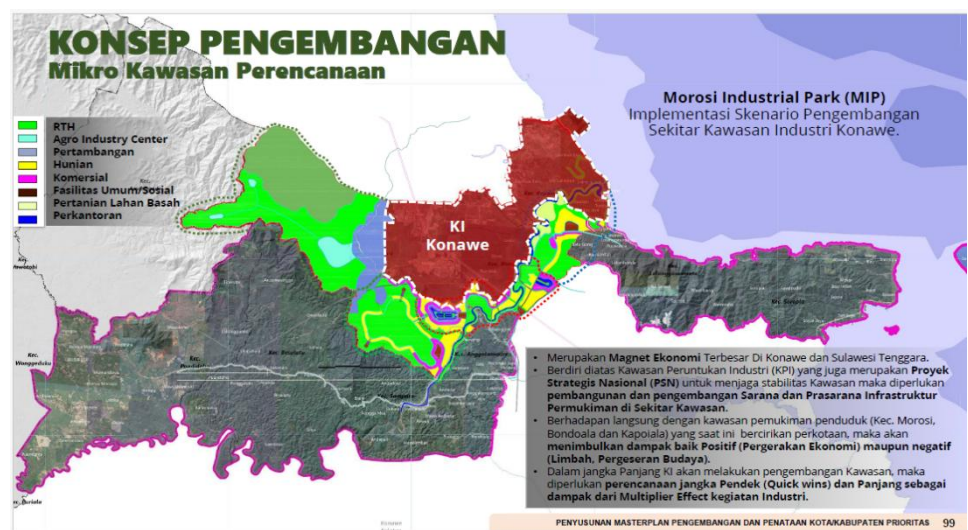
Gambar 3. 10 Konsep Pengembangan Makro

Pada Skala makro: struktur ruang dan peran kawasan. Pada skala makro, Konawe diposisikan sebagai hinterland strategis Kendari (PKN) dengan koridor utama Kendari–Unaaha–Wanggudu sebagai tulang punggung mobilitas orang dan barang. Kawasan Industri (KI) Konawe/Morosi menjadi pengungkit pertumbuhan, dilingkupi oleh: (i) kawasan inti perencanaan sebagai pusat aktivitas industri dan logistik; (ii) kawasan penyangga untuk pariwisata, permukiman pedesaan, hortikultura, serta perikanan dan layanan pelabuhan/PLTU; dan (iii) kawasan lindung/suaka alam sebagai sabuk ekologis penyangga daya dukung lingkungan. Arah kebijakan di tingkat ini adalah penguatan konektivitas regional, pengendalian alih fungsi lahan produktif, dan penjaminan keseimbangan pertumbuhan–kelestarian.



Gambar 3. 11 Konsep Pengembangan Makro dan Meso

Skala meso: penguatan peran zona dan transisi kota–desa. Pada skala meso, fungsi ruang diperinci menjadi zona Non-KI (pertanian–perkebunan, wisata agro, pusat pelayanan lingkungan), zona Non-KI pesisir (perikanan dan pariwisata laut), serta permukiman eksisting dan permukiman baru pendukung industri yang harus ditata agar aman dan legal. Koridor logistik menuju KI, PLTU, dan Kendari disiapkan melalui rencana jalan arteri/tol dan jalur kereta api; titik pertemuan jaringan dialokasikan untuk *dry port*, *logistics park*, *truck staging area*, dan simpul angkutan umum. Fokus kebijakan: kepastian zonasi melalui RDTR, pengendalian bangunan di sempadan koridor, dan penyiapan lahan untuk infrastruktur strategis.



Gambar 3. 12 Konsep Pengembangan Mikro

Skala mikro: standar tata guna lahan dan layanan dasar. Pada skala mikro, pola ruang di sekitar KI ditetapkan rinci mencakup RTH/green belt, agro-industry center, hunian pekerja/rusun, komersial–perkantoran, fasilitas umum/sosial, dan pertanian lahan basah untuk ketahanan pangan dan reduksi banjir. Ditetapkan standar teknis: sempadan industri, jaringan utilitas terpadu (air minum, sanitasi, listrik, telekomunikasi), drainase ramah air, jalur pejalan kaki/sepeda, keselamatan persimpangan, serta jarak tempuh hunian–kerja yang rasional. Tujuannya adalah produktivitas tinggi dengan kualitas hidup warga yang terjaga.

Prioritas kawasan: hirarki jaringan dan pengendalian akses. Peta prioritas menetapkan jaringan primer (poros Kendari–Wanggudu) sebagai tulang punggung, jaringan sekunder (Morosi–PLTU) sebagai kolektor industri-logistik, dan jaringan tertier sebagai distribusi lingkungan. Disiplin koridor diberlakukan: akses langsung dibatasi, disediakan frontage/collector–distributor, simpang berkelas, manajemen parkir dan **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029 | 304**

truck staging, serta pengendalian reklame/PKL. Ruang komersial, jasa, perkantoran, hunian, dan RTH linear ditempatkan di simpul jaringan untuk mencegah *ribbon development* dan menjaga kecepatan serta keselamatan koridor.

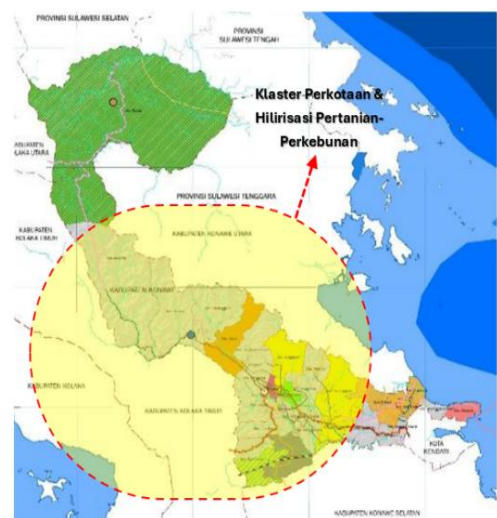
RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029 mengarahkan percepatan penetapan/penyelarasan RTRW–RDTR koridor industri dan pesisir berbasis OSS-RBA, penyediaan bank tanah dan/atau konsolidasi lahan untuk simpul logistik–interchange–RTH, serta penyusunan standar desain jalan (cross-section, sempadan, akses) sebagai lampiran pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian kualitas lingkungan dijamin melalui sabuk hijau, ambang baku emisi/limbah, dan *buffer* permukiman.

Arah ruang ini sekaligus menjadi instrumen daerah untuk mendukung agenda pusat: hilirisasi industri (KI Konawe), ketahanan pangan (sabuk pertanian-irigasi), kesehatan untuk semua (akses layanan dasar di kantong pekerja), makan bergizi gratis (jaringan logistik pangan), perluasan akses pendidikan (penyediaan lahan sekolah di permukiman baru), pengendalian inflasi (efisiensi rantai pasok), serta kemudahan perizinan (RDTR ber-OSS dan kepastian zonasi).

Pengembangan Klaster secara makro-meso-mikro yang terkunci oleh prioritas jaringan akan mengarahkan investasi publik-swasta secara efisien, menumbuhkan daya saing industri Konawe, dan sekaligus menjaga keberlanjutan sosial-lingkungan sesuai visi “Konawe yang Berdaya Saing, Sejahtera, Adil, dan Berkelanjutan.”

3) Klaster Perkotaan dan Hilirisasi Pertanian-Perkebunan:

Meliputi Kecamatan Unaaha, Wawotobi, Konawe, Amonggedo, Lambuya, Besulutu, Abuki, Padangguni, Uepai, dan sekitarnya. Wilayah ini ditetapkan sebagai pusat produksi pertanian, hortikultura, dan peternakan terpadu. Arah kebijakan mencakup penguatan kapasitas SDM pertanian, pembangunan kawasan industri agro (agropolitan), penyediaan infrastruktur



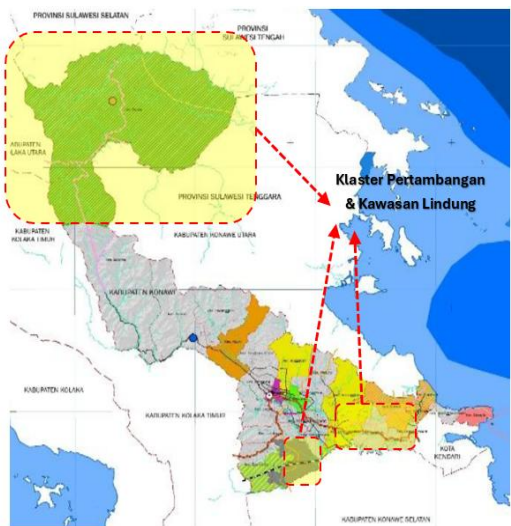
Gambar 3. 13 Klaster Dua

irigasi dan jalan usaha tani, pengembangan koperasi dan BUMDes, serta integrasi sistem distribusi pangan untuk mendukung ketahanan pangan

dan pengendalian inflasi daerah. Selain itu, pengembangan Kawasan Transmigrasi juga menjadi program intensif yang akan terus dikembangkan dalam upaya pengembangan wilayah di kabupaten konawe.

4) Klaster Zona Pertambangan dan Kawasan Lindung:

Meliputi Kecamatan Routa, Puriala, dan Pondidaha. Kawasan ini diarahkan untuk pengembangan industri pertambangan strategis (nikel, batuan, logam tanah jarang) secara berkelanjutan. Kebijakan diarahkan pada penataan ruang berbasis mitigasi risiko, penguatan pengawasan lingkungan, pengembangan kawasan industri hilirisasi, serta perlindungan



Gambar 3. 14 Klaster Tiga

kawasan konservasi dan wilayah perhutanan sosial. Komoditas unggulan seperti lada dan hasil perkebunan eksotis lainnya dikembangkan sebagai diversifikasi ekonomi lokal di luar sektor pertambangan. Secara lintas kawasan, kebijakan kewilayahan didukung oleh:

- Penyusunan rencana tata ruang berbasis daya dukung lingkungan dan risiko bencana.
- Pengembangan sistem transportasi terintegrasi (jalan, pelabuhan, logistik).
- Penguatan akses layanan dasar dan pusat pertumbuhan wilayah baru.
- Pembangunan infrastruktur energi, air baku, dan digitalisasi wilayah.
- Penguatan kelembagaan lokal dan kolaborasi multi-pihak dalam pengelolaan kawasan.

Sarah kewilayahan ini menjadi instrumen penting dalam pengendalian pembangunan spasial, sekaligus sebagai dasar perumusan program prioritas wilayah dalam RPJMD 2025–2029. Dengan pendekatan kewilayahan yang terintegrasi, diharapkan dapat tercapai pertumbuhan wilayah yang inklusif, berkeadilan spasial, serta berdaya saing dalam skala regional maupun nasional.

Tabel 3. 5 Matriks Arah Pengembangan Wilayah Konawe

Klaster Wilayah	Program Strategis	Hilight Intervensi	Fokus Pembangunan	Kecamatan Utama
Klaster Industri, Penyangga Perkotaan & Pariwisata	Peningkatan Infrastruktur Wilayah	Pembangunan pelabuhan	Kawasan transisi kota, industrialisasi pesisir, logistik, dan wisata bahari	Morosi, Bondoala, Soropia, Sampara, Kapoiala, Lalonggasumeeto
		Pembangunan Dry Port / Depo Kontainer		
		Pengendalian kawasan kumuh		
		Pengembangan Rumah Sakit Daerah		
		Pengelolaan Persampahan		
		pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai sarana perikanan terpadu		
		Pembangunan Rumah Susun Pekerja / Kawasan Rumah MBR		
		Peningkatan Jaringan Air Bersih / SPAM		
		Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik / SPALD		
	Penguatan konektivitas	Pembangunan jembatan Penghubung		
		Peningkatan Infrastruktur Jalan		
	Pengembangan Pariwisata	Pengembangan minawisata (perikanan dan Wisata)		
		Pengembangan wisata Tahunan berbasis Budaya		
		Peningkatan Sarana Prasarana Kawasan Wisata		
	Peningkatan Kawasan Ekonomi	Pembangunan pasar induk pangan		
Klaster Perkotaan & Hilirisasi Pertanian-Perkebunan	Pengembangan Kawasan Peternakan Terpadu	Pembangunan Kawasan Peternakan	Ketahanan pangan, pengendalian inflasi, dan ekonomi berbasis rakyat	Unaaha, Wawotobi, Abuki, Besulutu, Konawe, Amonggedo, Lambuya
		Pengembangan Produksi Jagung Pakan		
		Hilirisasi Produksi Pakan Ternak		
		Pengembangan Kawsan Transmigrasi		
	Peningkatan Infrastruktur Wilayah	Pembangunan Bendung Pelosika		
		Pengembangan energi terbarukan (PLTMH, surya dan Hidro)		

Klaster Wilayah	Program Strategis	Highlight Intervensi	Fokus Pembangunan	Kecamatan Utama
		Percepatan Konektivitas Latoma dan Rauta		
		Pengelolaan Persampahan		
		Peningkatan Jaringan Air Bersih / SPAM		
		Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik / SPALD		
	Pengembangan Kawasan Sentra UKM	Pembangunan Alun-Alun Kota Unaaha		
		Pembangunan Stadion Olah Raga		
		Pembangunan Kebun Binatang / Kebun Raya		
	Pengembangan Kawasan Tematik	Menembangkan satu produk unggulan di beberapa kecamatan		
		Memaksimalkan Produksi Perhutanan Sosial melalui tematik perkebunan		
	Pengembangan Kebudayaan	Pembangunan Museum Budaya		
		Revitalisasi Kawasan Cagar Budaya		
	Penguatan konektivitas di Sentra Produksi	Perbaikan Infrastruktur Jalan		
	Peningkatan Produksi Pertanian	Percetakan Lahan Sawah Baru		
		Peningkatan Teknologi dan Penelitian Bidang Pertanian		
		Perbaikan Jaringan Irigasi dan Jalan Usaha Tani		
	Pengembangan Perikanan Darat	Pembangunan Kawasan Pembibitan Ikan/BBI		
		Pengembangan Perikanan Rawa / Rawa Aopa		
	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pembangunan Balai Latihan Kerja Vokasi		
		Pelatihan SDM pertanian		

Klaster Wilayah	Program Strategis	Highlight Intervensi	Fokus Pembangunan	Kecamatan Utama
		Penguatan koperasi Merah Putih dan BUMDes		
Klaster Pertambangan & Kawasan Lindung	Pengembangan kawasan industri Pertambangan	Penataan Kawasan Pertambangan dalam rangka memaksimalkan potensi PAD	Ekstraksi sumber daya strategis, keberlanjutan lingkungan, dan konservasi	Routa,
	Pengembangan Konservasi	Rehabilitasi kawasan hutan		
	Diversifikasi komoditas	Pengembangan Kawasan Tematik / Lada		

Sumber; Tim Penyusun

Konsep pengembangan wilayah Kabupaten Konawe dibangun dengan tujuan utama menciptakan wilayah yang berdaya saing secara ekonomi, berkeadilan secara sosial, dan berkelanjutan secara ekologis. Untuk itu, strategi pembangunan wilayah diarahkan pada:

- Optimalisasi potensi lokal melalui industrialisasi yang berbasis sumber daya alam dan masyarakat
- Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru berbasis kota kecil penyangga
- Hilirisasi sektor unggulan: pertanian, peternakan, perkebunan, tambang, dan pariwisata
- Penyediaan infrastruktur wilayah yang mendukung konektivitas antar-klaster
- Integrasi pembangunan wilayah dengan tata ruang, mitigasi risiko, dan konservasi lingkungan

2. Keterpaduan Lintas Zona dan Program Lintas Sektor

Untuk menghindari fragmentasi pembangunan antar-zona, Pemerintah Kabupaten Konawe mengintegrasikan pembangunan klaster dengan sejumlah program lintas sektor dan kawasan, antara lain:

- Penyusunan tata ruang berbasis risiko dan daya dukung lingkungan
- Pembangunan sistem transportasi dan logistik terintegrasi (jalan penghubung, pelabuhan, jembatan strategis)
- Penyediaan layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, energi, dan internet
- Digitalisasi tata kelola wilayah melalui *command center* dan *smart district*

- Pengembangan SDM lokal melalui pelatihan, vokasi, dan pendampingan usaha

Melalui pendekatan klasterisasi wilayah yang terencana dan terintegrasi, Kabupaten Konawe berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperkuat daya saing antarwilayah, serta mewujudkan keseimbangan pembangunan antar sektor. Konsep ini sejalan dengan RPJMN 2025–2029, RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara, dan RPJPD Kabupaten Konawe, sehingga pembangunan wilayah berjalan dalam satu kerangka kebijakan nasional yang harmonis. Dengan demikian, pengembangan wilayah Kabupaten Konawe bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, melainkan juga menempatkan *keadilan spasial, ketahanan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat* sebagai fondasi pembangunan daerah menuju Konawe yang berdaya saing, sejahtera, adil, dan berkelanjutan.



Gambar 3. 15 Air Baku Kabupaten Konawe

Air Baku

Berbasis arah RPJMN 2025–2029, pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Kabupaten Konawe diposisikan sebagai pengungkit utama agenda **Swasembada Air** yang menopang ketahanan pangan, energi, dan kesehatan publik (*Food–Energy–Water Nexus*). Secara nasional, SDA berada pada Prioritas Nasional 2 dan diukur melalui Indeks Ketahanan Air; karena itu seluruh intervensi air di daerah harus menaut langsung dengan peningkatan produktivitas pertanian, keandalan pasokan air baku untuk industri dan kota, serta pengurangan risiko bencana banjir dan abrasi.

Sasaran pembangunan SDA daerah diselaraskan dengan dua sasaran PP “Swasembada Air”: (i) terwujudnya pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan produktif, serta (ii) meningkatnya rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi aman. Indikator turunannya yang diadopsi sebagai IKU/IKD RPJMD

meliputi kapasitas tampungan air, rasio kapasitas air baku terpasang terhadap kebutuhan penduduk/layanan, persentase luas sawah fungsional beririgasi, rasio layanan irigasi yang dijamin waduk/embung, efisiensi pemanfaatan air irigasi, persentase kawasan prioritas yang terlindungi dari daya rusak air, serta cakupan air minum dan sanitasi aman berikut penurunan praktik BABS.

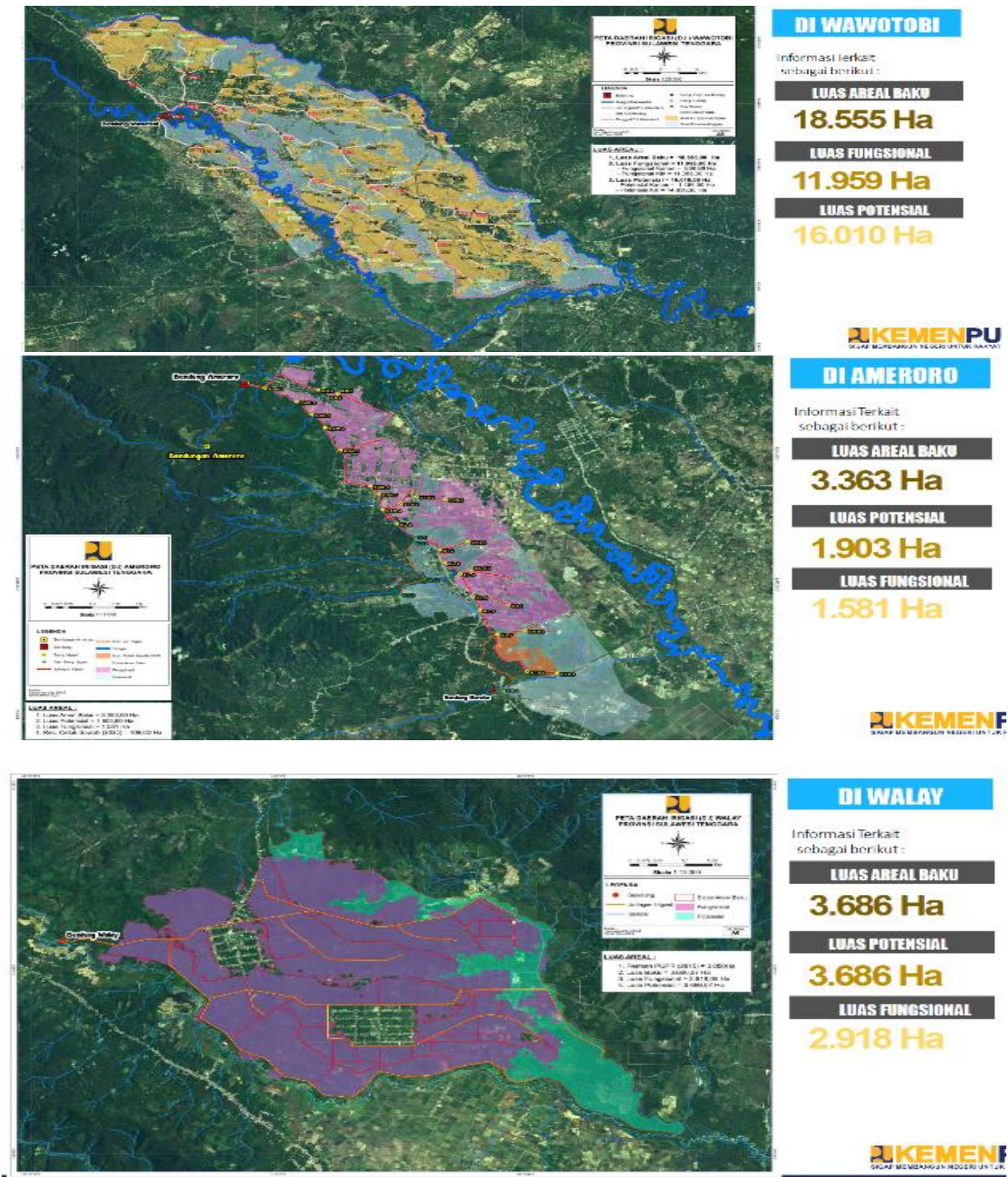


Gambar 3. 16 Air Baku Bendung Ameroro

Strategi kewilayahan diintegrasikan dengan tiga klaster pembangunan daerah. Pada Klaster Industri-Penyangga-Pariwisata (Morosi-Bondoala-Sampara-Soropia-Lalonggasumeeto-Anggalomoare-Kapoiala), fokus diarahkan pada keandalan air baku untuk kawasan industri dan permukiman pekerja (intake-IPA-transmisi *bulk*), pengendalian banjir dan proteksi pesisir, penataan sempadan sungai serta penguatan RTH biru-hijau yang menjadi prasyarat keberlanjutan kawasan industri dan destinasi wisata bahari.

Pada Klaster Perkotaan dan Hilirisasi Pertanian-Perkebunan (Unaaha-Wawotobi-Konawe dan sekitarnya), prioritasnya rehabilitasi dan modernisasi jaringan irigasi, pembangunan/optimalisasi tampungan kecil (embung), perluasan cakupan air minum dan sanitasi aman berbasis SPAM perpipaan dan sistem setempat berstandar, serta *raw water grid* yang menghubungkan tampungan-IPA-kota untuk ketahanan kekeringan sekaligus mendukung pengendalian inflasi pangan. Pada Klaster Zona Pertambangan dan Kawasan

Lindung (Routa–Puriala–Pondidaha), penekanan kebijakan pada mitigasi dampak hidrologi tambang (pengelolaan limpasan, *sediment trap*, normalisasi), rehabilitasi DAS dan *buffer zone*, penyediaan layanan air dasar bagi permukiman sekitar, serta pemantauan konservatif air tanah.



Gambar 3. 17 Jaringan Irigasi D.I Wawotobi, D.I Ameroro, D.I Walay

Agenda program disusun mengikuti klaster kegiatan prioritas nasional dan kewenangan BWS: KP01 (pembangunan dan pengelolaan tampungan air), KP02 (penyediaan pasokan air berkelanjutan—air baku metropolitan/perkotaan & strategis; kawasan sulit air; air baku berbasis bendungan/embung; pengembangan & rehabilitasi irigasi multikomoditas; penyempurnaan tata kelola infrastruktur; pengelolaan air tanah), dan KP03

(pengelolaan risiko daya rusak air—banjir, abrasi, dan perlindungan sempadan). Paket proyek tersebut menjadi *pipeline* usulan APBN-APBD yang



Gambar 3. 18 Jaringan Irigasi D.I Wawotobi, D.I Ameroro, D.I Walay

Dengan arsitektur kebijakan tersebut, pembangunan SDA di Kabupaten Konawe berfungsi sebagai *enabler* lintas-sektor: menjamin keandalan air baku untuk industri dan kota, mendorong produktivitas pertanian melalui irigasi yang efisien, menurunkan risiko bencana di pesisir dan DAS, serta memperkuat kesehatan publik. Pendekatan ini memastikan

investasi SDA memberikan nilai tambah ekonomi yang merata, berkeadilan spasial, dan mendukung daya saing Konawe di tingkat regional maupun nasional sepanjang 2025–2029.

3.2.2 Arah Kebijakan Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029

Strategi dan arah kebijakan dirumuskan dalam bentuk upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Strategi dirumuskan dengan memperhatikan sasaran yang ingin dicapai, sedangkan arah kebijakan merupakan operasionalisasi dari masing-masing strategi yang dirumuskan guna mendukung pencapaian setiap misi yang direncanakan oleh kepala daerah. Arah kebijakan yang dirumuskan akan menjadi panduan dalam melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan secara lebih spesifik dan kontekstual pada level renstra. Perumusan arah kebijakan setiap misi RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029 akan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. 6 Arah Kebijakan Daerah

No	Misi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pemerataan akses pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas	Bidang Kesehatan: •Rehabilitasi dan pembangunan puskesmas, rumah tunggu kelahiran, serta layanan persalinan gratis •Pengadaan puskesmas keliling, mobil layanan imunisasi dan telemedicine •Pelatihan dan insentif bagi bidan, perawat, dokter umum dan kader kesehatan tradisional • Implementasi MBG (Makanan Bergizi) bagi anak PAUD–SMA serta gizi ibu hamil/balita •Imunisasi dasar lengkap, skrining TBC, stunting dan kesehatan jiwa •Posyandu remaja, edukasi kesehatan reproduksi dan pengendalian narkoba. •Penerapan Program Cek Kesehatan Gratis •Bantuan sosial bersyarat untuk keluarga miskin guna menjamin akses kesehatan •Pembangunan Rumah Sakit di kawasan Industri dan kawasan pendukung lainnya. •Pembangunan Kawasan Olah Raga Terpadu. -Pencegahan Stunting melalui Program PEPSI (Pekan Edukasi Pencegahan Stunting) Bidang Pendidikan: • Rehabilitasi ruang kelas, pembangunan sekolah baru dan Sekolah Rakyat di wilayah transmigrasi/desa terpencil •Beasiswa bagi siswa berprestasi, anak miskin dan tahfiz Al-Qur'an; pemberian seragam gratis •Pelatihan kompetensi dan sertifikasi guru serta penambahan tunjangan pendidik ASN •Pengadaan bus sekolah, fasilitas ramah disabilitas dan perpustakaan digital. • Dukunan percepatan Sekolah Rakyat •Program pemberantasan buta aksara, pendidikan non-formal berbasis komunitas dan pelatihan vokasi bagi perempuan & difabel

No	Misi	Arah Kebijakan
2	Meningkatkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi lokal dan inovasi teknologi	3. Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui; Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis Koperasi & UMKM: •Konsolidasi, pembentukan dan penguatan Kopdes/BUMDes Merah Putih; pembukaan koperasi perempuan dan koperasi pemuda •Pelatihan manajemen, pemasaran digital dan akuntansi; akses KUR, CSR dan modal ventura •Diversifikasi usaha (agribisnis, jasa transportasi, kerajinan) dan program <i>One Village One Product/Kawasan Tematik</i> •Revitalisasi pasar rakyat, pembangunan pasar induk dan pengembangan marketplace lokal •Pembangunan Kawasan Alun-Alun Kalosara Sebagai wadah pengembangan UMKM. • Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Penguatan Industri & Inovasi: •Pembangunan smelter nikel, pabrik precursor, katoda, baterai EV dan special steel •Revitalisasi sentra IKM logam, rotan dan kakao; pembentukan pusat riset dan inkubator inovasi •Pembangunan jalan shortcut & jembatan Tabanggele-Pebunooha untuk menunjang logistik industri •Pendampingan SMK, balai latihan kerja dan program magang industri dengan sertifikasi •Pengembangan pariwisata pesisir (minawisata) dan agrowisata desa sebagai potensi lokal baru •Pengembangan Kawasan Industri dan hilirisasi Peternakan •Pengembangan Kawasan Perikanan Darat •Pengembangan Kawasan Perkotaan Kecil Morosi •Pengembangan Kawasan Kampung Nelayan Merah Putih •Pengembangan Kawasan Lumbung Pangan Daerah • Peraturan daerah kemudahan berinvestasi Pengendalian Inflasi • Melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia • Melaksanakan rapat teknis tim pengendalian inflasi daerah • Menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting • Melaksanakan Pencanangan gerakan menanam • Melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait • Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang • Berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan • Merealisasikan Belanja Tak Terduga (BTT) untuk dukungan pengendalian inflasi • Memberikan bantuan transportasi dari APBD 18. Penanggulangan Kemiskinan • Penguatan perlindungan sosial melalui perbaikan DTKS 19. Ketahanan pangan dan air; • Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian • Hilirisasi dan Nilai Tambah Pangan; • Penguatan Distribusi dan Cadangan Pangan Daerah • Peningkatan Kualitas Konsumsi dan Gizi Masyarakat • Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan
3	Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan partisipatif	Reformasi & Digitalisasi: •Penerapan SPBE untuk layanan perizinan, pajak, NIK, SP4N-LAPOR, dan e-procurement; integrasi data (Satu Data Konawe) •Penguatan SPIP, MCP KPK, LPPD dan SAKIP; peningkatan SDM Auditor, penerapan anggaran berbasis kinerja; reward-punishment bagi ASN; pelatihan antikorupsi dan etika publik •Penataan struktur organisasi OPD, perampingan birokrasi dan optimalisasi pelayanan keliling (KTP/KK) •Penerapan Smart Konawe di tiap desa dan kelurahan dalam pemberian pelayanan dan updating data kependudukan. Partisipasi & Kemitraan: •Musrenbang inovatif dan forum konsultasi publik yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, perempuan dan pemuda •Pengembangan platform transparansi anggaran dan dashboard real-time layanan •Penyusunan <i>project pipeline</i> KPBU/PINA; perjanjian CSR terukur dengan perusahaan tambang dan industri

No	Misi	Arah Kebijakan
		•Kemitraan riset dengan universitas, pelibatan diaspora Konawe dalam investasi dan transfer teknologi •Platform crowd-funding untuk proyek sosial, pendidikan, kesehatan dan konservasi. •Peningkatan kerjasama antar daerah
4	Memperkuat ketahanan sosial dan budaya masyarakat dengan melestarikan kearifan lokal, nilai-nilai tradisional, dan kerukunan antar umat beragama	Pelestarian Budaya & Kearifan Lokal: •Revitalisasi dan digitalisasi situs budaya, museum, taman purbakala dan cagar budaya LAIKAMBUU •Festival budaya tahunan, pameran seni, lomba tradisi serta dukungan sanggar seni dan komunitas adat •Pendidikan nilai-nilai budaya, kerajinan tangan dan bahasa daerah di sekolah dan komunitas •Revitalisasi Kawasan MTQ sebagai pusat Pendidikan agama dan budaya Kerukunan & Sosial: •Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dialog rutin antar agama dan sosialisasi toleransi •Pemberdayaan perempuan dan pemuda melalui pelatihan kepemimpinan, usaha kreatif dan koperasi •Program desa wisata budaya dan minawisata untuk mempromosikan budaya lokal dan meningkatkan ekonomi •Pendampingan hukum, mediasi konflik dan kampanye anti kekerasan berbasis gender •Integrasi transmigran dengan masyarakat lokal melalui festival budaya, koperasi bersama dan dialog adat
5	Menerapkan pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	Konservasi & Green Economy: •Reforestasi hutan lindung, rehabilitasi DAS, penghijauan lahan kritis dan perlindungan mangrove •Pembentukan kawasan konservasi laut, transplantasi terumbu karang dan budidaya rumput laut •Program perhutanan sosial, agroforestry lada/kopi/kakao dan skema pembayaran jasa lingkungan •Pengembangan energi terbarukan (PLTS desa, PLTMH, biomassa) dan efisiensi energi industri •Program bank sampah, pengelolaan limbah organik/B3, komposting dan pengolahan air limbah domestik serta TP3SR di beberapa kecamatan inti. •Pembangunan Kawasan Taman Safari dan Kebun Binatang sebagai bentuk pelestarian Lingkungan dan satwa sekaligus sarana edukasi masyarakat. Mitigasi & Adaptasi Iklim: •Penyusunan peta risiko bencana; sistem peringatan dini tsunami, banjir dan kebakaran hutan •Pembangunan tanggul, kanal, sumur resapan dan peningkatan drainase; desain bangunan tahan banjir/gempa •Pelatihan evakuasi, simulasi bencana dan peningkatan kapasitas relawan desa •Program konsumsi & produksi bertanggung jawab, ekonomi sirkular dan kampanye <i>zero waste</i> •Audit K3 di industri, peningkatan peralatan pemadam kebakaran dan penegakan Perda lingkungan
6	Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur antara desa dan kota	Konektivitas & Layanan Dasar: •Pembangunan/rehabilitasi jalan kabupaten, jalan usaha tani dan jembatan penghubung Morosi-Kendari •Pembangunan <i>dry port/Depo Kontainer</i> dan Pelabuhan di wilayah Morosi dan sekitarnya. •Penyediaan SPAM regional, pengembangan IPA desa/kecamatan, penyediaan air bersih, sumur bor dan instalasi air limbah (IPAL) •Perluasan jaringan listrik desa, pembangunan PLTS & PLTMH, serta penyediaan jaringan internet 4G/5G •Rehabilitasi drainase kota, pembangunan sumur resapan dan taman resapan air Perumahan & Fasilitas Sosial: •Mendukung Program 3 Juta Rumah lokal: pembangunan rumah susun pekerja, rumah MBR, perumahan vertikal dan renovasi rumah swadaya •Penataan kawasan kumuh, kampung nelayan dan penyediaan ruang terbuka hijau •Pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, olahraga dan pasar induk di desa dan kota

No	Misi	Arah Kebijakan
		•Penyediaan lahan perumahan di kawasan industri dan transmigrasi, serta percepatan sertifikasi tanah • Integrasi perencanaan infrastruktur desa–kota melalui pemetaan spasial dan sistem informasi geografis

Dalam RPJMN Tahun 2025-2029 terdapat program prioritas nasional yang menjadi fokus pembangunan untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan dituangkan kedalam dokumen perencanaan. Sehingga untuk memastikan sinkronisasi terhadap program nasional pemerintah daerah kabupaten telah menuangkan arah kebijakan terhadap program nasional ke dalam RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029 yang tergambar pada tabel dibawah ini;

Tabel 3. 7 Arah Kebijakan Daerah terhadap Program Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN DAERAH
1	2	3
1	PENANGGULANGAN KEMISKINAN	
	OPTIMALISASI PELAKSANAAN PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKTREM	Penyusunan basis data kemiskinan yang akurat
	SEKOLAH RAKYAT	Fasilitasi lahan
	PEMBANGUNAN 3 JUTA RUMAH	fasilitasi pembangunan perumahan MBR
		penyederhanaan perizinan
		penentuan kelompok sasaran
2	KETAHANAN PANGAN DAN AIR	
	PENGADAAN DAN PENGELOLAAN GABAH/BERAS DALAM NEGERI SERTA PENYALURAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian;
		Rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier untuk menjamin ketersediaan air
		Penerapan teknologi pertanian modern, benih unggul, dan sistem tanam terpadu.
		• Diversifikasi produksi komoditas pangan strategis seperti padi, jagung, dan kedelai.
		• Penguatan kelembagaan kelompok tani dan penyuluh untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.
		Hilirisasi dan Nilai Tambah Pangan;
		• Peningkatan kapasitas pascapanen melalui pelatihan, peralatan, dan pengolahan
		• Pengembangan industri berbasis pangan lokal (beras, jagung, olahan perkebunan).
		• Fasilitasi kemitraan antara petani, koperasi, BUMDes, dan pelaku usaha.
		• Dukungan pengembangan kawasan agrowisata pangan yang bernilai ekonomi tinggi.
		Penguatan Distribusi dan Cadangan Pangan Daerah
		Pembentukan dan penguatan lumbung pangan desa serta cadangan pangan pemerintah daerah.
		Kolaborasi dengan BUMD pangan dan Bulog dalam penyaluran cadangan beras pemerintah (CBP).
		Optimalisasi jaringan logistik dan transportasi pangan antar wilayah.
		Fasilitasi akses pasar bagi petani dan UMKM berbasis pangan

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN DAERAH
1	2	3
		Peningkatan Kualitas Konsumsi dan Gizi Masyarakat
		• Implementasi program makan bergizi gratis berbasis pangan lokal untuk anak sekolah • Sosialisasi pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA). • Penguatan program penurunan stunting melalui intervensi gizi dan pangan lokal. • Edukasi masyarakat tentang ketahanan pangan rumah tangga.
		Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan
		• Adaptasi perubahan iklim dan mitigasi risiko bencana terhadap produksi pangan • Pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif. • Digitalisasi data pangan daerah sebagai dasar perencanaan. • Peningkatan koordinasi lintas sektor (pertanian, perikanan, perdagangan, kesehatan, pendidikan).
3	KETAHANAN ENERGI DAN LISTRIK	
		berkomitmen memperkuat keandalan pasokan energi dan jaringan listrik melalui kerja sama dengan PLN dalam pengembangan gardu induk dan saluran distribusi. Upaya ini diarahkan untuk memastikan layanan energi dapat menjangkau seluruh kecamatan, termasuk desa pesisir dan pedalaman, serta memberikan prioritas pada fasilitas vital seperti rumah sakit, sekolah, dan sarana air bersih
		diversifikasi sumber energi berbasis potensi lokal dengan mendorong pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
		pemerintah daerah menekankan efisiensi energi dan manajemen permintaan. Program konversi penerangan jalan umum (PJU) ke lampu LED hemat energi, penerapan standar bangunan hemat energi untuk fasilitas publik, serta edukasi hemat energi bagi rumah tangga dan UMKM akan menjadi bagian penting dari strategi penghematan beban energi sekaligus menekan biaya operasional daerah
		meningkatkan akses energi yang inklusif dan mendukung ekonomi rakyat. Penerapan solusi energi untuk mendukung usaha tani, perikanan, UMKM, dan rumah tangga, seperti solar pump untuk irigasi, cold storage berbasis energi efisien untuk perikanan, serta SPBN/agen BBM di wilayah perdesaan, akan memperkuat produktivitas ekonomi masyarakat.
4	KEGIATAN KESEHATAN UNTUK SEMUA	
	JAMINAN KESEHATAN NASIONAL	Menanggung kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) daerah.
	MAKAN BERGIZI GRATIS	Makan bergizi gratis (MBG) harus dijalankan dengan melibatkan sekolah, pesantren, dan kelompok masyarakat, yang di daerah diturunkan melalui program penurunan stunting, peningkatan gizi anak, serta pemberdayaan pangan lokal.
5	PERLUASAN AKSES PENDIDIKAN	
	PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN REVITALISASI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	pembangunan unit sekolah baru di wilayah terpencil rehabilitasi sarana prasarana peningkatan kualitas guru pemberian bantuan pendidikan
6	PERTUMBUHAN EKONOMI	
	PENGENDALIAN INFLASI	• Melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia • Melaksanakan rapat teknis tim pengendalian inflasi daerah • Menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN DAERAH
1	2	3
		· Melaksanakan Pencanangan gerakan menanam · Melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait
		· Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang · Berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan · Merealisasikan Belanja Tak Terduga (BTT) untuk dukungan pengendalian inflasi · Memberikan bantuan transportasi dari APBD
	PERCEPATAN PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH	Konsolidasi, pembentukan dan penguatan Kopdes/BUMDes Merah Putih; pembukaan koperasi perempuan dan koperasi pemuda
	KEMUDAHAN PERIZINAN DI DAERAH	sistem pelayanan terpadu berbasis digital Peraturan daerah kemudahan perizinan

3.2.3 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Rencana program prioritas daerah Kabupaten Konawe merupakan kumpulan program yang disusun untuk mencapai sasaran pembangunan daerah melalui strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya.

Pemerintah Kabupaten Konawe menargetkan terwujudnya “Konawe yang berdaya saing, sejahtera, adil, dan berkelanjutan”. Berikut adalah program prioritas pembangunan daerah RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029 yang dijabarkan dalam 9 Prioritas Pembangunan Bersahaja dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pertama, penanggulangan kemiskinan dijalankan secara terintegrasi: pembaruan data sasaran, penyelarasan bantuan sosial dengan pemberdayaan ekonomi, perluasan “Sekolah Rakyat” di wilayah sulit layanan, serta fasilitasi rumah layak huni dan prasarana permukiman. Arah ini memastikan warga miskin dan rentan memperoleh layanan pendidikan, kesehatan, perumahan, dan kesempatan berusaha secara bersamaan.
2. Kedua, ketahanan pangan diperkuat dari hulu ke hilir. Daerah melakukan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan beras pemerintah, menstabilkan harga melalui koordinasi TPID, serta mendorong diversifikasi konsumsi dan gizi berimbang berbasis pangan lokal. Program ini menyatu dengan pengembangan agribisnis sehingga petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil menikmati nilai tambah yang lebih besar.
3. Ketiga, kesehatan untuk semua diwujudkan lewat pemenuhan standar layanan primer dan rujukan, akreditasi fasilitas, dan kepastian

pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional. Intervensi gizi diperkuat melalui program makan bergizi gratis bagi peserta didik, disertai pengendalian faktor risiko penyakit dan layanan promotif-preventif di masyarakat.

4. Keempat, perluasan akses pendidikan difokuskan pada revitalisasi sarana belajar, pemerataan dan peningkatan kompetensi guru, digitalisasi pembelajaran, serta penguatan tata kelola satuan pendidikan. Kolaborasi dengan dunia usaha mendorong vokasi, magang, dan kewirausahaan muda agar lulusan lebih siap kerja.
5. Kelima, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh hilirisasi produk pertanian dan perikanan, pengembangan destinasi agrowisata, serta penguatan UMKM dan koperasi desa/kelurahan merah putih. Iklim investasi diperbaiki melalui perizinan yang sederhana dan pasti, layanan OSS/SiCantik yang pro-pelaku usaha, promosi investasi yang selektif, dan keberpihakan pada produk lokal.
6. Keenam, pemerataan infrastruktur desa-kota diarahkan pada peningkatan konektivitas jalan dan transportasi, pelebaran akses air minum aman dan sanitasi layak, perbaikan drainase, serta penataan kawasan permukiman. Penyelenggaraan infrastruktur wajib konsisten dengan RTRW/RDTR dan prinsip desain hijau.
7. Ketujuh, tata kelola pemerintahan diperbaiki melalui reformasi birokrasi, digitalisasi layanan (SPBE), penguatan pengawasan internal, dan pengadaan yang kompetitif. Manajemen keuangan daerah dijalankan secara transparan dan akuntabel, dengan kontrak kinerja yang jelas pada setiap perangkat daerah.
8. Kedelapan, daya tahan sosial-budaya diperkuat lewat pelestarian cagar budaya, peningkatan moderasi beragama dan pencegahan konflik, penurunan kriminalitas berbasis komunitas, serta pengarusutamaan gender, perlindungan anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan.
9. Kesembilan, kualitas lingkungan dan ketahanan bencana ditingkatkan melalui pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah berhirarki 3R, rehabilitasi DAS, dan kesiapsiagaan darurat termasuk layanan penyelamatan kebakaran. Program adaptasi dan mitigasi berjalan seiring dengan pengembangan ekonomi hijau dan sirkular.

Penjabaran ke-9 Program Prioritas Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029 ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 8 Program Prioritas Daerah RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PRIORITAS	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
VISI : KONAWE YANG BERDAYA SAING, SEJAHTERA, ADIL DAN BERKELANJUTAN						
I. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN DAN LAYANAN KESEHATAN YANG BERKUALITAS	1.1	Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		
		1.1.1	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)		
			1.02.02	MENINGKATNYA UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN
			1.02.03	MENINGKATNYA MUTU DAN DISTRIBUSI TENAGA KESEHATAN	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
			1.02.04	MENINGKATNYA KUALITAS DAN DISTRIBUSI SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN, DAN MAKANAN MINUMAN	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	DINAS KESEHATAN
			1.02.05	MENINGKATNYA KUALITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
			2.14.02	MENINGKATNYA INDEKS PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN (IPBK)	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			2.14.03	MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		1.1.2	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	Rata Rata Lama Sekolah		
				Harapan Lama Sekolah		
			1.01.02	MENINGKATNYA PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 5-18 TAHUN DALAM PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN MENENGAH, SERTA PENDIKAN KESETARAAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			1.01.04	MENINGKATNYA MUTU DAN DISTRIBUSI PENDIDIK DAN TENAGA PENDIDIKAN	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			1.01.05	MENINGKATNYA KUALITAS DAN DISTRIBUSI INSTITUSI PENDIDIKAN	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			2.19.03	MENINGKATNYA PRESTASI OLAH RAGA PADA CABANG OLAH RAGA UNGGULAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			2.23.02	MENINGKATNYA LAYANAN PERPUSTAKAAN SESUAI STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PRIORITAS	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
II. MENINGKATKAN DAYA SAING EKONOMI DAERAH MELALUI PENGEMBANGAN POTENSI LOKAL DAN INOVASI TEKNOLOGI	2.1 Mewujudkan Struktur Ekonomi yang Inklusif dan Bedaya Saing			Indeks Daya Saing Daerah		
				PDRB Per Kapita		
				Rasio Gini		
		2.1.1 Meningkatnya Pemerataan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penciptaan Lapangan Kerja dan Penguatan Ekonomi Lokal yang Inklusif		Angka Kemiskinan		
				Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		
			1.06.02 MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN SOSIAL	PERSENTASE PEKERJA SOSIAL/TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN SOSIAL DI DALAM PANTI REHABILITASI SOSIAL BAGI PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS) LAINNYA DI LUAR HIV/AIDS DAN NAPZA	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	DINAS SOSIAL
			1.06.04 MENINGKATNYA REHABILITASI SOSIAL	PERSENTASE PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS) LAINNYA DI LUAR HIV/AIDS DAN NAPZA YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	DINAS SOSIAL
			1.06.05 MENINGKATNYA PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PERSENTASE PENERIMA MANFAAT YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASAR	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	DINAS SOSIAL
			2.07.03 MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA DI SEKTOR PRIORITAS YANG MENINGKAT PRODUKTIVITASNYA	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
			2.07.04 MENINGKATNYA PENEMPATAN TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN DI DALAM NEGERI	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
			2.17.02 MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	PERTUMBUHAN VOLUME USAHA KOPERASI	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
			2.17.06 MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS KOPERASI	PERSENTASE MENINGKATNYA KOPERASI YANG BERKUALITAS	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
			2.17.07 MENINGKATNYA KAPASITAS UMKM YANG TANGGUH DAN MANDIRI	PERSENTASE USAHA KECIL YANG BERTRANSFORMASI DARI INFORMAL KE FORMAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
			2.17.08 MENINGKATNYA DAYA SAING UMKM	PROPORSI UKM MENJALIN KEMITRAAN DAN EKSPOR	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
			2.19.02 MENINGKATNYA DAYA SAING KEPEMUDAAN	RASIO WIRUSAHA PEMUDA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		2.1.2 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi		Laju Pertumbuhan Ekonomi		
			2.18.02 MENINGKATNYA KEMUDAHAN BERINVESTASI	REALISASI TOTAL TERHADAP TARGET INVESTASI	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PRIORITAS	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			2.18.03 MENINGKATNYA JANGKAUAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PENINGKATAN INVESTOR YANG BERIVENSTASI	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			2.18.04 MENINGKATNYA PERIZINAN BERUSAHA RISIKO	PERSENTASE PELAKU USAHA YANG MEMPEROLEH IZIN SESUAI KETENTUAN	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			3.25.03 MENINGKATNYA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	JUMLAH TOTAL PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	DINAS PERIKANAN
			3.25.04 MENINGKATNYA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	JUMLAH TOTAL PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	DINAS PERIKANAN
			3.26.02 MENINGKATNYA DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	PERSENTASE PERTUMBUHAN KUNJUNGAN WISATAWAN	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
			3.26.05 MENINGKATNYA SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	PERSENTASE PELAKU PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF YANG AKTIF DAN TERVALIDASI	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
			3.27.02 MENINGKATNYA DISTRIBUSI DAN KUALITAS SARANA PERTANIAN	PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITAS PETERNAKAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			3.27.02 MENINGKATNYA DISTRIBUSI DAN KUALITAS SARANA PERTANIAN	PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
			3.27.03 MENINGKATNYA DISTRIBUSI DAN KUALITAS PRASARANA PETERNAKAN	PERSENTASE PENINGKATAN PRASARANA PERTANIAN TERHADAP PETERNAK DAN KELOMPOK TERNAK	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			3.27.03 MENINGKATNYA DISTRIBUSI DAN KUALITAS PRASARANA PERTANIAN	PERSENTASE KELOMPOK TANI YANG DIBERI BANTUAN PRASARANA PERTANIAN		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
			3.27.07 MENINGKATNYA SDM KELOMPOK TANI TERNAK DAN PENYULUH PETERNAKAN	PERSENTASE PENINGKATAN SDM KELOMPOK TANI TERNAK DAN PENYULUH PETERNAKAN	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			3.27.07 MENINGKATNYA KAPASITAS SDM BIDANG PENYULUH PERTANIAN	PERSENTASE SDM PENYULUH PERTANIAN YANG DITINGKATKAN		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
			3.30.02 MENINGKATNYA KEMUDAHAN PROSES PERIZINAN DAN PENDAFTARAN BERUSAHA	PERSENTASE IZIN USAHA PERDAGANGAN YANG DIFASILITASI	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
			3.30.03 MENINGKATNYA KUALITAS SARANA PERDAGANGAN DAN DISTRIBUSI BARANG YANG EFISIEN, MERATA DAN TERINTEGRITAS	PERSENTASE SARANA PERDAGANGAN YANG DITINGKATKAN KUALITASNYA	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
			3.30.04 MENINGKATNYA KELANCARAN DISTRIBUSI DAN STABILITAS HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	PERSENTASE STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
			3.30.05 MENINGKATNYA PELAKU USAHA YANG BERORIENTASI EKSPOR	NILAI EKSPOR BARANG	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
			3.31.03 MENINGKATNYA KUALITAS PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERINDUSTRIAN	PERSENTASE IZIN USAHA INDUSTRI YANG DITERBITKAN	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PRIORITAS	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
III. MENGOPTIMALKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKIF DAN PARTISIPATIF	3.1 Meningkatkan Efektivitas, Akuntabilitas, dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Transparan dan Responsif			Indeks Reformasi Birokrasi (RB)		
		3.1.1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Antikorupsi		Indeks Reformasi Hukum		
				Nilai SAKIP		
				MCP KPK		
				Nilai Capaian Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)		
				Kepatuhan Pelayanan Publik		
			X.XX.01 MENINGKATNYA KEPATUHAN PERANGKAT DAERAH DALAM TATA KELOLA ADMINISTRASI, PELAPORAN KINERJA, DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH SECARA TEPAT WAKTU, LENGKAP, DAN SESUAI KETENTUAN	PERSENTASE RATA-RATA KEPATUHAN TATA KELOLA PERANGKAT DAERAH (1)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	SEMUA OPD
			2.12.02 MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	PERSENTASE KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			2.12.03 MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PENCATATAN SIPIL	PERSENTASE KEPEMILIKAN DOKUMEN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			2.16.03 MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	INDEKS SPBE	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			2.24.02 MENINGKATNYA TATA KELOLA ARSIP DINAMIS DAN STATIS	TINGKAT KETERSEDIAAN ARSIP	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			4.01.02 MENINGKATKAN PELAYANAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI KOORDINASI DAN FASILITASI YANG EFEKTIF	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN KOORDINASI DAN FASILITASI YANG EFEKTIF (58)	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKRETARIAT DAERAH
			4.01.03 MENINGKATKAN KUALITAS PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI PENGUATAN KOORDINASI KEBUJAKAN DAN PENGELOLAAN STRATEGIS	PERSENTASE KEGIATAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN KOORDINASI KEBUJAKAN DAN PENGELOLAAN STRATEGIS (62)	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	SEKRETARIAT DAERAH
			4.02.02 MENINGKATNYA KUALITAS PERSIDANGAN DAN KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PERSENTASE PENETAPAN RANPERDA TAHUN N.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	SEKRETARIAT DPRD
			5.01.02 MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE KESELARASAN RPJMD DENGAN RKPd DAN RENSTRA PD	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PRIORITAS	KET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
			5.01.03	MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	PERSENTASE KESELARASAN RKPD DENGAN RENJA PD PADA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			5.02.02	MENINGKATNYA KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PERSENTASE KETEPATAN WAKTU PENETAPAN DAN PENERBITAN DOKUMEN PENGANGGARAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			5.02.03	MENINGKATNYA TATA KELOLA ASET DAERAH	PERSENTASE PENAMBAHAN NILAI ASET TETAP	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			5.02.04	MENINGKATNYA UPAYA EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI PENDAPATAN	PERSENTASE PAD TERHADAP PENDAPATAN DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
			5.03.02	MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR YANG PROFESIONAL, KOMPETEN, DAN BERORIENTASI KINERJA	PERSENTASE KUALITAS PENGELOLAAN SDM ASN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			5.04.02	MENINGKATNYA LAYANAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DASAR, KADER, MANAJERIAL, DAN FUNGSIONAL	PERSENTASE ASN YANG MENDAPATKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DASAR, MANAJERIAL, DAN FUNGSIONAL	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			5.05.03	MENINGKATNYA PEMANFAATAN INOVASI DAERAH DALAM PEMBANGUNAN	PERSENTASE PRODUK INOVASI YANG DIMANFAATKAN	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
			6.01.02	MENURUNNYA TERJADINYA PENYELEWENGAN ATAU PENYIMPANGAN, BAIK YANG BERSIFAT ANGGARAN ATAU PUN PROSES DAN KEWENANGAN	PERSENTASE REKOMENDASI BPK YANG DITINDAKLANJUTI	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
			6.01.03	MENINGKATNYA KUALITAS PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP)	PROGRAM PERUMUSAN KEBUJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
			7.01.02	MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERLAKSANA (77)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN
			7.01.05	MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG BAIK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PERSENTASE KEGIATAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG TERLAKSANA (77)	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN
IV. MEMPERKUAT KETAHANAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT DENGAN MELESTARIKAN KEARIFAN LOKAL, NILAI-NILAI TRADISIONAL, DAN KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA.	4.1	Meningkatkan Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)			
		4.1.1	Terlestarinya Tradisi, Seni dan Praktik Budaya Lokal sebagai Identitas Masyarakat	Persentase Tradisi, Seni, Cagar, dan Warisan Budaya yang Dilestarikan			
			1.06.07	MENINGKATNYA TATA KELOLA TAMAN MAKAM PAHLAWAN	PERSENTASE TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL YANG TERKELOLA DENGAN BAIK	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	DINAS SOSIAL
			2.22.02	MENINGKATNYA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PRIORITAS	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			2.22.05 MENINGKATNYA WARISAN BUDAYA YANG DILESTARIKAN	PERSENTASE CAGAR BUDAYA DAN WARISAN BUDAYA TAK BENDA YANG DITETAPKAN	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			2.23.03 MENINGKATNYA PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	PERSENTASE KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO YANG DIMILIKI	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		4.1.2 Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman, dan toleran melalui penguatan kerukunan antar umat beragama serta penurunan angka kriminalitas		Angka Kriminalitas (crime rate)		
				Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)		
			1.05.02 MENINGKATNYA PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN TIBUMTRANMAS	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			2.10.04 MENINGKATNYA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	PERSENTASE SENGKETA TANAH PENYELESAIAN TERSELESAIKANNYA GARAPAN SENGKETA TANAH KASUS TANAH GARAPAN BELUM BERSERTIFIKAT YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIASI	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			8.01.02 MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT AKAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	CAKUPAN PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			8.01.05 MENINGKATNYA KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA MASYARAKAT	PERSENTASE KEBUJAKAN DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAM DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH YANG DILAKSANAKAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			8.01.06 MENINGKATNYA PENANGANAN KONFLIK SOSIAL YANG DISELESAIKAN	PERSENTASE KONFLIK SOSIAL YANG DISELESAIKAN	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		4.1.3 Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif		Indeks Pembangunan Gender (IPG)		
			2.08.02 MENINGKATNYA KUALITAS DAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PUG DAN PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN	PERSENTASE ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ARG)	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			2.08.03 MENURUNNYA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	PERSENTASE PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DAN TPPO YANG MENDAPATKAN LAYANAN KOMPREHENSIF	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			2.08.04 MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA)	TINGKAT PEMANFAATAN LAYANAN PEMBELAJARAN KELUARGA YANG SESUAI STANDAR	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PRIORITAS	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			2.08.07 MENINGKATNYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK KEKERASAN, EKSPLOITASI, PENELANTARAN, PERKAWINAN DAN PERLAKUAN SALAH LAINNYA TERHADAP ANAK	PERSENTASE ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MENDAPATKAN LAYANAN KOMPREHENSIF	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
V. MENERAPKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DENGAN MEMPERHATIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN	5.1 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Ekosistem Melalui Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan			Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)		
		5.1.1 Terwujudnya Kemandirian Pangan yang Berkelanjutan		Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)		
			2.09.02 MENINGKATNYA PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	PERSENTASE JUMLAH CADANGAN PANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	DINAS KETAHANAN PANGAN
			2.09.03 MENINGKATNYA DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	SKOR POLA PANGAN HARAPAN	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	DINAS KETAHANAN PANGAN
			2.09.04 MENINGKATNYA PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	PERSENTASE DAERAH RENTAN RAWAN PANGAN	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	DINAS KETAHANAN PANGAN
			3.25.05 MENINGKATNYA PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERSENTASE PENINGKATAN PELAKU USAHA PERIKANAN YANG DI AWASI	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS PERIKANAN
			3.27.05 TERKENDALINYA WABAH PENYAKIT HEWAN	PERSENTASE PENANGGULANGAN WABAH HEWAN YANG DITANGANI	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			3.27.05 MENINGKATNYA PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	PERSENTASE PENANGANAN BENCANA PERTANIAN	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
			3.27.06 MENINGKATNYA KUALITAS DAN KEMUDAHAN PERIZINAN USAHA PERTANIAN	PERSENTASE PENERBITAN REKOMENDASI IZIN USAHA PETERNAKAN	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			3.27.06 MENINGKATNYA KUALITAS DAN KEMUDAHAN PERIZINAN USAHA PERTANIAN	PERSENTASE PENERBITAN REKOMENDASI IZIN USAHA PERTANIAN	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		5.1.2 Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas dan Resiliensi terhadap Bencana		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		
				Indeks Resiko Bencana		
			1.03.04 MENINGKATNYA LAYANAN PERSAMPAHAN REGIONAL	PERSENTASE SAMPAH YANG DIKELOLA DI TPA/TPST REGIONAL	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			1.05.03 MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA, MENINGKATNYA PENANGANAN BENCANA PADA SAAT TANGGAP DARURAT, MENINGKATNYA PENANGANAN BENCANA PADA SAAT PASCA BENCANA	PERSENTASE CAKUPAN PENYEBARAN INFORMASI DAN EDUKASI RAWAN BENCANA, PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA, PENANGANAN PASCA BENCANA	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			1.05.04 MENINGKATNYA LAYANAN PENCEGAHAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN, EVAKUASI DAN PENYELAMATAN	CAKUPAN LAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PRIORITAS	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			1.06.06 MENINGKATNYA PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA	PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM, SOSIAL DAN/ATAU NON ALAM YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASAR PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	DINAS SOSIAL
			2.11.02 MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KAJIAN LINGKUNGAN UNTUK MEMITIGASI DAMPAK KRP	PERSENTASE REKOMENDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DITINDAKLANJUTI	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			2.11.03 MENINGKATNYA PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE PENANGGULANGAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			2.11.05 MENINGKATNYA PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	PERSENTASE LIMBAH B3 YANG TERKELOLA	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			2.11.06 MENINGKATNYA KEPATUHAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TERHADAP PERSETUJUAN LINGKUNGAN YANG DITERBITKAN	KETAATAN PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN, IZIN PPLH DAN PUU LH	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			2.11.11 MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH	INDEKS KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
VI. MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR ANTARA DESA DAN KOTA	6.1 Meningkatkan Aksesibilitas dan Pemerataan Infrastruktur Dasar yang Mendukung Konektivitas Wilayah, Pelayanan Publik, dan Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah			Indeks Infrastruktur		
		6.1.1 Meningkatnya Konektivitas Wilayah dan Pemerataan Akses Infrastruktur Dasar untuk Menurunkan Disparitas Antar Wilayah		Rasio Konektivitas Wilayah		
				Persentase Desa Mandiri		
			2.13.02 MENINGKATNYA KUALITAS PENATAAN DESA	PERSENTASE FASILITASI PENATAAN DESA	PROGRAM PENATAAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			2.13.03 MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KERJA SAMA DESA	PERSENTASE FASILITASI KERJASAMA DESA	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			2.13.04 MENINGKATNYA KUALITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE FASILITASI TATA KELOLA DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			3.32.04 MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN DAN KAPASITAS TRANSMIGRAN DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	PERSENTASE TRANSMIGRAN YANG DIBINA DAN DIBERDAYAKAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
			7.01.03 MENINGKATNYA PERAN SERTA MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN	PERSENTASE KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG TERLAKSANA (77)	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN
			1.03.02 MENINGKATNYA PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERHADAP BANJIR DAN MENINGKATNYA AKSES MASYARAKAT TERHADAP IRIGASI	PERSENTASE LUAS LAYANAN IRIGASI MULTIKOMODITAS	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PRIORITAS	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			1.03.03 MENINGKATNYA AKSES MASYARAKAT TERHADAP SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PERSENTASE PENINGKATAN KAPASITAS YANG TERLAYANI MELALUI PENYALURAN AIR MINUM CURAH LINTAS KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			1.03.05 MENINGKATNYA AKSES MASYARAKAT TERHADAP SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH	PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENEMPATI HUNIAN DENGAN AKSES SANITASI (AIR LIMBAH DOMESTIK LAYAK DAN AMAN)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			1.03.06 MENINGKATNYA KUALITAS SISTEM DRAINASE	PERSENTASE CAKUPAN DRAINASE DALAM KONDISI BAIK	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			1.03.09 MENINGKATNYA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN YANG TERTATA	PERSENTASE PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			1.03.10 MENINGKATNYA AKSESIBILITAS MASYARAKAT YANG NYAMAN DAN AMAN	TINGKAT KEMANTAPAN JALAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			1.03.12 MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	PERSENTASE PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			1.04.02 TERPENUHINYA RUMAH LAYAK HUNI BAGI WARGA NEGARA KORBAN BENCANA DAN YANG TERKENA RELOKASI AKIBAT PROGRAM PEMERINTAH	PERSENTASE WARGA NEGARA KORBAN BENCANA YANG MEMPEROLEH RUMAH LAYAK HUNI	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			1.04.04 MENINGKATNYA PENATAAN DAN PENANGANAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	PERSENTASE PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH YANG DITATA DAN DITANGANI	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			1.04.05 MENINGKATNYA PENYEDIAAN PSU PERMUKIMAN	PERSENTASE PERMUKIMAN YANG SUDAH DILENGKAPI PSU (PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM)	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			2.10.09 MENINGKATNYA PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	PERSENTASE PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			2.10.10 MENINGKATNYA TERTIP PERTANAHAN DAN KEPASTIAN HUKUMBAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH	PERSENTASE LUAS KONSOLIDASI TANAH	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			2.15.02 MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN TRANSPORTASI DARAT	PERSENTASE KELENGKAPAN JALAN YANG TELAH TERPASANG TERHADAP KONDISI IDEAL	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	DINAS PERHUBUNGAN
			2.15.03 MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN TRANSPORTASI LAUT	KONEKTIVITAS LAUT	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	DINAS PERHUBUNGAN

Sumber; Tim Penyusun

Selain program prioritas daerah diatas, terdapat kegiatan prioritas utama (KPU) yang tercantum dalam Lampiran IV RPJMN Tahun 2025-2029 yang berlokasi di Sulawesi Tenggara, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe melakukan sinkronisasi untuk mendukung kegiatan prioritas utama (KPU) tersebut dalam RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029 yang digambarkan pada tabel dibawah ini;

**Tabel 3. 9 Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Wilayah Sulawesi tenggara
Pda RPJMN Tahun 2025-2029**

No.	RPJMN	RPJMD Prov.Sultra	RPJMD Konawe
1	Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut	Program Perikanan Budidaya	· Program Perikanan Budidaya
		Peluncuran Roadmap <i>Blue Economy*</i>	Pembentukan kawasan konservasi laut, transplantasi terumbu karang dan budidaya rumput laut
2	Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)	Program Perikanan Tangkap	· Program Perikanan Tangkap
		Peluncuran Roadmap <i>Blue Ecomony*</i>	Pembentukan kampung nelayan
3	Pengembangan Pangan Hewani	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	· Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		Pelatihan Penyelia Dan Juru Sembelih*	Penyediaan Rumah ptotong hewani
4	Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	· Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	· Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		Gerakan Pangan Murah*	Pembangunan jalan usaha tani
		Penanaman Seribu Bibit Tanaman*	Bantuan Benih Dan Pupuk*
5	Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses	Bantuan Benih Dan Pupuk*	Bantuan alsintan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	· Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Laris (Layanan Ambulans Darat Dan Laut Gratis)*	layanan persalinan gratis
6	Penurunan kematian ibu dan anak	Pembangunan Tiga Rs Daerah Di Kabupaten	Pembangunan Rumah Sakit di kawasan Industri dan kawasan pendukung lainnya.
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	· Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Program Sultra Health Service Untuk Mempekuat Perlindungan Asuransi Kesehatan Masyarakat*	Bantuan sosial bersyarat untuk keluarga miskin guna menjamin akses kesehatan
7	Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan		rumah tunggu kelahiran, serta layanan persalinan gratis
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	· Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
8	Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR	Laris (Layanan Ambulans Darat Dan Laut Gratis)*	Pelatihan dan insentif bagi bidan, perawat, dokter umum dan kader kesehatan tradisional
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	· Program Pengelolaan Persampahan

No.	RPJMN	RPJMD Prov.Sultra	RPJMD Konawe
		Program Pengelolaan Persampahan	Program bank sampah, pengelolaan limbah organik/B3, komposting dan pengolahan air limbah domestik.
9	Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	· Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Peningkatan Pembangunan Sarana Sanitasi Dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)*	Penyediaan SPAM regional, pengembangan IPA desa/kecamatan, penyediaan air bersih, sumur bor dan instalasi air limbah (IPAL)
10	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU	Program Kawasan Permukiman	· Program Kawasan Permukiman
		Program Pengembangan Perumahan	· Program Pengembangan Perumahan
		Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Gempa Bumi Di Kabupaten Kolaka Timur*	Mendukung Program 3 Juta Rumah lokal: pembangunan rumah susun pekerja, rumah MBR, perumahan vertikal dan renovasi rumah swadaya
		Jama'ah (Jalan Mulus Antar Wilayah)*	Pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, olahraga dan pasar induk di desa dan kota
11	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	· Program Pengembangan Kebudayaan
		Program Pengembangan Kebudayaan	Revitalisasi dan digitalisasi situs budaya, museum, taman purbakala dan cagar budaya
			Festival budaya tahunan, pameran seni, lomba tradisi serta dukungan sanggar seni dan komunitas adat
12	Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	· Program Pengelolaan Pendidikan
		Penggaris (Perlengkapan Dan Seragam Sekolah Gratis)*	Beasiswa bagi siswa berprestasi, anak miskin dan tahfiz Al Qur'an; pemberian seragam gratis
		Pemberian Beasiswa Berprestasi*	Rehabilitasi ruang kelas, pembangunan sekolah baru dan Sekolah Rakyat di wilayah transmigrasi/desa terpencil
13	Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, in-service training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja	Program Pendidik Dan Tenaga Pendidik	Program Pendidik Dan Tenaga Pendidik
		Seleksi Kompetensi Pppk Tahap II*	Pelatihan kompetensi dan sertifikasi guru serta penambahan tunjangan pendidik ASN
		Sertifikasi Kelembagaan Dan Pengembangan Kompetensi*	

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memuat program perangkat daerah dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta Indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

4.1 Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Rencana program prioritas daerah Kabupaten Konawe merupakan kumpulan program yang disusun untuk mencapai sasaran pembangunan daerah melalui strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Kebijakan umum pembangunan berfungsi sebagai pedoman konkret dalam menentukan program-program pembangunan yang memiliki daya ungkit tinggi, sehingga mampu menerjemahkan strategi yang telah ditetapkan secara efektif. Program-program prioritas pembangunan ini selanjutnya menjadi acuan bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) masing-masing OPD.

Setiap program pembangunan dilengkapi dengan indikator kinerja yang berfungsi sebagai instrumen perencanaan dan pengendalian pembangunan tahunan, sehingga perkembangan hasil pembangunan dapat diukur secara jelas hingga akhir periode RPJMD. Indikator kinerja program yang berupa hasil (*outcomes*) menjadi acuan utama dalam menentukan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh OPD sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya dalam bidang urusan pemerintahan, baik yang bersifat wajib maupun penunjang. Dokumen perencanaan ini juga menyajikan rancangan proyeksi mengenai target capaian untuk setiap tahun selama kurun waktu lima tahun, sehingga memberikan gambaran prospek pencapaian target serta menjadi acuan kinerja bagi setiap OPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Bersamaan dengan itu, kebutuhan pendanaan untuk program-program prioritas juga digambarkan secara proyektif berdasarkan hasil evaluasi terhadap kerangka pendanaan yang telah dicapai pada lima tahun anggaran sebelumnya.

Rencana program perangkat daerah Kabupaten Konawe untuk periode tahun 2024-2029 telah disusun sebanyak **158 program**. Program-program tersebut merupakan implementasi dari urusan wajib dan urusan pilihan yang

sesuai dengan kewenangan Kabupaten Konawe, serta mencakup fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah. Setiap program dalam perencanaan ini telah dilengkapi dengan indikator kinerja dan kerangka pendanaan yang jelas. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dapat diukur keberhasilannya dan memiliki landasan pendanaan yang jelas. Rincian lengkap mengenai program-program tersebut telah disusun berdasarkan urusan masing-masing, sehingga memudahkan dalam proses implementasi dan pemantauan.

Tabel 4. 1 Matriks Program Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029																		
NO	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM												PERANGKAT DAERAH
						TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
						TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
VISI : KONAWE YANG BERDAYA SAING, SEJAHTERA, ADIL DAN BERKELANJUTAN																		
I	MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN DAN LAYANAN KESEHATAN YANG BERKUALITAS																	
1.1	Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	74,50	75,10		75,50		75,70		76,10		76,50		76,90		
1.1.1	Meningkatya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat		Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	70,61	70,71		70,81		70,91		71,01		71,11		71,21		
	PROGRAM PEMEMUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	MENINGKATNYA UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI	%	100,00	100,00	94.244.396.278,00	100,00	111.021.150.217,00	100,00	110.304.619.861,00	100,00	107.904.868.332,00	100,00	108.446.157.551,00	100,00	108.548.063.477,00	DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	MENINGKATNYA MUTU DAN DISTRIBUSI TENAGA KESEHATAN	PERSENTASE PENINGKATAN KOMPETENSI SDM BIDANG KESEHATAN	%	100,00	100,00	1.190.924.000,00	100,00	946.648.425,00	100,00	964.064.635,00	100,00	981.916.250,00	100,00	1.000.214.156,00	100,00	1.000.214.156,00	DINAS KESEHATAN
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	MENINGKATNYA KUALITAS DAN DISTRIBUSI SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN, DAN MAKANAN MINUMAN	PERSENTASE CAKUPAN SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	%	100,00	100,00	382.764.100,00	100,00	475.000.000,00	100,00	500.000.000,00	100,00	550.000.000,00	100,00	500.000.000,00	100,00	500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	MENINGKATNYA KUALITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PERSENTASE MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN YANG DIBERDAYAKAN	%	100,00	100,00	417.850.200,00	100,00	2.215.662.000,00	100,00	2.215.662.000,00	100,00	1.990.662.000,00	100,00	2.215.662.000,00	100,00	2.215.662.000,00	DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	MENINGKATNYA INDEKS PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN (IPBK)	INDEKS PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN (IPBK)	INDEKS	62,40	66,00	734.751.500,00	69,80	1.348.976.000,00	73,90	996.224.800,00	78,20	1.166.286.040,00	82,80	726.200.342,00	85,00	745.010.369,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	PROPORSI KEBUTUHAN KB YANG TERPENUHI	%	77,90	78,00	5.181.682.000,00	78,10	7.968.852.222,00	78,20	7.975.271.484,00	78,30	7.981.722.843,00	78,40	7.988.206.458,00	78,50	7.994.722.491,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM												PERANGKAT DAERAH
						TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
						TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.1.2	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat		Rata Rata Lama Sekolah	Tahun	9,69	9,75		10,09		10,43		10,77		11,11		11,45		
			Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,05	13,26		13,36		13,46		13,56		13,66		13,76		
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	MENINGKATNYA PARTISIPASI WARGA NEGERA USIA 5-18 TAHUN DALAM PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN MENENGAH, SERTA PENDIKAN KESETARAAN	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGERA USIA 5-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN MENENGAH, SERTA PENDIKAN KESETARAAN	%	100,00	100,00	94.425.398.525,00	100,00	78.348.696.007,00	100,00	81.357.212.956,00	100,00	87.818.172.082,00	100,00	97.978.061.317,00	100,00	115.418.498.926,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	MENINGKATNYA KUALITAS KURIKULUM PENDIDIKAN	PERSENTASE SATUAN PENDIDIKAN YANG MENGEMBANGKAN KURIKULUM MUATAN LOKAL	%	100,00	100,00	44.466.000,00	100,00	103.841.000,00	100,00	165.439.300,00	100,00	286.523.765,00	100,00	526.474.953,00	100,00	1.004.048.700,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	MENINGKATNYA MUTU DAN DISTRIBUSI PENDIDIK DAN TENAGA PENDIDIKAN	PERSENTASE GURU YANG MEMILIKI SERTIFIKAT PENDIDIK	%	100,00	100,00	1.711.522.400,00	100,00	1.711.522.400,00	100,00	1.797.098.520,00	100,00	1.886.953.445,00	100,00	1.981.301.116,00	100,00	2.080.366.171,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	MENINGKATNYA KUALITAS DAN DISTRIBUSI INSTITUSI PENDIDIKAN	PERSENTASE USULAN IZIN SATUAN PENDIDIKAN YANG DITERBITKAN/DIPERBARUI	%	100,00	100,00	51.938.000,00	100,00	75.375.500,00	100,00	101.409.900,00	100,00	151.011.645,00	100,00	247.624.727,00	100,00	438.130.963,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	TERLESTARIKANNYA BAHASA DAN SASTRA DAERAH	PERSENTASE PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	%	0,00	0,00	-	100,00	48.125.000,00	100,00	96.250.000,00	100,00	192.500.000,00	100,00	385.000.000,00	100,00	770.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	MENINGKATNYA PRESTASI OLAH RAGA PADA CABANG OLAH RAGA UNGGULAN	PERSENTASE PEMUDA DAN ORGANISASI OLAHRAGA YANG BERPRESTASI PADA CABANG OLAHRAGA UNGGULAN	%	50,00	50,00	1.708.597.000,00	50,00	6.268.862.500,00	60,00	6.539.734.062,00	70,00	6.602.127.413,00	80,00	6.899.055.598,00	90,00	6.921.531.987,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	MENINGKATNYA KUALITAS KEPRAMUKAAN	TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEPRAMUKAAN	%	100,00	100,00	336.846.000,00	100,00	2.356.391.515,00	100,00	2.364.548.473,00	100,00	2.372.874.341,00	100,00	2.381.373.166,00	100,00	2.390.049.096,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	MENINGKATNYA LAYANAN PERPUSTAKAAN SESUAI STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN	NILAI TINGKAT KEDEMARAN MEMBACA MASYARAKAT	INDEKS	53,25	60,00	866.206.500,00	10,00	2.220.000.000,00	20,00	1.880.000.000,00	28,00	2.240.000.000,00	35,00	2.240.000.000,00	40,00	2.240.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
II	MENINGKATKAN DAYA SAING EKONOMI DAERAH MELALUI PENGEMBANGAN POTENSI LOKAL DAN INOVASI TEKNOLOGI																	
2.1	Mewujudkan Struktur Ekonomi yang Inklusif dan Bedaya Saing		Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,26	3,34		3,42		3,50		3,58		3,66		3,74		
			PDRB Per Kapita	Rp. Juta Per Tahun	45,88	50,76		56,51		63,44		71,65		81,52		93,26		

NO	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM												PERANGKAT DAERAH
						TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
						TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Rasio Gini	Angka	0,302	0,300		0,298		0,295		0,293		0,290		0,288		
2.1.1	Meningkatnya Pemerataan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penciptaan Lapangan Kerja dan Penguatan Ekonomi Lokal yang Inklusif		Angka Kemiskinan	%	13,27	12,27		12,25		10,12		9,05		8,07		7,09		
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,95	2,88		2,75		2,70		2,50		2,10		2,00		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN SOSIAL	PERSENTASE PEKERJA SOSIAL/TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN SOSIAL DI DALAM PANTI REHABILITASI SOSIAL BAGI PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS) LAINNYA DI LUAR HIV/AIDS DAN NAPZA	%	80,00	80,00	150.750.000,00	80,00	421.312.500,00	80,00	424.125.000,00	80,00	440.750.000,00	80,00	453.000.000,00	80,00	502.500.000,00	DINAS SOSIAL
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	MENINGKATNYA LAYANAN PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	PERSENTASE WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN YANG TERTANGANI	%	75,00	0,00	-	80,00	50.000.000,00	80,00	50.000.000,00	80,00	50.000.000,00	80,00	50.000.000,00	80,00	50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	MENINGKATNYA REHABILITASI SOSIAL	PERSENTASE PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS) LAINNYA DI LUAR HIV/AIDS DAN NAPZA YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA	%	80,00	80,00	399.265.000,00	88,00	1.294.600.000,00	88,00	1.304.600.000,00	88,00	1.359.600.000,00	88,00	1.395.600.000,00	88,00	1.444.600.000,00	DINAS SOSIAL
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	MENINGKATNYA PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PERSENTASE PENERIMA MANFAAT YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASAR	%	80,00	80,00	64.609.000,00	80,00	437.862.500,00	80,00	439.425.000,00	80,00	442.550.000,00	80,00	456.800.000,00	80,00	483.300.000,00	DINAS SOSIAL
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	TERKELOLANYA INFORMASI TENAGA KERJA	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENYUSUN RENCANA TENAGA KERJA	%	0,00	50,00	200.000.000,00	50,00	270.000.000,00	50,00	270.000.000,00	50,00	270.000.000,00	100,00	270.000.000,00	100,00	270.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA DI SEKTOR PRIORITAS YANG MENINGKAT PRODUKTIVITASNYA	%	45,00	25,00	60.305.500,00	50,00	965.000.000,00	60,00	973.000.000,00	70,00	975.000.000,00	80,00	995.000.000,00	100,00	1.005.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	MENINGKATNYA PENEMPATAN TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN DI DALAM NEGERI	%	74,00	74,00	149.244.000,00	74,00	500.000.000,00	75,00	500.000.000,00	76,00	500.000.000,00	77,00	500.000.000,00	78,00	620.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	MENINGKATNYA PEKERJA INDONESIA YANG TERLINDUNGI	PERSENTASE PEKERJA PADA PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN PERLINDUNGAN HAK-HAK PEKERJA DAN DIALOG SOSIAL	%	43,50	100,00	900.480.960,00	100,00	1.085.000.000,00	100,00	1.090.000.000,00	100,00	1.110.500.000,00	100,00	1.120.000.000,00	100,00	1.140.000.006,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN	PRESENTASE KELUARGA YANG MENGIKUTI KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN KELUARGA	%	61,00	62,00	4.350.539.000,00	63,00	1.890.911.960,00	64,00	1.843.946.520,00	65,00	1.896.996.253,00	70,00	1.850.061.235,00	72,00	1.853.141.542,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM												PERANGKAT DAERAH
						TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
						TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		KELUARGA SEJAHTERA (KS)																
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	PERTUMBUHAN VOLUME USAHA KOPERASI	%	100,00	100,00	81.334.000,00	100,00	300.000.000,00	100,00	320.000.000,00	100,00	340.000.000,00	100,00	360.000.000,00	100,00	380.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	MENINGKATNYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	PERSENTASE PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	%	25,00	35,00	27.472.000,00	50,00	300.000.000,00	65,00	320.000.000,00	80,00	340.000.000,00	95,00	360.000.000,00	100,00	380.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN KOPERASI	PERSENTASE KOPERASI AKTIF	%	0,00	0,00	-	35,00	300.000.000,00	45,00	320.000.000,00	55,00	340.000.000,00	60,00	360.000.000,00	65,00	380.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	MENINGKATNYA KUALITAS SDM PERKOPERASIAN	PERSENTASE KOPERASI YANG DIBERIKAN DUKUNGAN FASILITASI PELATIHAN	%	60,00	70,00	1.034.751.000,00	75,00	400.000.000,00	80,00	403.000.000,00	90,00	406.000.000,00	95,00	409.000.000,00	100,00	412.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS KOPERASI	PERSENTASE MENINGKATNYA KOPERASI YANG BERKUALITAS	%	50,00	75,00	60.637.000,00	100,00	950.000.000,00	100,00	1.185.000.000,00	100,00	1.310.000.000,00	100,00	1.435.000.000,00	100,00	1.560.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	MENINGKATNYA KAPASITAS UMKM YANG TANGGUH DAN MANDIRI	PERSENTASE USAHA KECIL YANG BERTRANSFORMASI DARI INFORMAL KE FORMAL	%	50,00	50,00	2.547.910.000,00	50,00	4.795.014.475,00	50,00	4.847.489.836,00	50,00	4.901.277.081,00	50,00	4.956.409.008,00	50,00	5.012.919.233,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	MENINGKATNYA DAYA SAING UMKM	PROPORSI UKM MENJALIN KEMITRAAN DAN EKSPOR	%	0,00	0,00	-	50,00	550.000.000,00	50,00	780.000.000,00	50,00	1.010.000.000,00	50,00	1.240.000.000,00	50,00	1.470.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	MENINGKATNYA DAYA SAING KEPEMUDAAN	RASIO WIRUSAHA PEMUDA	%	50,00	50,00	374.754.500,00	50,00	1.550.000.000,00	60,00	1.635.000.000,00	70,00	1.675.000.000,00	80,00	1.710.000.000,00	90,00	1.740.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA
2.1.2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi		Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	11,82	15,43		18,32		17,28		16,16		14,79		13,52		
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	MENINGKATNYA KEMUDAHAN BERINVESTASI	REALISASI TOTAL TERHADAP TARGET INVESTASI	%	100,00	100,00	73.941.000,00	100,00	810.000.000,00	100,00	834.300.000,00	100,00	859.329.000,00	100,00	885.108.870,00	100,00	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	MENINGKATNYA JANGKAUAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PENINGKATAN INVESTOR YANG BERNVENSTASI	%	100,00	100,00	50.796.000,00	100,00	315.000.000,00	100,00	324.450.000,00	100,00	334.183.500,00	100,00	344.209.005,00	100,00	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	MENINGKATNYA PERIZINAN BERUSAHA RISIKO	PERSENTASE PELAKU USAHA YANG MEMPEROLEH IZIN SESUAI KETENTUAN	%	100,00	100,00	37.559.000,00	100,00	305.000.000,00	100,00	314.150.000,00	100,00	323.574.500,00	100,00	333.281.735,00	100,00	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	TERKENDALINYA PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI PELAKU USAHA DALAM MEMBUKA USAHA	%	100,00	100,00	14.737.000,00	100,00	380.000.000,00	100,00	379.000.000,00	100,00	378.270.000,00	100,00	377.818.100,00	100,00	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM												PERANGKAT DAERAH
						TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
						TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	MENINGKATNYA PEMANFAATAN DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN PERIZINAN	PERSENTASE PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN	%	100,00	100,00	10.892.000,00	100,00	80.000.000,00	100,00	82.400.000,00	100,00	84.872.000,00	100,00	87.418.160,00	100,00	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	MENINGKATNYA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	JUMLAH TOTAL PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP.	TON	3650,00	3652,00	119.409.500,00	3701,00	2.441.669.000,00	3832,00	2.863.691.000,00	4.023,00	3.288.365.000,00	4.224,00	3.693.058.000,00	4.435,00	4.134.020.000,00	DINAS PERIKANAN
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	MENINGKATNYA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	JUMLAH TOTAL PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	TON	2172,00	2184,00	669.856.000,00	2196,00	1.451.259.000,00	2208,00	1.244.079.285,00	2.220,00	1.264.975.550,00	2.232,00	1.292.615.913,00	2.244,00	1.323.594.437,00	DINAS PERIKANAN
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	MENINGKATNYA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	JUMLAH TOTAL PRODUKSI PERIKANAN OLAHAN	TON	1200,00	1200,00	134.789.000,00	1200,00	626.000.000,00	1200,00	692.000.000,00	1.200,00	763.500.000,00	1.200,00	1.033.000.000,00	1.200,00	1.305.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	MENINGKATNYA DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	PERSENTASE PERTUMBUHAN KUNJUNGAN WISATAWAN	%	100,00	100,00	798.144.500,00	100,00	1.867.028.900,00	100,00	1.959.459.059,00	100,00	2.053.270.956,00	100,00	2.148.533.679,00	100,00	2.245.319.766,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	MENINGKATNYA JANGKAUAN PEMASARAN PARIWISATA	PERSENTASE PENINGKATAN MEDIA PEMASARAN PARIWISATA	%	100,00	100,00	2.451.829.000,00	100,00	2.836.000.000,00	100,00	2.977.800.000,00	100,00	3.126.690.000,00	100,00	3.283.024.500,00	100,00	3.447.175.724,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	MENINGKATNYA KUALITAS EKOSISTEM KREATIF	PERSENTASE PELAKU EKONOMI KREATIF YANG MEMILIKI KEKAYAAN INTELEKTUAL	%	0,00	0,00	-	100,00	689.375.000,00	100,00	732.750.000,00	100,00	787.200.000,00	100,00	862.185.000,00	100,00	976.544.249,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	MENINGKATNYA SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	PERSENTASE PELAKU PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF YANG AKTIF DAN TERVALIDASI	%	100,00	100,00	407.001.000,00	100,00	600.000.000,00	100,00	630.000.000,00	100,00	661.500.000,00	100,00	694.575.000,00	100,00	729.303.744,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	MENINGKATNYA DISTRIBUSI DAN KUALITAS SARANA PETERNAKAN	PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITAS PETERNAKAN	%	60,00	65,00	2.735.664.750,00	70,00	2.183.163.816,00	75,00	2.361.495.914,00	80,00	2.426.826.511,00	85,00	2.488.368.663,00	90,00	2.566.622.026,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
		MENINGKATNYA DISTRIBUSI DAN KUALITAS SARANA PERTANIAN	PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	%	45,91	7,59	10.033.324.500,00	13,28	6.877.083.125,00	15,70	7.114.635.203,00	19,00	7.352.488.583,00	19,38	7.590.650.797,00	19,55	7.804.129.566,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	MENINGKATNYA DISTRIBUSI DAN KUALITAS PRASARANA PETERNAKAN	PERSENTASE PENINGKATAN PRASARANA PERTANIAN TERHADAP PETERNAK DAN KELOMPOK TERNAK	%	100,00	30,00	2.994.224.000,00	35,00	4.020.823.783,00	40,00	4.128.001.611,00	45,00	4.745.242.172,00	50,00	5.007.546.448,00	70,00	5.299.915.447,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
		MENINGKATNYA DISTRIBUSI DAN KUALITAS PRASARANA PERTANIAN	PERSENTASE KELOMPOK TANI YANG DIBERI BANTUAN PRASARANA PERTANIAN	%	80,00	80,00	14.267.469.520,00	85,00	16.421.207.353,00	87,00	17.229.791.630,00	90,00	19.261.066.829,00	93,00	18.998.787.788,00	95,00	19.088.654.620,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	MENINGKATNYA KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	TINGKAT PENGENDALIAN PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS (PHMS)	%	100,00	75,00	2.264.325.000,00	80,00	2.636.600.500,00	85,00	2.957.580.500,00	90,00	3.217.580.500,00	95,00	3.487.580.500,00	100,00	3.775.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM												PERANGKAT DAERAH
						TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
						TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	MENINGKATNYA SDM KELOMPOK TANI TERNAK DAN PENYULUH PETERNAKAN	PERSENTASE PENINGKATAN SDM KELOMPOK TANI TERNAK DAN PENYULUH PETERNAKAN	%	4,00	20,00	285.699.000,00	25,00	725.000.000,00	30,00	780.000.000,00	35,00	825.000.000,00	40,00	885.000.000,00	45,00	935.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
		MENINGKATNYA KAPASITAS SDM BIDANG PENYULUH PERTANIAN	PERSENTASE SDM PENYULUH PERTANIAN YANG DITINGKATKAN	%	40,00	50,00	5.324.967.000,00	53,00	1.090.000.000,00	55,00	1.090.000.000,00	57,00	1.090.000.000,00	60,00	1.090.000.000,00	65,00	1.090.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	MENINGKATNYA KEMUDAHAN PROSES PERIZINAN DAN PENDAFTARAN BERUSAHA	PERSENTASE IZIN USAHA PERDAGANGAN YANG DIFASILITASI	%	100,00	100,00	80.402.000,00	100,00	506.250.000,00	100,00	512.500.000,00	100,00	525.000.000,00	100,00	550.000.000,00	100,00	600.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	MENINGKATNYA KUALITAS SARANA PERDAGANGAN DAN DISTRIBUSI BARANG YANG EFISIEN, MERATA DAN TERINTEGRITAS!	PERSENTASE SARANA PERDAGANGAN YANG DITINGKATKAN KUALITASNYA	%	100,00	100,00	18.244.000,00	100,00	300.000.000,00	100,00	300.000.000,00	100,00	300.000.000,00	100,00	300.000.000,00	100,00	300.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	MENINGKATNYA KELANCARAN DISTRIBUSI DAN STABILITAS HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	PERSENTASE STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	%	100,00	100,00	450.742.000,00	100,00	900.000.000,00	100,00	900.000.000,00	100,00	900.000.000,00	100,00	900.000.000,00	100,00	900.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	MENINGKATNYA PELAKU USAHA YANG BERORIENTASI EKSPOR	NILAI EKSPOR BARANG	MILYAR RUPIAH	627,30	1000,00	241.047.000,00	1400,00	400.000.000,00	1800,00	400.000.000,00	2.200,00	400.000.000,00	2.600,00	400.000.000,00	3.000,00	400.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	TERSTANDARISASINYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KAB. KONawe	PERSENTASE ALAT ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP) BERTANDA SAH YANG BERLAKU	%	100,00	100,00	52.796.000,00	100,00	238.859.000,00	100,00	240.801.950,00	100,00	242.842.047,00	100,00	244.984.149,00	100,00	247.233.356,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	MENINGKATNYA PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	PERSENTASE PROMOSI PRODUK LOKAL YANG DIFASILITASI/DILAKSANAKAN	%	10,00	15,00	12.150.000,00	20,00	12.150.000,00	25,00	12.757.500,00	30,00	13.395.375,00	35,00	14.065.143,00	40,00	14.768.400,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	MENINGKATNYA REALISASI PEMBANGUNAN INDUSTRI	PERSENTASE REALISASI INVESTASI SEKTOR INDUSTRI DAN KAWASAN INDUSTRI	%	20,00	30,00	337.837.870,00	40,00	916.871.870,00	50,00	720.215.463,00	60,00	573.726.235,00	70,00	427.412.545,00	80,00	2.481.283.171,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	MENINGKATNYA KUALITAS PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERINDUSTRIAN	PERSENTASE IZIN USAHA INDUSTRI YANG DITERBITKAN	%	100,00	100,00	29.995.000,00	100,00	33.120.000,00	100,00	37.744.750,00	100,00	45.569.487,00	100,00	59.722.961,00	100,00	86.459.109,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	MENINGKATNYA PEMANFAATAN INFORMASI INDUSTRI	TERSEDIAANYA INFORMASI INDUSTRI SECARA LENGKAP, AKURAT, DAN TERKINI	%	0,00	20,00	102.275.000,00	40,00	102.275.000,00	60,00	107.388.750,00	80,00	112.758.187,00	80,00	118.396.096,00	80,00	124.315.899,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
III	MENGOPTIMALKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKIF DAN PARTISIPATIF																	

NO	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM												PERANGKAT DAERAH
						TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
						TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3.1	Meningkatkan Efektivitas, Akuntabilitas, dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Transparan dan Responsif		Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Nilai	65,82	68,00		71,00		73,00		76,00		79,00		81,00		
3.1.1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Antikorupsi		Indeks Reformasi Hukum	Nilai	69,01	69,01		71,00		74,00		75,50		77,00		78,50		
			Nilai SAKIP	Nilai	67,27	68,00		71,00		73,00		76,00		79,00		81,00		
			Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (IPKD MCSP)	Nilai	58,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Nilai Capaian Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Nilai	3,406	3,550		3,700		3,850		4,000		4,200		4,500		
			Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai	88,87	89,87		90,37		90,87		91,37		91,87		92,37		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	MENINGKATNYA KEPATUHAN PERANGKAT DAERAH DALAM TATA KELOLA ADMINISTRASI, PELAPORAN KINERJA, DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH SECARA TEPAT WAKTU, LENGKAP, DAN SESUAI KETENTUAN	PERSENTASE RATA-RATA KEPATUHAN TATA KELOLA PERANGKAT DAERAH	%	100,00	100,00	945.620.699.072,00	100,00	937.999.958.228,00	100,00	944.683.233.303,00	100,00	955.634.552.950,00	100,00	958.319.553.867,00	100,00	965.737.434.085,00	SEMUA OPD
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	PERSENTASE KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK	%	100,00	100,00	439.472.000,00	100,00	585.000.000,00	100,00	585.000.000,00	100,00	585.000.000,00	100,00	585.000.000,00	100,00	585.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PENCATATAN SIPIL	PERSENTASE KEPEMILIKAN DOKUMEN PENCATATAN SIPIL	%	100,00	100,00	142.382.000,00	100,00	395.000.000,00	100,00	395.000.000,00	100,00	395.000.000,00	100,00	395.000.000,00	100,00	395.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	MENINGKATNYA PEMANFAATAN INFORMASI KEPENDUDUKAN	PERSENTASE INFORMASI KEPENDUDUKAN YANG DIMANFAATKAN	%	100,00	100,00	68.124.000,00	100,00	245.000.000,00	100,00	245.000.000,00	100,00	245.000.000,00	100,00	245.000.000,00	100,00	245.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	MENINGKATNYA KUALITAS PROFIL KEPENDUDUKAN	CAKUPAN PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	%	100,00	100,00	5.390.000,00	100,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM												PERANGKAT DAERAH
						TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
						TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	MENINGKATNYA JANGKAUAN DAN KUALITAS KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH	PERSENTASE TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP AKSES DAN KUALITAS INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH (SURVEI)	%	100,00	50,00	985.283.550,00	65,00	1.275.000.000,00	75,00	1.475.000.000,00	85,00	1.655.000.000,00	95,00	1.745.000.000,00	100,00	1.725.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	INDEKS SPBE	INDEKS	2,92	3,00	378.281.000,00	3,50	1.085.000.000,00	4,00	1.085.000.000,00	4,50	760.000.000,00	5,00	710.000.000,00	5,00	710.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	TERCAPAINYA KOLABORASI, INTEGRASI, DAN STANDARDISASI DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM STATISTIK NASIONAL (SSN)	INDEKS PEMBANGUNAN STATISTIK (IPS)	INDEKS	1,97	0,00	-	2,60	380.000.000,00	40,00	415.000.000,00	42,00	460.000.000,00	45,00	500.000.000,00	45,00	580.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	MENINGKATNYA KEAMANAN SIBER DAN SANDI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG TELAH MENGUNAKAN SANDI DALAM KOMUNKASI PERANGKAT DAERAH	%	0,00	100,00	96.087.000,00	100,00	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00	100,00	215.000.000,00	100,00	215.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	MENINGKATNYA TATA KELOLA ARSIP DINAMIS DAN STATIS	TINGKAT KETERSEDIAAN ARSIP	%	100,00	100,00	171.541.300,00	100,00	184.666.300,00	100,00	206.368.365,00	100,00	241.624.281,00	100,00	303.580.492,00	100,00	418.509.514,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	MENINGKATNYA PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP SESUAI NSPK	PERSENTASE CAKUPAN PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	%	0,00	0,00	-	100,00	11.562.500,00	100,00	23.125.000,00	100,00	46.250.000,00	100,00	92.500.000,00	100,00	185.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	PROGRAM PERIZINAN PENGUNAAN ARSIP	MENINGKATNYA AKSES MASYARAKAT TERHADAP PENGUNAAN ARSIP YANG BERSIFAT TERTUTUP	PERSENTASE AKSES MASYARAKAT TERHADAP PENGUNAAN ARSIP YANG BERSIFAT TERTUTUP	%	0,00	0,00	-	100,00	1.875.000,00	100,00	3.750.000,00	100,00	7.500.000,00	100,00	15.000.000,00	100,00	30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	MENINGKATKAN PELAYANAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI KOORDINASI DAN FASILITASI YANG EFEKTIF	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN KOORDINASI DAN FASILITASI YANG EFEKTIF	%	100,00	100,00	9.141.354.000,00	100,00	7.652.049.750,00	100,00	7.830.798.335,00	100,00	8.185.565.634,00	100,00	8.915.469.616,00	100,00	5.298.428.697,00	SEKRETARIAT DAERAH
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	MENINGKATKAN KUALITAS PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI PENGUATAN KOORDINASI KEBIJAKAN DAN PENGELOLAAN STRATEGIS	PERSENTASE KEGIATAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN KOORDINASI KEBIJAKAN DAN PENGELOLAAN STRATEGIS	%	100,00	100,00	1.599.257.300,00	100,00	2.224.800.000,00	100,00	2.420.800.000,00	100,00	2.556.800.000,00	100,00	2.712.060.000,00	100,00	2.936.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	MENINGKATNYA KUALITAS PERSIDANGAN DAN KAJIAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PERSENTASE PENETAPAN RANPERDA TAHUN N.	%	100,00	100,00	13.644.725.350,00	100,00	10.919.737.250,00	100,00	10.931.755.375,00	100,00	10.944.073.953,00	100,00	10.956.700.495,00	100,00	10.969.642.701,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM												PERANGKAT DAERAH
						TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
						TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	MENIGNKATNYA KUALITAS PERENCAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERESENTASE KESELARASAN RPJMD DENGAN RKPD DAN RENSTRA PD	%	100,00	100,00	4.573.343.000,00	100,00	4.783.343.000,00	100,00	4.783.343.000,00	100,00	4.783.343.000,00	100,00	4.783.343.000,00	100,00	4.783.343.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	PERSENTASE KESELARASAN RKPD DENGAN RENJA PD PADA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	%	100,00	100,00	1.743.388.450,00	100,00	1.743.388.450,00	100,00	1.743.388.450,00	100,00	1.743.388.450,00	100,00	1.743.388.450,00	100,00	1.743.388.450,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	MENINGKATNYA KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PERSENTASE KETEPATAN WAKTU PENETAPAN DAN PENERBITAN DOKUMEN PENGANGGARAN	%	100,00	100,00	369.911.673.914,00	100,00	357.921.709.789,00	100,00	356.757.114.214,00	100,00	356.757.114.214,00	100,00	356.757.114.214,00	100,00	356.757.114.214,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	MENINGKATNYA TATA KELOLA ASET DAERAH	PERSENTASE PENAMBAHAN NILAI ASET TETAP	%	100,00	65,00	1.029.598.000,00	70,00	141.436.000,00	75,00	527.746.000,00	80,00	878.108.000,00	85,00	878.108.000,00	90,00	878.108.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	MENINGKATNYA UPAYA EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI PENDAPATAN	PERSENTASE PAD TERHADAP PENDAPATAN DAERAH	%	12,00	12,79	2.591.098.000,00	13,14	2.361.000.000,00	13,50	2.444.000.000,00	13,88	2.527.000.000,00	14,27	2.610.000.000,00	14,27	2.693.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR YANG PROFESIONAL, KOMPETEN, DAN BERORIENTASI KINERJA	PERSENTASE KUALITAS PENGELOLAAN SDM ASN	%	100,00	100,00	2.607.463.050,00	100,00	3.315.154.300,00	100,00	3.408.154.300,00	100,00	3.501.154.300,00	100,00	3.526.154.300,00	100,00	3.551.154.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	MENINGKATNYA LAYANAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DASAR, KADER, MANAJERIAL, DAN FUNGSIONAL	PERSENTASE ASN YANG MENDAPATKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DASAR, MANAJERIAL, DAN FUNGSIONAL	%	0,00	0,00	-	100,00	996.911.960,00	100,00	999.946.520,00	100,00	1.002.996.253,00	100,00	1.006.061.235,00	100,00	1.009.141.542,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	MENINGKATNYA PEMANFAATAN HASIL KELITBANGAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	PERSENTASE REKOMENDASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIJADIKAN SEBAGAI LANDASAN DALAM IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN	%	75,00	80,00	556.821.650,00	85,00	2.890.000.000,00	90,00	4.480.000.000,00	95,00	3.074.500.000,00	100,00	4.673.725.000,00	100,00	3.277.911.244,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	MENINGKATNYA PEMANFAATAN INOVASI DAERAH DALAM PEMBANGUNAN	PERSENTASE PRODUK INOVASI YANG DIMANFAATKAN	%	34,60	0,00	-	45,00	600.000.000,00	50,00	820.000.000,00	55,00	650.000.000,00	60,01	650.000.000,00	65,00	650.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	MENURUNNYA TERJADINYA PENYELEWENGAN ATAU PENYIMPANGAN, BAIK YANG BERSIFAT ANGGARAN ATAUPUN PROSES DAN KEWENANGAN	PERSENTASE REKOMENDASI BPK YANG DITINDAKLANJUTI	%	80,55	80,58	5.086.498.850,00	81,00	6.390.292.250,00	81,50	6.447.549.556,00	82,00	6.506.238.294,00	82,50	6.566.394.250,00	83,00	6.628.054.107,00	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	MENINGKATNYA KUALITAS PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP)	LEVEL	3,00	3,00	949.231.000,00	3,00	1.595.000.000,00	3,00	1.595.000.000,00	4,00	1.595.000.000,00	4,00	1.595.000.000,00	4,00	1.595.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE

NO	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM												PERANGKAT DAERAH
						TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
						TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERLAKSANA	%	100,00	100,00	629.948.742,00	100,00	3.121.000.000,00	100,00	2.608.500.000,00	100,00	3.216.000.000,00	100,00	3.823.500.000,00	100,00	4.431.000.000,00	KECAMATAN
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	TERCIPTANYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA MASYARAKAT	PERSENTASE KEGIATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG TERLAKSANA	%	100,00	100,00	328.330.890,00	100,00	840.000.000,00	100,00	840.000.000,00	100,00	840.000.000,00	100,00	840.000.000,00	100,00	840.000.000,00	KECAMATAN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG BAIK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PERSENTASE KEGIATAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG TERLAKSANA	%	100,00	100,00	320.026.830,00	100,00	420.000.000,00	100,00	420.000.000,00	100,00	420.000.000,00	100,00	420.000.000,00	100,00	420.000.000,00	KECAMATAN
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK MELALUI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	PERSENTASE KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA YANG TERLAKSANA	%	0,00	0,00	1.085.920.350,00	100,00	1.176.000.000,00	100,00	672.000.000,00	100,00	672.000.000,00	100,00	672.000.000,00	100,00	672.000.000,00	KECAMATAN
IV	MEMPERKUAT KETAHANAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT DENGAN MELESTARIKAN KEARIFAN LOKAL, NILAI-NILAI TRADISIONAL, DAN KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA.																	
4.1	Meningkatkan Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Nilai	-	55,00		57,00		59,50		62,00		64,50		67,00		
4.1.1	Terlestarinya Tradisi, Seni dan Praktik Budaya Lokal sebagai Indentitas Masyarakat		Persentase Tradisi, Seni, Cagar, dan Warisan Budaya yang Dilestarikan	%	-	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	MENINGKATNYA TATA KELOLA TAMAN MAKAM PAHLAWAN	PERSENTASE TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL YANG TERKELOLA DENGAN BAIK	%	100,00	100,00	124.199.000,00	100,00	205.000.000,00	100,00	205.000.000,00	100,00	210.000.000,00	100,00	214.000.000,00	100,00	217.000.000,00	DINAS SOSIAL
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	MENINGKATNYA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	%	100,00	100,00	951.490.000,00	100,00	247.600.000,00	100,00	247.600.000,00	100,00	247.600.000,00	100,00	247.600.000,00	100,00	247.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL	MENINGKATNYA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL	PERSENTASE Kesenian TRADISIONAL YANG DILANESTARIKAN DAN DIKEMBANGKAN	%	0,00	0,00	-	100,00	65.000.000,00	100,00	65.000.000,00	100,00	65.000.000,00	100,00	65.000.000,00	100,00	65.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	MENINGKATNYA AKSES MASYARAKAT TERHADAP INFORMASI SEJARAH	TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP TINJAUAN SEJARAH LOKAL	%	0,00	0,00	-	100,00	145.000.000,00	100,00	145.000.000,00	100,00	145.000.000,00	100,00	145.000.000,00	100,00	145.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM												PERANGKAT DAERAH
						TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
						TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	MENINGKATNYA WARISAN BUDAYA YANG DILESTARIKAN	PERSENTASE CAGAR BUDAYA DAN WARISAN BUDAYA TAK BENDA YANG DITETAPKAN	%	100,00	100,00	1.575.566.000,00	100,00	125.000.000,00	100,00	125.000.000,00	100,00	125.000.000,00	100,00	125.000.000,00	100,00	125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	MENINGKATNYA TATA KELOLA MUSEUM	PERSENTASE KUNJUNGAN WISATAWAN KE MUSEUM	%	0,00	100,00	110.216.500,00	100,00	145.000.000,00	100,00	145.000.000,00	100,00	145.000.000,00	100,00	145.000.000,00	100,00	145.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	MENINGKATNYA PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	PERSENTASE KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO YANG DIMILIKI	%	20,00	0,00	-	20,00	183.125.000,00	40,00	186.250.000,00	60,00	192.500.000,00	80,00	205.000.000,00	100,00	230.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
4.1.2	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman, dan toleran melalui penguatan kerukunan antar umat beragama serta penurunan angka kriminalitas		Angka Kriminalitas (crime rate)	Per 100.000 penduduk	193,95	129,00		128,00		127,00		103,27		103,11		103,00		
			Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Nilai	-	85,00		88,00		91,00		94,00		97,00		100,00		
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	MENINGKATNYA PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN TIBUMTRANMAS	%	100,00	100,00	2.896.739.968,00	100,00	3.612.670.000,00	100,00	3.612.670.000,00	100,00	3.612.670.000,00	100,00	3.612.670.000,00	100,00	3.612.670.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	MENINGKATNYA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	PERSENTASE SENGKETA TANAH KASUS TANAH GARAPAN BELUM BERSERTIFIKAT YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIASI	%	0,00	0,00	-	50,00	50.000.000,00	50,00	50.000.000,00	50,00	50.000.000,00	55,00	50.000.000,00	60,00	50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	MENINGKATNYA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUKPEMBANGUNAN	PERSENTASE PENYELESAIAN GANTI KERUGIANDAN SANTUANAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	%	0,00	0,00	-	50,00	130.000.000,00	50,00	130.000.000,00	50,00	130.000.000,00	55,00	130.000.000,00	60,00	130.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT AKAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	CAKUPAN PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	%	71,43	85,71	2.057.396.500,00	100,00	2.329.000.000,00	100,00	2.446.000.000,00	100,00	2.509.000.000,00	100,00	2.571.000.000,00	100,00	2.687.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	MENINGKATNYA ETIKA DAN BUDAYA POLITIK	PERSENTASE PENDIDIKAN POLITIK PADA KADER PARTAI POLITIK	%	100,00	100,00	906.401.660,00	100,00	272.000.000,00	100,00	292.000.000,00	100,00	312.000.000,00	100,00	332.000.000,00	100,00	332.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	MENINGKATNYA KETERTIBAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	PERSENTASE ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG AKTIF	%	100,00	100,00	124.638.000,00	100,00	162.701.450,00	100,00	208.344.950,00	100,00	252.988.450,00	100,00	297.631.950,00	100,00	307.753.950,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM												PERANGKAT DAERAH
						TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
						TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	MENINGKATNYA KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA MASYARAKAT	PERSENTASE KEBIJAKAN DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAM DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH YANG DILAKSANAKAN	%	100,00	100,00	237.568.000,00	100,00	189.845.100,00	100,00	228.895.100,00	100,00	240.017.100,00	100,00	242.017.100,00	100,00	269.945.100,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	MENINGKATNYA PENANGANAN KONFLIK SOSIAL YANG DISELESAIKAN	PERSENTASE KONFLIK SOSIAL YANG DISELESAIKAN	%	100,00	100,00	526.261.000,00	100,00	416.752.900,00	100,00	445.440.000,00	100,00	467.180.000,00	100,00	472.180.000,00	100,00	477.180.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.1.3	Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesenjaraan Gender dan Masyarakat Inklusif		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	93,81	93,65		93,80		93,95		94,10		94,25		94,40		
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	MENINGKATNYA KUALITAS DAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PUG DAN PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN	PERSENTASE ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ARG)	%	10,00	20,00	308.641.000,00	30,00	1.009.484.300,00	35,00	1.030.440.300,00	40,00	1.019.076.550,00	45,00	1.044.372.956,00	50,00	1.055.603.523,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	MENURUNNYA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	PERSENTASE PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DAN TPPO YANG MENDAPATKAN LAYANAN KOMPREHENSIF	%	100,00	100,00	207.600.000,00	98,00	467.500.000,00	98,00	482.500.000,00	99,00	388.000.000,00	99,00	443.000.000,00	99,00	535.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA)	TINGKAT PEMANFAATAN LAYANAN PEMBELAJARAN KELUARGA YANG SESUAI STANDAR	%	60,00	100,00	124.553.000,00	100,00	765.000.000,00	100,00	816.250.000,00	100,00	817.562.500,00	100,00	818.940.625,00	100,00	780.387.656,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	MENINGKATNYA PEMANFAATAN DATA GENDER DAN ANAK	TINGKAT PEMANFAATAN DATA GENDER DAN ANAK DALAM PERENCANAAN, EVALUASI DANIATAU PENYUSUNAN KEBIJAKAN	%	100,00	100,00	39.760.000,00	100,00	125.000.000,00	100,00	126.000.000,00	100,00	126.000.000,00	100,00	127.000.000,00	100,00	128.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	PROGRAM PEMEMUHAN HAK ANAK (PHA)	TERJAMINNYA PEMEMUHAN HAK SEMUA ANAK SECARA KOMPREHENSIF	INDEKS PEMENUHAN HAK ANAK (IPHA)	INDEKS	53,81	54,00	288.490.000,00	55,00	563.000.000,00	56,00	487.200.000,00	57,00	620.707.500,00	58,00	651.742.875,00	60,00	2.188.200.656,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	MENINGKATNYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK KEKERASAN, EKSPLOITASI, PENELANTARAN, PERKAWINAN DAN	PERSENTASE ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MENDAPATKAN LAYANAN KOMPREHENSIF	%	100,00	100,00	285.853.500,00	100,00	690.000.000,00	100,00	757.500.000,00	100,00	702.000.000,00	100,00	877.500.000,00	100,00	960.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM												PERANGKAT DAERAH
						TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
						TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		PERLAKUAN SALAH LAINNYA TERHADAP ANAK																
V	MENERAPKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DENGAN MEMPERHATIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN																	
5.1	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Ekosistem Melalui Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan		Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	-	15,00		16,00		17,00		18,00		19,00		20,00		
5.1.1	Terwujudnya Kemandirian Pangan yang Berkelanjutan		Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	17,14	15,80		14,50		13,20		11,90		10,50		9,00		
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	MENINGKATNYA PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	PERSENTASE JUMLAH CADANGAN PANGAN	%	0,00	100,00	2.150.000.000,00	100,00	1.515.000.000,00	100,00	1.517.000.000,00	100,00	1.519.000.000,00	100,00	1.520.000.000,00	100,00	1.522.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	MENINGKATNYA DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	SKOR POLA PANGAN HARAPAN	NILAI	85,00	82,00	2.886.839.800,00	83,50	2.352.000.000,00	84,00	2.371.000.000,00	84,50	2.388.000.000,00	85,00	2.405.000.000,00	85,50	2.422.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	MENINGKATNYA PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	PERSENTASE DAERAH RENTAN RAWAN PANGAN	%	100,00	100,00	66.545.000,00	100,00	577.000.000,00	100,00	577.000.000,00	100,00	577.000.000,00	100,00	577.000.000,00	100,00	577.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	MENINGKATNYA PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN	PERSENTASE PANGAN SEGAR YANG MEMENUHI PERSYARATAN DAN MUTU KEAMANAN PANGAN	%	100,00	100,00	89.809.000,00	100,00	185.000.000,00	100,00	160.000.000,00	100,00	160.000.000,00	100,00	160.000.000,00	100,00	160.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	MENINGKATNYA PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERSENTASE PENINGKATAN PELAKU USAHA PERIKANAN YANG DI AWASI	%	100,00	100,00	55.554.000,00	100,00	1.671.566.061,00	100,00	1.667.968.892,00	100,00	1.695.206.737,00	100,00	1.730.979.771,00	100,00	1.776.788.170,00	DINAS PERIKANAN
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	TERKENDALINYA WABAH PENYAKIT HEWAN	PERSENTASE PENANGGULANGAN WABAH HEWAN YANG DITANGANI	%	0,00	0,00	-	100,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	MENINGKATNYA PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	PERSENTASE PENANGANAN BENCANA PERTANIAN	%	100,00	100,00	56.301.000,00	100,00	670.000.000,00	100,00	670.000.000,00	100,00	670.000.000,00	100,00	670.000.000,00	100,00	670.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

NO	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM												PERANGKAT DAERAH
						TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
						TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	MENINGKATNYA KUALITAS DAN KEMUDAHAN PERIZINAN USAHA PETERNAKAN	PERSENTASE PENERBITAN REKOMENDASI IZIN USAHA PETERNAKAN	%	0,00	0,00	-	100,00	475.000.000,00	100,00	480.000.000,00	100,00	485.000.000,00	100,00	490.000.000,00	100,00	495.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	MENINGKATNYA KUALITAS DAN KEMUDAHAN PERIZINAN USAHA PERTANIAN	PERSENTASE PENERBITAN REKOMENDASI IZIN USAHA PERTANIAN	%	30,00	35,00	41.676.500,00	40,00	60.000.000,00	45,00	60.375.000,00	50,00	60.759.375,00	55,00	61.153.359,00	60,00	61.557.193,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
5.1.2	Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas dan Resiliensi terhadap Bencana		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	79,31	82,65		82,82		83,00		83,17		83,34		83,34		
			Indeks Resiko Bencana	Nilai	155,79	155,59		155,39		155,19		154,90		154,70		154,50		
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	MENINGKATNYA LAYANAN PERSAMPAHAN REGIONAL	PERSENTASE SAMPAH YANG DIKELOLA DI TPA/TPST REGIONAL	%	0,00	0,00	-	80,00	109.375.000,00	81,00	18.750.000,00	82,00	37.500.000,00	83,00	75.000.000,00	85,00	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA, MENINGKATNYA PENANGANAN BENCANA PADA SAAT TANGGAP DARURAT, MENINGKATNYA PENANGANAN BENCANA PADA SAAT PASCA BENCANA	PERSENTASE CAKUPAN PENYEBARAN INFORMASI DAN EDUKASI RAWAN BENCANA, PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA, PENANGANAN PASCA BENCANA	%	100,00	100,00	11.053.424.850,00	100,00	3.391.980.000,00	100,00	2.855.458.500,00	100,00	2.942.264.962,00	100,00	2.879.366.584,00	100,00	2.879.366.584,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	MENINGKATNYA LAYANAN PENCEGAHAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN, EVAKUASI DAN PENYELAMATAN	CAKUPAN LAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN	%	100,00	100,00	1.930.014.850,00	100,00	2.261.000.000,00	100,00	2.308.500.000,00	100,00	2.322.000.000,00	100,00	2.330.500.000,00	100,00	2.339.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	MENINGKATNYA PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA	PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM, SOSIAL DAN/ATAU NON ALAM YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASAR PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA	%	100,00	100,00	364.719.000,00	100,00	933.600.000,00	100,00	963.600.000,00	100,00	978.600.000,00	100,00	993.600.000,00	100,00	1.043.600.000,00	DINAS SOSIAL
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KAJIAN LINGKUNGAN UNTUK MEMITIGASI DAMPAK KRP	PERSENTASE REKOMENDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DITINDAKLANJUTI	%	100,00	80,00	464.829.550,00	85,00	1.530.000.000,00	90,00	1.787.500.000,00	95,00	1.545.187.500,00	100,00	1.553.067.187,00	100,00	1.553.067.187,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	MENINGKATNYA PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE PENANGGULANGAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	%	80,00	80,00	283.049.000,00	85,00	3.932.138.384,00	90,00	3.585.474.076,00	95,00	3.449.026.447,00	100,00	3.462.800.329,00	100,00	3.462.800.329,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM												PERANGKAT DAERAH
						TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
						TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	PERSENTASE RTH	%	80,00	80,00	1.378.319.000,00	80,00	1.093.469.000,00	85,00	1.147.055.725,00	90,00	1.150.732.118,00	95,00	1.154.500.420,00	95,00	1.154.500.420,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	MENINGKATNYA PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	PERSENTASE LIMBAH B3 YANG TERKELOLA	%	80,00	80,00	44.453.500,00	80,00	195.000.000,00	85,00	205.000.000,00	90,00	210.000.000,00	95,00	215.000.000,00	95,00	215.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	MENINGKATNYA KEPATUHAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TERHADAP PERSETUJUAN LINGKUNGAN YANG DITERBITKAN	KETAATAN PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN, IZIN PPLH DAN PUU LH	USAHA	5,00	10,00	101.585.000,00	15,00	700.000.000,00	20,00	300.000.000,00	25,00	300.000.000,00	30,00	300.000.000,00	30,00	300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	MENINGKATNYA KAPASITAS SDM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP YANG DITINGKATKAN KOMPETENSINYA	%	0,00	100,00	62.300.000,00	100,00	600.141.515,00	100,00	601.892.223,00	100,00	603.651.685,00	100,00	605.419.944,00	100,00	605.419.944,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	MENINGKATNYA KINERJA PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	%	0,00	80,00	20.389.000,00	80,00	75.000.000,00	85,00	75.000.000,00	90,00	75.000.000,00	100,00	75.000.000,00	100,00	75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	MENINGKATNYA PENYELESAIAN SENGKETA/ KASUS TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE PENYELESAIAN SENGKETA/KASUS TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP	%	100,00	100,00	28.192.000,00	100,00	185.000.000,00	100,00	185.000.000,00	100,00	185.000.000,00	100,00	185.000.000,00	100,00	185.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH	INDEKS KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH	NILAI	-	40,00	6.506.645.000,00	40,00	1.856.350.697,00	45,00	1.823.898.701,00	50,00	1.845.875.697,00	55,00	1.876.498.829,00	55,00	1.910.197.329,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
VI	MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR ANTARA DESA DAN KOTA																	
6.1	Meningkatkan Aksesibilitas dan Pemerataan Infrastruktur Dasar yang Mendukung Konektivitas Wilayah, Pelayanan Publik, dan Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah		Indeks Infrastruktur	Nilai	-	50,00		51,50		53,00		54,50		56,00		57,50		

NO	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM												PERANGKAT DAERAH
						TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
						TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
6.1.1	Meningkatnya Konektivitas Wilayah dan Pemerataan Akses Infrastruktur Dasar untuk Menurunkan Disparitas Antar Wilayah		Rasio konektivitas kab/kota	Nilai	85,62	85,62		87,00		88,00		89,00		90,00		91,00		
			Persentase Desa Mandiri	%	0,000	0,003		0,014		0,021		0,027		0,034		0,041		
	PROGRAM PENATAAN DESA	MENINGKATNYA KUALITAS PENATAAN DESA	PERSENTASE FASILITASI PENATAAN DESA	%	100,00	100,00	65.037.000,00	100,00	152.224.500,00	100,00	242.663.850,00	100,00	420.453.292,00	100,00	772.788.456,00	100,00	1.474.052.878,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KERJA SAMA DESA	PERSENTASE FASILITASI KERJASAMA DESA	%	100,00	100,00	40.423.000,00	100,00	46.673.000,00	100,00	54.944.150,00	100,00	69.566.357,00	100,00	96.794.674,00	100,00	149.134.407,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	MENINGKATNYA KUALITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE FASILITASI TATA KELOLA DESA	%	100,00	75,00	608.880.950,00	75,00	704.193.450,00	75,00	829.949.997,00	75,00	1.052.541.245,00	75,00	1.467.355.803,00	75,00	2.265.098.589,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	MENINGKATNYA KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PEMBANGUNAN	PERSENTASE FASILITASI PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN DESA (LKD)	%	50,00	75,00	876.050.200,00	75,00	919.800.200,00	75,00	1.007.352.710,00	75,00	1.140.845.343,00	75,00	1.364.137.608,00	75,00	1.764.844.486,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	MENINGKATNYA PELAKSANAAN TRANSMIGRASI	PRESENTASE PROGRAM TRANSMIGRASI YANG DILAKSANAKAN	%	0,00	100,00	109.340.000,00	100,00	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	MENINGKATNYA KUALITAS PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	PERSENTASE LUAS KAWASAN TRANSMIGRASI YANG BERKEMBANG	%	100,00	100,00	64.755.000,00	100,00	585.000.000,00	100,00	685.000.000,00	100,00	685.000.000,00	100,00	685.000.000,00	100,00	685.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN DAN KAPASITAS TRANSMIGRAN DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	PERSENTASE TRANSMIGRAN YANG DIBINA DAN DIBERDAYAKAN	%	100,00	100,00	57.296.000,00	100,00	370.000.000,00	100,00	370.000.000,00	100,00	370.000.000,00	100,00	370.000.000,00	100,00	370.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	MENINGKATNYA PERAN SERTA MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN	PERSENTASE KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG TERLAKSANA	%	100,00	100,00	12.713.500.189,00	100,00	17.980.000.000,00	100,00	15.990.000.000,00	100,00	15.990.000.000,00	100,00	15.990.000.000,00	100,00	15.990.000.000,00	KECAMATAN
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	MENINGKATNYA PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERHADAP BANJIR DAN MENINGKATNYA AKSES MASYARAKAT TERHADAP IRIGASI	PERSENTASE LUAS LAYANAN IRIGASI MULTIKOMODITAS	%	78,00	78,00	17.723.229.350,00	78,00	11.439.584.000,00	79,00	15.924.042.750,00	80,00	15.440.103.093,00	81,00	12.588.543.369,00	82,00	5.227.356.378,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM												PERANGKAT DAERAH
						TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
						TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	MENINGKATNYA AKSES MASYARAKAT TERHADAP SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PERSENTASE PENINGKATAN KAPASITAS YANG TERLAYANI MELALUI PENYALURAN AIR MINUM CURAH LINTAS KABUPATEN/KOTA	%	9,00	12,00	1.643.369.000,00	14,00	2.931.567.853,00	14,00	2.973.394.942,00	14,00	3.286.221.023,00	14,00	3.330.070.836,00	14,00	3.374.969.742,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	MENINGKATNYA AKSES MASYARAKAT TERHADAP SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH	PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENEMPATI HUNIAN DENGAN AKSES SANITASI (AIR LIMBAH DOMESTIK LAYAK DAN AMAN)	%	93,00	94,00	4.622.256.902,00	95,00	9.980.908.755,00	96,00	10.853.910.177,00	97,00	10.467.698.482,00	98,00	11.087.899.476,00	100,00	12.270.763.976,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	MENINGKATNYA KUALITAS SISTEM DRAINASE	PERSENTASE CAKUPAN DRAINASE DALAM KONDISI BAIK	%	70,00	75,00	1.719.833.000,00	80,00	4.896.018.910,00	83,00	4.578.624.005,00	85,00	4.611.292.126,00	88,00	4.644.023.588,00	90,00	4.696.818.707,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	MENINGKATNYA PENATAAN DAN PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN STRATEGIS	PERSENTASE KAWASAN PERMUKIMAN STRATEGIS WILAYAH KABUPATEN/KOTA	%	0,00	0,00	-	60,00	2.378.026.769,00	62,00	2.433.448.153,00	65,00	2.532.677.894,00	70,00	2.719.466.284,00	75,00	3.081.313.616,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	MENINGKATNYA KUALITAS BANGUNAN GEDUNG	PERSENTASE BANGUNAN GEDUNG DALAM KONDISI BAIK	%	100,00	100,00	9.225.404.800,00	100,00	895.975.000,00	100,00	921.523.750,00	100,00	927.224.937,00	100,00	968.086.183,00	100,00	999.115.491,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	MENINGKATNYA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN YANG TERTATA	PERSENTASE PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	%	80,00	81,00	3.607.452.500,00	82,00	3.896.437.500,00	83,00	3.993.848.437,00	84,00	4.093.694.647,00	84,00	4.196.037.012,00	85,00	4.300.937.937,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	MENINGKATNYA AKSESIBILITAS MASYARAKAT YANG NYAMAN DAN AMAN	TINGKAT KEMANTAPAN JALAN	%	48,30	50,00	122.645.836.348,00	52,12	114.513.462.247,00	55,95	118.934.527.073,00	59,77	119.701.191.672,00	63,59	120.474.827.205,00	67,42	209.194.825.078,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	MENINGKATNYA KOMPETENSI TENAGA KONSTRUKSI	PERSENTASE TENAGA KERJA KONSTRUKSI KUALIFIKASI TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI	%	60,00	62,00	261.656.200,00	64,00	765.000.000,00	66,00	718.125.000,00	66,00	621.328.125,00	68,00	624.611.327,00	70,00	627.976.611,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	PERSENTASE PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	80,00	82,00	1.417.520.000,00	84,00	4.216.855.353,00	86,00	4.219.189.630,00	87,00	4.221.535.579,00	88,00	4.223.893.257,00	90,00	4.326.262.724,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	TERPENUHINYA RUMAH LAYAK HUNI BAGI WARGA NEGARA KORBAN BENCANA DAN YANG TERKENA RELOKASI AKIBAT PROGRAM PEMERINTAH	PERSENTASE WARGA NEGARA KORBAN BENCANA YANG MEMPEROLEH RUMAH LAYAK HUNI	%	100,00	100,00	647.098.850,00	100,00	2.265.062.250,00	100,00	2.539.924.737,00	100,00	3.168.889.723,00	100,00	4.426.021.709,00	100,00	6.879.447.794,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	MENINGKATNYA KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN	PERSENTASE LUAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI BAWAH 10 HA YANG DITANGANI	%	70,00	70,00	1.494.415.900,00	70,00	2.757.741.000,00	70,00	2.898.450.150,00	75,00	3.154.567.653,00	80,00	3.640.513.094,00	85,00	4.585.083.109,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	MENINGKATNYA PENATAAN DAN PENANGANAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	PERSENTASE PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH YANG DITATA DAN DITANGANI	%	0,00	0,00	-	55,00	1.355.283.030,00	60,00	1.358.784.446,00	65,00	1.362.303.369,00	70,00	1.365.839.886,00	75,00	1.369.394.086,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA	MENINGKATNYA PENYEDIAAN PSU PERMUKIMAN	PERSENTASE PERMUKIMAN YANG SUDAH DILENGKAPI PSU (PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM)	%	75,00	75,00	688.075.300,00	75,00	1.695.000.000,00	75,00	1.695.000.000,00	80,00	1.695.000.000,00	80,00	1.695.000.000,00	80,00	1.695.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM												PERANGKAT DAERAH
						TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
						TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	DAN UTILITAS UMUM (PSU)																	
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	MENINGKATNYA SERTIFIKASI DAN REGISTRASI BAGI ORANG ATAU BADAN HUKUM YANG MELAKSANAKAN PERANCANGAN DAN PERENCANAAN RUMAH SERTA PERENCANAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PSU TINGKAT KEMAMPUAN MENENGAH	PERSENTASE SERTIFIKASI DAN REGISTRASI BAGI ORANG ATAU BADAN HUKUM YANG MELAKSANAKAN PERANCANGAN DAN PERENCANAAN RUMAH SERTA PERENCANAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PSU TINGKAT KEMAMPUAN MENENGAH	%	0,00	0,00	-	50,00	20.000.000,00	50,00	20.000.000,00	55,00	20.000.000,00	55,00	20.000.000,00	60,00	20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	MENINGKATNYA AKSES MASYRAKAT TERHADAP TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA (TORA)	TERSEDINYA TANAH OBYEK LANDREFORM (TOL) YANG SIAP DIREDISTRIBUSIKAN YANG BERASAL DARI TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DANTANAH ABSENTEE	%	0,00	0,00	-	50,00	220.000.000,00	50,00	220.000.000,00	50,00	220.000.000,00	55,00	220.000.000,00	60,00	220.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	MENINGKATNYA PENGELOLAAN TANAH KOSONG	PERSENTASE TANAH KOSONG YANG DIKELOLA	%	0,00	0,00	-	50,00	30.000.000,00	50,00	30.000.000,00	50,00	30.000.000,00	55,00	30.000.000,00	60,00	30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	MENINGKATNYA PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	PERSENTASE PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	%	0,00	0,00	-	50,00	10.000.000,00	50,00	10.000.000,00	50,00	10.000.000,00	55,00	10.000.000,00	60,00	10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	MENINGKATNYA TERTIP PERTANAHAN DAN KEPASTIAN HUKUMBAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH	PERSENTASE LUAS KONSOLIDASI TANAH	%	0,00	0,00	-	50,00	80.000.000,00	50,00	80.000.000,00	50,00	80.000.000,00	55,00	80.000.000,00	60,00	80.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN TRANSPORTASI DARAT	PERSENTASE KELENGKAPAN JALAN YANG TELAH TERPASANG TERHADAP KONDISI IDEAL	%	0,00	100,00	11.351.218.000,00	100,00	12.128.750.000,00	100,00	11.525.000.000,00	100,00	9.757.593.750,00	100,00	8.807.783.593,00	100,00	7.933.071.933,00	DINAS PERHUBUNGAN
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN TRANSPORTASI LAUT	KONEKTIVITAS LAUT	INDEKS	30,00	40,00	17.750.000,00	42,00	253.125.000,00	44,00	256.750.000,00	50,00	63.525.000,00	55,00	76.576.250,00	60,00	102.155.062,00	DINAS PERHUBUNGAN

Sumber; SIPD

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penetapan indikator Kinerja Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah daerah serta indikator kinerja penyelenggara pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah

Penetapan Indikator kinerja Utama (IKU) daerah selanjutnya disajikan dalam Tabel Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Konawe Tahun 2025 – 2029 pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 2 IKU Kab Konawe Tahun 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM					
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030
				TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.1.1	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	70,71	70,81	70,91	71,01	71,11	71,21
1.1.2	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	Rata Rata Lama Sekolah	Tahun	9,75	10,09	10,43	10,77	11,11	11,45
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,26	13,36	13,46	13,56	13,66	13,76
2.1.1	Meningkatnya Pemerataan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penciptaan Lapangan Kerja dan Penguatan Ekonomi Lokal yang Inklusif	Angka Kemiskinan	%	12,27	12,25	10,12	9,05	8,07	7,09
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,88	2,75	2,70	2,50	2,10	2,00
2.1.2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	15,43	18,32	17,28	16,16	14,79	13,52
3.1.1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Antikorupsi	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	69,01	71,00	74,00	75,50	77,00	78,50
		Nilai SAKIP	Nilai	68,00	71,00	73,00	76,00	79,00	81,00
		Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (IPKD MCSP)	Nilai	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Nilai Capaian Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Nilai	3,550	3,700	3,850	4,000	4,200	4,500
		Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai	89,87	90,37	90,87	91,37	91,87	92,37
4.1.1	Terlestarinya Tradisi, Seni dan Praktik Budaya Lokal sebagai Identitas Masyarakat	Persentase Tradisi, Seni, Cagar, dan Warisan Budaya yang Dilestarikan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.1.2	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman, dan toleran melalui penguatan kerukunan antar umat beragama serta penurunan angka kriminalitas	Angka Kriminalitas (crime rate)	Per 100.000 penduduk	129,00	128,00	127,00	103,27	103,11	103,00
		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Nilai	85,00	88,00	91,00	94,00	97,00	100,00
4.1.3	Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	93,65	93,80	93,95	94,10	94,25	94,40
5.1.1	Terwujudnya Kemandirian Pangan yang Berkelanjutan	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	15,80	14,50	13,20	11,90	10,50	9,00

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM					
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030
				TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.1.2	Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas dan Resiliensi terhadap Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	82,65	82,82	83,00	83,17	83,34	83,34
		Indeks Resiko Bencana	Nilai	155,59	155,39	155,19	154,90	154,70	154,50
6.1.1	Meningkatnya Konektivitas Wilayah dan Pemerataan Akses Infrastruktur Dasar untuk Menurunkan Disparitas Antar Wilayah	Rasio konektivitas kab/kota	Nilai	85,62	87,00	88,00	89,00	90,00	91,00
		Persentase Desa Mandiri	%	0,003	0,014	0,021	0,027	0,034	0,041

4.2.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Penetapan indikator kinerja daerah daerah beserta targetnya dalam perencanaan pembangunan daerah kabupaten konawe tahun 2025-2029 diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4. 3 IKD Kab Konawe Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Nilai	-	85,20	85,40	85,60	85,80	86,00	86,20	
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	17,14	15,80	14,50	13,20	11,90	10,50	9,00	
3	Konsumsi Listrik per Kapita	Kwh/Kapita	-	267,00	285,00	305,00	327,00	350,00	374,00	
4	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	-	51,17	51,67	52,17	52,67	53,17	53,67	
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	79,31	82,65	82,82	83,00	83,17	83,34	83,34	
6	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai	-	71,84	72,04	72,24	72,44	72,64	72,64	
7	Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai	-	86,30	86,50	86,70	86,90	87,10	87,10	
8	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Nilai	-	94,47	94,54	94,61	94,68	94,75	94,75	
9	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	(%)	-	0,60	1,10	1,60	2,50	3,00	3,50	
10	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Ton/Tahun	-	5465,79	5565,79	5595,79	5625,79	5665,79	5665,79	
11	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	-	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	60,00	
12	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	-	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	
13	Indeks Resiko Bencana	Nilai	155,79	155,59	155,39	155,19	154,90	154,70	154,50	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
14	Indeks ketahanan daerah	Nilai	-	0,30	0,33	0,35	0,40	0,45	0,45	
15	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	-	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	
16	Kepadatan Penduduk	Orang/km2	-	46,00	46,50	47,00	47,50	48,00	49,00	
17	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Nilai	-	0,40	0,45	0,50	0,50	0,55	0,55	
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	11,82	15,43	18,32	17,28	16,16	14,79	13,52	
2	Angka Kemiskinan	%	13,27	12,27	12,25	10,12	9,05	8,07	7,09	
3	PDRB Per Kapita	Rp. Juta Per Tahun	45,88	50,76	56,51	63,44	71,65	81,52	93,26	
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,95	2,88	2,75	2,70	2,50	2,10	2,00	
5	Rasio Gini	Angka	0,302	0,300	0,298	0,295	0,293	0,290	0,288	
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	74,50	75,10	75,50	75,70	76,10	76,50	76,90	
7	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	70,61	70,71	70,81	70,91	71,01	71,11	71,21	
8	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	(%)	-	14,00	20,68	18,52	16,36	14,20	13,04	
9	Rata Rata Lama Sekolah	Tahun	9,69	9,75	10,09	10,43	10,77	11,11	11,45	
10	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,05	13,26	13,36	13,46	13,56	13,66	13,76	
11	Literasi membaca	%	-	90,00	90,05	90,10	90,15	90,20	90,25	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
12	Numerasi	%	-	87,00	89,00	91,00	95,00	96,00	98,00	
13	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Nilai	-	60,00	75,00	75,10	75,20	75,30	75,40	
14	Indeks Literasi Digital	Nilai	-	43,30	43,80	44,30	44,80	45,30	89,50	
15	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	-	80,00	82,00	85,00	89,00	92,00	95,00	
16	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Nilai	-	85,00	88,00	91,00	94,00	97,00	100,00	
17	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Nilai	-	55,00	57,00	59,50	62,00	64,50	67,00	
18	Indeks Perlindungan Anak	Nilai	-	58,00	67,20	67,30	67,40	67,50	67,60	
19	Indeks Pembangunan Keluarga	Nilai	-	61,70	62,80	64,10	65,40	66,70	68,10	
20	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Nilai	0,00	0,40	0,54	0,53	0,52	0,51	0,50	
21	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	93,81	93,65	93,80	93,95	94,10	94,25	94,40	
22	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	per 100.000 KH	-	160,00	155,20	150,50	146,00	141,60	137,40	
23	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	per 100.000 penduduk	-	321,31	254,17	222,94	200,68	183,81	170,89	
24	Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
25	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	%	-	90,00	90,50	91,00	91,50	92,00	92,50	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
26	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	%	-	80,50	85,00	90,00	92,00	92,00	95,00	
27	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	%	-	29,32	29,95	30,58	31,21	31,83	32,45	
28	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitas dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan	Orang	-	880	895	900	930	960	985	
29	Jumlah warisan budaya yang terdaftar	Objek	-	19	25	25	25	25	25	
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Angka Ketergantungan	%	-	64,37	64,12	63,87	63,62	63,37	63,12	
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	-	82,77	20,00	18,00	16,00	14,00	12,00	
3	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	-	11,02	12,00	11,00	10,00	10,00	10,00	
4	Rasio Kewirausahaan	Persentase	-	1,90	2,40	2,77	3,21	3,65	4,08	
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	-	68,28	68,53	68,78	69,03	69,28	69,53	
6	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	-	40,45	59,00	65,00	70,00	75,00	80,15	
7	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	-	15,84	12,95	10,07	7,18	4,29	1,41	
8	Net Ekspor	%	-	46,84	56,06	65,29	74,52	83,75	92,98	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
9	Indeks Infrastruktur	Nilai	-	50,00	51,50	53,00	54,50	56,00	57,50	
10	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Persentase	-	82,74	83,62	84,50	85,38	86,26	87,14	
11	Persentase Desa Mandiri	%	0,000	0,003	0,014	0,021	0,027	0,034	0,041	
12	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	(%)	-	0,84	0,88	0,92	0,97	1,02	1,07	
13	Tingkat Inflasi	(%)	-	2,90	2,80	2,70	2,60	2,50	2,40	
14	Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	%	-	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	
15	Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel non bintang	%	-	66,67	68,42	68,77	69,30	69,65	71,93	
16	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	%	-	37,92	39,81	41,80	43,89	46,09	48,39	
17	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (UKM)	%	-	0,53	0,76	0,99	1,22	1,45	1,68	
18	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level kabupaten	%	-	5,60	11,60	16,60	16,70	17,60	17,70	
19	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	Nilai	-	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	
20	Return on Asset (ROA) BUMD	%	-	-27,25	-32,12	-31,41	-25,78	-16,24	4,37	
21	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	-	60,50	61,75	62,35	62,55	62,75	63,05	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
22	Indeks harga Konsumen	Nilai	-	115,00	114,00	113,00	112,00	111,00	110,00	
23	Nilai Investasi daerah (rp)	%	-	3,3 T	3,4 T	3,6 T	3,7 T	3,9 T	3,9 T	
24	Jumlah Kredit yang Diberikan untuk lapangan usaha	triliun rupiah	-	2,61	2,71	2,81	2,91	3,01	3,11	
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	69,01	69,01	71,00	74,00	75,50	77,00	78,50	
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	-	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,00	
3	Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai	88,87	89,87	90,37	90,87	91,37	91,87	92,37	
4	Indeks SPI	Nilai	-	73,00	78,00	80,00	85,00	90,00	95,00	
5	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,26	3,34	3,42	3,50	3,58	3,66	3,74	
7	Cakupan layanan telekomunikasi (%)	%	-	82,52	85,29	87,14	90,27	92,94	95,14	
8	Angka Kriminalitas (crime rate)	per 100.000 penduduk	193,35	129,00	128,00	127,00	103,27	103,11	103,00	
9	Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan	Kelompok Masyarakat	-	6	6	7	7	7	8	
10	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	-	3,10	3,14	3,18	3,22	3,26	3,28	
11	Jumlah Kerja sama daerah	Kerja Sama	-	20	20	20	20	20	20	

NO	INDIKATOR			SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					KET	
						2025	2026	2027	2028	2029		2030
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
12	Persentase konflik atau ketegangan antarumat beragama yang terselesaikan			%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
13	Jumlah Konflik atau Ketegangan Antarumat Beragama yang Dilaporkan			Kasus	-	0	0	0	0	0	0	
14	Nilai SAKIP			Nilai	67,27	68,00	71,00	73,00	76,00	79,00	81,00	
15	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (IPKD MCSP)			Nilai	58,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	Nilai Capaian Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)			Nilai	3,41	3,55	3,70	3,85	4,00	4,20	4,50	
17	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)			Nilai	65,82	68,00	71,00	73,00	76,00	79,00	81,00	
	INDIKATOR KINERJA KUNCI											
1	Pendidikan		Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	-	92,95	93,05	94,00	94,05	95,00	95,05	
		(2)	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	-	99,28	99,04	99,05	99,06	99,08	99,09	
		(3)	Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	-	93,10	93,05	94,00	94,05	95,00	95,05	
		(4)	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yg berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	-	89,53	90,05	91,05	92,05	93,05	94,05	
		(5)	Angka partisipasi kasar (APK) Sekolah Dasar	%	-	100,00	102,00	103,00	104,00	105,00	106,00	
		(6)	Angka partisipasi kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama	%	-	107,41	108,00	108,05	109,00	109,05	110,00	

NO	INDIKATOR			SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		(7)	Angka pendidikan yang tamat (APT SD)	%	-	92,09	93,00	94,00	95,00	96,00	96,05	
		(8)	Angka pendidikan yang tamat (APT SMP)	%	-	95,68	96,03	96,08	97,03	97,08	98,00	
		(9)	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	-	94,39	95,00	95,05	96,00	96,05	97,00	
		(10)	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	-	93,10	93,06	94,02	94,08	95,04	96,00	
		(11)	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	-	0,60	0,55	0,05	0,45	0,04	0,03	
		(12)	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	-	0,60	0,55	0,05	0,45	0,04	0,03	
		(13)	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	-	92,62	96,00	96,07	97,04	98,00	98,05	
		(14)	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	-	99,75	99,08	99,85	99,09	99,09	99,09	
		(15)	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	-	93,37	94,00	94,08	95,05	96,00	96,00	
		(16)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	-	98,93	99,01	99,03	99,04	99,05	99,06	
		(17)	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	-	81,23	85,00	87,00	88,05	89,05	90,00	
		(18)	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	%	-	86,57	90,00	92,00	93,05	94,05	95,00	
		(19)	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	%	-	0,93	0,07	0,07	0,07	1,00	1,02	

NO	INDIKATOR			SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		(20)	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	%	-	0,00	0,02	0,04	0,06	0,08	1,00	
		(21)	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	%	-	0,99	1,02	1,05	1,08	1,01	1,12	
		(22)	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	%	-	0,00	0,02	0,04	0,06	0,08	1,00	
		(23)	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	%	-	9,14	9,06	10,01	10,06	11,01	11,06	
		(24)	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	%	-	13,24	14,00	14,08	15,06	16,04	17,02	
		(25)	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	%	-	93,39	94,00	94,06	95,02	95,08	96,02	
		(26)	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	%	-	97,98	98,02	98,05	98,08	99,01	99,03	
		(27)	Penduduk yang berusia>15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	-	97,99	98,02	98,04	98,06	98,08	99,00	
		(28)	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	-	71,15	75,00	79,00	83,00	87,00	90,00	
		(29)	Iklim Keamanan SMP	Nilai	-	73,11	73,00	75,00	77,00	78,05	80,00	
		(30)	Iklim Kebhinekaan SD	Nilai	-	78,37	75,00	77,00	79,00	81,00	83,00	
		(31)	Iklim Kebinekaan SMP	Nilai	-	76,56	74,00	76,00	78,00	79,05	81,00	
		(32)	Iklim Inklusivitas SD	Nilai	-	63,78	65,05	68,00	70,00	72,00	74,00	

NO	INDIKATOR			SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		(33)	Iklim Inklusivitas SMP	Nilai	-	63,88	62,00	65,00	68,00	70,00	72,00	
		(34)	Iklim Keamanan SD	Nilai	-	76,60	78,05	80,00	82,00	84,00	86,00	
		(35)	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	-	51,15	59,00	62,00	65,00	68,00	70,00	
		(36)	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	-	39,28	56,00	60,00	64,00	67,00	70,00	
		(37)	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	-	63,90	64,00	66,00	68,00	69,00	70,00	
		(38)	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	-	62,94	60,00	62,00	64,00	66,00	68,00	
		(39)	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	-	62,98	74,00	78,00	82,00	86,00	90,00	
		(40)	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	%	-	53,95	68,00	72,00	77,00	81,00	85,00	
2	Kesehatan	(1)	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk (TT/1.000 penduduk)	Rasio	-	0,90	0,95	1,00	1,10	1,25	1,40	
		(2)	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		(3)	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	-	94,00	95,00	96,00	97,00	98,00	98,00	
		(4)	Persentase ibu bersalin Mendapatkan pelayanan persalinan	%	-	95,00	96,00	97,00	98,00	98,00	98,00	
		(5)	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	-	95,00	96,00	97,00	98,00	98,00	98,00	

NO	INDIKATOR			SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		(6)	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	-	94,00	95,00	96,00	97,00	98,00	98,00	
		(7)	Persentase anak usia pendidikan dasar yg mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	-	94,00	95,00	96,00	97,00	98,00	98,00	
		(8)	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	-	89,00	90,00	92,00	94,00	96,00	97,00	
		(9)	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	-	84,00	85,00	88,00	91,00	94,00	95,00	
		(10)	Persentase penderita hipertensi yg mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	-	74,00	75,00	80,00	85,00	90,00	92,00	
		(11)	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	-	69,00	70,00	78,00	85,00	90,00	92,00	
		(12)	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	-	82,00	85,00	88,00	90,00	92,00	94,00	
		(13)	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	-	88,00	90,00	92,00	94,00	96,00	97,00	
		(14)	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	-	82,00	85,00	88,00	91,00	94,00	95,00	
		(15)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Per 1.000 Kelahiran	-	6,66	5,10	4,80	4,50	4,20	4,00	
		(16)	Angka kelangsungan hidup bayi	%	-	99,46	99,49	99,52	99,55	99,58	99,60	
		(17)	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Per 1.000 Kelahiran	-	0,54	0,35	0,34	0,33	0,32	0,30	

NO	INDIKATOR			SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		(18)	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Per 1.000 Kelahiran	-	5,40	4,60	4,40	4,20	3,80	3,50	
		(19)	Angka Kematian Ibu per100,000 kelahiran hidup	per 100.000 KH	-	179,95	150,00	140,00	130,00	115,00	100,00	
		(20)	Rasio posyandu per satuan balita	Per 1000	-	1,33	1,35	1,40	1,45	1,50	1,55	
		(21)	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	per 100.000 penduduk	-	63,90	64,50	65,00	65,50	66,00	66,50	
		(22)	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	per 100.000 penduduk	-	0,72	0,80	0,90	1,00	1,05	1,10	
		(23)	Rasio dokter per satuan penduduk	Per 1000 Penduduk	-	0,41	0,50	0,58	0,65	0,72	0,80	
		(24)	Rasio tenaga medis per satuan penduduk (Nakes/10.000 penduduk)	Rasio	-	8,62	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50	
		(25)	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	-	82,00	85,00	88,00	90,00	92,00	94,00	
		(26)	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	-	87,04	90,50	92,30	94,10	95,50	96,00	
		(27)	CakupanDesa/kelurahanUniversal ChildImmunization (UCI)	%	-	42,74	65,00	75,00	82,00	88,00	90,00	
		(28)	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	-	94,00	95,00	96,00	97,00	98,00	98,00	
		(29)	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	-	80,00	85,00	90,00	92,00	94,00	95,00	
		(30)	Non Polio AFP rate per100.000 penduduk (kasus/100.000 <15 th)	Nilai	-	2,57	2,57	2,70	2,70	2,80	2,80	

NO	INDIKATOR			SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		(31)	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	-	88,00	90,00	92,00	94,00	96,00	97,00	
		(32)	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	-	83,00	85,00	88,00	91,00	94,00	95,00	
		(33)	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	per 100.000 penduduk	-	321,31	230,00	210,00	195,00	180,00	150,00	
		(34)	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	per 100.000 penduduk	-	10,77	10,00	9,50	9,00	8,50	8,00	
		(35)	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	-	35,46	45,00	55,00	60,00	65,00	70,00	
		(36)	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	-	70,92	80,00	85,00	88,00	90,00	92,00	
		(37)	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	-	88,00	90,00	92,00	94,00	96,00	97,00	
		(38)	Penderita diare yang ditangani	%	-	99,05	98,00	98,50	99,00	99,00	99,00	
		(39)	Angka kejadian Malaria	Per 1000 Penduduk	-	0,00	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	
		(40)	Tingkat kematian akibat malaria	%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		(41)	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	%	-	35,00	40,00	55,00	65,00	75,00	80,00	
		(42)	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	%	-	82,00	85,00	88,00	91,00	94,00	95,00	
		(43)	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	-	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	

NO	INDIKATOR			SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		(44)	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	-	48,90	60,00	70,00	78,00	85,00	90,00	
		(45)	Cakupan puskesmas	%	-	103,57	105,00	106,00	107,00	108,00	109,00	
		(46)	Cakupan pembantu puskesmas	%	-	30,20	32,00	34,00	36,00	38,00	40,00	
		(47)	Cakupan pelayanan nifas	%	-	67,43	72,00	75,00	80,00	84,00	86,00	
		(48)	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	-	82,50	87,00	89,00	91,00	93,00	95,00	
		(49)	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	%	-	90,00	92,00	93,00	94,00	95,00	95,00	
		(50)	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	-	45,32	55,00	65,00	75,00	85,00	90,00	
		(51)	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	-	50,00	60,00	70,00	75,00	80,00	85,00	
		(52)	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	-	98,00	98,00	98,00	99,00	99,00	99,00	
		(53)	Presentase lanjut usia yang mandiri	%	-	93,50	94,20	94,60	95,00	95,20	95,50	
		(54)	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	%	-	1,40	1,35	1,30	1,25	1,22	1,20	
		(55)	Pravelensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun	%	-	12,40	11,00	10,00	9,50	8,50	8,00	
		(56)	Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	%	-	100,00	98,00	98,00	99,00	99,00	99,00	

NO	INDIKATOR			SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		(57)	Presentasi puskesmas terakreditasi paripurna	%	-	37,93	45,00	55,00	65,00	75,00	80,00	
		(58)	Presentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurna	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		(59)	Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar	%	-	51,72	78,00	86,00	90,00	95,00	100,00	
		(60)	Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		(61)	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	%	-	36,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	
		(62)	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	%	-	21,80	21,00	20,00	19,50	18,80	18,00	
		(63)	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	%	-	100,00	98,00	98,00	99,00	99,00	99,00	
		(64)	Insidensi Tuberkulosis	per 100.000 penduduk	-	321,00	230,00	210,00	195,00	180,00	150,00	
3	Pekerjaan Umum	(1)	Rasio luas kawasan permukiman rawan pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	-	63,83	70,00	73,00	76,00	78,00	80,00	
		(2)	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yg terlindungi oleh Infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Kab/Kota	%	-	46,67	48,00	50,00	53,00	56,00	60,00	
		(3)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasitangga di seluruh kab/kota	%	-	60,97	63,50	66,00	68,00	69,00	70,00	

NO	INDIKATOR			SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		(4)	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah	%	-	2,08	2,30	2,60	2,80	3,00	3,20	
		(5)	Persentase jumlah rumah tangga yg memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	-	0,43	0,95	1,10	1,30	1,50	1,70	
		(6)	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	-	97,00	98,00	98,00	99,00	99,00	99,00	
		(7)	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	-	49,86	57,00	60,00	64,00	67,00	70,00	
		(8)	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	-	97,00	98,00	98,00	99,00	99,00	99,00	
		(9)	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	-	53,68	62,00	66,00	70,00	73,00	76,00	
		(10)	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk (km/1.000 penduduk)	Rasio	-	0,27	0,27	0,28	0,28	0,29	0,29	
		(11)	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	-	6,57	7,20	7,60	8,00	8,50	9,00	
		(12)	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	%	-	22,88	20,00	18,00	15,00	12,00	10,00	
		(13)	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	-	25,00	27,00	30,00	34,00	37,00	40,00	
		(14)	Persentase penduduk berakses air minum Persentase penduduk berakses air minum	%	-	49,46	50,00	52,00	56,00	60,00	65,00	
		(15)	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	-	51,63	55,00	58,00	62,00	66,00	70,00	

NO	INDIKATOR			SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		(16)	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	%	-	75,00	78,00	80,00	82,00	85,00	88,00	
		(17)	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	-	6,32	7,00	8,00	9,00	9,50	10,00	
		(18)	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	%	-	21,00	25,00	30,00	40,00	50,00	60,00	
		(19)	Ruang publik yang berubah peruntukannya	%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		(20)	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	%	-	79,36	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	
		(21)	Ketaatan terhadap RTRW	%	-	80,00	82,00	85,00	88,00	92,00	95,00	
		(22)	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	-	53,68	62,00	66,00	70,00	73,00	76,00	
		(23)	Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Kasus	-	0	0	0	0	0	0	
		(24)	Penyelesaian Materi Teknis RTRW	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		(25)	Penetapan RTRW	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		(26)	Penyelesaian Materi Teknis RDTR	%	-	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		(27)	Penetapan RDTR	%	-	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

NO	INDIKATOR			SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		(28)	Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan	Hektar	-	100,00	150,00	200,00	250,00	300,00	350,00	
4	Perumahan	(1)	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kab/kota	%	-	97,00	98,00	98,00	99,00	99,00	99,00	
		(2)	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	-	10,00	20,00	40,00	65,00	85,00	100,00	
		(3)	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	-	21,06	20,00	19,00	18,00	16,50	15,00	
		(4)	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	%	-	1,50	2,00	5,00	8,00	12,00	16,00	
		(5)	Rasio rumah layak huni	%	-	78,94	81,00	83,00	85,00	88,00	90,00	
		(6)	Rasio permukiman layak huni	%	-	96,37	96,80	97,20	97,60	98,00	98,30	
		(7)	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	-	78,94	81,00	83,00	85,00	88,00	90,00	
		(8)	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	-	64,00	66,50	67,50	69,00	70,50	72,00	
		(9)	Persentase pemukiman yang tertata	%	-	80,46	82,00	83,00	84,00	85,00	86,50	
		(10)	Persentase lingkungan permukiman kumuh	%	-	3,63	3,30	3,00	2,60	2,30	2,00	
		(11)	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	-	1,05	0,95	0,85	0,75	0,65	0,55	
		(12)	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	%	-	0,41	0,40	0,38	0,35	0,33	0,30	

NO	INDIKATOR			SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		(13)	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	-	5,00	6,00	8,00	10,00	12,00	15,00	
5	Trantibumlinmas	(1)	PERSENTASE GANGGUAN TRANTIBUM YANG DAPAT DISELESAIKAN	%	-	50,00	60,00	70,00	80,00	85,00	90,00	
		(2)	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	-	250	300	400	500	600	700	
		(3)	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiap-siagaan terhadap bencana	Orang	-	7500	8000	8500	9000	9500	10000	
		(4)	Jumlah warga negarayang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Orang	-	886	900	950	1000	1050	1100	
		(5)	PERSENTASE PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN	%	-	97,00	98,00	98,00	99,00	99,00	99,00	
		(6)	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	%	-	94,00	95,00	96,00	97,00	98,00	98,00	
		(7)	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	-	88,00	90,00	92,00	94,00	95,00	96,00	
		(8)	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Nilai	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		(9)	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	Nilai	-	87,00	88,00	89,00	90,00	91,00	92,00	
		(10)	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	Nilai	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

NO	INDIKATOR			SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6	Sosial	(1)	PERSENTASE PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUTUSIA TERLANTAN DAN GELANDANGAN PENGEMIS YG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI LUAR PANTI (INDIKATOR SPM)	%	-	97,00	98,00	98,00	99,00	99,00	99,00	
		(2)	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota	%	-	97,00	98,00	98,00	99,00	99,00	99,00	
		(3)	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	-	79,29	80,50	81,50	82,50	83,50	85,00	
		(4)	Persentase PMKS yang tertangani	%	-	79,29	80,50	81,50	82,50	83,50	85,00	
		(5)	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	-	5,00	10,00	20,00	25,00	30,00	40,00	
		(6)	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	-	94,00	95,00	96,00	97,00	98,00	98,00	
		(7)	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	-	88,00	90,00	92,00	94,00	95,00	96,00	
		(8)	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	-	97,00	98,00	98,00	99,00	99,00	99,00	
		(9)	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	-	73,66	78,00	80,00	82,00	84,00	86,00	
		(10)	Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	Keluarga	-	25	32	40	50	65	85	

NO	INDIKATOR			SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		(11)	SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial ASN dan NON ASN yang Mengikuti Sertifikasi	Orang	-	83	83	85	87	89	92	
		(12)	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan yang Mengikuti Proses Akreditasi	Lembaga	-	100	100	100	100	100	100	
		(13)	Persentase (%) daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	%	-	100,00	82,00	89,00	96,00	100,00	100,00	
		(14)	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	-	92,00	82,00	84,00	86,00	88,00	90,00	
		(15)	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	-	88,00	82,00	84,00	86,00	88,00	90,00	
		(16)	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	-	93,00	82,00	84,00	86,00	88,00	90,00	
		(17)	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	-	89,00	85,00	87,00	89,00	91,00	93,00	
		(18)	Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	-	100,00	98,00	98,00	99,00	99,00	99,00	
7	Ketenagakerjaan	(1)	Persentase kegiatan yg dilaksanakan yg mengacu ke rencana tenaga kerja	%	-	67,00	80,00	85,00	88,00	90,00	92,00	
		(2)	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	-	2,00	3,00	4,00	6,00	8,00	10,00	
		(3)	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang	-	1500	29550	29565	30000	31000	32000	
		(4)	Jumlah lulusan pelatihan vokasi yang bersertifikat	Orang	-	100	300	600	900	1200	1500	

NO	INDIKATOR			SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		(5)	Persentase Pekerja Informal	%	-	60,28	60,29	60,30	60,31	60,32	60,33	
8	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	(1)	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	-	0,15	25,00	30,00	35,00	45,00	50,00	
		(2)	PERSENTASE ANAK KORBAN KEKERASAN YANG DITANGANI INSTANSI TERKAIT KABUPATEN	%	-	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	95,00	
		(3)	RASIO KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN, TERMASUK TPPO (PER 100.000 PENDUDUK PEREMPUAN	%	-	1,00	1,00	0,90	0,90	0,80	0,70	
		(4)	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	-	10,94	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	
		(5)	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	-	13,33	13,33	13,33	13,33	13,33	13,33	
		(6)	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	-	89,06	89,60	89,90	90,20	90,50	90,80	
		(7)	Rasio KDRT	Rasio	-	2,01	1,90	1,80	1,70	1,60	1,50	
		(8)	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		(9)	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	-	96,17	96,40	96,60	96,80	97,00	97,20	
		(10)	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	-	97,00	98,00	98,00	99,00	99,00	99,00	

NO	INDIKATOR			SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		(11)	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	-	97,00	98,00	98,00	99,00	99,00	99,00	
		(12)	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	-	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	95,00	
		(13)	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	-	94,00	95,00	96,00	97,00	98,00	98,00	
		(14)	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	-	97,00	98,00	98,00	99,00	99,00	99,00	
		(15)	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	-	97,00	98,00	98,00	99,00	99,00	99,00	
		(16)	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	-	97,00	98,00	98,00	99,00	99,00	99,00	
		(17)	Rasio APM perempuan/laki-laki diSD (GPI×100)	Rasio	-	96,30	97,00	98,00	99,00	100,00	100,00	
		(18)	Rasio APM perempuan/laki-laki diSMP (GPI×100)	Rasio	-	74,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	
		(19)	Rasio APM perempuan/laki-laki diSMA (GPI×100)	Rasio	-	66,10	72,00	78,00	85,00	92,00	100,00	
		(20)	Rasio APM perempuan/laki-laki diPerguruan Tinggi (GPI×100)	Rasio	-	22,35	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	
		(21)	Rasio melek huruf perempuan terhadaplaki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun (GPI×100)	Rasio	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

NO	INDIKATOR			SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		(22)	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian	%	-	43,20	43,50	43,80	44,10	44,30	44,50	
		(23)	Persentase ARG Daerah	%	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
		(24)	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah	Nilai	-	-	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
		(25)	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Nilai	-	58,00	67,20	67,30	67,40	67,50	67,60	
		(26)	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	%	-	100,00	98,00	98,00	99,00	99,00	99,00	
		(27)	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	-	100,00	98,00	98,00	99,00	99,00	99,00	
		(28)	Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Nilai	-	-	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	
9	Pangan	(1)	PERSENTASE KETERSEDIAAN PANGAN (TERSEDIAANYA CADANGAN BERAS/ JAGUNG SESUAI KEBUTUHAN)	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		(2)	Ketersediaan energi dan protein perkapita	%	-	82,00	83,50	84,00	84,50	85,00	85,50	
		(3)	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	-	80,00	85,00	90,00	92,00	94,00	95,00	
		(4)	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	-	75,00	85,00	90,00	92,00	94,00	95,00	
		(5)	Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) terhadap target jumlah CBPD berdasarkan Perbadan 15/2023	%	-	57,00	85,00	90,00	95,00	95,00	95,00	

NO	INDIKATOR			SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		(6)	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	-	82,00	83,50	84,00	84,50	85,00	85,50	
		(7)	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	-	15,00	1,80	1,60	1,40	1,20	1,00	
10	Pertanahan	(1)	Persentase pemanfaatan tanah yg sesuai dgn peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dgn luas izin lokasi yg diterbitkan	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		(2)	Persentase penetapan tanah utk Pembangunan fasilitas umum	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		(3)	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		(4)	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		(5)	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		(6)	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	-	94,00	95,00	96,00	97,00	98,00	98,00	
		(7)	Persentase luas lahan bersertifikat	%	-	62,11	70,00	77,00	85,00	90,00	94,00	
		(8)	Penyelesaian izin lokasi	%	-	83,70	87,30	88,30	89,20	90,00	90,50	
		(9)	Jumlah bidang tanah yang didistribusi	Bidang Tanah	-	-	144,00	159,00	174,00	190,00	200,00	
		(10)	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria	Kepala Keluarga	-	-	100742	110817	121899	134089	140000	

NO	INDIKATOR			SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
11	Lingkungan Hidup	(1)	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	-	77,30	79,50	80,50	81,50	82,00	83,00	
		(2)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemda Kab/Kota	%	-	15,00	20,00	25,00	35,00	50,00	60,00	
		(3)	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	
		(4)	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	
		(5)	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	
		(6)	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Nilai	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
		(7)	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota	%	-	94,00	95,00	96,00	97,00	98,00	98,00	
		(8)	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	Ton/Tahun	-	3000,00	4000,00	5000,00	6000,00	6200,00	6500,00	
		(9)	Persentase cakupan area pelayanan	%	-	0,02	5,00	8,00	12,00	15,00	20,00	
		(10)	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	Skor	-	71,00	73,00	75,00	77,00	79,00	80,00	
		(11)	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	%	-	94,00	95,00	96,00	97,00	98,00	98,00	
		(12)	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	%	-	94,00	95,00	96,00	97,00	98,00	98,00	

NO	INDIKATOR			SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		(13)	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	poin	-	40,00	40,00	45,00	50,00	55,00	55,00	
		(14)	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan pengumpulan Sampah	%	-	45,00	50,00	55,00	58,00	60,00	65,00	
12	Admindukcapil	(1)	Perekaman KTP elektronik	%	-	99,46	99,90	100,00	100,00	100,00	100,00	
		(2)	Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (Satu) Hari yang Memiliki KIA	%	-	56,22	75,00	85,00	92,00	96,00	98,00	
		(3)	Kepemilikan akta kelahiran	%	-	98,50	99,00	99,00	99,50	99,50	99,50	
		(4)	Persentase OPD yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama	%	-	45,45	75,00	85,00	95,00	100,00	100,00	
		(5)	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	-	99,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		(6)	Rasio pasangan berakte nikah	%	-	56,25	72,00	80,00	90,00	96,00	98,00	
		(7)	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Nilai	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	[ada (1) /tidak ada (0)]
		(8)	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Nilai	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	[Sudah(1)/Belum(0)]
		(9)	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	-	97,00	98,00	98,00	99,00	99,00	99,00	
		(10)	Cakupan Kepemilikan Akta Cerai	%	-	97,00	98,00	98,00	99,00	99,00	99,00	
		(11)	Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	%	-	97,00	98,00	98,00	99,00	99,00	99,00	

NO	INDIKATOR			SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(1)	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	-	62,50	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	
		(2)	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	-	0,00	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	
		(3)	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	-	97,00	98,00	98,00	99,00	99,00	99,00	
		(4)	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Kelompok	-	10	11	11	12	12	13	
		(5)	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	-	10	11	12	12	13	13	
		(6)	Persentase LSM aktif	%	-	5,15	7,00	9,00	10,00	11,00	12,00	
		(7)	Persentase LPM Berprestasi	%	-	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	
		(8)	Persentase PKK aktif	%	-	97,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	
		(9)	Persentase Posyandu aktif	%	-	94,00	95,00	96,00	97,00	98,00	98,00	
		(10)	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	-	35,00	40,00	55,00	65,00	75,00	80,00	
		(11)	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	%	-	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	85,00	
		(12)	Jumlah Desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa berbasis digital	Desa	-	50	60	75	85	95	100	
14	Pengendalian Penduduk dan	(1)	TFR (Angka Kelahiran Total)	Nilai	-	2,42	2,40	2,37	2,35	2,32	2,29	

NO	INDIKATOR			SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Keluarga Berencana											
		(2)	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	-	1,09	1,08	1,05	1,03	1,02	1,00	
		(3)	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	-	27,78	35,00	40,00	50,00	60,00	70,00	
		(4)	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan IndukPengendalian Penduduk	%	-	-	30,00	50,00	70,00	85,00	100,00	
		(5)	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Dokumen	-	1	1	1	2	2	3	
		(6)	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Unit	-	1	2	3	4	5	6	
		(7)	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Rata-Rata Jumlah Anak	-	2,20	2,18	2,16	2,14	2,12	2,10	
		(8)	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	%	-	71,09	72,00	73,00	74,00	75,00	76,00	
		(9)	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR15–19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	-	40,00	37,30	34,80	32,50	30,30	28,30	
		(10)	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	-	33,73	35,00	37,00	39,00	41,00	43,00	
		(11)	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	-	61,57	63,00	65,00	67,00	69,00	70,00	

NO	INDIKATOR			SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		(12)	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	-	63,73	68,00	72,00	75,00	78,00	80,00	
		(13)	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	-	43,73	48,00	52,00	56,00	60,00	65,00	
		(14)	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	-	44,16	48,00	52,00	56,00	60,00	65,00	
		(15)	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	-	13,79	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	
		(16)	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	-	55,17	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	
		(17)	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		(18)	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	-	5,97	8,00	10,00	12,00	14,00	15,00	
		(19)	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		(20)	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	-	0,00	80,00	88,00	92,00	95,00	95,00	
		(21)	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	-	71,43	80,00	85,00	90,00	93,00	95,00	
		(22)	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

NO	INDIKATOR			SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		(23)	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	%	-	0,50	0,40	0,30	0,25	0,20	0,15	
		(24)	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		(25)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks (Skala 0-100)	-	61,50	62,80	64,10	65,40	66,70	68,10	
		(26)	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	%	-	78,00	78,10	78,20	78,30	78,40	78,50	
		(27)	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks (Skala 0-100)	-	66,00	69,80	73,90	78,20	82,80	85,00	
		(28)	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	%	-	11,00	10,00	9,10	8,30	7,50	6,80	
		(29)	Indeks lansia berdaya	Indeks (Skala 0-100)	-	65,40	65,80	66,20	66,70	67,10	67,50	
		(30)	Indeks Pengasuhan remaja	Indeks (Skala 0-100)	-	87,50	88,30	89,10	89,90	90,70	91,50	
		(31)	Proporsi kampung KB Mandiri	Indeks (Skala 0-100)	-	19,80	22,00	24,40	27,00	29,90	30,00	
15	Perhubungan	(1)	Rasio konektivitas kab/kota	Nilai	85,62	85,62	87,00	88,00	89,00	90,00	91,00	
		(2)	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	%	-	0,20	0,22	0,24	0,26	0,27	0,28	
		(3)	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Nilai	-	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
		(4)	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	-	1200	1400	1500	1600	1700	1800	

NO	INDIKATOR			SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		(5)	Jumlah PelabuhanLaut/Udara/Terminal Bis	Unit	-	1	1	1	1	1	1	
		(6)	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	-	64,00	70,00	78,00	84,00	88,00	92,00	
		(7)	Pemasangan Rambu-rambu	%	-	60,60	70,00	80,00	88,00	92,00	95,00	
		(8)	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	KM	-	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	
		(9)	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Nilai	-	100,00	110,00	120,00	130,00	140,00	150,00	
		(10)	Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Kabupaten/Kota	Indeks	-	0,83	0,90	0,95	1,00	1,00	1,00	
		(11)	Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Kabupaten/Kota	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	Kominfo	(1)	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	-	81,08	90,00	96,00	100,00	100,00	100,00	
		(2)	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	-	100,00	80,00	90,00	95,00	98,00	100,00	
		(3)	PERSENTASE MASYARAKAT YG MENJADI SASARAN PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK, MENGETAHUI KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH DAN PEMDA KAB/KOTA	%	-	68,36	72,00	76,00	80,00	85,00	88,00	
		(4)	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

NO	INDIKATOR			SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		(5)	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	-	87,43	88,00	88,50	89,00	89,50	90,00	
		(6)	Nilai tingkat kematangan layanan Jaringan Intra Pemerintah Provinsi	Level	-	1	2	2	2	3	3	
		(7)	Nilai tingkat kematangan penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Level	-	2	3	3	3	3	3	
		(8)	Nilai tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE di Pemerintah Provinsi	Level	-	3	3	3	3	3	3	
		(9)	Peningkatan implementasi inovasi Provinsi Cerdas	%	-	10,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	
		(10)	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks (Skala 0-100)	-	60,00	65,00	75,00	80,00	85,00	95,00	
17	Koperasi	(1)	Meningkatnya Koperasi yg berkualitas	%	-	13,01	15,00	16,60	17,90	19,50	21,00	
		(2)	Persentase Usaha mikro yang menjadi wirausaha	Persentase	-	6,04	6,50	7,20	8,00	8,60	9,20	
		(3)	Persentase koperasi aktif	%	-	29,23	35,00	45,00	55,00	60,00	65,00	
		(4)	Persentase UKM nonBPR/LKM aktif	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		(5)	Persentase BPR/LKM aktif	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		(6)	Update dan pengumpulan Data UMKM	Unit	-	21699	26700	31701	36702	41703	46704	
		(7)	Proporsi Jumlah UKM	%	-	0,53	56,00	58,00	60,00	62,00	64,00	

NO	INDIKATOR			SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		(8)	Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi	%	-	0,07	9,00	13,00	14,00	16,00	17,00	
		(9)	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Berkoperasi	%	-	1,00	1,02	1,03	1,05	1,06	1,08	
18	Penanaman Modal	(1)	Persentase peningkatan investasi dikabupaten/kota	%	-	25,13	9,00	10,00	10,50	11,00	11,50	
		(2)	Rasio daya serap tenaga kerja	triliun rupiah	-	20000,00	2550,00	2600,00	2650,00	2700,00	2750,00	
19	Kepemudaan dan Olah raga	(1)	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	-	10,00	10,50	11,00	12,00	13,50	15,00	
		(2)	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	-	10,00	20,00	21,00	22,50	24,00	25,00	
		(3)	Peningkatan prestasi olahraga	Cabang Olahraga (Cabor)	-	5	6	7	8	9	10	
		(4)	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	-	51,55	56,70	61,90	67,00	72,20	86,20	
		(5)	Persentase wirausaha muda	%	-	74,21	81,10	85,10	86,20	83,70	85,60	
		(6)	Cakupan pembinaan olahraga	%	-	28,57	34,29	42,86	48,57	54,29	62,86	
		(7)	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	-	23,53	35,29	41,18	47,06	52,94	60,00	
		(8)	Cakupan pembinaan atlet muda	%	-	43,33	53,33	60,00	66,67	72,00	80,00	
		(9)	Jumlah atlet berprestasi	Orang	-	2	2	3	4	5	6	

NO	INDIKATOR			SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		(10)	Jumlah prestasi olahraga	Prestasi	-	2	3	4	5	6	7	
		(11)	Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir	%	-	3,02	5,40	6,00	6,20	6,50	7,00	
		(12)	Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan terakhir	%	-	1,90	2,13	2,20	2,24	2,27	2,50	
		(13)	Persentase Pemuda (16-30 Tahun) Yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja Atau Mengikuti Pelatihan	%	-	10,00	19,00	18,00	17,00	16,00	15,00	
		(14)	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir	%	-	15,00	17,00	19,00	21,00	23,00	25,00	
		(15)	Jumlah kampanye olahraga yang terselenggara setahun terakhir	Kegiatan	-	4	4	5	5	6	6	
		(16)	Persentase Tenaga Keolahragaan yang Bersertifikat Nasional/Internasional	%	-	20,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	
		(17)	Persentase Olahragawan dalam Pemusatan Latihan (Nasional/Daerah) yang Berprestasi di Tingkat (Nasional)/Internasional	%	-	10,00	24,00	30,00	34,00	40,00	45,00	
20	Statistik	(1)	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		(2)	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		(3)	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Nilai	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	[ada (1) /tidak ada (0)]
		(4)	Buku "kabupaten dalam angka"	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	[ada (1) /tidak ada (0)]

NO	INDIKATOR			SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		(5)	Buku "PDRB"	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	[ada (1) /tidak ada (0)]
		(6)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	-	2,00	2,60	40,00	42,00	45,00	45,00	
21	Persandian	(1)	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Level	-	0,00	3,00	3,50	4,00	4,00	4,50	
		(2)	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		(3)	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	Level	-	3	3	3	4	4	5	
22	Kebudayaan	(1)	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	-	83,33	86,00	88,00	90,00	92,00	95,00	
		(2)	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Event	-	5	6	6	6	6	6	
		(3)	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Objek	-	-	1	1	1	1	1	
		(4)	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Objek	-	1	5	5	5	5	5	
		(5)	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton pertunjukan seni	%	-	50,00	27,00	30,00	33,00	36,00	40,00	
		(6)	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi tempat/peninggalan sejarah/warisan budaya bersifat kebendaan	%	-	55,00	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	
		(7)	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	-	55,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	

NO	INDIKATOR			SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		(8)	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan atau menghadiri upacara adat dalam setahun terakhir	%	-	75,00	32,00	34,00	36,00	38,00	40,00	
		(9)	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%	-	55,00	58,00	65,00	72,00	80,00	85,00	
		(10)	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal (bahasa daerah atau budaya lokal) dan/atau ekskul kesenian	%	-	75,00	78,00	80,00	82,00	84,00	86,00	
		(11)	Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan (dalam setahun terakhir)	%	-	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	
		(12)	Persentase Tradisi, Seni, Cagar, dan Warisan Budaya yang Dilestarikan	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
23	Perpustakaan	(1)	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Indeks (Skala 0-100)	-	60,00	10,00	20,00	28,00	35,00	40,00	
		(2)	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Eksemplar	-	16000	16190	19070	21490	24040	26170	
		(3)	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Unit	-	0,16	0,17	0,18	0,19	0,20	0,22	
		(4)	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	Orang	-	1000	20000	30000	40000	50000	60000	
		(5)	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	-	1000	3000	5000	7000	9000	10000	
		(6)	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang	-	10	24	34	44	52	60	

NO	INDIKATOR			SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
24	Kearsipan	(1)	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		(2)	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara utk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Nilai	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	[ada (1) /tidak ada (0)]
		(3)	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	
		(4)	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	Indeks (Skala 0-100)	-	100,00	64,00	66,00	68,00	72,00	80,00	
25	Perikanan	(1)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kab/kota (sumber data: one data KKP)	Ton/Tahun	-	17293,46	29677,25	31160,81	32718,85	34354,80	36071,80	
		(2)	Konsumsi ikan	Kg/KAP/TH	-	99,98	101,98	103,98	105,98	107,98	109,98	
		(3)	Cakupan bina kelompok nelayan	%	-	33,33	38,89	44,44	50,00	55,56	66,67	
		(4)	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	-	3873,49	3701,00	3832,00	4023,00	4224,00	4435,00	
		(5)	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	-	13643,46	2196,00	2208,00	2220,00	2232,00	2244,00	
26	Pariwisata	(1)	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	-	20,00	36,44	40,08	43,72	48,92	52,90	
		(2)	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yg datang	%	-	57,47	76,25	75,39	84,38	88,24	89,63	

NO	INDIKATOR			SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		(3)	Tingkat hunian akomodasi	%	-	66,67	68,42	68,77	69,30	69,65	71,93	
		(4)	Lama kunjungan Wisata	Jam	-	72,00	73,00	74,00	75,00	76,00	78,00	
		(5)	PAD sektor pariwisata	Milyar Rupiah	-	7,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	
		(6)	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Perjalanan	-	900	88	90	90	76	75	
27	Pertanian	(1)	Produktivitas pertanian (Padi) per hektar per tahun	%	-	4,04	4,10	4,20	4,30	4,40	4,50	
		(2)	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	-	34,87	33,96	33,38	32,65	31,63	30,59	
		(3)	Cakupan bina kelompok petani	%	-	10,11	10,62	11,15	11,70	12,29	12,90	
		(4)	Jumlah Produksi Jagung	Ton	-	85774,09	2949,50	3244,45	3568,89	3925,78	4318,36	
		(5)	Jumlah Produksi Padi	Ton	-	154724,69	512040,00	522280,80	532726,42	543380,94	554248,56	
		(6)	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai	Ton	-	1279,82	1830,16	1848,46	1866,95	1885,62	1904,47	
		(7)	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura jenis bawang merah	Ton	-	4284,42	24,00	26,00	28,00	30,00	32,00	
		(8)	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa	Ton	-	2273,58	2369,93	2417,33	2465,67	2514,99	2565,29	
		(9)	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kakao	Ton	-	5250,40	4927,96	5026,52	5127,05	5229,59	5334,18	

NO	INDIKATOR			SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		(10)	Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik, babi)	Ton	-	3886967,00	2905,00	3138,00	3389,00	3660,00	3958,00	
		(11)	Jumlah Produksi Telur	Ton	-	1445,53	1264,00	1391,00	1530,00	1713,00	1884,00	
		(12)	Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Ha	-	100,00	30468,44	30773,12	31080,85	31391,66	31705,58	
30	Perdagangan	(1)	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	-	24,23	30,00	40,00	50,00	55,00	60,00	
		(2)	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	-	76,72	76,72	76,72	76,72	76,72	76,72	
		(3)	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yg berlaku	%	-	83,46	85,00	88,00	90,00	92,00	95,00	
31	Perindustrian	(1)	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	%	-	21,57	23,00	24,50	26,00	27,50	29,00	
		(2)	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	%	-	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	
		(3)	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	-	55,56	66,67	77,78	88,89	88,89	100,00	
		(4)	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)	triliun rupiah	-	0,15	0,17	0,19	0,21	0,23	0,26	
32	Transmigrasi	(1)	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	Unit	-	0	0	0	1	1	1	
		(2)	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Unit	-	1	1	1	2	2	2	

NO	INDIKATOR			SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		(3)	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	Unit	-	1	1	1	2	2	2	
		(4)	Persentase transmigran swakarsa	%	-	10,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
		(5)	Persentase Dukungan Kegiatan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan di Kawasan Transmigrasi	%	-	40,00	50,00	50,00	50,00	55,00	60,00	
		(6)	Rate Nett Recent Migrasi	%	-	-0,31	-0,04	0,26	0,60	0,99	1,44	
33	Perencanaan	(1)	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	[ada (1) /tidak ada (0)]
		(2)	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	[ada (1) /tidak ada (0)]
		(3)	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	[ada (1) /tidak ada (0)]
		(4)	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	[ada (1) /tidak ada (0)]
		(5)	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		(6)	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		(7)	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
34	Manajemen Keuangan	(1)	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	-	23,93	23,93	23,93	23,93	23,93	23,93	
		(2)	Rasio PAD	Rp	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	

NO	INDIKATOR			SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		(3)	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi tranfer expenditure	%	-	50,74	50,74	50,74	50,74	50,74	50,74	
		(4)	Opini Laporan Keuangan	Opini	-	100	100	100	100	100	100	
		(5)	Persentase SILPA terhadap APBD	%	-	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	
		(6)	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		(7)	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	-	5,82	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		(8)	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	-	2,16	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	
		(9)	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	-	16,59	16,59	16,59	16,59	16,59	16,59	
		(10)	Penetapan APBD	Nilai	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	[Tepat Waktu(1)/Tidak Tepat Waktu(0)]
		(11)	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	-	99,48	99,48	99,48	99,48	99,48	99,48	
		(12)	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	-	99,48	99,48	99,48	99,48	99,48	99,48	
		(13)	Manajemen Aset	Nilai	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	[Ya(1)/Tidak(0)]
		(14)	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dlm APBD tahun sebelumnya	%	-	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	
		(15)	Persentase Kepemilikan NPWP	%	-	10,00	10,01	10,02	10,03	10,04	10,05	

NO	INDIKATOR			SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
35	Pengawasan	(1)	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	-	3	3	4	4	4	4	
		(2)	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	-	3,00	3,00	3,50	3,50	4,00	4,00	
		(3)	Persentase tindak lanjut temuan	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		(4)	Persentase pelanggaran pegawai	%	-	1,84	1,53	1,23	0,92	0,61	0,31	
		(5)	Jumlah temuan BPK	%	-	94,00	95,00	96,00	97,00	98,00	98,00	
36	Pengadaan	(1)	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yg ditanda tangani pada kuartal pertama	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		(2)	Persentase jumlah pengadaan yg dilakukan dgn metode kompetitif	%	-	30,00	35,56	42,50	51,43	63,33	80,00	
		(3)	Rasio nilai belanja yg dilakukakan melalui pengadaan	%	-	100,00	67,20	70,00	72,00	75,00	80,00	
37	Kepegawaian	(1)	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	-	73,50	74,50	75,50	76,50	77,00	77,50	
		(2)	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	-	3,02	3,20	3,50	4,00	4,50	5,00	
		(3)	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		(4)	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP/Tahun	-	60,00	64,00	68,00	72,00	76,00	80,00	

NO	INDIKATOR			SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		(5)	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	-	0,49	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	
		(6)	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	-	27,81	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	
		(7)	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	-	35	35	35	35	35	35	
		(8)	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Orang	-	695	695	695	695	695	695	
		(9)	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	-	2572	2572	2572	2572	2572	2572	
38	Transparansi dan Partisipasi Publik	(1)	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	-	99,48	99,50	99,50	99,60	99,60	99,70	
		(2)	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
39	Penelitian dan Pengembangan	(1)	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	%	-	31,58	45,00	52,00	60,00	70,00	78,95	
		(2)	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		(3)	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	-	5,00	5,00	10,00	16,00	22,00	31,25	
		(4)	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	-	46,88	55,00	63,00	70,00	85,00	100,00	
40	Sekretariat Dewan	(1)	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Nilai Akreditasi	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	[ada (1) /tidak ada (0)]

NO	INDIKATOR			SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		(2)	Tersusun dan terintegrasinya Program- Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Nilai	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	[ada (1) /tidak ada (0)]
		(3)	Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Nilai	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	[ada (1) /tidak ada (0)]

PENUTUP

Keberhasilan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Konawe dalam mewujudkan visi **“KONAWA YANG BERDAYA SAING, SEJAHTERA, ADIL DAN BERKELANJUTAN”** perlu didukung oleh (1) komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah dan daerah; (3) keberpihakan pembangunan kepada rakyat; (4) peran serta aktif segenap pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Konawe; serta (5) dalam rangka menjaga keseimbangan pembangunan dan menjaga kesinambungan rencana.

RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah yakni Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen penjabaran dari RPJMD yang ditetapkan setiap tahun. Demikian pula menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah yakni Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Perangkat daerah (Renja PD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Renstra PD.

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan disusun guna menciptakan petunjuk umum dalam pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi lintas Perangkat daerah dalam upaya mengimplementasikan arah kebijakan RPJPD secara efektif dan efisien. Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi dilaksanakan untuk melakukan pengelolaan sumber daya pembangunan secara optimal sehingga dapat dilakukan pembagian peran secara tepat agar tercapai tujuan pembangunan jangka Panjang yang telah ditetapkan. Kaidah Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Konawe Tahun 2025 -2045 adalah sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah pengampu urusan Penunjang Perencanaan daerah melakukan koordinasi dengan seluruh Perangkat daerah atau unit kerja yang ada di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe, agar memperhatikan arah kebijakan dan sasaran pokok

- pembangunan lima tahunan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada periode berkenaan, yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Strategis Daerah (Renstra) Perangkat Daerah;
2. Perumusan Visi, Misi dan Arah Kebijakan RPJMD selama periode perencanaan tahun 2025 -2 045 harus memperhatikan keselarasan dan mengacu pada Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJPD tahun 2025- 2 045;
 3. Target Pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam target Indikator Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Konawe Tahun 2025 -2 045 agar menjadi acuan dalam penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dokumen RPJMD pada periode berkenaan;
 4. Sebagai upaya memastikan atas pencapaian target RPJPD Kabupaten Konawe Tahun 2025 -2 045, Perangkat Daerah pengampu perencanaan harus melaksanakan pengendalian dan evaluasi berdasarkan regulasi yang berlaku, sebagai upaya menghadapi perubahan pada lingkungan internal maupun eksternal;
 5. Apabila terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe, maka penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang baru dan memastikan seluruh urusan telah tertangani dengan baik.

5.1.1 Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran

Sinkronisasi antara dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran, serta kebijakan pendanaan, sangat penting untuk menjamin kualitas perencanaan dan kesesuaian pelaksanaan pembangunan di lapangan. Perencanaan yang tersusun secara baik menjadi landasan utama bagi tercapainya tujuan pembangunan secara berkelanjutan. Selain itu, perencanaan yang matang memungkinkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya keuangan yang tersedia. Dokumen perencanaan yang jelas

dan terarah juga akan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan, baik di tingkat pusat, daerah, maupun kalangan non-pemerintah.

Agar pelaksanaan pembangunan berjalan efektif, perlu adanya konsistensi antara rencana dan alokasi pendanaan yang diperkuat dengan sistem pengambilan keputusan yang bijak dan terstruktur. Dalam hal ini, penetapan prioritas pembangunan harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan urgensi dan dampaknya. Pelibatan aktif dari seluruh pemangku kepentingan melalui proses kolaboratif menjadi kunci penting dalam memperkuat mekanisme perencanaan dan pengambilan keputusan, sehingga hasil pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

5.1.2 Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

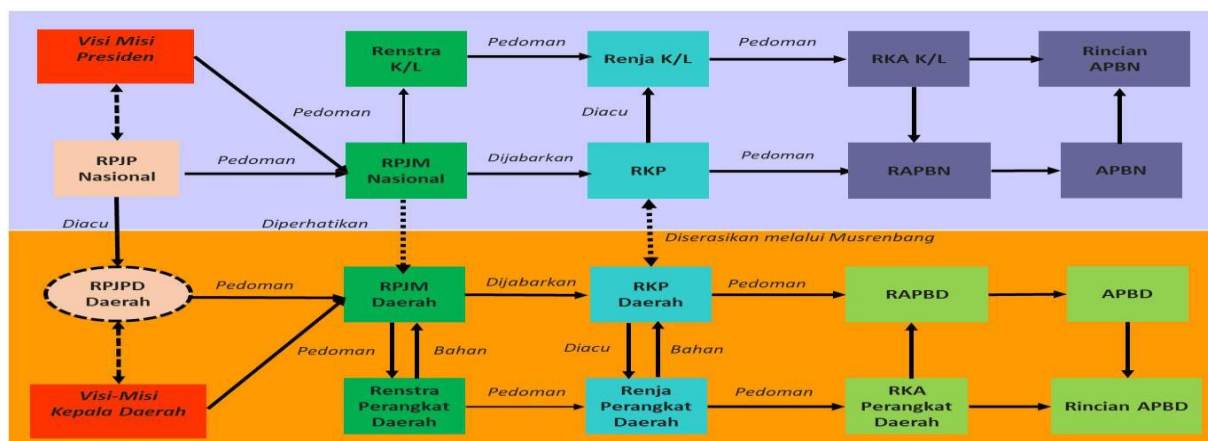
Dokumen RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2025–2029 disusun dengan berpedoman pada RPJPN Tahun 2025–2045, RPJPD Prov Sultra Tahun 2025–2045 dan RPJPD Kabupaten Konawe Tahun 2025–2045, RPJMN Tahun 2025–2029, RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025–2029, serta RTRW Kabupaten Konawe Tahun 2014–2034. RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2025–2029 ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang telah diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. Keselarasan tersebut mencakup periodisasi, strategi dan arah kebijakan, indikator utama pembangunan daerah yang merupakan turunan dari indikator makro RPJMD Provinsi dan RPJMN, serta program-program prioritas perangkat daerah yang mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan.

RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2025–2029 selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Konawe yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai acuan penyusunan perencanaan anggaran daerah, yaitu Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe.

Selanjutnya, RPJMD dijabarkan menjadi rencana tahunan daerah

yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang diacu oleh Perangkat Daerah untuk dijabarkan menjadi Rencana Tahunan Perangkat Daerah yang disebut Rencana Kerja (Renja). Dokumen Renja ini akan menjadi dasar Perangkat Daerah dalam mengusulkan RKA Perangkat Daerah dan selanjutnya akan dirangkum menjadi RAPBD. Dokumen ini akan ditindaklanjuti menjadi APBD dan akhirnya menjadi dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA SKPD. Dengan kata lain RPJMD merupakan penjabaran dari rencana jangka panjang dan menjadi dasar rencana jangka pendek sampai ke penganggarannya.

RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2025–2029 juga menjadi acuan bagi pemerintah kecamatan dan desa dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, sehingga terjalin kesinambungan pembangunan dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga nasional. Hal ini menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Konawe secara partisipatif, lebih tinggi, integratif, dan sinergis dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lainnya.



Gambar 5. 1 Hubungan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Lainnya

(Sumber: UU No 25 Tahun 2004)

5.2 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029 dilakukan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2025 -2029 dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan perencanaan melalui pengendalian jangka menengah dan jangka pendek. Hasil pengendalian menengah dan jangka pendek kemudian disampaikan kepada Bupati.

5.2.1 Pengendalian Perencanaan

Pengendalian perencanaan memiliki tujuan memastikan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan. Pengendalian tersebut didasarkan pada hasil evaluasi pengendalian jangka menengah dan jangka pendek.

- 1) Pengendalian jangka menengah mencakup: a). Penjabaran perencanaan RPJPD Kabupaten Konawe ke dalam RPJMD Kabupaten Konawe, RPJMD Kabupaten Konawe ke dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Konawe; b). Identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.
- 2) Pengendalian jangka pendek mencakup: a). Penjabaran perencanaan RPJMD Kabupaten Konawe ke dalam dokumen RKPD Kabupaten Konawe, RKPD Kabupaten Konawe ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Konawe; b). Identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

5.2.2 Pengendalian pelaksanaan

Pengendalian pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pemantauan dan Evaluasi mencakup: a). Pemantauan mitigasi risiko pembangunan; b). Evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah; dan c). Evaluasi pencapaian kinerja utama pembangunan daerah. Pengendalian pembangunan perlu didukung dengan pelaksanaan harmonisasi regulasi

agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif. Harmonisasi regulasi adalah upaya untuk menyinergikan regulasi pemantauan, pengendalian, evaluasi dan manajemen kinerja yang memiliki tujuan menjaga konsistensi pelaksanaan pengendalian dengan kinerja perangkat daerah. Mewujudkan pengendalian yang komprehensif perlu dilakukan pengoordinasian pengendalian pada lintas dan internal perangkat daerah.

5.3 Konsep Dan Strategi Pendanaan Dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Konawe

Dalam rangka merealisasikan berbagai program strategis pembangunan wilayah Kabupaten Konawe periode 2025–2029, diperlukan strategi pendanaan yang adaptif, berkelanjutan, dan berbasis sinergi multipihak. Mengingat besarnya kebutuhan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, pengembangan kawasan industri, penguatan ketahanan pangan, serta penyediaan layanan dasar di seluruh klaster wilayah, maka Pemerintah Kabupaten Konawe menyusun pendekatan pembiayaan yang terintegrasi dengan sumber-sumber pendanaan yang tersedia baik dari internal APBD maupun dari luar daerah.

Langkah pertama dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan merealokasi belanja operasional menuju belanja produktif berbasis klaster. Pendekatan ini akan memastikan bahwa dana daerah lebih efektif untuk mendanai program-program prioritas seperti pembangunan jalan usaha tani, sarana kesehatan, dan fasilitas publik di kawasan pertanian, industri, maupun kota penyangga. Reprioritisasi ini juga didukung oleh perluasan basis pajak dan retribusi daerah terutama dari sektor industri, pariwisata, dan kawasan komersial baru.

Selanjutnya, strategi pendanaan diarahkan pada akselerasi pemanfaatan dana transfer dari pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Fiskal, dan Dana Desa. Pemerintah Kabupaten Konawe akan menyelaraskan program-program daerah dengan prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029, antara lain program Makan Bergizi (MBG), Sekolah Rakyat, pembangunan 3 juta rumah, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan

penguatan ketahanan pangan. Untuk itu, dibentuk tim teknis penyusun proposal DAK tematik yang berbasis data spasial dan analisis kebutuhan sektoral per klaster.

Untuk membiayai pembangunan infrastruktur skala besar seperti pelabuhan industri, jembatan konektivitas, sistem air bersih, dan perumahan pekerja, Pemerintah Kabupaten Konawe akan mengembangkan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA). Proyek-proyek strategis seperti pelabuhan penyangga Morosi–Soropia, rusun pekerja di kawasan industri, dan dry port dapat ditawarkan kepada investor swasta melalui skema KPBU yang menguntungkan dan terjamin secara hukum.

Di sisi lain, pendekatan pembiayaan kreatif juga dilakukan melalui mobilisasi Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) dari sektor swasta, khususnya perusahaan tambang, industri nikel, dan agroindustri. CSR diarahkan untuk mendukung program pendidikan vokasi, pelatihan tenaga kerja, pembangunan sarana air bersih dan sanitasi, serta pengembangan desa wisata dan kampung nelayan. Pemanfaatan CSR ini akan dikelola secara akuntabel dengan penguatan regulasi daerah serta pengawasan multipihak.

Selain itu, Dana Desa dapat diarahkan untuk mendukung koperasi Merah Putih, program perhutanan sosial, budidaya hortikultura, dan pengembangan sekolah rakyat di wilayah terpencil. Kolaborasi ini akan diperkuat melalui pelatihan bagi aparatur desa dalam menyusun APBDes yang selaras dengan arah RPJMD.

Pendanaan partisipatif juga akan dikembangkan melalui skema *crowd-funding* untuk mendukung program sosial, konservasi budaya, dan pemberdayaan komunitas muda. Pengembangan platform digital untuk donasi publik dan kolaborasi dengan diaspora Konawe menjadi bagian dari strategi inovatif membangun daerah berbasis gotong royong modern.

Secara umum, strategi pendanaan ini disusun berbasis pendekatan klaster wilayah. Zona industri dan penyangga kota (Zona 1) akan fokus pada pendanaan skala besar melalui KPBU dan CSR industri. Zona perkotaan dan hilirisasi pertanian (Zona 2) akan mengandalkan kombinasi APBD, Dana

Desa, dan skema pendanaan nasional ketahanan pangan. Sedangkan Zona pertambangan dan kawasan lindung (Zona 3) diarahkan pada pendanaan CSR tambang, insentif konservasi, serta hibah lingkungan dari mitra pembangunan. Dengan strategi pembiayaan yang beragam dan terintegrasi ini, Kabupaten Konawe optimis dapat merealisasikan seluruh agenda pembangunan daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

5.4 Kesimpulan

Dokumen RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2025–2029 merupakan landasan penting yang harus dipahami secara menyeluruh oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai acuan bersama dalam pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah. Perencanaan pembangunan yang efektif tidak hanya bergantung pada dokumen itu sendiri, tetapi juga pada keterlibatan aktif dari semua pihak baik masyarakat, pemerintah, maupun sektor swasta. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi dan komitmen bersama untuk menjaga kesinambungan antara rencana jangka menengah dengan pelaksanaan tahunan agar tujuan pembangunan yang telah dirumuskan dapat terwujud secara optimal.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa melimpahkan perlindungan, petunjuk, dan kekuatan kepada seluruh elemen pembangunan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, demi kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Konawe yang berkelanjutan.